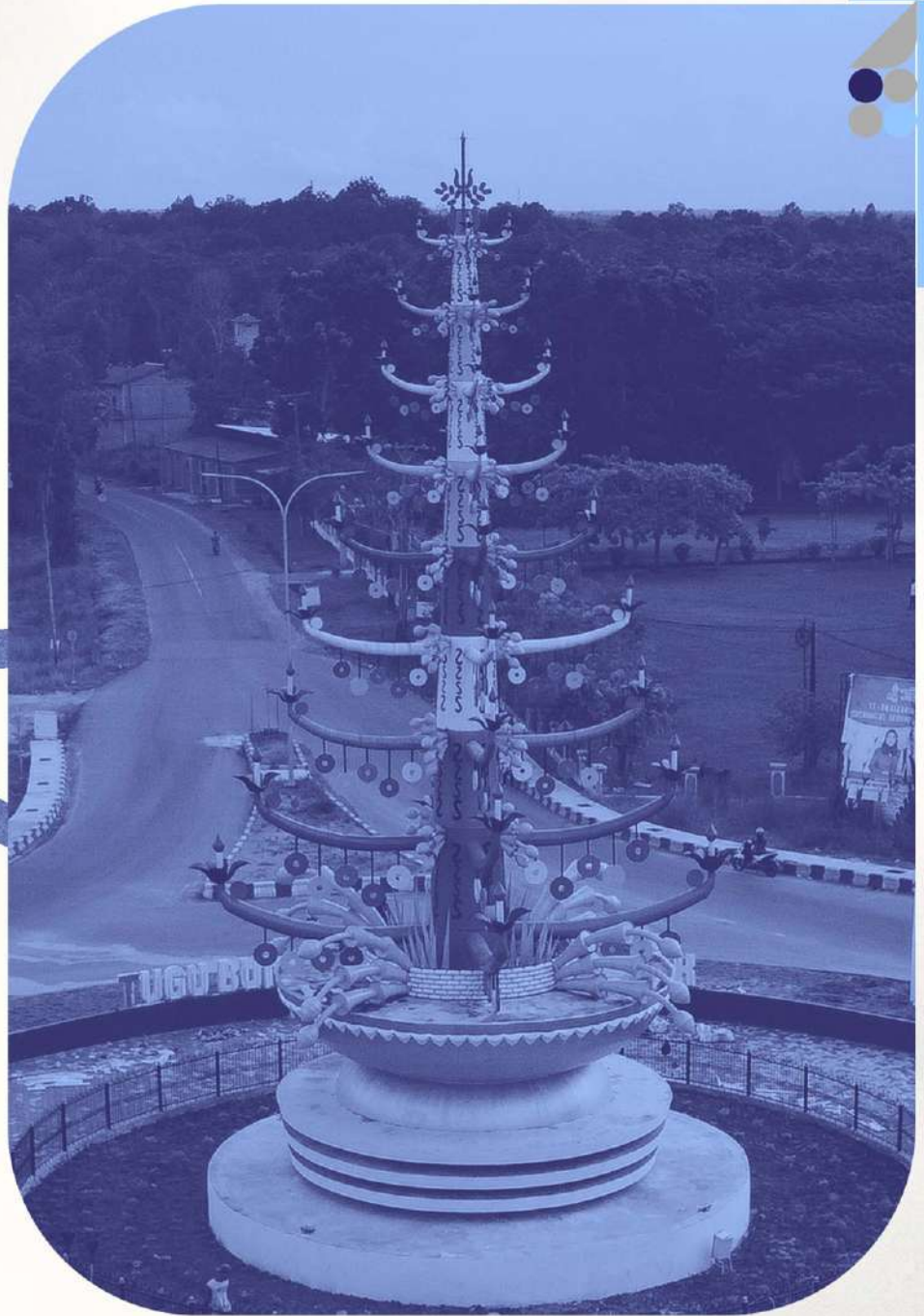




PEMERINTAH
KABUPATEN BARITO TIMUR

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



bangga
melayani
bangsa

LKPj

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur
Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa oleh karena penyertaan dan bimbingan-Nya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2024 ini dapat disusun sebagaimana yang diharapkan.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah ini sesuai amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026 sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Barito Timur Nomor 08 Tahun 2023 dengan Tema Pembangunan pada Tahun 2024 yaitu ***"Pengembangan Ekonomi Daerah melalui optimalisasi sumberdaya lokal disertai peningkatan kualitas jaringan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia yang handal"***.

Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan tiga tahunan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026. Arah kebijakan dibuat untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun selama periode dokumen perencanaan.

Kami menyadari dalam pelaksanaan program/kegiatan pembangunan Tahun Anggaran 2024 masih banyak terdapat kelemahan dan kekurangannya, namun Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur bersama-sama dengan masyarakat akan terus berupaya dan bekerja keras untuk melakukan langkah-langkah perbaikan demi mewujudkan harapan berbagai pihak secara khusus untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Barito Timur.

Pemerintah memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi serta ucapan terimakasih kepada seluruh stakeholders pelaksana Pembangunan, segenap Pimpinan dan Anggota DPRD, jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur, aparat keamanan, termasuk jajaran pemerintah desa dan Masyarakat Kabupaten Barito Timur secara keseluruhan, serta pihak swasta yang telah memberikan dukungan dan bekerja keras bahu-membahu dalam melaksanakan urusan pemerintah, Pembangunan, dan kemasyarakatan.

Demikian Laporan Pertanggungjawaban ini disusun dan disampaikan sebagai bahan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 dan perbaikan-perbaikan pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Barito Timur di tahun-tahun mendatang demi "*Gumi Jari Janang Kelalawah*" (*Menjadi Jaya Selamanya*).

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu menyertai kita.

Tamiang Layang, 7 Maret 2025
BUPATI BARITO TIMUR

M. YAMIN



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Dasar Hukum	3
1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah	5
1.3 Data Umum Daerah.....	9
1. Data Geografis Wilayah.....	9
2. Jumlah Penduduk	11
3. Pertumbuhan Penduduk.....	12
4. Jumlah ASN.....	14
5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan.....	16
6. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja.....	18
7. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan.....	19
BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	21
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	30
3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	30
A. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	30
B. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Non Dasar	66
C. Pelaksanaan Urusan Pilihan	110
D. Pelaksanaan Urusan Pendukung, Penunjang, Pengawas Urusan, Kewilayahan, dan Pemerintahan Umum.....	126
3.2 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan.....	169
3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran 2023	174
3.4 Prestasi.....	195
BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	197
BAB V PENUTUP	198

DAFTAR TABEL

Nomor	Uraian	Halaman
1.2.1	Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Tahun 2024-2026	6
1.3.1	Luas Wilayah dan Jumlah Desa per Kecamatan Kabupaten Barito Timur....	10
1.3.2	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2024.....	11
1.3.3	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Timur Tahun 2024.....	11
1.3.4	Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2024	13
1.3.5	Jumlah Pegawai Negeri Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Timur Tahun 2023-2024.....	14
1.3.6	Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2023-2024.....	15
1.3.7	Jumlah ASN Daerah Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2023-2024	15
1.3.8	Perincian Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 Setelah Perubahan dan Realisasi Tahun 2023	16
1.3.9	Belanja Daerah Menurut Jenis Belanja Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 Setelah Perubahan dan Realisasi Tahun 2023.....	18
1.3.10	Pembiayaan Daerah di Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 Setelah Perubahan dan Realisasi Tahun 2023	19
2.1.1	Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024	23
3.1.1	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	31
3.1.2	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Non Dasar ..	67
3.1.3	Pelaksanaan Urusan Pilihan	111
3.1.4	Pelaksanaan Unsur Pendukung, Penunjang, Pengawas Urusan, Kewilayahan dan Pemerintahan Umum	127
3.2.1	Produk Hukum sebagai Kebijakan strategis di Kabupaten Barito Timur Tahun 2024.....	169

3.3.1	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran 2023	175
-------	--	-----

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Uraian	Halaman
1	Realisasi Anggaran TA. 2024	200
2.	Risalah Rapat Paripurna DPRD tentang Penyampaian LKPJ Tahun 2023	287
3.	Risalah Rapat Paripurna DPRD tentang Penyampaian Rekomendasi LKPJ Tahun 2023.....	294
4.	Rekomendasi DPRD Kabupaten Barito Timur atas LKPJ Tahun 2023.....	303

BAB I

PENDAHULUAN

Kabupaten Barito Timur dibentuk secara hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur.

. Pada akhir Tahun 2023 seiring berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Barito Timur Periode 2018-2023 maka pemerintahan dilanjutkan oleh Penjabat Bupati Indra Gunawan, SE.,M.P.A. Pemerintah Kabupaten Barito Timur saat ini disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-3937 Tahun 2023 Tanggal 22 September 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Barito Timur.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa :

Pasal 69 ayat (1) : Kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 71 ayat (2) : Kepala daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 71 ayat (3) : Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh DPRD untuk rekomendasi perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Penyusunan LKPJ dimaknai sebagai proses pencapaian kinerja dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD). LKPJ disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan yang dikenal dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran tahunan RPJMD atau RPD dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

LKPJ Akhir Tahun Anggaran pada dasarnya merupakan progres laporan atas kinerja pembangunan selama satu tahun dan menjadi kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kegagalan dan keberhasilan pencapaian indikator kinerja akan dijadikan sebagai acuan tindakan perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Barito Timur tahun mendatang dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan.

Ruang lingkup LKPJ dijelaskan pada Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 meliputi hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

Agenda penyampaian LKPJ diharapkan mampu menjadi sarana sinergitas bagi pihak eksekutif dan legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta menjadi media evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. LKPJ yang disusun memiliki peran yang sangat strategis dalam proses pembangunan yakni untuk menjaga kesinambungan dan keberlanjutan pelaksanaan program-program pembangunan. Melalui mekanisme ini, progres dan permasalahan yang muncul dalam kegiatan pembangunan dapat dicermati dan dilakukan penilaian sebagai bahan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan program-program pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.

Seiring dengan cita-cita pengoptimalan sistem perencanaan melalui penyelarasan dan sinergitas antara program prioritas Nasional dan Daerah, serta penyeragaman periodisasi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi/Kabupaten/Kota, melalui momentum pemilihan Kepala Daerah secara serentak sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, yang secara implisit menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah tersebut untuk Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 sehingga Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Barito Timur mengambil kebijakan untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sebagai pedoman strategis untuk menjaga kesinambungan pembangunan di tengah transisi kepemimpinan. LKPJ Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 ini adalah laporan yang memuat hasil pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur di tahun awal penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.

1.1 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2021 didasarkan atas:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

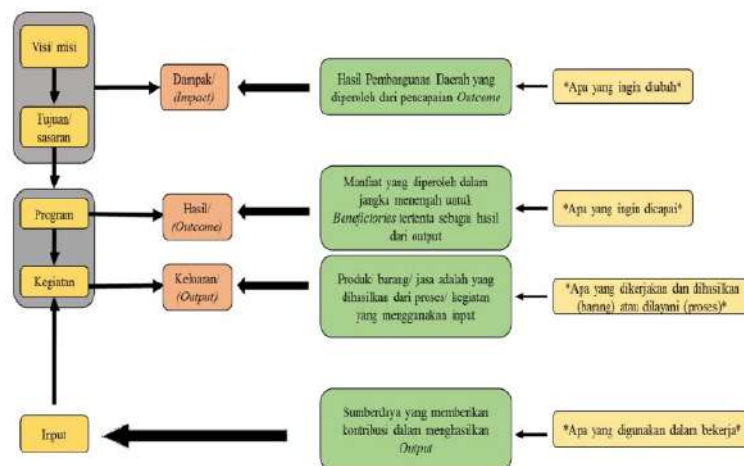
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2008 Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 50);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 Nomor 80);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 Nomor 66);
13. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 Nomor 165);
14. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 Nomor 168);
15. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 Nomor 178);
16. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 Nomor 194);
17. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 Nomor 199)

1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah

Pada Tahun 2024-2026 Visi dan Misi merujuk kepada RPD dalam hal pelaksanaan perencanaan kedepannya. Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan RPD selama 3 (tiga) tahun mendatang. Tujuan dan sasaran disusun dalam kerangka yang jelas di setiap misi, sehingga menggambarkan dampak keberhasilan pembangunan daerah.

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan RPJMD. Secara skematik keterkaitan antara visi, misi dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang secara totalitas menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah, dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.2
Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah



Dari gambar di atas, jelas bahwa tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah secara keseluruhan. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja, maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran. Lebih jelasnya Tujuan, Sasaran dan Strategi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2.1

Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Tahun 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
1. Meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui sektor pertanian holtikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, koperasi, UMKM, dan Perluasan Lapangan Pekerjaan	1.1. Meningkatnya daya saing ekonomi unggul daerah.	Pengembangan potensi destinasi wisata unggulan
	1.2. Meningkatnya daya tarik pariwisata daerah.	Peningkatan akses dan fasilitas penunjang kepariwisataan
	1.3. Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat.	Peningkatan peran serta dan SDM pelaku usaha pariwisata
	1.4. Meningkatnya investasi daerah dalam mengurangi pengangguran.	Penawaran kepada investor dengan kemudahan administrasi untuk berinvestasi di kabupaten Barito Timur.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana bidang kesehatan, pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia”, terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Pembangunan yaitu:	2.1. Meningkatkan kualitas Pendidikan masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi Angka Partisipasi Pendidikan 2. Optimalisasi capaian rata-rata kemampuan literasi dan numerasi SD, rata – rata kompetensi literasi dan numerasi SMP 3. Optimalisasi Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B 4. Optimalisasi Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV 5. Optimalisasi Jumlah Pengawas dan Penilik PAUD
	2.2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar masyarakat 2. Peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan 3. Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan 4. Mengoptimalkan pengelolaan Sumber Daya Rumah Sakit 5. Meningkatkan sistem mutu pelayanan rumah sakit
	2.3. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan dan pendapatan, kesehatan serta pendidikan penduduk.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan; 2. Penguatan Pemberdayaan perempuan.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
3. Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan, jembatan, pengairan, air bersih, listrik, dan pariwisata yang berwawasan lingkungan”, terdiri dari 2 (dua) Sasaran Pembangunan yaitu:	3.1. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat.	Percepatan pembangunan infrastruktur aksesibilitas antar wilayah
	3.2. Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup.	1) Pengembangan teknologi, sarana- prasarana dalam pengelolaan persampahan dan air limbah secara terpadu. 2) Peningkatan peran serta masyarakat/Stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup
4. Pembinaan umat beragama, adat, budaya, pemuda dan olahraga”, terdiri dari 4 (empat) sasaran pembangunan yaitu :	4.1. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat.	Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan berbudi luhur
	4.2. Meningkatkan pemberdayaan pemuda dalam pembangunan.	Penguatan kapasitas SDM kepemudaan dan olahraga
	4.3. Meningkatkan prestasi olahraga.	Meningkatkan pembinaan terhadap organisasi pemuda, olahraga, pelatih keolah ragaan, sarana dan prasarana olahraga dan pembinaan pemuda dan atlet
	4.4. Meningkatkan kelestarian adat dan budaya daerah.	Peningkatan emeliharaan Benda, Situs dan Cagar Budaya Daerah
5. Meningkatkan pemerintah yang baik, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab”, terdiri dari 3 (tiga) sasaran pembangunan yaitu :	5.1. Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.	Meningkatkan Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, Meningkatkan tata Kelola pada SAKIP
	5.2. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.	Meningkatkan pencapaian manfaat atas pelaksanaan program dan kegiatan, meningkatkan Kinerja Pembinaan serta pengawasan internal, Meningkatkan Kepatuhan Perangkat Daerah dalam Menindaklanjuti Temuan Pemeriksaan.
	5.3. Meningkatnya pelayanan publik yang berkualitas dan terpadu.	Penguatan kinerja pelayanan Pemerintah daerah dan penerapan reformasi birokrasi

Sumber : Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026

Prioritas pembangunan tahunan dirumuskan dari program prioritas Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Timur tahun 2024-2026. Penentuan prioritas pembangunan tahun 2024 memperhatikan pencapaian kinerja tahun 2023 dan

proyeksi pencapaian kinerja tahun 2024. Prioritas pembangunan daerah diharapkan mampu menjawab permasalahan pembangunan daerah.

Selain untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, Prioritas pembangunan tahun 2024 juga dirumuskan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dan melanjutkan prioritas pembangunan yang belum tercapai pada tahun sebelumnya. Adapun tema pembangunan Kabupaten Barito Timur tahun 2024 adalah

“Pengembangan Ekonomi Daerah melalui optimalisasi sumberdaya lokal disertai peningkatan kualitas jaringan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia yang handal”.

Perekonomian mempunyai peran penting dalam pembangunan Barito Timur. Sumberdaya-sumberdaya lokal yang dimiliki sangat perlu dikembangkan dan dioptimalisasikan guna meningkatkan kesejahteraan penduduk. Kabupaten Barito Timur mempunyai keunggulan di sektor pertanian dan turunannya (perikanan, perkebunan, kehutanan, peternakan) sebagai pendapatan tertinggi. Dari fokus permasalahan ekonomi terdapat dua permasalahan pokok yaitu perekonomian berbasis kerakyatan yang harus terus dikembangkan secara optimal, demikian juga terus dioptimalkannya pemerataan pendapatan masyarakat.

Beberapa hal yang menjadikan kendala sektor pertanian adalah belum maksimalnya integrasi kegiatan ekonomi yang produktif, kreatif dan inovatif, artinya bahwa kegiatan ekonomi saat ini masih dalam tahap meningkatkan produktivitasnya belum mengarah pada pengembangan agribisnis dengan terobosan yang inovatif. Pergerakan aktifitas perekonomian daerah Kabupaten Barito Timur belum maksimal, perlu dikembangkan ke arah industri pengolahan untuk nilai tambah produk pertanian. Hal ini dikarenakan bahwa dengan meningkatkan nilai tambah akan meningkatkan pendapatan secara signifikan, tidak hanya pendapatan daerah tetapi juga pendapatan masyarakat dapat meningkat.

Sebagai daerah yang kaya sumber daya alam dan sumber daya manusia, perekonomian Kabupaten Barito Timur bisa dikembangkan dengan baik. Sistem ekonomi yang berbasis pada sumber daya alam yang dikelola oleh masyarakat sendiri atau disebut dengan perekonomian kerakyatan.

Konsep perekonomian ini adalah mengelola secara swadaya sumber daya ekonomi yang diusahakan meliputi pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kerajinan, dan lain sebagainya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya. Konsep ekonomi kerakyatan ini belum dilaksanakan sepenuhnya di Kabupaten Barito Timur, sehingga perlu adanya pemahaman kepada masyarakat agar perekonomian masyarakat Barito Timur mandiri dan berdikari.

Untuk mewujudkan perekonomian daerah yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya belinya, maka daerah dapat mengoptimalkan sumber daya lokalnya dengan:

- Perluasan pangsa pasar dan iklim perdagangan yang kondusif
- Mewujudkan penataan lokasi sector informal
- Peningkatan produktivitas dan daya saing produk industry berbasis sumberdaya lokal
- Mendorong peningkatan skala usaha UMKM melalui penguatan modal.
- Pengembangan dan peningkatan kualitas SDM yang memiliki pengetahuan entrepreneur.
- Mendukung tumbuh kembangnya ekonomi kerakyatan yang unggul melalui penguatan kelembagaan koperasi.
- Peningkatan produksi hasil pertanian strategis
- Jaringan infrastruktur khususnya akses jalan antar desa, kecamatan dan perkotaan yang memadai dan pemerataan jaringan listrik dan penerangan jalan.

1.3 Data Umum Daerah

Data umum Kabupaten Barito Timur memuat informasi tentang profil daerah secara umum yang meliputi data geografis wilayah, jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, jumlah PNS, realisasi pendapatan menurut jenis pendapatan, realisasi belanja menurut jenis belanja, dan realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan. Data umum Kabupaten Barito Timur disajikan sebagai berikut:

1. Data Geografis Wilayah

Luas wilayah Kabupaten mengacu kepada Undang- Undang Nomor 5 Tahun

2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah dan Permendagri RI No. 137 Tahun 2017 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

Kabupaten Barito Timur yang beribukota di Tamiang Layang terletak antara 1°2' Lintang Utara dan 2°5' Lintang Selatan, 114° – 115° Bujur Timur. Kabupaten Barito Timur diapit oleh Kabupaten Barito Selatan di sebelah Utara dan Barat, Kabupaten Tabalong di Propinsi Kalimantan Selatan di sebelah Timur, Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Tabalong di sebelah Selatan.

Luas wilayah Kabupaten Barito Timur sebesar 3.834 km² yang terdiri dari 10 kecamatan. Kecamatan Dusun Timur dan Paju Epat merupakan dua kecamatan terluas, masing-masing 867,70 km² dan 664,30 km². Apabila kedua kecamatan ini dijumlahkan, luasnya mencapai 39,96% dari seluruh wilayah Kabupaten Barito Timur. Luas wilayah Kabupaten Barito Timur menurut Kecamatan disajikan pada Tabel 1.3.1 berikut ini:

Tabel 1.3.1
Luas Wilayah dan Jumlah Desa per Kecamatan Kabupaten Barito Timur

No.	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase terhadap luas kabupaten (%)	Jumlah Desa/ Kelurahan
1.	Benua Lima	Taniran	258,00	6,73	7
2.	Dusun Timur	Tamiang Layang	867,70	22,63	17
3.	Paju Epat	Telang	664,30	17,33	9
4.	Awang	Hayaping	203,00	5,29	11
5.	Patangkep Tutui	Bentot	255,00	6,65	10
6.	Dusun Tengah	Ampah Kota	371,00	9,68	8
7.	Raren Batuah	Unsum	186,00	4,85	9
8.	Paku	Tampa	272,00	7,09	12
9.	Karusen Janang	Dayu	178,00	4,64	7
10.	Pematang Karau	Bambulung	579,00	15,10	13
Jumlah Total			3.834	100,00	103

Sumber Data: BPS Kabupaten Barito Timur (Kabupaten Barito Timur Dalam Angka 2025)

Kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil dimiliki oleh Kecamatan Karusen Janang yaitu 178,00 Km² atau 4,64 persen dari luas wilayah Kabupaten Barito Timur, diikuti oleh Kecamatan Raren Batuah 186,00 Km² dan Kecamatan Awang 203,00 Km².

Wilayah Kabupaten Barito Timur yang sebagian besar berada pada wilayah daratan dan perbukitan dengan tanah mineral. Lahan kering sebagian besar telah dimanfaatkan untuk pengembangan pertanian tanaman pangan dan perkebunan terutama kebun karet dan kelapa sawit.

2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Barito Timur pada Tahun 2024 menurut data BPS adalah sebanyak 118.759 jiwa, sedangkan menurut data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur adalah sebanyak 118.665 jiwa, terdiri dari 60.804 Jiwa laki-laki dan 57.861 Jiwa perempuan dengan sebaran per kecamatan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 1.3.2 berikut ini :

Tabel 1.3.2
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2024

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Jumlah (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
		Laki-laki	Perempuan		
		Data Dukcapil			Data BPS
1.	Benua Lima	3.416	3.212	6.628	6.523
2.	Dusun Timur	15.012	14.576	29.588	30.887
3.	Paju Epat	3.502	3.253	6.755	6.981
4.	Awang	3.276	3.142	6.418	6.220
5.	Patangkep Tutui	3.749	3.526	7.275	7.066
6.	Dusun Tengah	12.847	12.369	25.216	24.858
7.	Raren Batuah	4.556	4.304	8.860	8.499
8.	Paku	4.764	4.416	9.180	9.034
9.	Karusen Janang	2.806	2.634	5.440	5.736
10.	Pematang Karau	6.876	6.429	13.305	12.965
	Jumlah	59.787	56.877	116.664	118.579

Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur (Data diterima Februari 2025) dan Data BPS Kabupaten Barito Timur (Kabupaten Barito Timur Dalam Angka 2025)

Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Timur Tahun 2024 dapat di lihat pada Tabel 1.3.3 berikut:

Tabel 1.3.3
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Timur Tahun 2024

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Jumlah (Jiwa)
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	5.128	4.943	10.071
5-9	4.209	3.974	8.183
10-14	4.486	4.334	8.820
15-19	5.023	4.634	9.657

Lanjutan Tabel 1.3.3 :

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Jumlah (Jiwa)
	Laki-laki	Perempuan	
20-24	5.303	4.921	10.224
25-29	5.092	4.894	9.989
30-34	4.723	4.519	9.242
35-39	4.621	4.574	9.195
40-44	4.665	4.426	9.091
45-49	4.396	4.221	8.617
50-54	3.908	3.741	7.649
55-59	3.205	2.931	6.136
60-64	2.394	2.202	4.596
65-69	1.636	1.581	3.217
70-74	1.050	1.049	2.099
75+	872	1.104	1.976
Jumlah Total	60.711	58.048	118.759

Sumber Data: BPS Kabupaten Barito Timur (Kabupaten Barito Timur Dalam Angka 2025)

Berdasarkan Tabel 1.3.3 di atas terlihat jumlah penduduk terbanyak berasal dari kelompok umur 20 – 24 tahun sebanyak 10.224 Jiwa, diikuti kelompok umur 0-4 Tahun sebanyak 10.071 Jiwa. Kita dapat melihat bahwa penduduk Kabupaten Barito Timur didominasi oleh kelompok umur kaum muda yang masih dalam usia baru menyelesaikan Pendidikan dan dalam usia anak-anak. Sedangkan jumlah kelompok umur paling sedikit adalah kelompok penduduk usia 75+ yaitu sebanyak 1.976 Jiwa.

Terjadinya perbedaan angka antara versi BPS dengan versi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur disebabkan adanya perbedaan pendekatan atau metode perhitungan. Versi BPS menganggap penduduk Kabupaten Barito Timur adalah orang-orang yang secara riil pada saat sensus dan atau sudah 6 bulan berdomisili di Kabupaten Barito Timur, sedangkan menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur berdasarkan jumlah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan data dari Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan.

3. Pertumbuhan Penduduk

Jumlah Penduduk, Ratio Jenis Kelamin Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2024

menurut data BPS Kabupaten Barito Timur dapat dilihat pada Tabel 1.3.4 berikut ini :

Tabel 1.3.4
Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2024

No.	Kecamatan	Jumlah (Jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020–2024 (%)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per Km ²	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
1.	Benua Lima	6.523	0,78	5,49	25,28	108
2.	Dusun Timur	30.887	2,50	26,00	35,58	102
3.	Paju Epat	6.981	2,91	5,88	10,51	119
4.	Awang	6.220	0,52	5,24	30,64	105
5.	Patangkep Tutui	7.066	0,25	5,95	27,71	106
6.	Dusun Tengah	24.858	0,43	20,93	67,00	102
7.	Raren Batuah	8.499	0,55	7,16	45,69	103
8.	Paku	9.034	1,05	7,61	33,21	106
9.	Karusen Janang	5.736	2,07	4,83	32,22	106
10.	Pematang Karau	12.965	0,78	10,92	22,39	105
	Jumlah	118.579	1,28	100	30,98	105

Sumber Data: BPS Kabupaten Barito Timur (Kabupaten Barito Timur Dalam Angka 2025)

Laju pertumbuhan penduduk per Tahun 2020–2024 adalah sebesar 1,28. Kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi adalah Dusun Timur dengan penduduk sebanyak 30.887 jiwa yang mencakup 26% penduduk Kabupaten Barito Timur. Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Dusun Tengah dengan kepadatan 67 jiwa/km² dan jumlah penduduk 24.858 jiwa. Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Paju Epat dengan kepadatan 10,51 jiwa/km² dan jumlah penduduk 6.981 jiwa. Kecamatan Dusun Tengah sangat strategis sebagai pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan yang terletak di daerah segi tiga antara Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Barito Selatan, sedangkan Kecamatan Dusun Timur merupakan pusat pendidikan dan pemerintahan dan mulai berkembang ke arah kota perdagangan.

Rasio jenis kelamin di Kabupaten Barito Timur adalah 105, artinya terdapat 105 penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Komposisi penduduk Kabupaten Barito Timur terdiri atas 60.711 penduduk laki-laki dan 58.048 penduduk perempuan. Kepadatan penduduk Kabupaten Barito Timur yang tergolong jarang, yakni sekitar 30,98 Jiwa per Km².

4. Jumlah ASN

Data ASN Daerah di Kabupaten Barito Timur Tahun 2023-2024 seperti terdapat di Tabel 1.3.5 berikut ini:

Tabel 1.3.5
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Timur Tahun 2023-2024

Pangkat/ Golongan / Ruang	2023			2024		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
I/A (Juru Muda)	2	-	2	2	-	2
I/B (Juru Muda Tingkat I)	1	-	1	1	-	1
I/C (Juru)	3	-	3	3	-	3
I/D (Juru Tingkat I)	9	-	9	8	-	8
Jumlah Golongan I	15	-	15	14	-	14
II/A (Pengatur Muda)	10	6	16	10	6	16
II/B (Pengatur Muda Tingkat I)	21	12	33	19	10	29
II/C (Pengatur)	63	91	154	46	52	98
II/D (Pengatur Tingkat I)	133	58	191	117	83	200
Jumlah Golongan II	227	167	394	192	151	343
III/A (Penata Muda)	203	243	446	195	178	373
III/B (Penata Muda Tingkat I)	167	315	482	182	345	527
III/C (Penata)	215	336	551	209	325	534
III/D (Penata Tingkat I)	303	401	704	299	431	730
Jumlah Golongan III	888	1.295	2.183	885	1.279	2.164
IV/A (Pembina)	155	207	362	142	184	326
IV/B (Pembina Tingkat I)	151	227	378	127	199	326
IV/C (Pembina Utama Muda)	18	3	21	26	13	39
IV/D (Pembina Utama Madya)	1	0	1	1	0	1
IV/E (Pembina Utama)	0	0	0	0	0	0
Jumlah Golongan IV	325	437	762	296	396	692
Jumlah Total	1.455	1.899	3.339	1.387	1.826	3.213

Sumber Data : BKPSDM Kabupaten Barito Timur (Data Diterima Februari 2025)

Banyaknya Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah Barito Timur Tahun 2024 mengalami penurunan sebanyak 3,77% dibandingkan Tahun 2023 dari 3.339 orang menjadi 3.219 orang. Penurunan jumlah PNS ini disebabkan mutasi pegawai keluar daerah, pensiun dan meninggal dunia.

Berdasarkan kepangkatan maka PNS Daerah terbanyak yaitu Golongan III sebanyak 2.164 orang, diikuti Golongan IV sebanyak 692 orang, Golongan II sebanyak 343 orang, dan terendah dicapai oleh Golongan I sebanyak 14 orang.

Sedangkan untuk ASN dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Barito Timur yang tercatat sejak Tahun 2024 adalah sebagai Berikut :

Tabel 1.3.6

Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Timur Tahun 2024

Pangkat/ Golongan / Ruang	2024		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
V	5	6	11
VI	-	-	-
VII	23	112	135
VIII	-	-	-
IX	122	504	626
X	3	15	18
Jumlah Total	153	637	790

Sumber Data : BKPSDM Kabupaten Barito Timur (Data Diterima Februari 2025)

Berdasarkan tabel 1.3.6 ASN Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Daerah terbanyak pada Golongan/Ruang IX dengan 626 orang, diikuti Golongan/Ruang VII sebanyak 135 orang, Golongan/Ruang X sebanyak 18 orang, dan terendah dicapai oleh Golongan/Ruang V sebanyak 11 orang.

Jumlah ASN Daerah menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2023-2024 dapat di lihat pada Tabel 1.3.7 berikut:

Tabel 1.3.7

Jumlah ASN Daerah Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2023-2024

Pangkat/ Golongan / Ruang	2023			2024		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Sampai dengan SD	9	-	9	7	-	7
SLTP/Sederajat	18	2	20	19	3	22
SMA/Sederajat	285	151	436	267	129	396
Diploma I, II/Akta I,II	54	71	125	27	46	73
Diploma III/Akta III/Sarjana Muda	103	265	368	164	418	582
Tingkat Sarjana/Doktor/Ph.D	1,072	1,474	2,546	1.046	1.867	2.923
Jumlah Total	1,541	1,963	3,504	1.540	2.463	4.003

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah ASN perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Sementara berdasarkan pendidikan pada Tahun 2024, ASN yang terdiri dari PNS dan PPPK terbanyak yakni 2.923 orang memiliki pendidikan tingkat sarjana dan pasca sarjana, kemudian diikuti Diploma III/Akta III/Sarjana Muda sebanyak 582 orang dan SMA/ sederajat sebanyak 396 orang.

5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Secara garis besar Pendapatan Daerah terdiri dari sumber penerimaan PAD, dana perimbangan dan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023 dan 2024 diuraikan sebagaimana dalam Tabel 1.3.8 berikut ini :

Tabel 1.3.8
Perincian Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur
Tahun Anggaran 2024 Setelah Perubahan dan Realisasi Tahun 2023

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024		Realisasi 2023
		(Rp)	(%)	
PENDAPATAN	1.188.134.362.900,00	1.200.079.387.823,00	101,01	983.541.900.115,03
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	90.444.536.153,00	63.659.136.185,00	70,38	60.228.818.442,03
Pendapatan Pajak Daerah	30.593.000.000,00	15.119.207.052,00	49,42	18.408.812.156,94
Pendapatan Retribusi Daerah	5.097.624.840,00	3.341.301.652,00	65,55	2.766.598.933,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.521.333.680,00	4.333.141.058,00	78,48	27.049.142,65
Lain-lain PAD yang Sah	49.232.577.633,00	40.865.488.422,00	83,00	39.026.358.209,44
PENDAPATAN TRANSFER	1.088.279.923.289,00	1.129.939.555.081,00	103,83	923.288.081.673,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.025.406.014.248,00	1.084.064.735.899,00	105,72	784.533.230.628,00
Dana Bagi Hasil	290.386.175.248,00	357.320.326.002,00	123,05	191.068.698.189,00
Dana Alokasi Umum	492.192.241.000,00	489.386.842.111,00	99,43	457.131.088.950,00
Dana Alokasi Khusus - Fisik	65.259.717.000,00	63.547.299.982,00	97,38	52.417.638.397,00
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	83.916.673.000,00	80.159.059.804,00	95,52	83.915.805.092,00

Lanjutan Tabel 1.3.8 :

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024		Realisasi 2023
		(Rp)	(%)	
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	93.651.208.000,00	93.651.208.000,00	100	77.935.147.800,00
Dana Insentif Daerah	14.664.300.000,00	14.664.300.000,00	100	-
Dana Desa	78.986.908.000,00	78.986.908.000,00	100	77.935.147.800,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	62.873.909.041,00	45.874.819.182,00	72,92	60.819.703.245,00
Pendapatan Bagi Hasil	-	-	-	-
Bantuan Keuangan	62.873.909.041,00	45.874.819.182,00	72,96	60.819.703.245,13
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	9.409.903.458,00	6.480.694.557,00	68,87	25.000.000,00
Pendapatan Hibah - LRA	5.209.903.458,00	-	0	25.000.000,00
Pendapatan Lainnya	4.200.000.000,00	6.480.694.557,00	154,30	-

Sumber : BPKAD Kab. Barito Timur (Data unaudited diterima pada 3 Maret 2025**)

Ket : ** data sangat sementara

Berdasarkan Tabel 1.3.8 di atas dapat dilihat bahwa Pendapatan Daerah mencapai 101,01 persen melebihi dari target di Tahun 2024. Sumber pendapatan tertinggi diperoleh dari Pendapatan Transfer dengan realisasi 103,83 persen dari target anggaran Tahun 2024 dan melebihi dari realisasi di Tahun 2023, diikuti oleh PAD dengan capaian di Tahun 2024 mencapai 70,38 persen dari yang ditargetkan lebih tinggi sedikit jika dibandingkan realisasi Tahun 2023.

PAD Kabupaten Barito Timur meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah. Sumber PAD terbesar diperoleh dari Lain-lain PAD yang Sah Rp 40.865.488.422 diikuti Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp 15.119.207.052, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp 4.333.141.058 dan terendah diperoleh dari Retribusi Daerah sebesar Rp 3.341.301.652.

Pendapatan Transfer meliputi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebesar Rp 1.084.064.735.899, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya sebesar Rp 93.651.208.000 dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp 45.874.819.182. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 maka Pendapatan Transfer Tahun 2024 melebihi dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan Kabupaten Barito Timur mendapatkan dana insentif fiskal dari Pemerintah Pusat dan mampu memaksimalkan Dana Alokasi Umum dan Dana

Alokasi Khusus dengan optimal, selain itu meningkatnya Dana Bagi Hasil dari Pusat juga mampu mendorong pendapatan ini meningkat hingga 100 persen.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bersumber dari Pendapatan lainnya dalam hal ini Pendapatan Kapitasi JKN pada FKTP sebesar Rp 6.480.694.557 lebih besar dari penyerapan tahun sebelumnya..

Jika kita perbandingan kontribusi masing-masing sumber pendapatan daerah terhadap total pendapatan, maka kontribusi PAD sebesar 5,3 persen, Pendapatan Transfer sebesar 94,16 persen, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 0,54 persen.

6. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Transfer. Secara keseluruhan realisasi belanja daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 dan 2023 disajikan dalam uraian Tabel 1.3.8 berikut ini :

Tabel 1.3.9
Belanja Daerah Menurut Jenis Belanja Kabupaten Barito Timur
Tahun Anggaran 2024 Setelah Perubahan dan Realisasi Tahun 2023

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	(%)	Realisasi 2023
BELANJA DAERAH	1.317.413.770.394	1.214.900.463.172,00	92,22	1.059.721.629.160,41
BELANJA OPERASI	928.775.734.994,00	848.524.224.072,00	91,36	695.482.303.674,04
Belanja Pegawai	448.653.455.086,00	420.555.957.626,00	93,74	347.439.464.519,35
Belanja Barang dan Jasa	408.917.705.733,00	366.663.027.485,00	89,67	228.529.659.212,00
Belanja Subsidi	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	600.000.000,00
Belanja Hibah	66.423.374.175,00	59.516.848.960,00	89,60	47.547.860.937,00
Belanja Bantuan Sosial	4.181.200.000,00	1.188.390.000,00	28,42	9.275.004.600,00
BELANJA MODAL	217.448.641.827,00	199.404.368.523,00	91,70	201.360.547.759,37
Belanja Modal Tanah	1.000.000.000,00	928.648.700,00	92,86	1.098.858.088,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.678.840.742,00	33.938.884.242,00	90,07	16.700.733.622,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	47.381.133.338,00	46.280.221.340,00	97,68	41.140.779.038,98
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	131.318.167.747,00	118.186.314.241,00	90,00	138.082.480.220,39
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	70.500.000,00	70.300.000,00	99,72	171.975.500,00
Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	0,00	919.472.706,00
BELANJA TAK TERDUGA	4.540.565.754,00	1.404.472.148,00	30,93	2.533.187.200,00
Belanja Tidak Terduga	4.540.565.754,00	1.404.472.148,00	30,93	2.533.187.200,00
BELANJA TRANSFER	166.648.827.818,00	165.567.398.428,00	99,35	160.345.590.527,00

Lanjutan Tabel : 1.3.9 :

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	(%)	Realisasi 2023
Belanja Bagi Hasil	5.074.986.644,00	5.074.986.644,00	100	4.104.711.131,00
Belanja Bantuan Keuangan	161.573.841.174,00	160.492.411.784,00	99,33	156.240.879.396,00
SURPLUS / (DEFISIT)	(129.279.407.494,00)	(14.821.075.348,00)	11,46	(72.317.329.574,39)

Sumber : BPKAD Kab. Barito Timur (Data unaudited diterima pada 6 Maret 2025*)

Berdasarkan Tabel 1.3.9 di atas maka dapat dilihat Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 sebesar 92,22 persen dari target capaian Belanja Daerah yang ditetapkan, dengan struktur belanja terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 848.524.224.072,00 atau 91,36 persen dari target belanja, Belanja Modal sebesar Rp 199.404.368.523,00 atau 91,70 persen dari target belanja, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 1.404.472.148,00 atau 30,93 persen dari target belanja, dan Belanja Transfer sebesar Rp 165.567.398.428,00 atau 99,35 persen dari target belanja. Pada Tahun 2024 keuangan daerah mengalami defisit sebesar Rp 14.821.075.348,00. Defisit keuangan terjadi akibat adanya perubahan yang tertuang dalam perubahan APBD TA. 2024 yang sebagian besar digunakan untuk peningkatan kegiatan pembangunan daerah.

7. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Rincian anggaran dan realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Barito Timur pada Tahun 2024 sebagaimana yang tertuang dalam APBD dapat dilihat pada Tabel 1.3.10 di bawah ini:

Tabel 1.3.10
Pembiayaan Daerah di Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 Setelah Perubahan dan Realisasi Tahun 2023

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	(%)	Realisasi 2023
PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	154.279.407.494,00	154.279.407.494,00	100	241.287.048.039,00
Penggunaan SILPA	154.279.407.494,00	154.279.407.494,00	100	241.287.048.039,00
Penerimaan Kembali Investasi	-	-	0,00	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	100	10.775.000.000,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	100	10.775.000.000,00
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	0,00	-
PEMBIAYAAN NETTO	129.279.407.494,00	129.279.407.494,00	100,00	230.512.047.039,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	114.458.332.144,00	-	154.332.317.993,79

Pada tabel 1.3.10 di atas dapat dilihat bahwa Penerimaan Daerah dalam pembiayaan di Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp 154.279.407.494 dan terealisasi sebesar 100 persen. Jumlah penerimaan pembiayaan di Tahun 2024 lebih kecil jika dibandingkan dengan Tahun 2023. Sedangkan besarnya Pengeluaran Daerah dalam pembiayaan dianggarkan sebesar Rp 25.000.000.000 dan dapat direalisasikan 100 persen. Jumlah pengeluaran pembiayaan di Tahun 2024 lebih besar jika dibandingkan dengan Tahun 2023.

Pada dasarnya pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit belanja daerah. Oleh karena itu, besaran defisit belanja daerah juga harus memperhatikan besaran nilai pembiayaan netto yang dapat digunakan untuk menutupnya. Pada Tahun 2024 dianggarkan Pembiayaan Netto sebesar Rp. 129.279.407.494,00 dan mengalami defisit sebesar Rp. 14.821.075.348,00 sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kabupaten Barito Timur sebesar Rp. 114.458.332.144,00.

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang secara teknis masih mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, bahwa APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah, terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Kerangka anggaran pembangunan daerah Tahun 2024 akan memberikan gambaran arah pembangunan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan kemampuan fiskal Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Anggaran pembangunan daerah tersebut pendanaannya bersumber antara lain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Secara umum komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu:

1. Penerimaan daerah, terdiri dari pendapatan daerah yang merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, dan penerimaan pembiayaan daerah yang merupakan semua penerimaan yang harus dibayar kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya; dan
2. Pengeluaran daerah, terdiri dari belanja daerah yang merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat, khususnya dalam memberikan pelayanan umum, serta pengeluaran pembiayaan daerah yang merupakan semua pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran terkait maupun pada tahun berikutnya.

Pemerintah Kabupaten Barito Timur dalam pengelolaan keuangan berupaya menyesuaikan dengan perkembangan program-program Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan menjadi prioritas dalam Pembangunan Daerah. Disamping itu pengelolaan keuangan daerah selalu

disesuaikan dengan arah kebijakan umum maupun prioritas anggaran Kabupaten Barito Timur yang telah disepakati dan ditetapkan sebagai bahan untuk menyusun program dan kegiatan guna mencapai sasaran pembangunan daerah dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diperlukan adanya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan pada Perangkat Daerah dengan tetap memperhatikan tugas pokok, dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah serta adanya keterpaduan program dan kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur sehingga dapat sinergi untuk melaksanakan program dan kegiatan pembangunan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai suatu rencana keuangan tahunan daerah, telah diupayakan dalam penyusunannya secara cermat dan menyeluruh yang disesuaikan dengan perkiraan kemampuan dana yang dapat dihimpun untuk membiayai rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Tema RKP Tahun 2024 adalah **"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**, fokus pembangunan diarahkan kepada memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan Pembangunan kebudayaan, membangun lingkungan hidup, meningkatkan mitigasi bencana dan perubahan iklim serta memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik, dengan sasaran dan target yang harus dicapai pada Tahun 2024. Maka dengan memperhatikan tema RKP Tahun 2024 dan guna menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten/kota maka ditetapkanlah prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 yaitu ***"Pengembangan Ekonomi Daerah melalui optimalisasi sumberdaya lokal disertai peningkatan kualitas jaringan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia yang handal"***.

Pemerintah Kabupaten Barito Timur pada Tahun 2024 telah melaksanakan 5 Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 10 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, 3 Urusan Pilihan dan 18 Fungsi Penunjang yang dilaksanakan oleh 36 Perangkat Daerah (PD) sesuai tugas pokok dan fungsinya. Penjabaran perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 seperti yang terlampir dalam Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 4 Tahun 2024 tanggal 17 September 2024 tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dapat dijabarkan pada Tabel 2.1.1 berikut ini:

Tabel 2.1.1
Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubah	Bertambah/ (Berkurang)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	86.960.980.445,00	90.444.536.153,00	3.483.555.708,00	4
4.1.01	Pajak Daerah	30.593.000.000	30.593.000.000	0	0
4.1.02	Retribusi Daerah	5.137.624.840	5.097.624.840	(40.000.000)	-0,8
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.521.333.680	5.521.333.680	0	0,0
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	45.709.021.925	49.232.577.633	3.523.555.708	7,7
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.042.834.870.489	1.088.279.923.289	45.445.052.800	4,4
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	987.287.417.000	1.025.406.014.248	38.118.597.248	3,9
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	55.547.453.489	62.873.909.041	7.326.455.552	13,2
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	9.409.903.458,	9.409.903.458	0	0,0
4.3.01	Pendapatan Hibah	5.209.903.458	5.209.903.458	0	0,0
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4.200.000.000	4.200.000.000	0	0,0
	Jumlah Pendapatan	1.139.205.754.392	1.188.134.362.900	48.928.608.508	4,3
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	819.593.805.137	928.775.734.994,01	109.181.929.857	13,3
5.1.01	Belanja Pegawai	436.812.040.082	448.653.455.086,01	11.841.415.004,01	2,7
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	314.572.418.830	408.917.705.733	94.345.286.903	30,0
5.1.04	Belanja Subsidi	600.000.000	600.000.000	0	0,0
5.1.05	Belanja Hibah	63.428.146.225	66.423.374.175	2.995.227.950	4,7
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.181.200.000	4.181.200.000	0	0,0
5.2	BELANJA MODAL	179.667.954.046	217.448.641.827,99	37.780.687.781,99	21,0
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0,0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.650.031.643	37.678.840.742	(971.190.901)	-2,5
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	35.470.739.609	47.381.133.338,99	11.910.393.729,99	33,6
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	104.326.682.794	131.318.167.747	26.991.484.953	25,9
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	220.500.000	70.500.000	(150.000.000)	-68,0
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000	4.540.565.754	(5.459.434.246)	-54,6
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	4.540.565.754	(5.459.434.246)	-54,6
5.4	BELANJA TRANSFER	181.777.857.034	166.648.827.818	(15.129.029.216)	-8,3
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.074.986.644	5.074.986.644	0	0,0
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	176.702.870.390	161.573.841.174	(15.129.029.216)	-8,6
	Jumlah Belanja	1.191.039.616.217	1.317.413.770.394	126.374.154.177	10,6
	Total Surplus/(Defisit)	(51.833.861.825)	(129.279.407.494)	(77.445.545.669)	149,4
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	76.833.861.825	154.279.407.494	77.445.545.669	100,8
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	76.833.861.825	154.279.407.494	77.445.545.669	100,8

Lanjutan Tabel 2.1.1

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	%
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	76.833.861.825	154.279.407.494	77.445.545.669	100,8
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	25.000.000.000	25.000.000.000	0	0,0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	25.000.000.000	25.000.000.000	0	0,0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000.000	25.000.000.000	0	0,0
	Pembiayaan Netto	51.833.861.825	129.279.407.494	77.445.545.669	149,4
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0

Sumber : BPKAD Kab. Barito Timur

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Kenaikan dan penurunan pendapatan daerah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro nasional secara signifikan yaitu terhadap Pendapatan Asli Daerah, terutama sektor pajak daerah.

Kebijakan umum pendapatan daerah tahun anggaran 2024 berdasarkan realisasi tahun anggaran 2023 dan memperhatikan kebutuhan dan prospek ke depan yang diharapkan akan mengoptimalkan penerimaan daerah melalui pendekatan pelayanan dan peningkatan kerjasama dengan semua pihak, serta strategi dalam penguatan stabilitas ekonomi masyarakat dan dukungan terhadap program ekonomi kreatif untuk masyarakat guna penguatan terhadap ekonomi daerah, maka arah dan kebijakan umum penerimaan daerah adalah sebagai berikut :

1. **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**, Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Barito Timur terus berupaya melakukan intensifikasi dan diversifikasi sumber-sumber penerimaan PAD seperti pajak dan retribusi daerah serta menggali sumber-sumber penerimaan lainnya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Timur.
2. **Dana Perimbangan :**
 - a. **Bagi Hasil Pajak**, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di daerah pedesaan dan mensosialisasikan tentang pentingnya keberadaan sumber penerimaan daerah dari pajak dan retribusi (khususnya pajak PBB), serta memberikan insentif bagi daerah/desa yang memiliki pendapatan melebihi target yang telah ditetapkan.
 - b. **Bagi Hasil Bukan Pajak**, meningkatkan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

- c. **Dana Alokasi Umum (DAU)**, menggunakan anggaran belanja yang bersumber DAU untuk keperluan belanja gaji dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan khusus rutin operasional.
- d. **Dana Alokasi Khusus (DAK)**, menetapkan lokasi dan anggaran pembangunan dari sumber dana DAK baik Fisik dan/atau Non Fisik sesuai dengan peruntukannya dan kebutuhan pembangunan daerah Kabupaten Barito Timur.

Rencana Pendapatan Daerah pemerintah Kabupaten Barito Timur pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 sebesar Rp. 1.188.134.362.900,00 turun sebesar Rp. 48.928.608.508,00 atau 4,3 persen dari Pendapatan Murni yang dianggarkan sebesar Rp. 1.139.205.754.392,00.

Kebijakan Umum Anggaran Belanja Pembangunan Daerah diarahkan pada prinsip-prinsip keadilan yang dapat dinikmati seluruh masyarakat khususnya dalam hal pelayanan publik yang disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah.

Belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Oleh karena itu penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 berupaya menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, Perangkat Daerah (PD) maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Barito Timur harus berbasis kinerja dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah, khususnya pengelolaan belanja daerah yang bersifat wajib pelayanan dasar. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun 2024 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap PD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Pada Tahun 2024 ini pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan mengubah prinsip belanja, dari yang menggunakan prinsip money follow function, diubah menjadi money follow program, artinya program dan kegiatan strategis menjadi prioritas untuk mendapatkan anggaran yang lebih proporsional.

Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja. Penerapan azas efisiensi dan

efektifitas belanja merupakan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengoptimalkan belanja daerah.

Arah kebijakan belanja daerah Tahun 2024 antara lain terdiri dari hal-hal sebagai berikut :

- 1.** Pengeluaran Anggaran Belanja Daerah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip :
 - a. Efektif, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan.
 - b. Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program/kegiatan serta fungsi masing-masing Dinas/Lembaga/Satuan Kerja Daerah lainnya.
 - c. Keharusan penggunaan kemampuan/hasil Produksi Dalam Negeri sejauh memungkinkan.
- 2.** Disamping itu, didalam menetapkan kredit anggaran dan pelaksanaan pengendalian kredit anggaran dapat diperhatikan pula ketentuan/petunjuk tentang :
 - a. Penganggaran belanja yang tidak diperkenankan.
 - b. Penganggaran belanja yang sangat dibatasi,
 - c. Penyediaan Dana Cadangan
- 3.** Pengeluaran Anggaran Belanja Operasi maupun Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip :
 - a. Penyediaan kredit belanja operasi dilakukan sesuai dengan prioritas untuk memperlancar roda pemerintahan dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.
 - b. Setiap kelompok objek belanja operasi dan belanja modal diusahakan dikaji kembali berdasarkan azas efisiensi secara tepat guna.
 - c. Belanja Tidak Terduga masih dianggarkan untuk menjaga situasi yang tidak diinginkan.
- 4. Anggaran Belanja Operasi** untuk masing-masing bagian belanja dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. Belanja Pegawai :
 - Belanja gaji, tunjangan jabatan pegawai dan tunjangan lainnya serta belanja honorarium dialokasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebutuhan masing-masing Satuan Kerja dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Belanja pegawai dianggarkan sebesar Rp. 436.812.040.082,00 pada APBD Murni, pada APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp. 448.653.455.086,01 ada penambahan sebesar Rp. 11.841.415.004,01.
 - b. Belanja Barang dan Jasa
 - Mengalokasikan belanja tersebut diatas sesuai dengan ketentuan dan peraturan

yang berlaku, khususnya Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 terkait Satuan Biaya Regional. Belanja Barang dan Jasa pada APBD Murni dianggarkan sebesar Rp. 314.572.418.830,00 pada APBD Perubahan Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp. 408.917.705.733,00 ada peningkatan sebesar Rp. 94.345.286.903,00.

c. Belanja Subsidi dan Hibah

- Mengalokasikan belanja tersebut diatas sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- Belanja Subsidi dianggarkan sebesar Rp. 600.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari yang dianggarkan pada APBD Perubahan.
- Belanja Hibah pada APBD Murni dianggarkan sebesar Rp. 63.428.146.225 pada APBD Perubahan Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp. 66.423.374.175,00 ada peningkatan sebesar Rp. 2.995.227.950,00.

d. Belanja Bantuan Sosial

- Dialokasikan untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat maupun lembaga atau panti-panti sosial. Belanja Bantuan Sosial pada APBD Murni dianggarkan sebesar Rp. 4.181.200.000,00 tidak mengalami perubahan dari yang dianggarkan pada APBD Perubahan.

5. Pengeluaran Anggaran Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip efektif dan efisien sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku serta didasarkan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa serta antisipasi kejadian luar biasa (bencana kesehatan, bencana alam dan bencana sosial lainnya), dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Belanja Modal

- Dialokasikan berdasarkan prinsip-prinsip efektif dan efisien sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Penganggaran belanja modal pada APBD Murni sebesar Rp. 179.667.954.046,00 sedangkan pada APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp. 217.448.641.827,99 terdapat penambahan sebesar Rp. 37.780.687.781,99.

b. Belanja Tidak Terduga

- Anggaran yang dialokasikan untuk mengantisipasi berbagai kejadian yang masih belum teranggarkan dananya, seperti pada saat sekarang ini dimana untuk mengantisipasi hal-hal yang bersifat urgent dan kebutuhan yang sangat dinamis dalam penanganan potensi bencana, Pemerintah Daerah memaksimalkan Rekening Belanja Tidak Terduga untuk menangani akibat dari dampak bencana tersebut baik ekonomi, kesehatan dan jaringan sosial. Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar sebesar Rp. 10.000.000.000,00 pada APBD murni Tahun 2024 sedangkan pada

APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp. 4.540.565.754,00 terdapat pengurangan sebesar Rp. 5.459.434.246,00.

c. Belanja Transfer

- Dialokasikan sesuai dengan ketentuan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan program membangun desa. Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp. 181.777.857.034,00 pada APBD murni Tahun 2024 sedangkan pada APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp. 166.648.827.818,00 terdapat penurunan sebesar Rp. 15.129.029.216,00.

Rencana Belanja Daerah pemerintah Kabupaten Barito Timur pada Perubahan APBD Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 sebesar Rp. 1.317.413.770.394,00 naik sebesar Rp. 126.374.154.177,00 atau 10,6 persen dari APBD Murni yang dianggarkan sebesar Rp. 1.191.039.616.217,00.

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Secara umum penyelenggaraan urusan Pemerintah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 yang dilaksanakan oleh masing-masing PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2024 yang ditunjang oleh anggaran yang tertuang dalam APBD Kabupaten Barito Timur pada masing-masing PD, kemudian dijabarkan dalam program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan ditunjukkan dengan capaian pelaksanaan program dan kegiatan terhadap indikator kinerja. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif maupun kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program dan kegiatan.

Indikator Kinerja Pembangunan (IKP) untuk masing-masing PD telah dituangkan dalam RPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026 dan dijabarkan di dalam RKPD dengan target setiap tahun. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024 dilakukan menurut fungsi dan urusan penyelenggaraan pemerintahan yaitu urusan wajib dasar, urusan wajib non dasar, urusan pilihan, serta Unsur Pendukung, Penunjang, Pengawas Urusan, Kewilayahan dan Pemerintahan Umum.

A. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosia.

Rincian realisasi anggaran Urusan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dapat dilihat pada Lampiran 1 dengan diuraikan dalam Capaian program Urusan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dapat dilihat pada Tabel 3.1.1 berikut:

Tabel 3.1.1
Pelaksanaan Urusan Wajb yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dengan penerapan SPM dan tata kelola yang transparan dan akuntabel	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
				- Nilai LAKIP perangkat daerah	85 Poin	72,41 Poin	- Isi LKIP belum sepenuhnya mengacu pada Permenpan 53/2014	- Dalam penyusunan LAKIP mengacu pada Permenpan 53/2014 dan LAKIP dipublikasikan tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan.	Disdik telah menyinkronkan :AKIP dengan Inspektorat dan LAKIP dipublikasikan sebelum batas waktu yang telah ditentukan
				Program Pengelolaan Pendidikan					
				- Indeks Iklim Keamanan SD	86,72 Persen	77,59 Persen	- Tim Penanggulangan Pencegahan Kekerasan di Satuan Pendidikan belum berjalan dan di Kabupaten belum berjalan optimal - Layanan pengaduan di tingkat kabupaten belum berjalan optimal	- Disdik melakukan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah, - Pengembangan konten digital untuk pendidikan, - Melaksanakan sosialisasi pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi, - Pelaksanaan bimtek peningkatan kapasitas pendidikan terkait pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi - Pembentukan Tim Penanggulangan Pencegahan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Kekerasan (TPPK) di Satuan Pendidikan dan satgas TPPK di Kabupaten	
				- Indeks Iklim Keamanan SMP	85,93 Persen	70,25 Persen	- Tim Penanggulangan Pencegahan Kekerasan di Satuan Pendidikan belum berjalan dan di Kabupaten belum berjalan optimal - Layanan pengaduan di tingkat kabupaten belum berjalan optimal	- Disdik melakukan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah, - Pengembangan konten digital untuk pendidikan, - Melaksanakan sosialisasi pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi, - Pelaksanaan bimtek peningkatan kapasitas pendidikan terkait pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi - Pembentukan Tim Penanggulangan Pencegahan Kekerasan (TPPK) di Satuan Pendidikan dan satgas TPPK di Kabupaten	
				- Indeks Iklim Kebinekaan SD	92,74 Persen	75,68 Persen	- Tim Penanggulangan Pencegahan Kekerasan di Satuan Pendidikan belum berjalan dan di Kabupaten belum berjalan optimal - Layanan pengaduan di tingkat kabupaten belum berjalan optimal	- Disdik melakukan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah, - Pengembangan konten digital untuk pendidikan, - Melaksanakan sosialisasi pencegahan perundungan,	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								kekerasan dan intoleransi, - Pelaksanaan bimtek peningkatan kapasitas pendidikan terkait pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi - Pembentukan Tim Penanggulangan Pencegahan Kekerasan (TPPK) di Satuan Pendidikan dan satgas TPPK di Kabupaten	
				- Indeks Iklim Kebinekaan SMP	90,1 Persen	74,59 Persen	- Tim Penanggulangan Pencegahan Kekerasan di Satuan Pendidikan belum berjalan dan di Kabupaten belum berjalan optimal - Layanan pengaduan di tingkat kabupaten belum berjalan optimal	- Disdik melakukan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah, - Pengembangan konten digital untuk pendidikan, - Melaksanakan sosialisasi pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi, - Pelaksanaan bimtek peningkatan kapasitas pendidikan terkait pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi - Pembentukan Tim Penanggulangan Pencegahan Kekerasan (TPPK) di Satuan Pendidikan dan satgas TPPK di Kabupaten	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- Indeks Inklusivitas SD	81,05 Persen	58,17 Persen	- Tim Penanggulangan Pencegahan Kekerasan di Satuan Pendidikan belum berjalan dan di Kabupaten belum berjalan optimal - Layanan pengaduan di tingkat kabupaten belum berjalan optimal	- Disdik melakukan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah, - Pengembangan konten digital untuk pendidikan, - Melaksanakan sosialisasi pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi, - Pelaksanaan bimtek peningkatan kapasitas pendidikan terkait pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi - Pembentukan Tim Penanggulangan Pencegahan Kekerasan (TPPK) di Satuan Pendidikan dan satgas TPPK di Kabupaten	
				- Indeks Inklusivitas SMP	85,93 Persen	56,85 Persen	- Tim Penanggulangan Pencegahan Kekerasan di Satuan Pendidikan belum berjalan dan di Kabupaten belum berjalan optimal - Layanan pengaduan di tingkat kabupaten belum berjalan optimal	- Disdik melakukan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah, - Pengembangan konten digital untuk pendidikan, - Melaksanakan sosialisasi pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi, - Pelaksanaan bimtek peningkatan kapasitas pendidikan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								terkait pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi . - Pembentukan Tim Penanggulangan Pencegahan Kekerasan (TPPK) di Satuan Pendidikan dan satgas TPPK di Kabupaten.	
				- Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	100 Persen	83,89 Persen	Kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang PAUD masih kurang optimal karena dianggap belum wajib	- Pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana dan Utilitas PAUD. - pelaksanaan kegiatan koordinasi, perencanaan, supervise dan evaluasi layanan di bidang Pendidikan.	
				- Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	100 Persen	96,81 Persen	- Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan masih kurang - Penduduk kabupaten barito timur usia 7 - 15 tahun menempuh pendidikan di luar kabupaten barito timur	- Pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana dan utilitas baik satuan pendidikan SD maupun SMP, - Pelaksanaan kegiatan koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan bidang pendidikan, - Pemberian bantuan peralatan belajar untuk siswa tidak mampu di satuan pendidikan SD maupun SMP.	
				- Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan	100 Persen	71,63 Persen	- Kesadaran masyarakat tentang pendidikan masih kurang	- Memberikan pembinaan kepada satuan pendidikan / peserta didik bahwa	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)			- Sebagian anak sudah bekerja dan tidak mau melanjutkan sekolah	untuk memperoleh ijazah harus mengikuti ujian kesetaraan dan uji kesetaraan - Pelaksanaan kegiatan koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan bidang pendidikan,	
				- Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	59,26 Persen	58,53 Persen	Tahun 2024, pihak BAN - PDM Provinsi Kalimantan Tengah hanya memprioritaskan untuk satpen yang belum akreditasi sedangkan untuk yang terakreditasi atau yang masih berstatus akreditasi C belum bisa difasilitasi	- Pembinaan Kelembagaan dan manajemen PAUD - Pengembangan konten digital untuk pendidikan - Sosialisasi dan advokasi kebijakan bidang pendidikan - Bimbingan teknis, pelatihan, dan atau magang / PKL untuk peningkatan kapasitas bidang pendidikan - Rehabilitasi sedang/berat sarana dan prasarana utilitas PAUD	
				- Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1	61,63 Persen	65,91 Persen			
				- Rerata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	54,59 Persen	71,28 Persen			
				- Rerata kemampuan Numerasi SD	39,83 Persen	61,45 Persen			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				berdasarkan asesmen nasional					
				- Rerata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	57,25 Persen	71,03 Persen			
				- Rerata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	68,55 Persen	63,81 Persen	<ul style="list-style-type: none"> - proporsi PTK bersertifikat masih kurang - Refleksi dan perbaikan pembelajaran secara berkelanjutan melalui komunitas belajar sebagai wadah bagi PTK untuk terus berupaya meningkatkan kualitas layanannya belum optimal. - Tingkat kualitas interaksi antara guru, peserta didik, dan materi pembelajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> - pelaksanaan pembinaan penggunaan teknologi, Informasi dan komunikasi (TIK) untuk pendidikan, - pengembangan konten digital untuk pendidikan, - pelatihan penggunaan aplikasi bidang pendidikan, - fasilitasi komunitas belajar untuk pendidik dan tenaga kependidikan, - penyelenggaraan proses belajar bagi peserta didik dan - bimtek peningkatan kapasitas bidang pendidikan untuk guru 	
				Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan					
				- Persentase Jumlah Pendidik dan Tenaga Pendidikan yang dihitung, dipetakan, ditata dan didistribusikan di Satuan Pendidikan Dasar,	80,55 Persen	95,60 Persen			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				PAUD dan Non Formal/Kesetaraan					
				Program Pengendalian Perizinan Pendidikan					
				- Persentase ijin pendidikan yang diterbitkan	96 Persen	100 Persen	-	-	
2.	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas sarpras kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Nilai LAKIP perangkat daerah	75 Poin	67,36 Poin	penyajian data pada pelaporan LAKIP masih belum maksimal. Nilai LAKIP saat ini pada tahun 2023 dan beberapa triwulan selama 2024 (untuk komponen pelaporan berjalan)	Penilaian keseluruhan hasil di tahun 2024 belum dilaksanakan, dan proses pembuatan LAKIP 2024 masih berlangsung sesuai dengan ; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 21, Laporan disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada Gubernur/Bupati/Wa likota, paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. sehingga optimalisasi penyajian data akan diperbaiki kembali.	
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat					
				- Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 Persen	89 Persen	Banyak balita yang tidak lagi datang ke posyandu setelah mendapatkan imunisasi dasar lengkap	Mengoptimalkan peran tenaga kesehatan dalam mengedukasi ibu balita agar tetap membawa balita ke posyandu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan dilakukan kunjungan rumah nakes bersama kader	Saat ini sudah ada beberapa aplikasi pelaporan online dan <i>realtime</i> sehingga data yang disampaikan dapat secara langsung diterima dan Memberikan target untuk pelaksanaan skrining, melakukan follow up pelaksanaan skrining yang telah dilakukan serta memastikan semua kegiatan skrining kesehatan dilaporkan baik offline maupun online.
				- Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	100 Persen	75,5 Persen	Tidak semua lansia di wilayah tsb mendatangi posyandu atau puskesmas untuk mendapatkan skrining kesehatan	Mengoptimalkan pendataan lansia, edukasi pentingnya layanan kesehatan pada lansia dan kunjungan rumah bagi lansia yang tidak mampu mendatangi posyandu atau puskesmas	Dinas Kesehatan melakukan Monev data pada FKTP secara berkala untuk memastikan kegiatan skrining kesehatan terutama yang berbasis web, karena pelaporan terkadang masih terkendala jaringan internet.
				- Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Persen	81 Persen	Pada waktu pelaksanaan kegiatan penjangkaran anak sekolah ada beberapa siswa yang tidak hadir.	Mengoptimalkan peran tenaga kesehatan bekerjasama dengan pihak sekolah supaya seluruh siswa/siswinya bisa hadir dalam kegiatan penjangkaran anak sekolah	
				- Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100 Persen	81,36 Persen	Masih ada persalinan yang ditolong non nakes dan tidak dilakukan di faskes yang memenuhi standar	Mengoptimalkan peran tenakes dalam menjaring ibu hamil sehingga persalinan tidak lagi ditolong non nakes dan dilakukan diluar	2. Tahun 2024 untuk BMHP Skrining Deteksi Dini DM sudah terpenuhi. Pelaksanaan Skrining DM sudah terjalin kerjasama yang baik

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								faskes sehingga bayi baru lahir segera mendapatkan layanan kesehatan yang sesuai standar	antara Dinas Kesehatan dan Puskesmas
				- Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 Persen	77 Persen	Masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman dari ibu-ibu hamil pentingnya pemeriksaan kehamilan secara dini dan sesuai dengan standar.	Meningkatkan volume penyuluhan dan kelas ibu hamil di wilayah kerja pkm masing-masing.Membuat inovasi perduli ibu hamil setiap desa	3. Optimalisasi kegiatan promosi kesehatan UPTD Puskesmas di wilayah kabupaten barito timur untuk segera menindaklanjuti terkait desa yang PHBSnya belum terealisasi serta berkoordinasi dengan pihak kecamatan dimasing-masing wilayah agar bisa menyampaikan kepada kepala desa yang ada diwilayah tersebut khususnya desa yang belum melakukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
				- Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100 Persen	71,60 Persen	Kurang kesadaran kelompok berisiko untuk ikut pelaksanaan skrining oleh Dinas Kesehatan dan PUSKESMAS	Melaksanakan sosialisasi kembali pada kelompok berisiko dan pendekatan koordinasi kembali dengan pengelola tempat berisiko	
				- Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100 Persen	127 Persen	Pelayanan orang terduga TB sudah dilakukan dengan maksimal sehingga didapati hasil melebihi dari target yang ditetapkan.	Mempertahankan kualitas layanan TB agar seluruh pasien mendapat pelayanan TB sesuai standar.	
				- Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 Persen	78 Persen	Masih kurangnya informasi dan edukasi untuk anak2 sekolah,remaja,calon pengantin tentang kesehatan reproduksi.	Meningkatkan volume edukasi dan penyuluhan untuk anak2 sekolah,remaja calon pengantin.	4. Melaksanakan sosialisasi HIV pada kelompok berisiko. dan pelaksanaan Diklat untuk meningkatkan kompetensi tenaga Kesehatan
				- persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan	100 Persen	76 Persen	Tidak semua lansia di wilayahpuskesmas terkait untuk mendatangi posyandu atau puskesmas untuk mendapatkan skrining kesehatan. mereka berkunjung hanya pada saat sakit	Mengoptimalkan pendataan lansia, edukasi pentingnya layanan kesehatan pada lansia dan kunjungan rumah bagi lansia yang tidak mampu mendatangi	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								posyandu atau puskesmas. dan optimalisasi kunjungan rumah dan POSYANDU LANSIA di setiap Desa	
				- Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Persen	100,4 Persen	-	Secara garis besar untuk capaian SPM Hipertensi tahun 2024 sudah hampir tercapai secara keseluruhan. Namun masih ada beberapa Puskesmas yang terkendala dengan kesadaran masyarakat untuk melakukan cek kesehatan. Petugas Kesehatan melakukan Skrining PTM ke Instansi dan kelompok masyarakat. Telah dilakukan skrining Hipertensi ke Instansi - instansi pemerintah dan kelompok masyarakat untuk mempercepat pencapaian target SPM.	
				- Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100 Persen	100 Persen	-	RSUD TAMIANG LAYANG sudah terakreditasi.	
				- Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	100 Persen	100 Persen	-	Jumlah Tempat Tidur 123 TT, Jumlah Penduduk 118.021 orang, idealnya 1 TT	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								untuk setiap 1.000 penduduk artinya seluruh penduduk Tamiang Layang terpenuhi untuk kebutuhan TT di RS.	
				- Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	100 Persen	100 Persen	-	Jumlah Tempat Tidur 123 TT, Jumlah Penduduk 118.021 orang, idealnya 1 TT untuk setiap 1.000 penduduk artinya seluruh penduduk Tamiang Layang terpenuhi untuk kebutuhan TT di RS.	
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan					Telah melaksanakan pelatihan dalam rangka peningkatan teknis bidang kesehatan baik diklat maupun penambahan beasiswa daerah
				- Persentase SDM Kesehatan yang meningkat kompetensinya	100 Persen	97 Persen	Dari 838 Tenaga Kesehatan masih tersisa 24 orang yang jenjang pendidikannya masih SLTA (SPK) atau SEDERAJAT, sehingga dalam peningkatan kompetensi harus naik ke jenjang yang lebih tinggi (D3 dan atau S1).	Mendorong Tenaga Kesehatan untuk kembali melanjutkan Pendidikan yang lebih tinggi. bersama BKPSDM untuk melakukan kelas Jauh dalam upaya peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan.	
				Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman					
				- Persentase sarana kefarmasian yang berizin	100 Persen	100 Persen	-	Seluruh Apotek dan Toko obat di wilayah Kabupaten Barito Timur sudah semua memiliki Izin.	
				Program Pemberdayaan					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Masyarakat Bidang Kesehatan					
				- Cakupan Rumah Tangga yang ber PHBS	35 Persen	91,08 Persen	Tidak semua Rumah Tangga disetiap desa menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Secara capaian sudah melampaui target, namun upaya promotif tetap ditingkatkan dengan Melakukan kunjungan rumah melalui Edukasi/sosialisasi terkait pentingnya hidup bersih dan sehat khususnya dilingkungan keluarga dan masyarakat ,apa saja dampak positif dan negatif kalo kita menerapkan perilaku PHBS	
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pembangunan infrastruktur dasar masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
				- Nilai LAKIP perangkat daerah	B Poin	B Poin			
				Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)					
				- Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	60 Persen	39,25 Persen	Belum adanya data secara menyeluruh permukiman rawan banjir data base Sungai yang terupdate, sehingga realisasi yang ada merupakan rekapan total pekerjaan yang telah dilaksanakan sampai tahun 2024.	Peningkatan anggaran untuk pekerjaan pembuatan Data Base Sungai sehingga dalam menangani permukiman banjir bisa terntegrasi dalam tahun ke tahun.	Peningkatan anggaran untuk pekerjaan pembuatan Data Base Sungai sehingga dalam menangani banjir bisa terntegrasi dalam tahun ke tahun. Tindak lanjut akan diprogramkan dan di anggarkan di APBD

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Perubahan Tahun 2025.
				- Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	75 Persen	46,86 Persen	Belum adanya update data inventarisasi secara menyeluruh untuk Kawasan persawahan yang aktif sehingga pekerjaan yang ada dilaksanakan berdasarkan usulan dan rekomendasi.	Harus berkoordinasi dengan pihak Dinas Pertanian untuk melaksanakan inventarisasi menyeluruh yang aktif dan memerlukan jaringan irigasi.	Diprogramkan di Kegiatan E-Paksi tahun 2025 dan Survei Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) Tahun 2025
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum					
				- Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	87,35 Persen	86,61 Persen	Masih adanya rumah tangga yang belum mendapatkan akses terhadap air minum SPAM.	Akan melakukan pemetaan Kembali untuk memenuhi seluruh Rumah Tangga punya akses air bersih.	
				Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional					
				- Tingkat penyediaan Sarana Persampahan	70 Persen	76,92 Persen	Terdapat 3 Truck Amrol yang rusak berat, dan perlunya pemasangan jaringan listrik dan	Menganggarkan kegiatan dalam APBD Perubahan Tahun 2025	Ditindaklanjuti dengan melakukan evaluasi kebijakan pengelolaan Sarana dan Prasarana

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							peningkatan jalan di TPA Puri untuk menunjang kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Cipta Karya		Sampah baik dari sisi SDM, kurangnya anggaran yang disediakan, juga jumlah TPA dan TPS yang masih kurang memadai sehingga tidak mampu mengakomodir volume sampah.
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah					
				- Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	89 Persen	87,25 Persen	Kegiatan tidak dianggarkan dalam APBD murni	Menganggarkan kegiatan dalam APBD Perubahan	
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase					
				- Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	60 Persen	62,92 Persen	-	-	Tidak dapat melaksanakan karena program pemeliharaan drainase dihilangkan dari APBD 2025, tindak lanjut akan menganggarkan program pemeliharaan drainase melalui mekanisme Perencanaan di Renja Perubahan supaya bisa di programkan di APBD Perubahan tahun 2025.
				- Persentase Luasan daerah yang tergenang	60 Persen	25,81 Persen	Tidak adanya fasilitas pengaturan limpasan air hujan di saluran drainase di perkotaan tamiang layang dan ampah.	Membangun fasilitas pengaturan limpasan air hujan seperti penggunaan sistem pengumpulan air hujan dan juga	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								fasilitas resapan air hujan.	
				Program Pengembangan Permukiman					
				- Persentase Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah dalam kondisi baik	60 Persen	64,11 Persen	-	-	-
				Program Penataan Bangunan Gedung					
				- Rasio kepatuhan IMB	65 Persen	100 Persen			
				Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya					
				- Persentase luas kawasan yang peruntukannya sesuai dengan RDTR dan peraturan zonasi	60 Persen	100 Persen	-	-	-
				Program Penyelenggaraan Jalan					
				- Persentase jalan dalam kondisi mantap	67,68 Persen	41,85 Persen	Masih banyak jalan yang belum masuk kondisi mantap dan ada paket yang sempat tertunda.	Mempercepat proses lelang kegiatan fisik dan melakukan pengawasan pada kegiatan Fisik agar berjalan sesuai dengan time schedule (jadwal kegiatan)	
				Program Pengembangan Jasa Konstruksi					
				- Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	50 Persen	35,71 Persen	Anggaran yang ada di DPA untuk kegiatan pelatihan tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat	Sudah dilakukan Koordinasi dengan Balai Jasa Konstruksi V Wilayah Banjarmasin,	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							kompetensi waktu pelaksanaannya 3 hari berdasarkan regulasi Peraturan Pemerintah No. 50/2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) waktu pelaksanaan dilaksanakan selama 5 Hari.	dengan solusi perlu dianggarkan untuk kegiatan yang dimaksud dengan waktu pelaksanaan selama 5 hari dan biaya assesor. Dan Telah dilaksanakan Sosialisasi Implementasi P3DN, Pengelolaan Katalog, Strategi Pelaksanaan E-Purchasing pekerjaan konstruksi.	
				- Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100 Persen	100 Persen	-	-	-
				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang					
				- Ketaatan terhadap RDTRK	70 Persen	100 Persen	-	-	-
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pembangunan lingkungan pemukiman dan perumahan yang sehat	Program Pengembangan Perumahan					
				- Tingkat Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	50 Persen	0 Persen	Belum ada SK Kepala Daerah Terkait Kawasan Rawan Bencana di Kab.Barito Timur	Melakukan Koordinasi dengan BPBD & DAMKAR Kab. Barito Timur terkait Data Wilayah Rawan Bencana, sehingga bisa tepat sasaran	
				- Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi	50 Persen	0 Persen	Belum ada SK Kepala Daerah Terkait Kawasan		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota			Rawan Bencana di Kab.Barito Timur		
				Program Kawasan Permukiman					
				- Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	74 Persen	51,28 Persen	Masih terdapat Batasan penyelenggaraan kegiatan.	Meningkatkan anggaran pada APBD perubahan 2025	
				Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional					
				- Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	80 Persen	76,47 Persen	Masih belum optimal PSU rumah tangga di Kab. Barito Timur	Meningkatkan anggaran pada APBD perubahan 2025	Pada tahun 2025 sudah di programkan di program Pengembangan Perumahan dan akan dilaksanakan pertemuan rutin tiap triwulan dengan pengembang perumahan resmi yang terdata di REI (Real Estate Indonesia) Kalimantan Tengah.
				Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh					
				- Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	35 Persen	9,2 Persen	Masih terdapat Batasan penyelenggaraan kegiatan.	Meningkatkan anggaran pada APBD perubahan 2025	Sudah di programkan di Program Kawasan Permukiman dengan Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dan akan segera dilaksanakan pada tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	Peningkatan pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Nilai LAKIP perangkat daerah	70 Poin	65,51 Poin	Ada beberapa indikator kegiatan yang tidak terpenuhi dari masing-masing program kegiatan Trantibum dan program kegiatan Perda	Meningkatkan kinerja aparaturnya Satpol PP dalam upaya memenuhi target indikator yang telah ditetapkan dalam upaya pelayanan kepada Masyarakat di tahun 2025	
				Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					Program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat sudah ditingkatkan secara maksimal.
				- Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100 Persen	81,76 Persen	Luasnya Jangkauan dan cakupan wilayah dengan 101 Desa, 3 Kelurahan, 10 Kecamatan di kabupaten yang cukup luas dengan penduduk tidak dibarengi dengan jumlah, kemampuan Anggota-terampil SatpolPP yang terbatas dan kurangnya sarana prasarana yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja, karena sarana sudah mulai menua	Optimalkan anggota SatpolPP dan sarana prasarana yang ada dan dengan dana pemeliharaan yang ada, Anggota melakukan patroli rutin 1x24 jam pada titik-titik rawan PEKAT (Penyakit Masyarakat), Ikut serta dalam pengamanan dan patroli gabungan-bersama ;TNI dan Polri dimomen kegiatan biasa dan resmi Pemerintah kab. Barito Timur	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 Persen	81,68 Persen	Belum maksimalnya koordinasi dan sosialisasi antar OPD teknis pemilik PERDA dan PERKADA kepada masyarakat dan OPD lainnya di Pemerintahan Barito Timur	Memaksimalkan koordinasi, Pendampingan dan sosialisasi OPD pemegang PERDA dan PERKADA kepada Masyarakat dan OPD lainnya	
6.		Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Peningkatan pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
				- Nilai LAKIP perangkat daerah	85 Poin	88,90 Poin	-	-	
				Program Penanggulangan Bencana					Program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat sudah ditingkatkan secara maksimal.
				- Persentase penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	78 Persen	97,95 Persen	Kecepatan dan ketepatan penyampaian informasi tidak maksimal karena belum terorganisirnya saluran penyampaian informasi yang informatif, akurat, handal dan terpercaya	Pembentukan Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) tingkat kabupaten	Penetapan kawasan rawan bencana didasarkan pada Kajian Resiko Bencana (KRB). Untuk penyusunan dokumen KRB dimaksud telah dianggarkan dalam DPA BPBDDAMKAR Tahun 2025 sebesar Rp. 300.000.000 dan ditargetkan telah selesai paling lambat pada bulan Agustus 2025
				- Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan	78 Persen	94,49 persen	Sumber informasi yang terbatas dan kualitas SDM pelaku penanggulangan bencana (PB) yang belum memadai	Peningkatan hubungan antar lembaga dan peningkatan kompetensi pelaku PB melewati	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				kesiap-siagaan terhadap bencana				pelatihan dan sertifikasi kompetensi	
				- Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	78 Persen	61,23 Persen	Beberapa kegiatan belum maksimal dilaksanakan berdasarkan jenis ancaman bencana	Meningkatkan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesuai jenis ancaman bencana	Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana didasarkan pada dokumen Rencana Kontijensi (RENKON) yang merupakan turunan dan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB). Untuk Penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi, kepada Pemerintah Daerah diusulkan jumlah kebutuhan biaya sebesar Rp. 250.000.000 dan diharapkan dapat dipenuhi pada tahun anggaran 2026
				Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran					
				- Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	70 Persen	99,94 Persen	Beberapa kegiatan belum maksimal dilaksanakan karena berdasarkan jenis ancaman kebakaran dan non kebakaran	Meningkatkan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Untuk mewujudkan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana bagi masyarakat korban bencana didasarkan pada dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang merupakan turunan dan bagian tidak

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	120 Menit	22,035 menit	Terkendala jarak tempuh mobilisasi ke TKP.	Diupayakan pengadaan Posko penanganan kebakaran di 10 Kecamatan	terpisahkan dari dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB). Untuk Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), kepada Pemerintah Daerah diusulkan jumlah kebutuhan biaya sebesar Rp. 280.000.000 dan diharapkan dapat dipenuhi pada tahun anggaran 2026
7.	Sosial	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial	Pemberian jaminan perlindungan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Nilai LAKIP perangkat daerah	 70 Poin	 69,56 Poin	 perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja	Menindaklanjuti rekomendasi pada Laporan Hasil Evaluasi SAKIP DPMDSos oleh Inspektorat Kabupaten Barito Timur-IRBAN II	
				Program Pemberdayaan Sosial - Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	 50 Porsen	 27,10 Porsen	Pada tahun 2024 terjadi pergantian PSKS yang dalam hal ini Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) setelah dilantiknya Kepala Desa yang baru pada tahun 2023 (Jumlah PSKS	DPMDSos melalui bidang sosial selaku pembina teknis dari PSKS (TKSK, PSM, Pendamping PKH, TAGANA dan Karang Taruna) akan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							<p>sebanyak 214 orang yang terdiri dari Tenaga Kerja Sosial Kecamatan sebanyak 10 orang; Pekerja Sosial Masyarakat sebanyak 106 orang; Taruna Siaga Bencana sebanyak 35 orang; Pendamping Program Keluarga Harapan sebanyak 13 orang; dan Karang Taruna Kabupaten dan Kecamatan sebanyak 50 orang). PSKS yang sebelumnya telah ditingkatkan kapasitasnya banyak yang diganti dengan yang baru sehingga perlu dilakukan pelatihan kembali. Perhitungan realisasi diperoleh dari : jumlah PSKS yang ditingkatkan kapasitasnya dibagi jumlah PSKS yang ada dikali 100 persen ($58/214 \times 100 = 27,10\%$)</p>	melakukan pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas Potensi dan Sumberdaya Kesejahteraan Sosial (PSKS)	
				Program Rehabilitasi Sosial					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dilayani	50 Persen	6,88 Persen	Perlu penambahan anggaran untuk meningkatkan pelayanan kepada PPKS. Peningkatan kemampuan dan jumlah SDM juga diperlukan, mengingat ada kasus yang hanya bisa ditangani oleh SDM yang bersertifikat dan terlatih dari lembaga resmi. Perhitungan realisasi diperoleh dari jumlah PPKS yang dilayani dibagi jumlah PPKS yang ada dikali 100% (41/596 x 100%)	Update data PPKS akan dilaksanakan ditahun 2025, hal ini karena anggaran tahun 2024 tidak mencukupi untuk melakukan pendataan secara maksimal. Proses penambahan SDM sudah dilakukan dengan cara permintaan formasi CPNS dan permintaan pendamping Rehabilitasi Sosial ke Dinas Sosial Provinsi.	1). Memasukkan penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti kedalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai dasar untuk mendapatkan bantuan sosial dari Kemensos RI; (2). Tahun 2025 akan membuat Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai penyandang disabilitas
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial					
				- Persentase Keakuratan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	85 Persen	52,75 Persen	Masih banyak Desa yang belum melakukan verifikasi data serta melakukan Musyawarah Desa Khusus yang membahas tentang Bantuan Sosial serta masih minimnya kuantitas dan kualitas SDM Bidang Sosial dalam melakukan pendataan DTKS. Perhitungan realisasi diperoleh dari jumlah hasil verifikasi usulan masyarakat yang layak masuk DTKS dibagi jumlah usulan masyarakat untuk masuk ke DTKS yang ada dikali 100% (134/254x 100%).	Melakukan pendampingan seluruh desa agar melaksanakan Musdessus, lebih selektif dan tepat sasaran dalam mengeluarkan Surat Tanda Tidak Mampu (SKTM) serta mengikuti pelatihan peningkatan SDM Bidang Sosial dalam pendataan DTKS.	Pendataan DTKS harus dilakukan dengan seksama, karena apabila datanya bertambah maka akan menjadi salah satu penyumbang terbesar data kemiskinan di suatu daerah. Dan Pendataan DTKS memang dilakukan secara online namun tetap dalam pengawasan DPMDSos Bidang Sosial selaku verifikator yang tetap melaksanakan pendataan tetap dalam tata cara yang telah ditentukan. Dan pihak

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Desa juga berperan besar dalam pendataan tersebut dengan melakukan Musyawarah Desa yang dilakukan secara berkala sebagai tindak lanjut untuk setiap keputusan yang berkenaan dengan persentase fakir miskin di desa tersebut.
				Program Penanganan Bencana					
				- Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	85 Persen	100 Persen	-	-	-
				Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan					
				- Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	70 Persen	40 Persen	Pengelolaan makam pahlawan hanya dapat dilakukan pada 2 item (Pembersihan dan penerangan) dari 5 item pengelolaan Taman makam Pahlawan yaitu : (1). Pembersihan lingkungan makam; (2). Pengecatan; (3). Rehab Nisan; (4). Adanya petugas kebersihan; dan (5). Penerangan;	Tahun 2025 telah dianggarkan untuk pengecatan dan rehab nisan	-

Analisa pelaksanaan Urusan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Urusan Pendidikan

➤ **Dinas Pendidikan**

Telah dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Pengelolaan Pendidikan. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar; Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud); Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

a. Masalah yang dihadapi

- Isi LKIP belum sepenuhnya mengacu pada Permenpan 53/2014.
- Tim Penanggulangan Pencegahan Kekerasan di Satuan Pendidikan belum berjalan dan di Kabupaten belum berjalan optimal.
- Layanan pengaduan di tingkat kabupaten belum berjalan optimal.
- Kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang PAUD masih kurang optimal karena dianggap belum wajib.
- Sebagian anak sudah bekerja dan tidak mau melanjutkan sekolah.
- BAN - PDM Provinsi Kalimantan Tengah hanya memprioritaskan untuk satpen yang belum akreditasi sedangkan untuk yang terakreditasi atau yang masih berstatus akreditasi C belum bisa difasilitasi.
- Kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang PAUD masih kurang optimal karena dianggap belum wajib

b. Solusi

- Dalam penyusunan LAKIP mengacu pada Permenpan 53/2014 dan LAKIP dipublikasikan tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan.
- Melakukan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah.
- Pengembangan konten digital untuk Pendidikan.
- Melaksanakan sosialisasi pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi.

- Pelaksanaan bimtek peningkatan kapasitas pendidikan terkait pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi
- Pembentukan Tim Penanggulangan Pencegahan Kekerasan (TPPK) di Satuan Pendidikan dan satgas TPPK di Kabupaten.
- Memberikan pembinaan kepada satuan pendidikan / peserta didik bahwa untuk memperoleh ijazah harus mengikuti ujian kesetaraan dan uji kesetaraan.
- Pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana dan Utilitas PAUD.

2. Urusan Kesehatan dan RSUD

➤ Dinas Kesehatan

Telah dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat; Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan; Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman; Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk Ukm dan Ukp Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota; Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm dan Ukp Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi; Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota; Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Untuk Ukp dan Ukm di Wilayah Kabupaten/Kota; Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (Tpm) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (Dam); Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk

Makanan Minuman Industri Rumah Tangga; Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

a. Masalah yang dihadapi

- Penyajian data pada pelaporan LAKIP masih belum maksimal. Nilai LAKIP saat ini pada tahun 2023 dan beberapa triwulan selama 2024 (untuk komponen pelaporan berjalan).
- Banyak balita yang tidak lagi datang ke posyandu setelah mendapatkan imunisasi dasar lengkap.
- Tidak semua lansia di wilayah masing-masing mendatangi posyandu atau puskesmas untuk mendapatkan skrining kesehatan.
- Pada waktu pelaksanaan kegiatan penjangkaran anak sekolah ada beberapa siswa yang tidak hadir untuk pelayanan Kesehatan sesuai standar.
- Masih ada persalinan yang ditolong non nakes dan tidak dilakukan di faskes yang memenuhi standar.
- Masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman dari ibu-ibu hamil pentingnya pemeriksaan kehamilan secara dini dan sesuai dengan standar.
- Kurang kesadaran kelompok berisiko HIV untuk ikut pelaksanaan skrining oleh Dinas Kesehatan dan PUSKESMAS.
- Masih kurangnya informasi dan edukasi untuk anak-anak sekolah, remaja, calon pengantin tentang kesehatan reproduksi.
- Dari 838 Tenaga Kesehatan masih tersisa 24 orang yang jenjang pendidikannya masih SLTA (SPK) atau SEDERAJAT, sehingga dalam peningkatan kompetensi harus naik ke jenjang yang lebih tinggi (D3 dan atau S1).
- Tidak semua Rumah Tangga disetiap desa menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

b. Solusi

- Penilaian keseluruhan hasil di tahun 2024 belum dilaksanakan, dan proses pembuatan LAKIP 2024 masih berlangsung sesuai dengan ; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 21.

- Mengoptimalkan peran tenaga kesehatan dalam mengedukasi ibu balita agar tetap membawa balita ke posyandu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan dilakukan kunjungan rumah nakes bersama kader.
- Mengoptimalkan pendataan lansia, edukasi pentingnya layanan kesehatan pada lansia dan kunjungan rumah bagi lansia yang tidak mampu mendatangi posyandu atau puskesmas.
- Mengoptimalkan peran tenaga kesehatan bekerjasama dengan pihak sekolah supaya seluruh siswa/siswinya bisa berhadir dalam kegiatan penjangkaran anak sekolah.
- Mengoptimalkan peran tenakes dalam menjaring ibu hamil sehingga persalinan tidak lagi ditolong non nakes dan dilakukan diluar faskes sehingga bayi baru lahir segera mendapatkan layanan kesehatan yang sesuai standar.
- Meningkatkan volume penyuluhan dan kelas ibu hamil di wilayah kerja pkm masing-masing. Membuat inovasi perduli ibu hamil setiap desa.
- Melaksanakan sosialisasi kembali pada kelompok berisiko HIV dan pendekatan koordinasi kembali dengan pengelola tempat berisiko.
- Mempertahankan kualitas layanan TB agar seluruh pasien mendapat pelayanan TB sesuai standar.
- Meningkatkan volume edukasi dan penyuluhan untuk anak2 sekolah, remaja calon pengantin.
- Mendorong Tenaga Kesehatan untuk kembali melanjutkan Pendidikan yang lebih tinggi. bersama BKPSDM untuk melakukan kelas Jauh dalam upaya peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan.
- upaya promotif ditingkatkan dengan Melakukan kunjungan rumah melalui Edukasi/sosialisasi terkait pentingnya hidup bersih dan sehat khususnya dilingkungan keluarga dan masyarakat ,apa saja dampak positif dan negatif kalo kita menerapkan perilaku PHBS.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

➤ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Telah dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda); Program

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional; Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah; Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase; Program Pengembangan Permukiman; Program Penataan Bangunan Gedung; Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya; Program Penyelenggaraan Jalan; Program Pengembangan Jasa Konstruksi. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pengelolaan Sda dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (Ws) Dalam (Satu) Daerah Kabupaten/Kota; Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya Dibawah Ha Dalam (Satu) Daerah Kabupaten/Kota; Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) di Daerah Kabupaten/Kota; Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota; Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota; Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota; Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota; Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Imb) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung; Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota; Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota; Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi.

a. Masalah yang dihadapi

- Belum adanya data secara menyeluruh permukiman rawan banjir data base Sungai yang terupdate, sehingga realisasi yang ada merupakan rekapitan total pekerjaan yang telah dilaksanakan sampai tahun 2024..
- Belum adanya update data inventarisasi secara menyeluruh untuk Kawasan persawahan yang aktif sehingga pekerjaan yang ada dilaksanakan berdasarkan usulan dan rekomendasi.
- Masih adanya rumah tangga yang belum mendapatkan akses terhadap air minum SPAM.

- Kurangnya sarana persampahan.
- Tidak adanya fasilitas pengaturan limpasan air hujan di saluran drainase di perkotaan tamiang layang dan ampah.
- Masih banyak jalan yang belum masuk kondisi mantap dan ada paket yang sempat tertunda.
- Sebagian kegiatan masih belum ada teranggarkan dalam APBD murni.

b. Solusi

- Peningkatan anggaran untuk pekerjaan pembuatan Data Base Sungai sehingga dalam menangani permukiman banjir bisa terntegrasi dalam tahun ke tahun.
- Berkoordinasi dengan pihak Dinas Pertanian untuk melaksanakan inventarisasi menyeluruh persawahan yang aktif dan memerlukan jaringan irigasi..
- Melakukan pemetaan Kembali untuk memenuhi seluruh Rumah Tangga punya akses air bersih. Membangun fasilitas pengaturan limpasan air hujan seperti penggunaan sistem pengumpulan air hujan dan juga fasilitas resapan air hujan.
- Mempercepat proses lelang kegiatan fisik dan melakukan pengawasan pada kegiatan Fisik agar berjalan sesuai dengan time schedule (jadwal kegiatan).
- Sudah dilakukan Koordinasi dengan Balai Jasa Konstruksi V Wilayah Banjarmasin, dengan solusi perlu dianggarkan untuk kegiatan yang dimaksud dengan waktu pelaksanaan selama 5 hari dan biaya assesor. Dan Telah dilaksanakan Sosialisasi Implementasi P3DN, Pengelolaan Katalog, Strategi Pelaksanaan E-Purchasing pekerjaan konstruksi.

4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

➤ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Telah dilaksanakan Program Kawasan Permukiman; Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (Psu); Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kegiatan

yang dilaksanakan yaitu Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota; Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah (Sepuluh) Ha; Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota; Urusan Penyelenggaraan Psu Perumahan; Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang Atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah Serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Psu Tingkat Kemampuan Kecil.

a. Masalah yang dihadapi

- Belum ada SK Kepala Daerah Terkait Kawasan Rawan Bencana di Kab.Barito Timur.
- Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan karena masih dalam proses pembaharuan data pengembang.
- Masih belum optimal PSU rumah tangga di Kab. Barito Timur.
- Masih belum tersedianya rumah layak huni bagi Masyarakat korban bencana banjir, longsor, kebakaran.

b. Solusi

- Melakukan Koordinasi dengan BPBD Damkar Kab. Barito Timur terkait Data Wilayah Rawan Bencana, sehingga bisa tepat sasaran.
- Mempercepat proses pendataan pengembang.
- Melakukan Koordinasi dengan BPBD Damkar Kab. Barito Timur terkait SK Kepala Daerah tentang Kawasan rawan bencana sehingga dapat dilakukan penanganan terhadap korban bencana.

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

➤ **Satuan Polisi Pamong Praja**

Telah dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dalam (Satu) Daerah Kabupaten/Kota; Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota.

a. Masalah yang dihadapi

- Terbatas anggota terampil satopolpp dan kurangnya sarana prasarana yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja, karena sarana sudah mulai menua.
- Belum maksimalnya koordinasi dan sosialisasi antar PD teknis pemilik PERDA dan PERKADA kepada masyarakat dan PD lainnya.

b. Solusi

- Luasnya Jangkauan dan cakupan wilayah dengan 101 Desa,3 Kelurahan, 10 Kecamatan di kabupaten yang cukup luas dengan penduduk tidak dibarengi dengan jumlah, kemampuan Anggota-terampil SatpolPP yang terbatas dan kurangnya sarana prasarana yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja, karena sarana sudah mulai menua.
- Belum maksimalnya koordinasi dan sosialisasi antar OPD teknis pemilik PERDA dan PERKADA kepada masyarakat dan OPD lainnya di Pemerintahan Barito Timur.

➤ **Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran**

Telah dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Penanggulangan Bencana; Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota; Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana; Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana; Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana; Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota.

a. Masalah yang dihadapi

- Beberapa kegiatan belum maksimal dilaksanakan berdasarkan jenis ancaman bencana.
- Terkendala jarak tempuh mobilisasi ke TKP yang cukup jauh.

b. Solusi

- Meningkatkan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesuai jenis ancaman bencana.
- Diupayakan pengadaan Posko penanganan kebakaran di 10 Kecamatan.

➤ **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial**

Telah dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Pemberdayaan Sosial; Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Progra Penanganan Bencana dan Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota; Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial; Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial; Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar; Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota; Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota; Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota; Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.

a. Masalah yang dihadapi

- Perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru

- PSKS yang sebelumnya telah ditingkatkan kapasitasnya banyak yang diganti dengan yang baru sehingga perlu dilakukan pelatihan kembali. .
- Perlu penambahan anggaran untuk meningkatkan pelayanan kepada PPKS.
- Masih banyak Desa yang belum melakukan verifikasi data serta melakukan Musyawarah Desa Khusus yang membahas tentang Bantuan Sosial serta masih minimnya kuantitas dan kualitas SDM Bidang Sosial dalam melakukan pendataan DTKS
- Pengelolaan makam pahlawan hanya dapat dilakukan pada 2 item (Pembersihan dan penerangan) dari 5 item pengelolaan Taman makam Pahlawan yaitu : (1). Pembersihan lingkungan makam; (2). Pengecatan; (3). Rehab Nisan; (4). Adanya petugas kebersihan; dan (5). Penerangan;

b. Solusi

- Menindaklanjuti rekomendasi pada Laporan Hasil Evaluasi SAKIP DPMDSos oleh Inspektorat Kabupaten Barito Timur-IRBAN II.
- DPMDSos melalui bidang sosial selaku pembina teknis dari PSKS (TKSK, PSM, Pendamping PKH, TAGANA dan Karang Taruna) akan melakukan pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas Potensi dan Sumberdaya Kesejahteraan Sosial (PSKS).
- PPKS akan dilaksanakan ditahun 2025, hal ini karena anggaran tahun 2024 tidak mencukupi untuk melakukan pendataan secara maksimal. Proses penambahan SDM sudah dilakukan dengan cara permintaan formasi CPNS dan permintaan pendamping Rehabilitasi Sosial ke Dinas Sosial Provinsi.
- Melakukan pendampingan seluruh desa agar melaksanakan Musdessus, lebih selektif dan tepat sasaran dalam mengeluarkan Surat Tanda Tidak Mampu (SKTM) serta mengikuti pelatihan peningkatan SDM Bidang Sosial dalam pendataan DTKS.
- Tahun 2025 telah dianggarkan untuk pengecatan dan rehab nisan

B. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Non Dasar

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Non Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olah raga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan.

Rincian realisasi anggaran Urusan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan non dasar dapat dilihat pada Lampiran 1 dengan diuraikan dalam Tabel 3.1.2 berikut:

Tabel.3.1.2
Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Non Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
				- Nilai LAKIP perangkat daerah	70 Poin	57,51 Poin	- Belum adanya teknologi informasi yang terintegrasi untuk mempermudah proses evaluasi dan monitoring atas capaian kinerja secara berkala - Kurangnya kuantitas, kualitas dan kapasitas SDM pada bagian Perencanaan	- Memberi masukan pada stake holder dan pimpinan untuk penyediaan aplikasi berbasis teknologi informasi untuk monev SAKIP - Meningkatkan kuantitas, kualitas dan kapasitas SDM pd bagian Perencanaan melalui penambahan personil/pegawai, dan juga intensifikasi pendidikan dan pelatihan urusan perencanaan dan pelaporan	
				Program Perencanaan Tenaga Kerja					
				- Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	28 Persen	80 Persen	-	RTKD 2024-2029 sudah dalam proses penyusunan dengan progress 80% dan akan terbit tahun 2025	
			Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja					
				- Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat	5 Persen	96,15 Persen	Dari 26 tenaga kerja/pencari kerja yg dilatih, 25 orang lulus dg		Telah dilakukan permintaan data bersama-sama

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							sertifikat kelulusan pelatihan dan 1 org tidak lulus		bidang Hubungan Industrial sekaligus pembinaan namun belum maksimal karena perusahaan masih menganggap bahwa tenaga kerja potensial (yang memiliki keahlian sertifikasi tertentu) yang mereka miliki adalah hal yang rahasia
									Sudah dilaksanakan penyebaran informasi terkait pembukaan lapangan pekerjaan melalui media sosial (grup2 WA), Website Disnakertransperi n Kab. Barito Timur belum maksimal dikarenakan kekurangan SDM
			Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja					
				- Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar	10 Persen	15,98 Persen	Dari 1383 pencari kerja yg terdaftar, ada 221 orang dilaporkan telah bekerja/ditempatkan	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten					
			Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Program Hubungan Industrial					
				- Tingkat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan	100 Persen	100 Persen	Dari 40 kasus yg dilaporkan/tercatat, 5 kasus diselesaikan melalui bipartit dan 35 kasus dapat diselesaikan oleh perusahaan	-	
				- Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenaga - kerjaan)	23 Persen	97,78 Persen	Dari 45 perusahaan yg terdaftar, ada 44 perusahaan yg melapor dan menerapkan tata kelola kerja yg layak. Kurangnya penindakan dari pengawas Provinsi untuk perusahaan yang belum memenuhi syarat kerja	-	-
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Peningkatan Peran dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dibuat
				- Nilai LAKIP perangkat daerah	70 Poin	68,01 poin	Masih belum sesuai indikator sasaran dan tujuan renstra dengan pohon kinerja dan ada beberapa item yang belum terpenuhi	Dikakukan perbaikan indikator sasaran dan tujuan pada renstra skpd	
				Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- Persentase ARG pada belanja langsung APBD	12 Persen	0 persen	Capaian masih dalam tahap rekapitulasi	Akan dipublikasikan hasil capaian 2024	
				- Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	53,28 Persen	61,71 persen	-	-	
			Penguatan Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak-hak Anak	Program Perlindungan Perempuan					
				- Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	88,05 Persen	0,0120 29 persen	Masih banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan yang belum dilaporkan karena kurangnya pemahaman masyarakat atas jenis tindak kekerasan terhadap perempuan, serta masyarakat masih enggan melaporkan kasus kekerasan karena dianggap aib.	Memperkuat pencegahan KtP/A , Pelayanan dan Perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pembentukan UPTD PPA Kabupaten Barito Timur yang dilengkapi dengan SDM Terlatih.	
			Peningkatan Keluarga yang Sehat dan Sejahtera	Program Peningkatan Kualitas Keluarga					
				- Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang dibina	100 Persen	100 persen	-	-	
				Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- Persentase Data Gender dan Anak yang dikelola secara uptodate	100 Persen	100 persen	-	-	
				Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)					
				- Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang dibina	100 Persen	78,95 persen	Ada beberapa Desa belum membentuk Forum Anak Daerah (FAD) di Tingkat Desa	Akan melengkapi, dan akan turun langsung ke Desa-desa yang belum membentuk Forum Anak Daerah (FAD) di Tingkat Desa.	
				Program Perlindungan Khusus Anak					
				- Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100 Persen	100 persen	1. Masih banyaknya kasus kekerasan terhadap anak yang belum melaporkan karena kurangnya pemahaman masyarakat atas jenis tindak kekerasan terhadap anak, serta masyarakat masih enggan melaporkan kasus kekerasan karena dianggap aib; 2) Belum adanya rumah aman bagi korban kekerasan	1) Memperkuat pencegahan KtP/A , Pelayanan dan Perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pembentukan UPTD PPA Kabupaten Baritpo Timur yang dilengkapi dengan SDM Terlatih; 2) Tersedianya rumah aman dan SDM rumah aman	
3.	Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Peningkatan Produksi dan Produktivitas sektor pertanian	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan					
				- Tingkat penyediaan Infrastruktur Pendukung	100 Persen	0 Persen	Tidak ada infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Pembangunan Gudang cadangan pangan	Kerjasama dengan Kantor Cabang Bulog Barito Selatan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kemandirian Pangan					sebagai penyedia beras
				Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat					
				- Persentase ketersediaan pangan (cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	100 Persen	0 Persen	Peraturan Daerah tentang Cadangan Pangan Daerah sedang dalam pembahasan DPRD	Pembuatan Peraturan Daerah tentang Cadangan Pangan pada Tahun 2025	Peraturan Daerah Dalam Proses Pengerjaan di Bagian Hukum
				- Ketersediaan energi perkapita	100 Persen	116,38 Persen	Masyarakat kurang mengkonsumsi umbi-umbian	Sosialisasi Konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	
				- Ketersediaan protein perkapita	100 Persen	118,30 Persen	Masyarakat kurang mengkonsumsi buah biji berminyak, kacang-kacangan, sayur dan buah	Sosialisasi Konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	
				Program Penanganan Kerawanan Pangan					- Pembangunan pertanian dan pedesaan
				- Persentase desa rawan pangan	100 Persen	93 Persen	- Kurangnya lahan pertanian -Kebanyakan petani menanam padi ladang hanya untuk konsumsi sendiri sedangkan permintaan dari luar Kabupaten Barito Timur banyak seperti beras gilai dan Talun - Banyaknya lahan yang tidak dimanfaatkan untuk ditanami tanaman yang bermanfaat	Upaya mengatasi masalah ketahanan pangan dilakukan melalui pengembangan lahan pertanian, peningkatan produksi, penanganan dampak perubahan iklim, promosi keragaman serta pengurangan pemborosan pangan, penguatan koordinasi pemerintah, pengadaan dan distribusi bantuan pangan, pengawasan gizi, pembangunan infrastruktur, kemudahan akses pangan, serta	- Peningkatan akses pangan - Perbaikan infrastruktur - Peningkatan fasilitas dan tenaga kesehatan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								penyediaan air bersih dan tenaga kesehatan.	
				Program Pengawasan Keamanan Pangan					
				- Persentase Pangan Segar yang Aman Dikonsumsi	100 Persen	74 Persen	alat uji rapid test dan biaya operasional Pengawasan keamanan pangan terbatas sehingga tidak semua kecamatan bisa dilakukan pengawasan	Penambahan anggaran untuk kegiatan Pengawasan keamanan pangan pada pangan segar	Sudah di anggarkan Dana Untuk Pengadaan Alat Penguji
4.	Pertanahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman		Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman					
				- Tingkat Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	20 Persen	20 Persen	-	-	-
				Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh					
				- Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	20 Persen	36,52 Persen	-	-	-
5.	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Penerapan sistem pengawasan secara konsisten	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			terhadap kerusakan lingkungan hidup	- Nilai LAKIP perangkat daerah	70 Poin	68,26 Poin	Perlu Diklat Untuk Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian	Mengikuti diklat Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian		
				Program Perencanaan Lingkungan Hidup						
				- Persentase rencana lingkungan hidup yang disusun dan ditetapkan	100 Persen	100 Persen	Ketersediaan Data, Proses Validasi dan Verifikasi Perencanaan Lingkungan Hidup ke DLH Provinsi maupun Kementerian Lingkungan Hidup	Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait data baik dalam wilayah Kabupaten maupun di luar wilayah kabupaten, tersedianya bank data		
				Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup						
				- Tingkat pengendalian terhadap pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	60 Persen	60 Persen	Ketersediaan sarana-prasarana, perlunya kolaborasi antar instansi terkait, ketersediaan data, perlunya Diklat untuk peningkatan SDM dan Masyarakat	Peningkatan sarana-prasarana pendukung kegiatan, Peningkatan Koordinasi dan Kolaborasi antar instansi terkait		
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)						
				- Persentase Keanekaragaman Hayati dan Konservasi Sumber Daya Alam/Lingkungan Hidup yang dikelola	50 Persen	50 Persen	-	-		
				Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)						

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- Tingkat Pengawasan dan Pemantauan serta Verifikasi dan Kepatuhan Administrasi Pengelolaan Limbah B3	80 Persen	75 Persen	Terjadi perubahan Regulasi (PP dan Kepmen)	Perlu adanya Sosialisasi Sistem Tanggap Darurat LB3 dan Bintek LB3	
				Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)					
				- Tingkat Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab	52,2 Persen	92,86 Persen	-	-	Melaksanakan pengawasan aktif dan pasif ke perusahaan dan pelaku usaha
			Penerapan sistem pengawasan secara konsisten terhadap kerusakan lingkungan hidup	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH					
				- Jumlah MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH yang diakui	1 Obyek	0 Obyek	Belum tersedia anggaran, belum ditetapkannya PERDA MHA	Dilaksanakannya sosialisasi di 2 calon Desa MHA yaitu Desa Juru Banu, Kecamatan Paju Epat dan Desa Awang, Kecamatan Dusun Tengah	
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- Persentase masyarakat yang mendapatkan peningkatan pendidikan lingkungan hidup melalui pelaksanaan Gerakan PBLHS	50 Persen	0 Persen	Belum tersedia anggaran, perlunya bimtek, belum ditetapkannya Calon Sekolah Adiwiyata	Perlu dilaksanakannya sosialisasi ke setiap sekolah calon Adiwiyata, Perlunya bimtek	
				Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat					
				- Persentase masyarakat yang mendapatkan Penghargaan Lingkungan Hidup	50 Persen	0 Persen	Belum tersedia anggaran, perlunya bimtek, belum ditetapkannya Calon Sekolah Adiwiyata	Perlu dilaksanakannya sosialisasi ke setiap sekolah calon Adiwiyata, Perlunya bimtek	
				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup					
				- Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang ditangani	70 Persen	100 Persen	-	-	
				Program Pengelolaan Persampahan					
				- Persentase sampah yang tertangani	93 Persen	26,36 Persen	Minimnya Regulasi dan Fasilitas Pengolahan Sampah	Merancang Perbub Pembatasan Sampah Plastik dan pembangunan fasilitas pengolahan sampah seperti TPST dan TPA Sanitary Landfill	
6.		Dinas Kependudukan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	dan Pencatatan Sipil		Daerah Kabupaten/Kota					
				- Nilai LAKIP perangkat daerah	93,75 Poin	94,94 Poin	-	-	'1. sudah melaksanakan pengadaan dan perbaikan alat pendukung pelayanan ADMINDUK 2. Sudah melaksanakan jemput bola ke kecamatan dan desa- desa
				Program Pendaftaran Penduduk					
				- Tingkat Perekaman KTP elektronik	96,75 Persen	99.25 Persen	-	-	-
				- Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	50 Persen	64 Persen	-	-	Pengadaan Alat Cetak KIA Telah Terlaksana. siap dilaksanakan di Tahun 2025
				Program Pencatatan Sipil					
				- Tingkat Kepemilikan akta kelahiran	100 Persen	100 Persen	-	-	-
				- Rasio pasangan berakte nikah	60 Persen	100 Persen	-	-	-
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					
				- Persentase informasi administrasi kependudukan yang dikelola	80 Persen	85 Persen	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Program Pengelolaan Profil Kependudukan					
				- Persentase Profil Kependudukan yang disediakan secara tepat waktu	100 Persen	100 Persen	-	-	-
7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
				- Nilai LAKIP perangkat daerah	70 Poin	69,56 Poin	Perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja	Menindaklanjuti rekomendasi pada Laporan Hasil Evaluasi SAKIP DPMSos oleh Inspektorat Kabupaten Barito Timur-IRBAN II	
				Program Peningkatan Kerjasama Desa					
				- Persentase kerjasama antar Desa yang difasilitasi	25 Persen	61,11 Persen	-	-	DPMSos melalui bidang Informasi Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan telah melakukan upaya peningkatan kerjasama antar desa yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 370 Tahun 2018; Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 371 Tahun 2018; Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 372
				Program Administrasi Pemerintahan Desa					
				- Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	6 Dokumen	6 Dokumen	-	-	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Tahun 2018; Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 373 Tahun 2018; Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 586 Tahun 2019; Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/499/HUK Tahun 2020; Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Kaqwasan Perdesaan melalui Kerjasama Antar Desa Tahun 2024; dan Berita Acara Kesepakatan Rapat Pembangunan Kawasan Perdesaan
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat			-	-	Setiap tahun melalui kegiatan PKK dilaksanakan berbagai lomba dalam rangka memeriahkan Hari Kartini dan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- Persentase Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	5 Persen	43,45 Persen	-	-	Hari Ibu; Untuk tahun 2025 akan dilaksanakan lomba posyandu ditingkat Kabupaten dan tingkat Provinsi
8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Peningkatan Keluarga yang sehat dan sejahtera	Program Pengendalian Penduduk					
				- Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	2,16 Poin	2,18 poin	-	-	
				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)					
				- Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	80,8 Persen	78 persen	Karena ada pandangan negatif dari masyarakat tentang penggunaan KB modern	Perlu adanya sosialisasi yang intens ke masyarakat	
				- Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	10,9 Persen	2,9 persen	Angka menurun berarti kebutuhan ber-KB terpenuhi	-	
				Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)					
				- Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	5 Persen	2 persen	Terbatasnya sarana dan tenaga teknis/ yg aktif dan terlapor dalam SIGA	Perlu di tempatkan tenaga medis dan sarana penunjangnya	Dilaksanakan Pembinaan melalui BOKB pada Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	42 Persen	91 persen	-	-	
9.	Perhubungan	Dinas Perhubungan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
				- Nilai LAKIP perangkat daerah	70 Poin	64,10 Poin	Masih adanya Perbaikan Pada Unit Kerja Serta Komitmen dalam Manajemen Kinerja OPD, Pengukuran Kinerja Baru dilaksanakan sampai level Eselon II	Pengukuran Kinerja akan dilakukan sampai ke level Staf	
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)					Perlunya Anggaran yang cukup untuk pengadaan Angkutan Perintis.
				- Persentase alat uji kendaraan bermotor yang beroperasi dengan baik	100 Persen	66,67 Persen	Tidak mencapai target karena dari 9 (sembilan) Alat Uji yang di Kalibrasi, ada 3 (tiga) hasil kalibrasi yang tidak berfungsi (tidak lulus Uji)	Pelayanan di Sektor Pengujian Kendaraan Bermotor Terus Melakukan Peningkatan Pelayanan terhadap Pemilik Kendaraan Bermotor yang membutuhkan KIR, Agar Realisasi di Tahun Berikutnya Lebih tinggi lagi	Akan dianggarkan pada perubahan APBD Tahun 2025
				- Persentase ketersediaan perlengkapan jalan	55 Persen	15,47 Persen	Tidak mencapai target karena dari jumlah rencana pengadaan perlengkapan jalan yang di targetkan tidak terakomodir semua karena minimnya anggaran	Peningkatan anggaran pada Perubahan APBD 2025	
			Peningkatan Dermaga dan	Program Pengelolaan Pelayaran					Saat ini masih dalam proses

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Sungai untuk menunjang Ibukota baru	- Persentase fasilitas perhubungan yang berfungsi dengan baik	30 Persen	28,57 Orang	Tidak mencapai target karena dari 7 (tujuh) Fasilitas perhubungan yang ada, hanya ada 2 (dua) yang berfungsi yaitu terminal Ampah dan terminal Tamiang Layang tetapi tidak berfungsi secara maksimal	Berupaya menghidupkan Kembali fasilitas perhubungan yang ada	pembentukan Perusda dalam bidang Pelabuhan
10.	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Peningkatan Pelayanan Publik yang Prima dan Transparan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
				- Nilai LAKIP perangkat daerah	95 Poin	73 Poin	Perlu Diklat Untuk Pencanaan, Keuangan dan Kepegawaian	Menganggarkan peningkatan kompetensi pada APBD 2025	
				Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik					Pada tahun 2024 Indeks SPBE Kab. Barito Timur mencapai 2,82 dan masuk ke dalam kategori BAIK. Beberapa dukungan kebijakan sudah diselesaikan seperti peraturan bupati tentang SPBE serta surat-surat keputusan bupati terkait tata laksana dan manajemen spbe. Untuk penganggaran masih menyesuaikan kemampuan daerah.
				- Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	80 Persen	60 Persen	Jaringan internet tidak merata, belum adanya sosialisasi tentang sarana diseminasi informasi pembangunan daerah yang dimiliki oleh Pemkab	Mengusulkan pembangunan tower BTS untuk meningkatkan sinyal, mengadakan sosialisasi tentang konten informasi pembangunan daerah baik melalui spanduk, media sosial dan Komunitas informasi Masyarakat (KIM)	
				- Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	80 Persen	60 Persen	Jumlah SDM yang menangani layanan publik secara online dan terintegrasi masih terbatas serta perlu diberikan pelatihan	Membuka formasi untuk mengisi SDM tersebut serta memberikan bimbingan teknis kepada SDM yang sudah tersedia	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Melakukan uji coba internet satelit yang disediakan oleh Starlink di area blankspot
				Program Pengelolaan Aplikasi Informatika					
				- Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	60 Persen	0 Persen	Akses internet saat ini masih disediakan oleh masing-masing OPD karena belum tersedianya jaringan Intranet intra OPD di Diskominfo	Mengajukan penganggaran untuk penyediaan Jaringan Intranet intra OPD berupa jaringan kabel fiber optik yang menghubungkan antar OPD	
11.	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
				- Nilai LAKIP perangkat daerah	95 Poin	96,62 Poin	-	-	-
				Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam					
				- Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam	0 Persen	0 Persen	Tidak Dianggarkan karena untuk Izin Usaha bukan kewenangan Dinas/OPD DISDAGKOPUKM	Secara Online /Kewenangan Dinas/OPD Dinas Perizinan	
				Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- Koperasi yang berkualitas	42 Persen	99,62 Persen	Kurangnya pemahaman anggota tentang Perkoperasi, terbatasnya akses permodalan minimnya pengetahuan pengurus tentang pentingnya pengembangan usaha koperasi	Penyuluhan koperasi, Bimtek Koperasi, membuka akses permodalan bagi koperasi	Telah dilaksanakan pendampingan usaha Koperasi
				Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi					
				- Persentase Koperasi aktif	48,35 Persen	99,92 Persen	- Terbatasnya pengetahuan pengurus tentang pembuatan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi koperasi - Terbatasnya pengetahuan pengurus tentang kewirausahaan dan cara pengembangan usaha - Sumber daya pengelola koperasi dan kesadaran anggota dalam berkoperasi minim	Penyuluhan koperasi, Bimtek Koperasi, membuka akses permodalan bagi koperasi	
				Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian					
				- Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	40 Persen	0 Persen	Tidak ada kegiatan di Tahun 2024	Telah dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi					
				- Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	30 Persen	0 Persen	Tidak ada kegiatan di Tahun 2024	Telah dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025	
				- Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	20 Persen	0 Persen	Tidak ada kegiatan di Tahun 2024	Telah dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025	
				- Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	85 Persen	99,71 Persen	Kelembagaan anggotanya tidak bertambah disebabkan keinginan masyarakat untuk menjadi anggota koperasi, rendahnya regenerasi pengurus, pengelolaan koperasi masih konvensional	Sosialisasi koperasi melalui sekolah, media sosial dan organisasi masyarakat lainnya	Sudah dilaksanakan penyuluhan dan pembinaan tentang regulasi koperasi
				- Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	25 Persen	0 Persen	Tidak ada kegiatan di Tahun 2024	Telah dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025	
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	35 Persen	100 Persen	1. Terbatasnya Jaringan (Internet)	Pendampingan dan sosialisasi	Telah dilaksanakan pendampingan pengembangan kemitraan pelaku usaha mikro dengan pihak perbankan dan pihak Perusahaan Telah difasilitasi petugas/ admin pada bidang bina UMK terkait penerbitan NIB Telah dilaksanakannya sosialisasi dan fasilitasi sarana promosi produk usaha mikro
				- Persentase usaha mikro yang bermitra	75 Persen	99,94 Persen	Kurangnya modal usaha, kurangnya pengetahuan pelaku usaha terkait pengembangan usaha, inovasi dan pemasaran digital	Pendampingan dan sosialisasi	
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)					
				- Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	30 Persen	100 Persen	Terbatasnya modal usaha, terbatasnya sarana pemasaran	pendampingan penguatan modal bermitra dengan perbankan, Bantuan Produktif	
12.	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Peningkatan Daya Tarik Investasi daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Nilai LAKIP perangkat daerah	95 Poin	60,81 poin	1. penyusunan laporan belum sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam Permen PANRB nomor 53 tahun 2014 2. Laporan akuntabilitas kinerja (bab III) belum melaporkan capaian kinerja atas setiap pernyataan kinerja yang telah	1. Akan melakukan penyusunan laporan sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam Permen PANRB nomor 53 tahun 2014 2. Memperbaiki Laporan akuntabilitas kinerja (bab III) dan akan melaporkan capaian kinerja atas	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							disepakati/diperjanjikan di dalam perjanjian kinerja kepala DPM-PTSP pada awal tahun atau yang telah direvisi.	setiap pernyataan kinerja yang telah disepakati/diperjanjikan di dalam perjanjian kinerja kepala DPM-PTSP pada awal tahun atau yang telah direvisi.	
				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal					Telah dilakukan pengawasan dan pembinaan Perusahaan Perumahan tentang LKPM
				- Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	0,5 Triliun	1,7 Triliun	-	-	
				Program Promosi Penanaman Modal					
				- Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	24 Investor	48 Investor	-	-	
				Program Pelayanan Penanaman Modal					
				- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Penanaman Modal dan Perijinan	85 Poin	82,39 Poin	Karena unsur Fasilitas dalam penyusunan IKM rendah	Telah dilaksanakan penambahan fasilitas pelayanan sesuai dengan arahan hasil survei IKM	
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal					
				- Persentase perusahaan yang melaporkan LKPM	88 Persen	90,28 Persen	-	-	
				Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal					
				- Persentase data dan informasi Perizinan dan non Perizinan yang dikelola secara uptodate	90 Persen	98,75 Persen	-	-	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Peningkatan Pelayanan Publik yang Prima dan Transparan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan					
				- Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	8 Persen	0 Persen	Belum tersedianya data	Akan berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM tentang jumlah pemuda yang berwirausaha	Melakukan pelatihan wirausaha muda pemula kepada pemuda dengan melibatkan pelaku usaha lokal
				- Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	70 Persen	2,44 Persen	1. Rendahnya minat pemuda untuk mengikuti kegiatan dan organisasi kepemudaan serta organisasi sosial masyarakat; 2. rendahnya kegiatan pengkaderan pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial masyarakat	1. Meningkatkan kegiatan pelatihan pengkaderan kepemimpinan pemuda; 2. meningkatkan kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan	
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan					Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada organisasi kepemudaan dalam bentuk peningkatan kapasitas sumberdaya manusia melalui pelatihan
				- Jumlah prestasi olahraga	15 Atlet	10 Atlet	Minimnya cabang olahraga yang mengikuti event olahraga tingkat Provinsi dan Nasional	Meningkatkan partisipasi cabang olahraga melalui kegiatan pembinaan atlet usia dini dalam rangka menyiapkan atlet-atlet berprestasi dan regenerasi atlet pada masa yang akan datang	Melakukan koordinasi lintas sektoral baik dalam rangka penjurangan bibit-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan					bibit atlet muda ditingkat satuan sekolah
				- Tingkat partisipasi dalam kegiatan kepramukaan	35 Persen	35 Persen	-	Upaya peningkatan di tahun yang akan datang	
14.	Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral					
				- Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	85 Persen	85 Persen	-	-	-
				- Persentase perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	85 Persen	85 Persen	-	-	-
15.	Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi					
				- Tingkat keamanan informasi pemerintah	85 Persen	56,58 Persen	-	-	-
16.	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Peningkatan Promosi Penyelenggaraan Budaya Tradisional Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
				- Nilai LAKIP perangkat daerah	85 Poin	77,9 Poin	1. Masih banyak yang harus diperbaiki dalam	1. Disbudparpora mengikuti	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							proses perencanaan, pengukuran dan evaluasi akuntabilitas kinerja di Disbudparpora. 2. SDM Disbudparpora masih perlu ditingkatkan kapasitasnya.	pendampingan dengan Inspektorat dan Menpan-RB dalam perbaikan perencanaan strategis. 2. Disbudparpora melakukan berbagai perbaikan dalam penyusunan perencanaan, pengukuran dan evaluasi akuntabilitas kinerja. 3. Disbudparpora melakukan upaya peningkatan kapasitas SDM dengan mengikutkan mereka pada Bimtek dan Pelatihan Pengembangan Kapasitas SDM.	
				Program Pengembangan Kebudayaan					Sudah ada festival budaya mandiri diadakan oleh komunitas seni budaya didukung oleh Disbudparpora dan Disbudparpora juga mendukung festival yang diadakan Pokdarwis lokal dengan bentuk promosi dan dari
				- Persentase kebudayaan yang dikembangkan	35 Persen	30 Persen	Banyak unsur kebudayaan yang belum bisa dikembangkan oleh Disbudparpora	Secara bertahap mengembangkan unsur-unsur kebudayaan yang belum terkelola oleh Disbudparpora	
				Program Pengembangan Kesenian Tradisional					
				- Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	7 Persen	7 Persen	-	Upaya peningkatan di tahun yang akan datang	
				Program Pembinaan Sejarah					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- Persentase sejarah lokal yang dibina	20 Persen	0 Persen	Belum diprogramkan pada tahun 2024	Telah dianggarkan di Tahun 2025	DPA APBD berupa hadiah lomba
			Optimalisasi Pemeliharaan Situs-situs budaya dan Cagar Budaya Daerah	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya					
				- Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	15 Persen	15 Persen	-	-	
				Program Pengelolaan Permuseuman					
				- Persentase koleksi Museum yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan dengan baik	95 Persen	95 Persen	Masih kurangnya tenaga ahli permuseuman yang sesuai dengan kompetensinya	Meningkatkan kompetensi tenaga permuseuman melalui pelatihan/bimtek	
17.	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
				- Nilai LAKIP perangkat daerah	90 Poin	56,35 Poin	Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.	1. Melakukan perbaikan terhadap komponen/sub komponen/kriteria Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (AKIP) sesuai rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2. Meningkatkan kapasitas SDM yang terkait perencanaan, pengukuran (pengumpulan data) dan pelaporan serta evaluasi akuntabilitas kinerja internal	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Program Pembinaan Perpustakaan					
				- Jumlah pengunjung perpustakaan	33.500 Orang	36.228 Orang	-	-	-
18.	Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Program Pengelolaan Arsip					
				- Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	90 Persen	31,25 Persen	1. Belum meningkatnya pemahaman OPD terhadap pentingnya penyimpanan arsip dinamis dan statis melalui depo penyimpanan arsip yang tersedia di Dinas Kearsipan Kabupaten	1. Meningkatkan pemahaman OPD terhadap pentingnya penyimpanan arsip dinamis dan statis melalui sosialisasi terhadap fungsi depo penyimpanan arsip yang tersedia di Dinas Kearsipan Kabupaten	Belum Terlaksana peningkatan fasilitas Depo Kearsipan terkendala pagu anggaran belum mencukupi untuk rehabilitasi sedang/berat
							2. Kurangnya kompetensi SDM Arsiparis dalam mengelola Arsip Statis dan Dinamis	2. Meningkatkan kompetensi SDM Arsiparis melalui Diklat atau Bimtek	
				Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip					
				- Persentase Arsip yang dialih mediakan	98 Persen	0 Persen	1. Perangkat IT pengalih media Arsip fisik menjadi Arsip digital baru dilakukan pengadaan pada akhir tahun 2024 sehingga Software berupa Aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) baru terintegrasi pada perangkat software di akhir tahun 2024	1. Segera melakukan koordinasi dengan OPD terkait (Diskominfo) untuk melakukan instalasi dan integrasi aplikasi SRIKANDI pada perangkat IT	Sudah dilaksanakan pengadaan perangkat IT yang memadai melalui Pokir TA 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							2. Belum tersedianya SDM IT yang kompeten untuk mengoperasikan aplikasi berbasis media elektronik dan digital	2. Melakukan pengadaan SDM IT untuk mengoperasikan aplikasi berbasis media elektronik dan digital melalui penerimaan CPNS Kab.Barito Timur tahun 2024	

Analisis pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan non dasar pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Urusan Tenaga Kerja

➤ Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian

Telah dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja; Program Penempatan Tenaga Kerja. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi; Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta; Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja; Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota; Pengelolaan Informasi Pasar Kerja; Penerbitan Perpanjangan Imta yang Lokasi Kerja Dalam (Satu) Daerah Kabupaten/Kota; Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi Dalam (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

a. Masalah yang dihadapi

- Belum adanya teknologi informasi yang terintegrasi untuk mempermudah proses evaluasi dan monitoring atas capaian kinerja secara berkala.
- Kurangnya kuantitas, kualitas dan kapasitas SDM pada bagian Perencanaan.

b. Solusi

- Memberi masukan pada stake holder dan pimpinan untuk penyediaan aplikasi berbasis teknologi informasi untuk monev SAKIP
- Meningkatkan kuantitas, kualitas dan kapasitas SDM pd bagian Perencanaan melalui penambahan personil/pegawai, dan juga intensifikasi pendidikan dan pelatihan urusan perencanaan dan pelaporan.

2. Urusan Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak

➤ **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dan Keluarga Berencana**

Telah dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; Program Perlindungan Perempuan; Program Peningkatan Kualitas Keluarga; Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak; Program Pemenuhan Hak Anak (Pha); Program Perlindungan Khusus Anak. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (Pug) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota; Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota; Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota; Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota; Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota; Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Keadilan Gender dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota; Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; Pelembagaan Pha pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota; Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota; Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota; Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

a. Masalah yang dihadapi

- Masih belum sesuai indikator sasaran dan tujuan renstra dengan pohon kinerja dan ada beberapa item yang belum terpenuhi.

- Masih banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan yang belum dilaporkan karena kurangnya pemahaman masyarakat atas jenis tindak kekerasan terhadap perempuan, serta masyarakat masih enggan melaporkan kasus kekerasan karena dianggap aib.
- Desa belum membentuk Forum Anak Daerah (FAD) di Tingkat Desa.
- Masih banyaknya kasus kekerasan terhadap anak yang belum dilaporkan karena kurangnya pemahaman masyarakat atas jenis tindak kekerasan terhadap anak, serta masyarakat masih enggan melaporkan kasus kekerasan karena dianggap aib.
- Belum adanya rumah aman bagi korban kekerasan.

b. Solusi

- Melakukan perbaikan indikator sasaran dan tujuan pada renstra skpd.
- Memperkuat pencegahan KtP/A, , Pelayanan dan Perlindungan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta pembentukan UPTD PPA Kabupaten Barito Timur yang dilengkapi dengan SDM terlatih.
- melengkapi, dan akan turun langsung ke Desa-desa yang belum membentuk Forum Anak Daerah (FAD) di Tingkat Desa.
- Tersedianya rumah aman dan SDM rumah aman

3. Urusan Pangan

➤ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Telah dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan; Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat; Program Penanganan Kerawanan Pangan; Program Pengawasan Keamanan Pangan. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Penataan Organisasi; Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota; Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya Sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka

Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan; Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota; Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi; Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan; Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota; Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota.

a. Masalah yang dihadapi

- Tidak ada infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan.
- Peraturan Daerah tentang Cadangan Pangan Daerah sedang dalam pembahasan DPRD
- Kurangnya lahan pertanian
- Kebanyakan petani menanam padi ladang hanya untuk konsumsi sendiri sedangkan permintaan dari luar Kabupaten Barito Timur banyak seperti beras gilai dan Talun.
- Banyaknya lahan yang tidak dimanfaatkan untuk ditanami tanaman yang bermanfaat
- alat uji rapid test dan biaya operasional Pengawasan keamanan pangan terbatas sehingga tidak semua kecamatan bisa dilakukan pengawasan.

b. Solusi

- Pembangunan Gudang cadangan pangan.
- Pembuatan Peraturan Daerah tentang Cadangan Pangan pada Tahun 2025.
- Sosialisasi Konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).
- Upaya mengatasi masalah ketahanan pangan dilakukan melalui pengembangan lahan pertanian, peningkatan produksi, penanganan dampak perubahan iklim, promosi keragaman serta pengurangan pemborosan pangan, penguatan koordinasi pemerintah, pengadaan dan distribusi bantuan pangan, pengawasan gizi, pembangunan infrastruktur, kemudahan akses pangan, serta penyediaan air bersih dan tenaga kesehatan.
- Penambahan anggaran untuk kegiatan Pengawasan keamanan pangan pada pangan segar.

4. Urusan Pertanahan

➤ **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Telah dilaksanakan Program Pengembangan Perumahan; Program Kawasan Pemukiman; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum;. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota; Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman Kumuh dengan Luas di Bawah (sepuluh) Ha; Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan.

a. Masalah yang dihadapi

- Tidak adanya permasalahan yang dihadapi

b. Solusi

-

5. Urusan Lingkungan Hidup

➤ **Dinas Lingkungan Hidup**

Telah dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Perencanaan Lingkungan Hidup; Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup; Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati); Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B); Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh); Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal dan Hak Mha yang Terkait dengan Pplh; Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup; Program Pengelolaan Persampahan. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Penataan Organisasi; Rencana Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Rpplh) Kabupaten/Kota; Pencegahan Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota; Penanggulangan Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota; Pemulihan Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota; Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota; Penyimpanan Sementara Limbah B; Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/Atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin Pplh Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Pengakuan Mha, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak Mha yang Terkait dengan Pplh; Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) Kabupaten/Kota; Pengelolaan Sampah.

a. Masalah yang dihadapi

- Perlunya Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Untuk Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian guna mendukung penilaian SAKIP SKPD.
- Ketersediaan Data, Proses Validasi dan Verifikasi Perencanaan Lingkungan Hidup ke DLH Provinsi maupun Kementerian Lingkungan Hidup.
- Ketersediaan sarana-prasarana, perlunya kolaborasi antar instansi terkait, ketersediaan data, perlunya Diklat untuk peningkatan SDM dan Masyarakat.
- Terjadi perubahan Peraturan (PP dan Keputusan) pada Tingkat pengawasan dan pemantauan pengelolaan limbah B3.
- Belum ditetapkannya Peraturan Daerah Masyarakat Hukum Adat (MHA).
- Belum tersedia anggaran, perlunya bimtek dan belum ditetapkannya Calon Sekolah Adiwiyata.
- Minimnya Peraturan dan Fasilitas Pengolahan Sampah.

b. Solusi

- Mengikuti diklat Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian.
- Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait data baik dalam wilayah Kabupaten maupun di luar wilayah kabupaten, tersedianya bank data.
- Peningkatan sarana-prasarana pendukung kegiatan, Peningkatan Koordinasi dan Kolaborasi antar instansi terkait .
- Perlu adanya Sosialisasi Sistem Tanggap Darurat LB3 dan Bintek LB3.

- Dilaksanakannya sosialisasi di 2 calon Desa MHA yaitu Desa Juru Banu, Kecamatan Paju Epat dan Desa Awang, Kecamatan Dusun Tengah.
- Perlu dilaksanakannya sosialisasi ke setiap sekolah calon Adiwiyata, Perlunya bimtek.
- Merancang Perbub Pembatasan Sampah Plastik dan pembangunan fasilitas pengolahan sampah seperti TPST dan TPA Sanitary Landfill.

6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

➤ **Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil**

Telah dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Pendaftaran Penduduk; Program Pencatatan Sipil; Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; Program Pengelolaan Profil Kependudukan. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pelayanan Pendaftaran Penduduk; Pelayanan Pencatatan Sipil; Penyelenggaraan Pencatatan Sipil; Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan; Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; Penyusunan Profil Kependudukan

a. Masalah yang dihadapi

- Tidak adanya permasalahan yang dihadapi

b. Solusi

-

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

➤ **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial**

Telah dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Peningkatan Kerjasama Desa; Program Administrasi Pemerintahan Desa; Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pengembangan Potensi

Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota; Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial; Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota; Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota; Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota; Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa; Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa; Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota.

a. Masalah yang dihadapi

- Perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.

b. Solusi

- Menindaklanjuti rekomendasi pada Laporan Hasil Evaluasi SAKIP DPMDSos oleh Inspektorat Kabupaten Barito Timur-IRBAN II.

8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

➤ **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dan Keluarga Berencana**

Telah dilaksanakan Program Perlindungan Khusus Anak; Program Pengendalian Penduduk; Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB); Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS). Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota; Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal; Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota; Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB; Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan

Kesejahteraan Keluarga; Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

a. Masalah yang dihadapi

- Terdapat pandangan negatif dari masyarakat tentang penggunaan KB modern.
- Terbatasnya sarana dan tenaga teknis/ yg aktif dan terlapor dalam SIGA

b. Solusi

- Perlu adanya sosialisasi yang intens ke Masyarakat tentang manfaat KB modern.
- Perlu di tempatkan tenaga medis dan sarana penunjangnya

9. Urusan Perhubungan

➤ **Dinas Perhubungan**

Telah dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Llaj). Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi. Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota; Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C; Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir; Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten/Kota; Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/Atau Barang Antar Kota Dalam (Satu) Daerah Kabupaten/Kota; Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

a. Masalah yang dihadapi

- Masih adanya Perbaikan Pada Unit Kerja Serta Komitmen dalam Manajemen Kinerja OPD, Pengukuran Kinerja Baru dilaksanakan sampai level Eselon II.

- Tidak mencapai target alat uji kendaraan bermotor karena dari 9 (sembilan) Alat Uji yang di Kalibrasi, ada 3 (tiga) hasil kalibrasi yang tidak berfungsi (tidak lulus Uji).
- jumlah rencana pengadaan perlengkapan jalan yang di targetkan tidak terakomodir semua karena keterbatasan anggaran.
- Fasilitas perhubungan yang ada tidak mencapai target karena dari 7 (tujuh), hanya ada 2 (dua) yang berfungsi yaitu terminal Ampah dan terminal Tamiang Layang tetapi tidak berfungsi secara maksimal.

b. Solusi

- Pengukuran Kinerja akan dilakukan sampai ke level Staf.
- Pelayanan di Sektor Pengujian Kendaraan Bermotor Terus Melakukan Peningkatan Pelayanan terhadap Pemilik Kendaraan Bermotor yang membutuhkan KIR, Agar Realisasi di Tahun Berikutnya Lebih tinggi lagi.
- Peningkatan anggaran pada Perubahan APBD 2025.
- Berupaya menghidupkan Kembali fasilitas perhubungan yang ada.

10. Urusan Komunikasi dan Informatika

➤ **Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik**

Telah dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Informasi dan Komunikasi Publik; Program Aplikasi Informatika; Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

a. Masalah yang dihadapi

- Perlu peningkatan SDM melalui Diklat Untuk Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian.

- Jaringan internet tidak merata, belum adanya sosialisasi tentang sarana diseminasi informasi pembangunan daerah yang dimiliki oleh Pemkab.
- Jumlah SDM yang menangani layanan publik secara online dan terintegrasi masih terbatas serta perlu diberikan pelatihan.
- Akses internet saat ini masih disediakan oleh masing-masing OPD karena belum tersedianya jaringan Intranet intra OPD di Diskominfo.

b. Solusi

- Menganggarkan peningkatan kompetensi SDM pada APBD 2025.
- Mengusulkan pembangunan tower BTS untuk meningkatkan sinyal, mengadakan sosialisasi tentang konten informasi pembangunan daerah baik melalui spanduk, media sosial dan Komunitas informasi Masyarakat (KIM).
- Membuka formasi untuk mengisi SDM tersebut serta memberikan bimbingan teknis kepada SDM yang sudah tersedia.
- Mengajukan penganggaran untuk penyediaan Jaringan Intranet intra OPD berupa jaringan kabel fiber optik yang menghubungkan antar OPD.

11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

➤ **Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**

Telah dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi; Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi; Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian; Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi; Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (Umk); Program Pengembangan Umkm; Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan; Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan; Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; Program Pengembangan Ekspor; Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen; Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah; Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota; Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam (Satu) Daerah Kabupaten/Kota; Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota; Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota; Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan; Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil; Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota; Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan; Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya; Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota; Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada (Satu) Daerah Kabupaten/Kota; Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan; Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

a. Masalah yang dihadapi

- Untuk izin usaha koperasi tidak dianggarkan karena untuk Izin Usaha bukan kewenangan Dinas/OPD DISDAGKOPUKM.
- Kurangnya pemahaman anggota tentang Perkoperasi, terbatasnya akses permodalan minimnya pengetahuan pengurus tentang pentingnya pengembangan usaha koperasi.
- Kelembagaan anggotanya tidak bertambah disebabkan karena masih rendahnya keinginan masyarakat untuk menjadi anggota koperasi, rendahnya regenerasi pengurus, pengelolaan koperasi masih konvensional.
- Kurangnya modal usaha, kurangnya pengetahuan pelaku usaha terkait pengembangan usaha, inovasi dan pemasaran digital.

- Masih banyak kegiatan yang belum teranggarkan di Tahun 2024.
- Terbatasnya modal usaha, terbatasnya sarana pemasaran.

b. Solusi

- Secara Online /Kewenangan Dinas/OPD Dinas Perizinan.
- Penyuluhan koperasi, Bimtek Koperasi ,membuka akses permodalan bagi koperasi.
- Sosialisasi koperasi melalui sekolah, media sosial dan organisasi masyarakat lainnya.
- Pendampingan dan sosialisasi.
- Telah dianggarkan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.
- pendampingan penguatan modal bermitra dengan perbankan, Bantuan Produktif.

12. Urusan Penanaman Modal

➤ **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Telah dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal; Program Pelayanan Penanaman Modal; Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota; Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota; Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah.

a. Masalah yang dihadapi

- penyusunan laporan belum sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam Permen PANRB nomor 53 tahun 2014.
- Laporan akuntabilitas kinerja (bab III) belum melaporkan capaian kinerja atas setiap pernyataan kinerja yang telah disepakati/diperjanjikan di dalam

perjanjian kinerja kepala DPM-PTSP pada awal tahun atau yang telah direvisi.

- IKM rendah karena unsur fasilitas dalam penyusunan pelayanan penanaman modal dan perizinan.

b. Solusi

- Melakukan penyusunan laporan sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam Permen PANRB nomor 53 tahun 2014.
- Memperbaiki Laporan akuntabilitas kinerja (bab III) dan akan melaporkan capaian kinerja atas setiap pernyataan kinerja yang telah disepakati/diperjanjikan di dalam perjanjian kinerja kepala DPM-PTSP pada awal tahun atau yang telah direvisi.
- Telah dilaksanakan penambahan fasilitas pelayanan sesuai dengan arahan hasil survei IKM.

13. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

➤ **Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan olah Raga**

Telah dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan; Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan; Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota; Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota; Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi; Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga; Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan.

a. Masalah yang dihadapi

- Minimnya cabang olahraga yang mengikuti event olahraga tingkat Provinsi dan Nasional.

b. Solusi

- Meningkatkan partisipasi cabang olahraga melalui kegiatan pembinaan atlet usia dini dalam rangka menyiapkan atlet-atlet berprestasi dan regenerasi atlet pada masa yang akan datang.

14. Urusan Statistik

➤ **Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik**

Telah dilaksanakan Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.

Tidak ada permasalahan.

15. Urusan Persandian

➤ **Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik**

Telah dilaksanakan Penyelenggaraan Statistik Sektoral; Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Tidak ada permasalahan.

16. Urusan Kebudayaan

➤ **Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan olah Raga**

Telah dilaksanakan Program Pengembangan Kebudayaan; Program Pengembangan Kesenian Tradisional; Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya; Program Pengelolaan Permuseuman; Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota; Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota; Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota; Pengelolaan Cagar Budaya

Peringkat Kabupaten/Kota; Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota; Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota; Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota; Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota; Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar.

a. Masalah yang dihadapi

- Masih banyak yang harus diperbaiki dalam proses perencanaan, pengukuran dan evaluasi akuntabilitas kinerja di Disbudparpora.
- SDM Disbudparpora masih perlu ditingkatkan kapasitasnya.
- Banyak unsur kebudayaan yang belum bisa dikembangkan oleh Disbudparpora.
- Sejarah lokal yang dibina Belum diprogramkan pada tahun 2024.
- Masih kurangnya tenaga ahli permuseuman yang sesuai dengan kompetensinya

b. Solusi

- Secara bertahap mengembangkan unsur-unsur kebudayaan yang belum terkelola oleh Disbudparpora.
- Disbudparpora mengikuti pendampingan dengan Inspektorat dan Menpan-RB dalam perbaikan perencanaan strategis.
- Disbudparpora melakukan berbagai perbaikan dalam penyusunan perencanaan, pengukuran dan evaluasi akuntabilitas kinerja.
- Disbudparpora melakukan upaya peningkatan kapasitas SDM dengan mengikutkan mereka pada Bimtek dan Pelatihan Pengembangan Kapasitas SDM.
-
- Program telah dianggarkan di Tahun 2025.
- Meningkatkan kompetensi tenaga permuseuman melalui pelatihan/bimtek.

17. Urusan Perpustakaan

➤ Dinas Perpustakaan

Telah dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Pembinaan Perpustakaan;. Kegiatan yang

dilaksanakan yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

a. Masalah yang dihadapi

- Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.

b. Solusi

- Melakukan perbaikan terhadap komponen/sub komponen/kriteria Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (AKIP) sesuai rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- Meningkatkan kapasitas SDM yang terkait perencanaan, pengukuran (pengumpulan data) dan pelaporan serta evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

18. Urusan Kearsipan

➤ **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

Telah dilaksanakan Program Pengelolaan Arsip; Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota; Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/Atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

a. Masalah yang dihadapi

- Belum meningkatnya pemahaman OPD terhadap pentingnya penyimpanan arsip dinamis dan statis melalui depo penyimpanan arsip yang tersedia di Dinas Kearsipan Kabupaten.
- Kurangnya kompetensi SDM Arsiparis dalam mengelola Arsip Statis dan Dinamis

- Perangkat IT pengalih media Arsip fisik menjadi Arsip digital baru dilakukan pengadaan pada akhir tahun 2024 sehingga Software berupa Aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) baru terintegrasi pada perangkat software di akhir tahun 2024.
- Belum tersedianya SDM IT yang kompeten untuk mengoperasikan aplikasi berbasis media elektronik dan digital.

b. Solusi

- Meningkatkan pemahaman OPD terhadap pentingnya penyimpanan arsip dinamis dan statis melalui sosialisasi terhadap fungsi depo penyimpanan arsip yang tersedia di Dinas Kearsipan Kabupaten.
- Meningkatkan kompetensi SDM Arsiparis melalui Diklat atau Bimtek.
- Segera melakukan koordinasi dengan OPD terkait (Diskominfo) untuk melakukan instalasi dan integrasi aplikasi SRIKANDI pada perangkat IT.
- Melakukan pengadaan SDM IT untuk mengoperasikan aplikasi berbasis media elektronik dan digital melalui penerimaan CPNS Kab.Barito Timur tahun 2024.

C. Pelaksanaan Urusan Pilihan

Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; perdagangan; perindustrian; dan transmigrasi. Pemerintah Kabupaten Barito Timur melalui Peraturan Bupati Kabupaten Barito Timur Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026 menetapkan 6 Urusan Pilihan yaitu kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; perdagangan; perindustrian; dan transmigrasi.

Rincian realisasi anggaran Urusan Pilihan dapat dilihat pada Lampiran 1 dengan capaian program diuraikan dalam Tabel 3.1.3 berikut:

Tabel 3.1.3
Pelaksanaan Urusan Pilihan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan Dan Peternakan	Peningkatan Produksi Sektor Perikanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
				- Nilai LAKIP perangkat daerah	70 Poin	69,21 Poin			
				Program Pengelolaan Perikanan Tangkap					1. Perlunya pengawasan perairan dengan razia/ patroli bersama Pokmaswas, TNI dan Polri
				- Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	1.131,89 Ton	784,06 Ton	1. Nelayan banyak yang mempunyai profesi ganda yaitu selain sebagian nelayan mereka juga sebagai karyawan perusahaan. 2. Populasi jumlah ikan yang semakin menurun karena adanya penangkapan secara ilegal. 3. Sarana dan prasarana penangkapan yang kurang memadai. 4. Adanya pencemaran perairan. 5. Penangkapan Ikan tergantung dari musim.	1. Melakukan Restocking untuk menambah populasi ikan yang ada di perairan. 2. Perlu adanya bantuan sarana dan prasarana alat untuk menangkap ikan yang ramah lingkungan. 3. Melakukan pengawasan perairan melalui patroli ataupun razia. 4. Melakukan sosialisasi mengenai ilegal fishing serta sanksi /hukuman yang diberikan kepada pelaku. 5. Peralihan ke sistem perikanan budidaya	Sudah dibentuknya Tim Razia/Patroli 2. Perlunya adanya bantuan alat pembuat pakan ikan Sudah Memberikan bantuan benih ikan dan pakan ikan. 3. Perlu adanya bantuan sarana dan prasarana budidaya
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya					
				- Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	1582,92 Ton	1537,14 Ton	1. Harga pakan ikan yang sangat tinggi	1. Perlu adanya alat pembuat pakan yang	Sudah memberikan bantuan kolam

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							2. Untuk Budidaya di Karamba kualitas air yang tidak menentu atau berubah 3. Terkendala pemasaran dalam jumlah yang besar untuk di Kab. Barito Timur belum ada penampungnya. 4. Sarana dan Prasarana Budidaya yang belum memadai	mudah dan praktis dalam operasionalnya 2. Subsidi pakan ikan 3. Perlu adanya bantuan sarana dan prasarana budidaya	Gali, Kolam Terpal, Kolam Bioflok dan karamba untuk pembudidaya ikan
				Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan					
				- Tingkat pertumbuhan stok sumberdaya perikanan	61,88 Persen	50 Persen	1. Kegiatan restocking tidak dapat dilaksanakan dikarena terkait anggaran 2. Penangkapan Ikan dengan bahan yang berbahaya	1. Melakukan Restocking 2. Patroli/Razia di perairan	Terkait anggaran yang tidak mencukupi untuk kegiatan restocking
			Penguatan perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan nilai tambah, serta penyediaan	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan					
				- Konsumsi ikan	40,05 Kg/Kapita/Tahun	50,32 Kg/Kapita/Tahun	1. Harga Ikan relatif semakin mahal	1. Meningkatkan produksi ikan melalui pemberian bantuan sarana dan prasarana	Memberikan bantuan alat tangkap kepada nelayan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			sumber protein hewan untuk konsumsi masyarakat				2. Belum adanya industri pengolahan/hasil perikanan	(kolam,karamba,bibit dan pakan ikan) 2. Memberikan pelatihan untuk penambahan industri RT pengolahan hasil perikanan	
2.	Pertanian	Dinas Perikanan Dan Peternakan	Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta penyediaan prasarana dan sarana pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian					
				- Jumlah produksi daging dan telur					
				- produksi daging	648,67 Ton	652,87 Ton	1. Harga Pakan Ternak yang sangat Tinggi 2. Belum adanya sarana dan prasarana industri pengolahan pakan ternak	1. Dukungan Pemerintah Daerah untuk memberikan bantuan sarana dan prasarana pengembangan peternakan (Kandang, bibit, dan paka ternak). 2. Melakukan kerjasama kemitraan dengan pihak swasta	
				- Produksi telur	515.218,30 Kg	710.643 Kg	Harga Pakan Ternak yang sangat tinggi	Dukungan Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi pakan	
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner					
				- Persentase Penurunan kejadian dan	100 Persen	70 Persen	1. Anggaran yang tersedia dalam rangka pencegahan	Tahun berikutnya anggaran untuk vaksin rabies dapat di	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				jumlah kasus penyakit hewan menular			dan pengendalian penyakit hewan menular masih relatif sedikit. 2. Sebagai Laporan Untuk Kabupaten Barito Timur Kasus Penyakit hewan menular sangat jauh menurun di mana pada tahun 2023 ada 10 Kasus dan pada tahun 2024 menurun menjadi 3 kasus.	tambah sehingga dapat mengcover seluruh jumlah habitat anjing yang ada di Kabupaten Barito Timur	
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian					
				- Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	100 Persen	100 Persen	-	-	-
3.	Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga	Peningkatan promosi penyelenggaraan budaya tradisional daerah	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata					
				- Persentase peningkatan wisatawan mancanegara	10 Persen	37,97 Persen	Kurang promosi pariwisata , Atraksi wisata dan Event Pariwisata	mempromosikan DTW melalui Medsos, Brosur, dan media lain, menyajikan atraksi wisata yang di kemas menjadi produk wisata menarik dan bernilai jual serta mampu bersaing, memperkuat branding pariwisata	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- Peningkatan wisatawan nusantara	14 Persen	0,68 Persen	Kurang promosi pariwisata , Atraksi wisata dan Event Pariwisata	mempromosikan DTW melalui Medsos, Brosur, dan media lain, menyajikan atraksi wisata yang di kemas menjadi produk wisata menarik dan bernilai jual serta mampu bersaing, memperkuat branding pariwisata	
				Program Pemasaran Pariwisata					
				- Tingkat hunian akomodasi	10 Persen	10,8 Persen	Kurang penyediaan fasilitas hotel non bintang dan kurang standar pelayanan hotel	Meningkatkan fasilitas hotel dan standar pelayanan hotel	
				Program pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif					
				- Jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	100 Persen	0,6 Persen	Kurang mengetahui dan memahami pengembangan dan pengelolaan produk pariwisata di Desa yang memiliki potensi wisata dan desa wisata	Menyiapkan SDM yang mampu mengelola potensi atraksi desa dan potensi desa wisata	
4.	Pertanian	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta penyediaan prasarana dan sarana pertanian	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
				- Nilai LAKIP perangkat daerah	70 Poin	70 Poin	Tidak Ada Masalah	Terus Ditingkatkan	
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- Persentase sarana pertanian yang digunakan secara tepat sasaran	100 Persen	90 Persen	Penggunaan sarana yang masih belum optimal berdasarkan fungsinya	Peningkatan penyuluhan ke petani akan fungsi sarana pertanian guna penerapan teknologi yang terbaru, atau kemudahan penggunaan sarana pertaniannya	Menyediakan anggaran pelatihan keterampilan petani dalam penggunaan sarana pertanian. perlunya keikutsertaan petani dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Gabungan atau Himpunan kelaompok tani yang diselenggarakan seindonesia, agar pengetahuan petani menjadi luas dan terampil
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian					
				- Persentase prasarana pertanian yang digunakan secara tepat sasaran	100 Persen	100 Persen	-	-	
				Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian					
				- Persentase kejadian/kasus bencana pertanian yang ditangani	100 Persen	100 Persen	-	-	
				Program Perizinan Usaha Pertanian					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- Persentase izin usaha pertanian yang diterbitkan	90 Persen	0 Persen	Regulasi perizinan yang masih belum ada	perlunya kejelasan akan regulasi dan kemudahan dalam perizinannya	
			Peningkatan kualitas SDM pertanian	Program Penyuluhan Pertanian					
				- Cakupan bina kelompok petani	90 Persen	90 Persen	-	-	
5.	Perdagangan	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Peningkatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan					
				- Tingkat Pengendalian Bahan Berbahaya yang beredar	80 Persen	100 Persen	-	-	
				- Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	70 Persen	0 Persen	Kegiatan tidak dilaksanakan pada Tahun 2024	Telah dianggarkan pada Tahun 2025	
				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan					
				- Persentase pasar daerah yang representatif	80 Persen	99,27 Persen	-	-	
				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting					
				- Persentase kinerja realisasi pupuk	60 Persen	53,36 Persen	Tidak terserap penuh oleh Petani dikarenakan kendala biaya, jarak dari kios jauh	ditambah subsidiya sehingga harga lebih murah plus subsidi transport	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							dan terkadang melalui jalur Sungai		
				- Tingkat ketersediaan bahan/barang strategis kebutuhan masyarakat	100 Persen	100 Persen	-	-	
				Program Pengembangan Ekspor					
				- Persentase produk unggulan daerah yang diekspor	95 Persen	0 Persen	Tidak adanya produk yang masuk dalam standard skala ekspor	Sudah mengikuti kegiatan Pameran Kalteng EXPO dan perlu adanya pendampingan dalam pemenuhan syarat standard produk unggulan yang memenuhi kriteria produk unggulan ekspor	
				Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen					
				- Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	80 Persen	90,75 Persen	-	-	-
				- Persentase Pengaduan Konsumen yang Ditangani	75 Persen	100 Persen	-	-	-
				Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	70 Persen	100 Persen	-	-	-
6.	Perindustrian	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri					
				- Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	25 Persen	0 Persen	Belum adanya dokumen RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten) sampai dengan di tetapkannya menjadi PERDA	Melakukan konsultasi/koordinasi dengan instansi terkait (Disnaker Prov. Kalteng, Kemenaker RI) untuk pelatihan/Bimtek penyusun dan teknis pelaksanaan kegiatan penyusunan RPIK	
				Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota					
				- Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	85 Persen	0 Persen	Tidak tersedianya data IUI pada Dinas PMPTSP dan aplikasi OSS RBA	Meningkatkan koordinasi dengan DPMPTSP	
				Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri yang masuk dalam SII Nasional -	0,15 Persen	6,5 Persen	Banyak IKM yg lupa password dan kesulitan akses/signal	Mengelola password dan memfokuskan IKM yg tidak terkendala akses/signal	Akan difasilitasi industri kecil yang berminat dalam mengurus ijin industri
7.	Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian		Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi					
				Tingkat penanganan permasalahan pertanahan transmigrasi -	30 Persen	0 Persen	Seluruh wilayah transmigrasi sudah menjadi desa mandiri (eks transmigrasi)	-	
				Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi					
				Persentase wilayah transmigrasi yang didata -	100 Persen	100 Persen	Akses jalan yang belum diaspal	Mengusulkan kepada instansi yang berwenang utk memperbaiki akses jalan	
				Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi					
				Persentase satuan pemukiman yang dibina -	40 Persen	40 Persen	Banyaknya transmigran yg sudah tidak menetap (pindah)	Pembinaan pada warga yg menetap	

Analisa pelaksanaan Urusan Pilihan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

➤ Dinas Perikanan dan Peternakan

Telah dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Pengelolaan Perikanan Tangkap; Program Pengelolaan Perikanan Budidaya; Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam (Satu) Daerah Kabupaten/Kota; Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota; Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil; Pengelolaan Pembudidayaan Ikan; Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota; Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil; Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota; Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian.

a. Masalah yang dihadapi

- Nelayan banyak yang mempunyai profesi ganda yaitu selain sebagian nelayan mereka juga sebagai karyawan perusahaan..
- Populasi jumlah ikan yang semakin menurun karena adanya penangkapan secara ilegal.
- Sarana dan prasarana penangkapan yang kurang memadai.
- Adanya pencemaran perairan.
- Penangkapan Ikan tergantung dari musim.
- Harga pakan ikan yang sangat tinggi
- Budidaya di Karamba kualitas air yang tidak menentu atau berubah
- Terkendala pemasaran dalam jumlah yang besar untuk di Kab. Barito Timur belum ada penampungnya.
- Sarana dan Prasarana Budidaya yang belum memadai.
- Kegiatan restocking tidak dapat dilaksanakan dikarena terkait anggaran.
- Harga Ikan relatif semakin mahal.
- Belum adanya industri pengolahan/hasil perikanan

b. Solusi

- Melakukan Restocking untuk menambah populasi ikan yang ada di perairan.
- Perlu adanya bantuan sarana dan prasarana alat untuk menangkap ikan yang ramah lingkungan.
- Melakukan pengawasan perairan melalui patroli ataupun razia.
- Melakukan sosialisasi mengenai ilegal fishing serta sanksi /hukuman yang diberikan kepada pelaku.
- Peralihan ke sistem perikanan budidaya.
- Perlu adanya alat pembuat pakan yang mudah dan praktis dalam operasionalnya.
- Subsidi pakan ikan
- Perlu adanya bantuan sarana dan prasarana budidaya.
- Meningkatkan produksi ikan melalui pemberian bantuan sarana dan prasarana (kolam,karamba,bibit dan pakan ikan)
- Memberikan pelatihan untuk penambahan industri Rumah Tangga pengolahan hasil perikanan.

2. Urusan Pariwisata

➤ Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

Telah dilaksanakan Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata; Program Pemasaran Pariwisata; Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota; Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota; Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota; Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar.

a. Masalah yang dihadapi

- Kurang promosi pariwisata , Atraksi wisata dan Event Pariwisata.
- Kurang penyediaan fasilitas hotel non bintang dan kurang standar pelayanan hotel.
- Kurang mengetahui dan memahami pengembangan dan pengelolaan produk pariwisata di Desa yang memiliki potensi wisata dan desa wisata.
-

b. Solusi

- mempromosikan DTW melalui Medsos, Brosur, dan media lain, menyajikan atraksi wisata yang di kemas menjadi produk wisata menarik dan bernilai jual serta mampu bersaing, memperkuat branding pariwisata.
- Meningkatkan fasilitas hotel dan standar pelayanan hotel.
- Menyiapkan SDM yang mampu mengelola potensi atraksi desa dan potensi desa wisata.

3. Urusan Pertanian

➤ **Dinas Perikanan dan Peternakan**

Telah dilaksanakan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian; Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota.

a. Masalah yang dihadapi

- Harga Pakan Ternak yang sangat Tinggi
- Belum adanya sarana dan prasarana industri pengolahan pakan ternak
- Anggaran yang tersedia dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit hewan menular masih relatif sedikit.
- Sebagai Laporan Untuk Kabupaten Barito Timur Kasus Penyakit hewan menular sangat jauh menurun di mana pada tahun 2023 ada 10 Kasus dan pada tahun 2024 menurun menjadi 3 kasus.

b. Solusi

- Dukungan Pemerintah Daerah untuk memberikan bantuan sarana dan prasarana pengembangan peternakan (Kandang, bibit, dan paka ternak).
- Melakukan kerjasama kemitraan dengan pihak swasta.
- Tahun berikutnya anggaran untuk vaksin rabies dapat di tambah sehingga dapat mengcover seluruh jumlah habitat anjing yang ada di Kabupaten Barito Timur.

➤ **Dinas Pertanian**

Telah dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program

Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian, Program Perizinan Usaha Pertanian, Program Penyuluhan Pertanian. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian; Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kewenangan Kabupaten/Kota; Peirizinan Usaha Pertanian di Daerah Kabupaten/Kota; Penyuluhan Pertanian di Daerah Kabupaten/Kota .

a. Masalah yang dihadapi

- Peningkatan penyuluhan ke petani akan fungsi sarana pertanian guna penerapan teknologi yang terbaru, atau kemudahan penggunaan sarana pertaniannya.
- Regulasi perizinan yang masih belum ada.

b. Solusi

- Dukungan Pemerintah Daerah untuk memberikan bantuan sarana dan prasarana pengembangan peternakan (Kandang, bibit, dan paka ternak).
- perlunya kejelasan akan regulasi dan kemudahan dalam perizinannya.

4. Urusan Perdagangan

➤ **Dinas, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Menengah**

Telah dilaksanakan Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan; Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; Program Pengembangan Ekspor; Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen; Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri. Kegiatan yang dilaksanakan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan; Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya; Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota; Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada (satu) Daerah Kabupaten/Kota; Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan; Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

a. Masalah yang dihadapi

- Kegiatan perizinan pelaku usaha yang mendapatkan IUPP/SIUP tidak dilaksanakan pada Tahun 2024.

- Pupuk Tidak terserap penuh oleh Petani dikarenakan kendala biaya, jarak dari kios jauh dan terkadang melalui jalur Sungai
- Tidak adanya produk yang masuk dalam standard skala ekspor.

b. Solusi

- Kegiatan telah dianggarkan pada Tahun 2025.
- Penambahan subsidi sehingga harga lebih murah plus subsidi transport.
- Sudah mengikuti kegiatan Pameran Kalteng EXPO dan perlu adanya pendampingan dalam pemenuhan syarat standard produk unggulan yang memenuhi kriteria produk unggulan ekspor.

5. Urusan Perindustrian

➤ **Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian**

Telah dilaksanakan Program Hubungan Industrial; Program Perencanaan dan Pembangunan Industri. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota; Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota; Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan

Industri Kabupaten/Kota; Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota.

a. Masalah yang dihadapi

- Belum adanya dokumen RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten) sampai dengan di tetapkannya menjadi PERDA.
- Tidak tersedianya data IUI pada Dinas PMPTSP dan aplikasi OSS RBA.
- Banyak IKM yg lupa password dan kesulitan akses/ signal

b. Solusi

- Melakukan konsultasi/koordinasi dengan instansi terkait (Disnaker Prov. Kalteng, Kemenaker RI) untuk pelatihan/Bimtek penyusun dan teknis pelaksanaan kegiatan penyusunan RPIK.
- Meningkatkan koordinasi dengan DPMPTSP.
- Mengelola password dan memfokuskan IKM yg tidak terkendala akses/ signal.

6. Urusan Transmigrasi

➤ **Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian**

Telah dilaksanakan Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian.

a. Masalah yang dihadapi

- Banyaknya transmigran yg sudah tidak menetap (pindah).
- Masih ada akses jalan yang belum diaspal

b. Solusi

- Seluruh wilayah transmigrasi sudah menjadi desa mandiri (eks transmigrasi).
- Mengusulkan kepada instansi yang berwenang utk memperbaiki akses jalan.
- Pembinaan pada warga yg menetap.

D. Pelaksanaan Unsur Pendukung, Penunjang, Pengawas Urusan, Kewilayahan dan Pemerintahan Umum

Rincian realisasi anggaran Unsur Pendukung, Penunjang, Pengawas Urusan, Kewilayahan dan Pemerintahan Umum dapat dilihat pada Lampiran 1 dengan capaian program diuraikan dalam Tabel 3.1.4 berikut:

Tabel 3.1.4
Pelaksanaan Urusan Pendukung, Penunjang, Pengawas, Kewilayahan dan Pemerintahan Umum

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan									
1.	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
				- Nilai LAKIP perangkat daerah	90 Poin	90 Poin	-	-	-
				- Persentase Bahan Kebijakan terkait organisasi pemerintah daerah yang ditindaklanjuti	90 Persen	90 Persen	-	-	-
				Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat					
				- Persentase Bahan Kebijakan Lingkup pemerintahan yang ditindaklanjuti	90 Persen	90 Persen	-	-	-
- Persentase Bahan Kebijakan Lingkup kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	90 Persen	84 Persen	Beberapa Pengusul Dana Hibah, tidak mengajukan proposal pencairan, sehingga proses pencairan dana tidak dapat dilakukan	Sosialisasi tentang prosedur pengusulan dan pencairan Dana Hibah perlu terus dilakukan secara contiuitas karen sebahagian penerima Dana Hibah setiap tahunnya berbeda	Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur, perlu disempurnakan dengan adanya				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<p>petunjuk teknis pelaksanaan yang terperinci sejak pengajuan pengusulan, pencairan hingga Laporan Pertanggung Jawaban sehingga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana hibah dapat terwujud dan terseragamkan</p> <p>Sudah dilaksanakan pemuktahiran data penerima dana bansos yang sesuai dengan syarat yang ada</p> <p>Perlu adanya platform teknis pengajuan hibah secara elektronik, sehingga bisa di akses oleh kelompok masyarakat yang memang memenuhi standar</p>

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									penerima dana hibah
				- Persentase produk perundang-undangan serta dokumentasi pembinaan dan pengawasan produk hukum yang difasilitasi dan dikoordinasikan	90 Persen	136 Persen	Raperda dan Raperbup yang diusulkan oleh OPD teknis belum sepenuhnya mencapai target	Memberikan asistensi/ pendampingan kepada OPD teknis	Melanjutkan Raperda yang masuk dalam Propemperkada yang belum mencapai target di tahun berikutnya
				Program Perekonomian dan Pembangunan					
				- Persentase Bahan Kebijakan Lingkup perekonomian yang ditindaklanjuti	99 Persen	77 Persen	Penyesuaian Pasal Yang tertuang di Perda, dengan peraturan yang ada di atasnya	Berkoordinasi dengan Kabupaten Tetangga satu Provinsi berkaitan dengan Perbup TJSLP yang sama	Akan dilaksanakan rapat FGD penentuan status perangkat desa
							Menunggu Penjadwalan Pembahasan Rapat Lanjutan Raperda Tentang Perusahaan Umum Daerah Nansarunai	Direncanakan Tahun 2025 diadakan Penjadwalan Pembahasan Rapat Lanjutan Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Nansarunai Kabupaten Barito Timur	
				- Persentase Bahan Kebijakan Lingkup pembangunan yang ditindaklanjuti	99 Persen	99 Persen	-	-	-
2.	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
				- Nilai LAKIP perangkat daerah	75 Poin	75 Poin	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD					
				- Nilai Survey Kepuasan pelayanan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	72 Persen	72 Persen	-	-	-
B. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan									
1.	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Litbang Daerah	Optimalisasi perencanaan dan penganggaran terpadu	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Nilai LAKIP perangkat daerah	70 Poin	70 Poin	-	-	Sudah dilaksanakan di tahun 2024 dengan dilakukan pendampingan dari Kemenpan dan hasilnya nilai Lakip Pemerintah Daerah. hal ini dapat terlihat dari peningkatan perolehan selama 3 tahun terakhir yakni tahun 2022 predikat CC (nilai 51,77) tahun 2023 predikat CC (nilai 57,96) atau naik sebanyak 6,19 point. Selanjutnya tahun 2024 naik ke predikat B

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									(nilai 60,85) atau naik 2,89 point.
				Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah					
				- Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD kedalam RKPD	97 Persen	97,5 Persen	-	-	
				Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah					
				- Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia kedalam RKPD	90 Persen	90 Persen	-	-	Sudah dibentuk Tim Penanggulangan Kemiskinan Bersama SKPD terkait bersinergi mengetasi kemiskinan melalui Rencana Aksi Daerah dengan pemetaan intervensi secara langsung.
				- Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam kedalam RKPD	95 Persen	95 Persen	-	-	
				- Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD bidang Infrastruktur dan	95 Persen	95 Persen	-	-	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDAS I DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kewilayahan kedalam RKPD					
2.	Keuangan	Badan Pendapatan Daerah		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
				- Nilai LAKIP perangkat daerah	70 Poin	52,5 Poin	Masih terdapat ketidakselarasan sasaran dan indikator kinerja pada Renstra, Indikator Kinerja Utama dan Pohon Kinerja. serta ada beberapa kekurangan pada dokumen Perencanaan, Pengukuran dan Evaluasi Kinerja yang belum diupload pada e-sakip reviu 2024	Lebih memperhatikan keselarasan pada tiap Dokumen yang saling berkaitan dan melengkapi kekurangan-kekurangan Dokumen yang diperlukan dalam tiap urusan Perencanaan, Pengukuran dan Evaluasi Kinerja.	
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah					
				- Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah	90 Persen	102,6 Persen	Lebih meningkatkan sosialisasi dan apresiasi bagi wajib pajak Pajak dan Retribusi Daerah	Lebih meningkatkan sosialisasi dan apresiasi bagi wajib pajak Pajak dan Retribusi Daerah	untuk tahun Anggaran 2024 realisasi Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan pertumbuhan pendapatan yang positif yaitu sebesar 1,08 persen dari realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 atau meningkat sebesar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDAS I DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Rp654.397.368,58 dari tahun 2023 yang hanya sebesar Rp60.228.818.807,03.
							Dalam Rangka peningkatan PAD pada tahun 2024 telah dilaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung yaitu : 1.Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengenai optimalisasi penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada tanggal 1 Oktober 2024; 2. Penerbitan Instruksi Bupati Barito Timur Nomor 21 Tahun 2024 yang mewajibkan masyarakat melampirkan bukti lunas pajak daerah dalam setiap layanan administrasi di lingkungan pemerintah kabupaten; 3. Koordinasi Pemanfaatan Aset Daerah (Lintas Jalan Kabupaten) Bersama OPD terkait dan KPK dengan tujuan Memiliki pandangan yang sama terkait tata cara pemungutan retribusi pemanfaatan aset Kabupaten berupa jalan perlintasan yang digunakan oleh Perusahaan yang akan aktif dilaksanakan pada tahun 2025; 4. Pengadaan e-POS/Tapping Box pada November 2024 yang merupakan bagian dari strategi pengawasan pajak secara real-time guna meningkatkan transparansi dan akurasi dalam pencatatan transaksi wajib pajak (WP); 5. Program "PBB-P2 Sapa ASN" yaitu Sosialisasi dilakukan saat apel gabungan OPD, sehingga mampu menjangkau banyak pihak sekaligus menciptakan budaya kepatuhan pajak di kalangan pegawai negeri; 6. Gerakan Cek Pajak Mandiri dan Pembayaran Non Tunai (Gercep MBA NONI) dimana Eksplorasi ini bertujuan untuk memahami lebih dalam aspek teknis, ekonomi, dan sosial dari Gerakan Cek Pajak Mandiri dan Pembayaran Non Tunai di Kabupaten Barito Timur; 7. PIWARAAN, yang telah diluncurkan secara resmi, merupakan langkah strategis Pemerintah Kabupaten Barito Timur dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Melalui sistem ini, pelaporan pajak dilakukan secara interaktif dan instan, yang tidak hanya memudahkan wajib pajak tetapi juga meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam pengelolaan pajak; 8. Pajak Daerah yang sepenuhnya telah menggunakan Elektronifikasi Pembayaran (QRIS, Internet/Mobile Banking, EDC) dan Retribusi Daerah hampir sepenuhnya telah menggunakan Elektronifikasi Pembayaran (QRIS, Internet/Mobile Banking, EDC) dan Semi Digital (ATM, Teller/Loket Bank).		
							Dengan adanya Gerakan Cek Pajak Mandiri dan Pembayaran Non Tunai (Gercep MBA NONI)meraih juara II Tingkat Provinsi sehingga adanya peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui kanal pembayaran non tunai/online dan Barito Timur mendapat raport dari Bank Indonesia sebagai kabupaten digital dengan skor 95.0%,Peringkat ke 5 dari		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
							14 kabupaten di kalteng dan peringkat 115 nasional dari 415 daerah di Indonesia untuk elektronifikasi transaksi pembayaran daerah.			
							PIWARAAN adalah salah satu upaya penggalian dan pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB). Melalui sistem ini, pelaporan pajak dilakukan secara interaktif dan instan, yang tidak hanya memudahkan wajib pajak tetapi juga meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam pengelolaan pajak. Dengan adanya PIWARAAN, diharapkan potensi pajak MLB dapat dimaksimalkan secara optimal, sehingga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD Kabupaten Barito Timur.			
		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Optimalisasi perencanaan dan penganggaran terpadu	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						
				- Nilai LAKIP perangkat daerah	75 Poin	56,35 Poin	Kurangnya pengetahuan dalam penyusunan LAKIP, sehingga masih terdapat kekurangan dan ketidakselarasan dokumen untuk dasar penilaian Akuntabilitas Kinerja.	Perlunya meningkatkan SDM yang terkait dengan perencanaan, pengukuran (pengumpulan data) dan pelaporan serta evaluasi akuntabilitas kinerja internal.	Akan mengikutsertakan Pegawai yang menyusun LAKIP	
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah						1.BPKAD selaku Sekretariat TAPD bersama dengan Pj. Bupati melaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap realisasi belanja SKPD pada setiap bulannya.
				- Ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan Perubahan RAPBD	Tepat Waktu	Status (tepat waktu/ tidak tepat waktu)	Tepat waktu	Status	Aplikasi SIPD yang masih dalam pengembangan	Perlunya pelatihan dan Bimtek tentang SIPD
				- Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel	100 Persen	100 Persen	Keterlambatan pencairan dana yang mengakibatkan target realisasi anggaran yang belum terpenuhi secara maksimal	Dalam proses pencairan anggaranjika terdapat syarat/berkas yang belum lengkap atau tidak sesuai dengan standar prosedur pencairananggaran, maka Bidang yang menangani akan segera menginformasikan ke SKPD tersebut untuk segera menindaklanjutinya		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDAS I DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu	Tepat Waktu Status (tepat waktu/ tidak tepat waktu)	Tepat Waktu Status	1. Aplikasi SIPD yang masih dalam pengembangan. 2. Sumber Daya Manusia yang belum memiliki tanggung jawab terhadap Tupoksi	Mengikuti pelatihan tentang SIPD dan melaksanakan Kaji Banding ke Daerah Lain	untuk menambah kekurangan belanja pada setiap SKPD khususnya belanja pegawai dan belanja pembangunan inftrastruktur. 3. Berdasarkan hasil audit BPK-RI terhadap SILPA TA. 2023 penggunaanya difokuskan untuk belanja pegawai, belanja Barang dan Jasa pada kegiatan SKPD serta kekurangan belanja infrastrukturnuk pembangunan daerah.
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah					1.Rekonsiliasi dan inventarisasi BMD telah dilaksanakan dengan baik dengan seluruh SKPD
				- Persentase BMD yang dikelola secara tertib dan akurat	100 Persen	95 Persen	Pengelolaan BMD harus lebih dikelola dan diinventarisir lebih baik dan harus tertib administrative	Melaksanakan penatausahaan BMD dengan inventarisir dan rekonsiliasi BMD yang rutin dengan semua SKPD	2. Telah mengikuti bimtek dan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									pelatihan untk menambah pengetahuan.
3.	Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Peningkatan kualitas manajemen SDM aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Nilai LAKIP perangkat daerah	70 Poin	52,7 Poin	Waktu pelaksanaan evaluasi internal oleh APIP dokumen Pohon kineja, dan kertas kerja revisi renstra tidak dapat di upload pada e-sakip reuiu	sudah melakukan perbaikan dokumen Pohon kineja, dan kertas kerja revisi renstra	-
				Program Kepegawaian Daerah					- ujian dinas dilaksanakan setiap tahun untuk Ujian Dinas TK.I dan Ujian Dinas TK.II
				- Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	95 Persen	72,86 Persen	Masih kurangnya minat PNS untuk mengikuti untuk mengikuti ijin dan tugas belajar	Pemkab memberikan kesempatan bagi PNS untuk mengikuti Ujian Dinas dan Tugas belajar	
				- Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	90 Persen	11,15 Persen	1. Kurangnya minat untuk menjadi pejabat Fungsional. 2. Terkendala ketiadaan Tim PAK di Kabupaten.	Perlu Peningkatan PNS JFU menjadi PNS Fungsional	- Tugas belajar diberi untuk PNS dan dianggarkan pada DPA BKPSDM setiap tahun khusus untuk Dr. Spesialis
				- Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	90 Persen	16,03 Persen	1. Keterbatasan pelaksanaan Bimtek dari Instansi Pembina 2. Terbatasnya kesempatan mengikuti Ujikom	Pemerintah Kabupaten memberikan Kesempatan Seluas-luasnya untuk PNS mengikuti Bimtek sesuai Jabatannya	- Ijin belajar (Tugas belajar mandiri) diikuti oleh seluruh ASN yang memiliki minat mengembangkan kompetensi
				- Indeks Kepuasan Pelayanan kepegawaian	3 Poin	3 Poin	-	-	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDAS I DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									dengan biaya sendiri
4.	Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Litbang Daerah		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah - Persentase kajian litbang yang diterapkan	40 Persen	40 Persen	-	-	
C. Unsur Pengawas Urusan Pemerintahan									
1.	Inspektorat Daerah	Inspektorat		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Nilai LAKIP perangkat daerah	75 Poin	71,10 Poin	Belum membuat laporan realisasi triwulanan dan semesteran, belum membuat cascading dan crosscutting	Membuat laporan realisasi triwulanan dan semesteran, belum membuat cascading dan crosscutting	Sudah dilaksanakan di tahun 2024 dengan dilakukan pendampingan dari Kemenpan dan hasilnya nilai Lakip Pemerintah Daerah. hal ini dapat terlihat dari peningkatan perolehan selama 3 tahun terakhir yakni tahun 2022 predikat CC (nilai 51,77) tahun 2023 predikat CC (nilai 57,96) atau naik sebanyak 6,19 point. Selanjutnya tahun 2024 naik ke predikat B

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									(nilai 60,85) atau naik 2,89 point.
			Penguatan Pengendalian dan Pengawasan pelaksanaan pemerintahan daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan - Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Terhadap Perangkat Daerah yang Diselesaikan	87 Persen	81,77 Persen	Adanya LHP baru terutama LHP Desa yang baru terbit dan belum sempat di tindak lanjuti oleh Desa, termasuk rekomendasi hasil pemeriksaan khusus	Melaksanakan rakor TL APIP per triwulan dan melakukan monitoring TL ke ke desa-desa secara periodik terutama ke Desa yang kurang aktif menindaklanjuti hasil temuan.	sudah dilaksanakan audit kinerja oleh inspektorat tahun 2024 : Audit kinerja ketahanan pangan Audit kinerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil Audit kinerja DPMPTSP Audit kinerja Dinas Pendidikan Audit Kinerja Dinas Kesehatan
				- Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK-RI yang Diselesaikan	87 Persen	86,01 Persen	karena masih banyak SKPD belum menindaklanjuti temuan BPK, khususnya temuan LHP lama dan LHP baru sudah hampir selesai ditindaklanjuti	mengintensifkan usaha TL ke masing-masing SKPD dan Desa	
				- Persentase Hasil Reviu yang Ditindaklanjuti	90 Persen	90 Persen	-	-	-
			Peningkatan pelayanan publik yang prima dan transparan.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi					
				- Nilai Kapabilitas APIP	3 Level	3 Level	-	-	-
				- Nilai Maturitas SPIP	3 Level	3 Level	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDAS I DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D.	Unsur Kewilayahan								
1.	Kecamatan	Kecamatan Dusun Tengah		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
				- Nilai LAKIP perangkat daerah	90 Poin	90 Poin	-	-	Telah dilaksanakan penganggaran untuk biaya diklat Aparatur
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					
				- Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100 Persen	99,95 Persen	Keterbatasan Fasilitas Sarana dan Prasarana pelayanan	menggunakan fasilitas yang tersedia pada tahun lalu dan mengoptimalkan kreatifitas SDM	
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					
				- Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	90 Persen	98,76 Persen	-	-	-
				Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum					
				- Persentase program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100 Persen	0 Persen	Kegiatan tidak dilaksanakan karena Karang taruna di beberapa Desa belum aktif	Dilaksanakan penganggaran di DPA 2025	
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					
				- Persentase lingkup tugas Urusan	90 Persen	25,93 Persen	Penganggaran dilaksanakan pada	Dilaksanakan penganggaran di DPA 2025	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDAS I DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah			perubahan Anggaran, tetapi tidak sempat terealisasi		
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa					-
				- Persentase desa yang mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	90 Persen	98,69 Persen	-	-	
		Kecamatan Pematang Karau		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
				- Nilai LAKIP perangkat daerah	70 Poin	75 Poin	-	-	Pelatihan sudah dianggarkan di Tahun 2025
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					
				- Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	80 Persen	80 Persen	-	-	-
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					
				- Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	80 Persen	80 Persen	-	-	-
				Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDAS I DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	-	-	-
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					
				- Persentase lingkup tugas Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 Persen	100 Persen	-	-	-
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
				- Persentase desa yang mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	85 Persen	85 Persen	-	-	-
		Kecamatan Awang		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
				- Nilai LAKIP perangkat daerah	80 Poin	80 Poin	Kurangnya Data yang didapatkan dalam Penyusunan LAKIP dan tidak akurat atau tidak lengkap, serta keterbatasan pegawai yang terlatih dalam penyusunan LAKIP	Melaksanakan Pelatihan untuk mempercepat proses pengolahan data, penataan pegawai serta mengikuti bimbingan teknis tentang cara pengumpulan dan pengolahan data yang tepat.	Pelatihan sudah dianggarkan di Tahun 2025
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					
				- Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100 Persen	100 Poin	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDAS I DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					
				- Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	100 Persen	95 Persen	Ada Beberapa Usulan masyarakat yang tidak terakomodir dalam perencanaan pembangunan, karena mengutamakan skala prioritas	Menetapkan usulan prioritas dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pelaksanaan perencanaan pembangunan kedepan	
				Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum					
				- Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti	100	100 Persen	-	-	-
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					
				- Persentase lingkup tugas Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 Persen	100 Poin	-	-	-
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
				- Persentase desa yang mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	100 Persen	-	-	-
		Kecamatan Patangkep Tutui		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
				- Nilai LAKIP perangkat daerah	80 Poin	75 Poin	Kurangnya Data yang didapatkan dalam Penyusunan LAKIP dan tidak akurat atau	Melaksanakan Pelatihan untuk mempercepat proses pengolahan data, penataan pegawai serta mengikuti	Pelatihan sudah dianggarkan di Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDAS I DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							tidak lengkap, serta keterbatasan pegawai yang terlatih dalam penyusunan LAKIP	bimbingan teknis tentang cara pengumpulan dan pengolahan data yang tepat.	
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					
				- Persentase pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	94 Persen	100 Persen	-	-	-
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					
				- Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	95 Persen	99,66 Persen	-	-	-
				Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum					
				- Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti	94 Persen	100 Persen	-	-	-
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					
				- Persentase lingkup tugas Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	94 Persen	100 Persen	-	-	-
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- Persentase desa yang mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	94 Persen	100 Persen	-	-	-
		Kecamatan Dusun Timur		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
				- Nilai LAKIP perangkat daerah	70 Poin	75 Poin	belum optimalnya SDM yang ada, SDM yang ada kurang mengupgrade potensi dan kemampuan	bimtek, sosialisasi, pelatihan	Untuk anggaran peningkatan SDM sudah dianggarkan di Tahun 2025 dan akan dilaksanakan di Tahun 2025
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					
				- Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100 Persen	100 Persen	-	-	-
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					
				- Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	85 Persen	100 Persen	-	-	-
				Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum					
			- Persentase pengaduan masyarakat terkait	100 Persen	100 Persen	-	-	-	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				trantibum yang ditindaklanjuti					
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					
				- Persentase lingkup tugas Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 Persen	100 Persen	-	-	-
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa					-
				- Persentase desa yang mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	100 Persen	-	-	
		Kecamatan Benua Lima		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
				- Nilai LAKIP perangkat daerah	70 Poin	70 Poin	-	-	Telah dilaksanakan penganggaran untuk biaya diklat maupun bimtek Aparatur di Kecamatan Benua Lima
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					
				- Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100 Persen	100 Persen	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDAS I DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					
				- Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	85 Persen	80 Persen	Ada beberapa sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Taniran yang tidak bisa terlaksana khususnya belanja modal barang karena nilai SSH/SBU yang tidak update pada SIPD sehingga tidak ada penyedia yang bersedia pengadaan dan bisa menimbulkan kerugian. Pembagunan jalan Kelurahan berdasar Permendagri Nomor 30 Tahun 2018 Bab 2 Pasal 4 ayat (2) disebutkan hanya untuk jalan pemukiman/ jalan poros/ sarana dan prasarana transportasi lainnya bukan untuk jalan kuburan sehingga tidak bisa dilaksanakan.	Agar Tim SSH/SBU merevisi dan menyesuaikan harga terbaru dan terupdate setiap tahun dalam SIPD sesuai survei harga pasar dan hasil review dari Inspektorat. Untuk pembangunan jalan kuburan sudah di anggarkan oleh dinas PUPR pada tahun 2025.	
				Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum					
				- Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti	100 Persen	95 Persen	Masih belum optimalnya pelaksanaan koordinasi bidang ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan	Meningkatkan koordinasi melalui rapat-rapat, pertemuan, dialog dan kunjungan lapangan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					
				- Persentase lingkup tugas Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 Persen	100 Persen	-	-	-
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
				- Persentase desa yang mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	100 Persen	-	-	-
		Kecamatan Paku		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
				- Nilai LAKIP perangkat daerah	70 Poin	90 Poin	-	-	Diusulkan pada perubahan anggaran Tahun 2025
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					
				- Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	85 Persen	85 Persen	-	-	
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					
				- Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	85 Persen	85 Persen	-	-	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDAS I DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum					
				- Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti	85 Persen	95 Persen	-	-	
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					
				- Persentase lingkup tugas Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	85 Persen	95 Persen	-	-	
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
				- Persentase desa yang mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	95 Persen	100 Persen	-	-	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
		Kec. Paju Epat		- Nilai LAKIP perangkat daerah	75 Poin	75 Poin	-	-	Belum teranggarkan untuk Bimtek tahun 2025 dan akan di usul kembali pada anggaran perubahan tahun 2025.
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDAS I DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	93 Persen	100 Persen	-	-	
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					
				- Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	81 Persen	100 Persen	-	-	
				Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum					
				- Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti	95 Persen	100 Persen	-	-	
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					
				- Persentase lingkup tugas Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	85 Persen	100 Persen	-	-	
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
				- Persentase desa yang mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	90 Persen	100 Persen	-	-	
		Kecamatan Raren Batuah		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDAS I DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- Nilai LAKIP perangkat daerah	70 Poin	75 Poin	Data yang digunakan dalam LAKIP sering kali tidak akurat atau tidak lengkap, serta keterbatasan pegawai yang terlatih dalam penyusunan LAKIP	Gunakan teknologi informasi untuk mempercepat proses pengolahan data, penataan pegawai serta melakukan pelatihan untuk pegawai tentang cara pengumpulan dan pengolahan data yang tepat.	Anggaran untuk peningkatan SDM Aparatur sudah di anggarkan pada Tahun 2025
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					
				- Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	75 Persen	85 Persen	Pelaksanaan pelayanan yang terlaksana saat ini hanya berhubungan dengan pelayanan non perijinan, sedangkan kegiatan perijinan dilaksanakan oleh DPMPSTP Kab Barito Timur	Memberikan pelatihan kepada pegawai untuk meningkatkan kompetensi dalam pelayanan	
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					
				- Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	75 Persen	80 Persen	Masih terdapat usulan masyarakat yang tidak terakomodir dalam perencanaan pembanguann	Menetapkan usulan prioritas dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pelaksanaan perencanaan pembangunan kedepan	
				Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum					
				- Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti	80 Persen	80 Persen	-	Melakukan evaluasi dan monitoring terkait pengaduan masyarakat	
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- Persentase lingkup tugas Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	75 Persen	85 Persen	-	-	
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
				- Persentase desa yang mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	90 Persen	90 Persen	-	-	
		Kecamatan Karusen Janang		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
				- Nilai LAKIP perangkat daerah	70 Poin	80 poin	Kurang optimalnya penggunaan teknologi dalam penyusunan laporan serta rendahnya koordinasi antarunit kerja juga menjadi kendala yang memengaruhi kualitas laporan. Akibatnya, nilai LAKIP yang dihasilkan cenderung rendah dan tidak mencerminkan akuntabilitas kinerja yang baik, sehingga berpengaruh pada kepercayaan publik terhadap kinerja perangkat daerah.	Pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi langkah penting untuk mempermudah proses pelaporan dan meningkatkan akurasi data. Lebih jauh, meningkatkan koordinasi antarunit kerja dan mendorong budaya kerja yang berorientasi pada hasil dapat membantu perangkat daerah mencapai standar akuntabilitas yang lebih baik. Dengan pendekatan ini, nilai LAKIP perangkat daerah dapat meningkat secara signifikan.	Peningkatan sarana prasarana pendukung dan pelatihan SDM sudah dianggarkan di Tahun 2025
				Program Penyelenggaraan					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDAS I DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					
				- Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	83 Persen	85 Persen	-	-	-
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					
				- Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	85 Persen	85 Persen	-	-	-
				Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum					
				- Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti	83 Persen	85 Persen	-	-	-
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum					
				- Persentase lingkup tugas Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	80 Poin	80 Persen	-	-	-
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDAS I DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- Persentase desa yang mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	86 Persen	87 Persen	-	-	-
E. Unsur Pemerintahan Umum									
1.	Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
				- Nilai LAKIP perangkat daerah	81 Poin	58,56 Poin	Kurangnya SDM Aparatur yang mempengaruhi capaian kinerja	Akan mengusulkan penambahan ASN agar dapat terpenuhi sesuai dengan ANJAB dan ABK	
				Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan					
				- Persentase Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang dilaksanakan	82 Persen	100 Persen	-	-	-
				Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik					
				- Presentase peningkatan masyarakat yang terlibat pendidikan etika budaya dan politik	64 Persen	99 Persen	-	-	
				Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDAS I DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- Presentase organisasi kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi	73 Persen	99 Persen	-	-	-
				Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya					
				- Presentase Peningkatan Masyarakat yang Terlibat Dalam Kewaspadaan Dini Masyarakat	73 Persen	74 Persen	-	-	-
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial					
				- Presentase Potensi Konflik Sosial Yang ditindaklanjuti	90 Poin	91 Persen	-	-	-

Analisis pelaksanaan Unsur Pendukung, Penunjang, Pengawas Urusan, Kewilayahan dan Pemerintahan Umum pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Unsur Pendukung Urusan Pemerintah

➤ Sekretariat Daerah

Telah dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; Program Perekonomian dan Pembangunan. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah; Penataan Organisasi; Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan; Administrasi Tata Pemerintahan; Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat; Fasilitasi dan Koordinasi Hukum; Fasilitasi Kerjasama Daerah; Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian; Pelaksanaan Administrasi Pembangunan; Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa; Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam.

a. Permasalahan

- Beberapa Pengusul Dana Hibah, tidak mengajukan proposal pencairan, sehingga proses pencairan dana tidak dapat dilakukan.
- Raperda dan Raperbup yang diusulkan oleh OPD teknis belum sepenuhnya mencapai target.
- Penyesuaian Pasal Yang tertuang di Perda, dengan peraturan yang ada di atasnya.
- Menunggu Penjadwalan Pembahasan Rapat Lanjutan Raperda Tentang Perusahaan Umum Daerah Nansarunai.

b. Solusi

- Sosialisasi tentang prosedur pengusulan dan pencairan Dana Hibah perlu terus dilakukan secara contiuitas karen sebahagian penerima Dana Hibah setiap tahunnya berbeda.
- Memberikan asistensi/ pendampingan kepada OPD teknis.

- Berkoordinasi dengan Kabupaten Tetangga satu Provinsi berkaitan dengan Perbup TJSPL yang sama.
- Direncanakan Tahun 2025 diadakan Penjadwalan Pembahasan Rapat Lanjutan Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Nansarunai Kabupaten Barito Timur.

➤ **Sekretariat DPRD**

Telah dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dprd. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD; Layanan Administrasi DPRD; Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD; Pembahasan Kebijakan Anggaran; Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan; Peningkatan Kapasitas DPRD; Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat; Fasilitasi Tugas DPRD.

a. Permasalahan

- Tidak Ada Permasalahan.

2. Unsur Penunjang Urusan Pemerintah

➤ **Perencanaan (Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah)**

Telah dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan; Analisis Data

dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam); Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

a. Permasalahan

- Tidak Ada Masalah.

b. Solusi

- Tidak Ada Masalah.

➤ **Keuangan(Badan Pendapatan Daerah)**

Telah dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Pengelolaan Keuangan Daerah; Program Pengelolaan Pendapatan Daerah. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah; Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah.

a. Permasalahan

- Masih terdapat ketidakselarasan pencantuman tujuan, sasaran dan indikator kinerja pada Renstra, Indikator Kinerja Utama dan Pohon Kinerja. serta ada beberapa kekiurangan pada dokumen Perencanaan, Pengukuran dan Evaluasi KInerja yang belum diupload pada e-sakip reuiu 2024.
- Masih kurangnya sosialisasi dan apresiasi bagi wajib pajak Pajak dan Retribusi Daerah.

b. Solusi

- Lebih memperhatikan keselarasan pada tiap Dokumen yang saling berkaitan dan melengkapi kekurangan-kekurangan Dokumen yang diperlukan dalam tiap urusan Perencanaan, Pengukuran dan Evaluasi Kinerja.

- Lebih meningkatkan sosialisasi dan apresiasi bagi wajib pajak Pajak dan Retribusi Daerah.

➤ **Keuangan(Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)**

Telah dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Pengelolaan Keuangan Daerah; Program Pengelolaan Barang Milik Daerah. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah; Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah; Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah; Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah; Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah; Pengelolaan Barang Milik Daerah.

a. Permasalahan

- Kurangnya pengetahuan dalam penyusunan LAKIP.
- Aplikasi SIPD yang masih dalam pengembangan.
- Keterlambatan pencairan dana yang mengakibatkan target realisasi anggaran yang belum terpenuhi secara maksimal.
- Sumber Daya Manusia yang belum memiliki tanggung jawab terhadap Tupoksi.
- Pengelolaan BMD masih kurang dalam hal dikelola dan administrasi

b. Solusi

- Perlunya mengikuti Bimtek Penyusunan LAKIP.
- Perlunya pelatihan dan Bimtek tentang SIPD.
- Dalam proses pencairan anggaranjika terdapat syarat/berkas yang belum lengkap atau tidak sesuai dengan standar prosedur pencairananggaran, maka Bidang yang menangani akan segera menginformasikan ke SKPD tersebut untukl segera menindaklanjutinya.

- Mengikuti pelatihan tentang SIPD dan melaksanakan Kaji Banding ke Daerah Lain.
- Melaksanakan penatausahaan BMD dengan inventarisir dan rekonsiliasi BMD yang rutin dengan semua SKPD.

➤ **Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan (Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia)**

Telah dilaksanakn Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Kepegawaian Daerah. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN; Mutasi dan Promosi ASN; Pengembangan Kompetensi ASN; Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.

a. Permasalahan

- Waktu pelaksanaan evaluasi internal oleh APIP dokumen Pohon kineja, dan kertas kerja revisi renstra tidak dapat di upload pada e-sakip reviu.
- Masih kurangnya minat PNS untuk mengikuti untuk mengikuti ijin dan tugas belajar.
- Kurangnya minat untuk menjadi pejabat Fungsional.
- Terkendala ketiadaan Tim PAK di Kabupaten.
- Keterbatasan pelaksanaan Bimtek dari Instansi Pembina.
- Terbatasnya kesempatan mengikuti Ujikom.

b. Solusi

- Sudah melakukan perbaikan dokumen Pohon kineja, dan kertas kerja revisi renstra
- Pemkab memberikan kesempatan bagi PNS untuk mengikuti Ujian Dinas dan Tugas belajar.
- Perlu Pengangkatan PNS JFU menjadi PNS Fungsional.
- Pemerintah Kabupaten memberikan Kesempatan Seluas-luasnya untuk PNS mengikuti Bimtek sesuai Jabatannya.

➤ **Penelitian dan Pengembangan (Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah)**

Telah dilaksanakan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD; Layanan Administrasi DPRD; Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD; Pembahasan Kebijakan Anggaran; Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan; Peningkatan Kapasitas DPRD; Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat; Fasilitasi Tugas DPRD

Tidak ada permasalahan.

3. Unsur Penunjang Urusan Pemerintah

➤ **Inspektorat Daerah (Inspektorat)**

Telah dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Penyelenggaraan Pengawasan; Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Penataan Organisasi; Penyelenggaraan Pengawasan Internal; Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu; Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan; Pendampingan dan Asistensi.

a. Permasalahan

- Belum membuat laporan realisasi triwulanan dan semesteran, belum membuat cascading dan crosscutting.
- Adanya LHP baru terutama LHP Desa yang baru terbit dan belum sempat di tindak lanjuti oleh Desa, termasuk rekomendasi hasil pemeriksaan khusus.
- karena masih banyak SKPD belum menindaklanjuti temuan BPK, khususnya temuan LHP lama dan LHP baru sudah hampir selesai ditindaklanjuti.

b. Solusi

- Membuat laporan realisasi triwulanan dan semesteran, belum membuat cascading dan crosscutting.
- Melaksanakan rakor TL APIP per triwulan dan melakukan monitoring TL ke ke desa-desa secara periodik terutama ke Desa yang kurang aktif menindaklanjuti hasil temuan..
- mengintensifkan usaha TL ke masing-masing SKPD dan Desa.

4. Unsur Kewilayahan

➤ **Kecamatan Dusun Tengah**

Telah dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik; Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan; Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan; Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan; Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

a. Permasalahan

- .

- Keterbatasan Fasilitas Sarana dan Prasarana pelayanan.
- Kegiatan tidak dilaksanakan karena Karang taruna di beberapa Desa belum aktif.
- Penganggaran dilaksanakan pada perubahan Anggaran, tetapi tidak sempat terealisasi.

b. Solusi

- Menggunakan fasilitas yang tersedia pada tahun lalu dan mengoptimalkan kreatifitas SDM.
- Dilaksanakan penganggaran di DPA 2025.

➤ **Kecamatan Pematang Karau**

Telah dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

a. Permasalahan

- Tidak ada Permasalahan.
-

➤ **Kecamatan Awang**

Telah dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik; Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.

a. Permasalahan

- Kurangnya Data yang didapatkan dalam Penyusunan LAKIP dan tidak akurat atau tidak lengkap, serta keterbatasan pegawai yang terlatih dalam penyusunan LAKIP.
- Ada Beberapa Usulan masyarakat yang tidak terakomodir dalam perencanaan pembangunan, karena mengutamakan skala prioritas

b. Solusi

- Melaksanakan Pelatihan untuk mempercepat proses pengolahan data, penataan pegawai serta mengikuti bimbingan teknis tentang cara pengumpulan dan pengolahan data yang tepat.
- Menetapkan usulan prioritas dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pelaksanaan perencanaan pembangunan kedepan.

➤ **Kecamatan Patangkep Tutui**

Telah dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik; Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan; Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan; Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah; Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

a. Permasalahan

- Kurangnya Data yang didapatkan dalam Penyusunan LAKIP dan tidak akurat atau tidak lengkap, serta keterbatasan pegawai yang terlatih dalam penyusunan LAKIP.

b. Solusi

- Melaksanakan Pelatihan untuk mempercepat proses pengolahan data, penataan pegawai serta mengikuti bimbingan teknis tentang cara pengumpulan dan pengolahan data yang tepat.

➤ **Kecamatan Dusun Timur**

Telah dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik; Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan; Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah; Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

a. Permasalahan

- Belum optimalnya SDM yang ada, SDM yang ada kurang mengupgrade potensi dan kemampuan.

b. Solusi

- Mengikuti bimtek, sosialisasi, pelatihan.

➤ **Kecamatan Benua Lima**

Telah dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa; Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan; Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

a. Permasalahan

- Ada beberapa sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Taniran yang tidak bisa terlaksana khususnya belanja modal barang karena nilai SSH/SBU yang tidak update pada SIPD sehingga tidak ada penyedia yang bersedia pengadaan dan bisa menimbulkan kerugian.
- Masih belum optimalnya pelaksanaan koordinasi bidang ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan.

b. Solusi

- Agar Tim SSH/SBU merevisi dan menyesuaikan harga terbaru dan terupdate setiap tahun dalam SIPD sesuai survei harga pasar dan hasil review dari Inspektorat. Untuk pembangunan jalan kuburan sudah di anggarkan oleh dinas PUPR pada tahun 2025.
- Meningkatkan koordinasi melalui rapat-rapat, pertemuan, dialog dan kunjungan lapangan.

➤ **Kecamatan Paku**

Telah dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik; Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak

Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Tidak ada Permasalahan

➤ **Kecamatan Paju Epat**

Telah dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.

Tidak ada Permasalahan.

➤ **Kecamatan Raren Batuah**

Telah dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.

a. Permasalahan

- Data yang digunakan dalam LAKIP sering kali tidak akurat atau tidak lengkap, serta keterbatasan pegawai yang terlatih dalam penyusunan LAKIP.
- Pelaksanana pelayanan yang terlaksana saat ini hanya berhubungan dengan pelayanan non perijinan, sedangkan kegiatan perijinan dilaksanakan oleh DPMPTSP Kab Barito Timur
- Masih terdapat usulan masyarakat yang tidak terakomodir dalam perencanaan pembangunan.

b. Solusi

- Gunakan teknologi informasi untuk mempercepat proses pengolahan data, penataan pegawai serta melakukan pelatihan untuk pegawai tentang cara pengumpulan dan pengolahan data yang tepat.
- Memberikan pelatihan kepada pegawai untuk meningkatkan kompetensi dalam pelayanan.
- Menetapkan usulan prioritas dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pelaksanaan perencanaan pembangunan kedepan.

➤ **Kecamatan Karusen Janang**

Telah dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik; Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa; Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

a. Permasalahan

- Kurang optimalnya penggunaan teknologi dalam penyusunan laporan serta rendahnya koordinasi antarunit kerja juga menjadi kendala yang memengaruhi kualitas laporan. Akibatnya, nilai LAKIP yang dihasilkan cenderung rendah dan tidak mencerminkan akuntabilitas kinerja yang baik, sehingga berpengaruh pada kepercayaan publik terhadap kinerja perangkat daerah.

b. Solusi

- Pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi langkah penting untuk mempermudah proses pelaporan dan meningkatkan akurasi data. Lebih jauh, meningkatkan koordinasi antarunit kerja dan mendorong budaya

kerja yang berorientasi pada hasil dapat membantu perangkat daerah mencapai standar akuntabilitas yang lebih baik. Dengan pendekatan ini, nilai LAKIP perangkat daerah dapat meningkat secara signifikan.

5. Unsur Pemerintahan Umum

➤ Kesatuan bangsa dan Politik (Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas)

Telah dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan; Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik; Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan; Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya; Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan; Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi; Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan; Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya; Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

a. Permasalahan

- Kurangnya SDM Aparatur yang mempengaruhi capaian kinerja.

b. Solusi

- Akan mengusulkan penambahan ASN agar dapat terpenuhi sesuai dengan ANJAB dan ABK.

3.2. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Menurut Penjelasan atas Pasal 16 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan "Kebijakan Strategis" adalah kebijakan yang mempunyai dampak secara luas terhadap masyarakat di daerah yang bersangkutan dan/atau membawa konsekuensi pembebanan terhadap APBD.

Kebijakan yang diambil meliputi Peraturan Bupati Barito Timur dan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur pada Tahun 2024. Kebijakan ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis. Produk hukum daerah Kabupaten Barito Timur yang terbit pada tahun 2024 seperti terdapat pada Tabel 3.2.1 berikut :

Tabel 3.2.1
Produk Hukum sebagai Kebijakan Strategis di Kabupaten Barito Timur Tahun 2024

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	2	3	4
1	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Peraturan Daerah Nomor 1 Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 Nomor 81 tanggal 1 Maret 2024, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64	Transparansi, akuntabilitas dan efisiensi Pengelolaan APBD
2	Kawasan Tanpa Rokok	Peraturan Daerah Nomor 2 Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 Nomor 82 tanggal 17 Juli 2024, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 65	Mencapai ujuan pembangunan nasional, masyarakat yang sehat lahir batin dengan derajat tinggi
3	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Peraturan Daerah Nomor 3 Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 Nomor 83 tanggal 12 September 2024	Transparansi, akuntabilitas dan efisiensi Pengelolaan APBD
4	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Peraturan Daerah Nomor 4 Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 Nomor 84 tanggal 17 September 2024, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 66	Transparansi, akuntabilitas dan efisiensi Pengelolaan APBD
5	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045	Peraturan Daerah Nomor 5 Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 Nomor 85 tanggal 5 November	Transparansi, akuntabilitas dan efisiensi Pengelolaan APBD

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	2	3	4
		2024, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 67	
6	Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024	Peraturan Bupati Nomor 1 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 Nomor 182, tanggal 22 Januari 2024	Transparansi, akuntabilitas dan efisiensi Pengelolaan APBD
7	Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2023 Kepada Desa Untuk Tahun Anggaran 2024	Peraturan Bupati Nomor 2 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 Nomor 181, tanggal 22 Januari 2024	Transparansi, akuntabilitas dan efisiensi Pengelolaan APBD
8	Pedoman Pengelolaan Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur	Peraturan Bupati Nomor 3 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 Nomor 183, tanggal 22 Januari 2024	Transparansi, akuntabilitas dan efisiensi Pengelolaan APBD
9	Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024	Peraturan Bupati Nomor 4 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 Nomor 184, tanggal 22 Januari 2024	Tertib, efisiensi, dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
10	Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024	Peraturan Bupati Nomor 5 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 Nomor 185, tanggal 7 Maret 2024	Transparansi, akuntabilitas dan efisiensi Pengelolaan APBD
11	Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur	Peraturan Bupati Nomor 6 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 Nomor 186, tanggal 7 Maret 2024	Perjalanan dinas dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab
12	Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024	Peraturan Bupati Nomor 7 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 Nomor 187, tanggal 20 Maret 2024	Transparansi, akuntabilitas dan efisiensi Pengelolaan APBD
13	Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur	Peraturan Bupati Nomor 8 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 Nomor 188, tanggal 16 Mei 2024	Transparansi, akuntabilitas dan efisiensi Pengelolaan APBD
14	Biaya Penunjang Operasional Bupati Dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2024	Peraturan Bupati Nomor 9 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 Nomor 189, tanggal 31 Mei 2024	Transparansi, akuntabilitas dan efisiensi Pengelolaan APBD

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	2	3	4
15	Tunjangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024	Peraturan Bupati Nomor 10 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 Nomor 190, tanggal 31 Mei 2024	Transparansi, akuntabilitas dan efisiensi Pengelolaan APBD
16	Sistem Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024	Peraturan Bupati Nomor 11 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 Nomor 191, tanggal 7 Juni 2024	Mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah dan profesional
17	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024	Peraturan Bupati Nomor 12 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 Nomor 192, tanggal 7 Juni 2024	Transparansi, akuntabilitas dan efisiensi Pengelolaan APBD
18	Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Peraturan Bupati Nomor 13 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 Nomor 193, tanggal 19 Juni 2024	Transparansi, akuntabilitas dan efisiensi Pengelolaan APBD
19	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Peraturan Bupati Nomor 14 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 Nomor 194, tanggal 25 Juni 2024	Transparansi, akuntabilitas dan efisiensi Pengelolaan APBD
20	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2025	Peraturan Bupati Nomor 15 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 Nomor 196, tanggal 1 Juli 2024	Transparansi, akuntabilitas dan efisiensi Pengelolaan APBD
21	Tata Cara Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan Quick Respon Indonesia Standard Giro Bendahara Pengeluaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah	Peraturan Bupati Nomor 16 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 Nomor 196, tanggal 1 Juli 2024	Transparansi, akuntabilitas dan efisiensi Pengelolaan APBD
22	Koordinasi Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Barito Timur	Peraturan Bupati Nomor 17 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2025 Nomor 197, tanggal 15 Juli 2024	Tata kehidupan yang tertib, tenteram, dan damai
23	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja	Peraturan Bupati Nomor 18 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2025 Nomor 198, tanggal 18 Juli 2024	Transparansi, akuntabilitas dan efisiensi Pengelolaan APBD

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	2	3	4
	Daerah Kabupaten Barito Timur		
24	Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024	Peraturan Bupati Nomor 19 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 Nomor 199, tanggal 24 Juli 2024	Transparansi, akuntabilitas dan efisiensi Pengelolaan APBD
25	Pedoman Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Barito Timur	Peraturan Bupati Nomor 20 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 Nomor 200, tanggal 29 Juli 2024	Pedoman dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Daerah Kabupaten Barito Timur
26	Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Peraturan Bupati Nomor 21 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 Nomor 201, tanggal 30 Juli 2024	Mewujudkan Perlindungan terhadap masyarakat Kabupaten Barito Timur
27	Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kode Etik Polisi Pamong Praja	Peraturan Bupati Nomor 22 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 Nomor 202, tanggal 31 Juli 2024	Mencapai Kondisi Dinamis agar Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat Melakukan kegiatan dengan tenang, tertib, dan teratur.
28	Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur	Peraturan Bupati Nomor 23 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 Nomor 203, tanggal 5 Agustus 2024	Untuk Menjamin Keselarasan Potensi Pegawai Negara Sipil
29	Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah	Peraturan Bupati Nomor 24 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 Nomor 204, tanggal 5 Agustus 2024	Transparansi, akuntabilitas dan efisiensi Pengelolaan APBD
30	Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah	Peraturan Bupati Nomor 25 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 Nomor 205, tanggal 5 Agustus 2024	Transparansi, akuntabilitas dan efisiensi Pengelolaan APBD
31	Tata Cara Perhitungan Potensi Pajak Daerah Dan Proyeksi Pendapatan Pajak Daerah	Peraturan Bupati Nomor 26 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 Nomor 206, tanggal 5 Agustus 2024	Transparansi, akuntabilitas dan efisiensi Pengelolaan APBD
32	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Nomor 27 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 Nomor 207, tanggal 12 September 2024	Transparansi, akuntabilitas dan efisiensi Pengelolaan APBD

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	2	3	4
33	Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Peraturan Bupati Nomor 28 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 Nomor 208, tanggal 17 September 2024	Transparansi, akuntabilitas dan efisiensi Pengelolaan APBD
34	Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Barito Timur	Peraturan Bupati Nomor 29 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 Nomor 209, tanggal 28 November 2024	Mengoptimalkan Kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Melakukan Penegakan Perda Dan Perkada
35	Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Barito Timur	Peraturan Bupati Nomor 30 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 Nomor 210, tanggal 10 Desember 2024	Mendukung Transformasi Pelayanan Kesehatan
36	Pedoman Pelaksanaan Rekam Medis Elektronik Pada Fasilitas Layanan Kesehatan Di Kabupaten Barito Timur	Peraturan Bupati Nomor 31 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 Nomor 211, tanggal 10 Desember 2024	Mendukung Transformasi Pelayanan Kesehatan
37	Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Barito Timur	Peraturan Bupati Nomor 32 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 Nomor 212, tanggal 10 Desember 2024	Mendukung Transformasi Pelayanan Kesehatan
38	Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Barito Timur	Peraturan Bupati Nomor 33 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 Nomor 213, tanggal 10 Desember 2024	Mendukung Transformasi Pelayanan Kesehatan
39	Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur	Peraturan Bupati Nomor 34 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 Nomor 214, tanggal 17 Desember 2024	Transparansi, akuntabilitas dan efisiensi Pengelolaan APBD
40	Analisis Standar Belanja Non Fisik Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2025	Peraturan Bupati Nomor 35 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 Nomor 215, tanggal 20 Desember 2024	Transparansi, akuntabilitas dan efisiensi Pengelolaan APBD
41	Strategi Sanitasi Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2027	Peraturan Bupati Nomor 36 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 Nomor 216, tanggal 20 Desember 2024	Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat
42	Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan	Peraturan Bupati Nomor 37 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024	Transparansi, akuntabilitas dan efisiensi Pengelolaan APBD

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	2	3	4
	Gedung Bagi Masyarakat Perpenghasilan Rendah	Nomor 217, tanggal 24 Desember 2024	
43	Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagi Masyarakat Perpenghasilan Rendah	Peraturan Bupati Nomor 38 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 Nomor 218, tanggal 27 Desember 2024	Transparansi, akuntabilitas dan efisiensi Pengelolaan APBD

Sumber : *Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Timur (2024)*

Selama Tahun 2024 ada terdapat 43 produk hukum yang dihasilkan sebagai kebijakan strategis untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat dan pemerintahan dengan dasar hukum yang jelas. Produk hukum tersebut terdiri dari 5 Peraturan Daerah dan 38 Peraturan Bupati.

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran 2023

Penyampaian LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Barito Timur pada Selasa, 22 Maret 2024 seperti yang dinyatakan dalam Risalah Paripurna DPRD pada Lampiran 2. Hal ini bersesuaian dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Pasal 19 Ayat (1) yang menyatakan Kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sedangkan menurut Pasal 19 Ayat (1) menyatakan bahwa Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melakukan pembahasan LKPJ. Rekomendasi DPRD atas LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 telah disampaikan dalam Rapat Paripurna Istimewa pada Jum'at, 16 Mei 2024 seperti dinyatakan dalam Risalah Paripurna DPRD pada Lampiran 3. Adapun Surat Keputusan DPRD Kabupaten Barito Timur Nomor 188.4/9/DPRD/2024 tanggal 16 Mei 2024 tentang Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023 seperti terlampir pada Lampiran 4.

Laporan tentang tindak lanjut pemerintah daerah terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.1
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran 2023

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	2	3	4
BADAN PENDAPATAN DAERAH			
Pengelolaan Pendapatan Daerah			
a.	Sangat perlu dipetakan masalah penyebab tidak tercapainya Optimalisasi pendapatan daerah dilakukan dengan mensinergikan program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan pertumbuhan pendapatan yang positif yaitu sebesar 1,08 persen dari realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 atau meningkat sebesar Rp654.397.368,58 dari tahun 2023 yang hanya sebesar Rp60.228.818.807,03.	Meningkatkan sumber pendapatan daerah di Kabupaten Barito Timur.
b.	Dalam konteks pengelolaan pendapatan daerah di Kabupaten Barito Timur sumber pendapatan utama daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh sebab itu maka perlu adanya strategi-strategi dalam rangka peningkatan PAD diwaktu yang akan datang. Disamping itu sumber-sumber pendapatan lainnya juga perlu ditingkatkan antara lain bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), lain-lain pendapatan yang sah, Dana Perimbangan sehingga proporsi DAU secara bertahap dapat mulai digantikan oleh sumber-sumber pendapatan yang dapat diupayakan oleh daerah.	Dalam Rangka peningkatan PAD pada tahun 2024 telah dilaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung yaitu : 1.Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengenai optimalisasi penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada tanggal 1 Oktober 2024; 2. Penerbitan Instruksi Bupati Barito Timur Nomor 21 Tahun 2024 yang mewajibkan masyarakat melampirkan bukti lunas pajak daerah dalam setiap layanan administrasi di lingkungan pemerintah kabupaten; 3. Koordinasi Pemanfaatan Aset Daerah (Lintas Jalan Kabupaten) Bersama OPD terkait dan KPK dengan tujuan Memiliki pandangan yang sama terkait tata cara pemungutan retribusi pemanfaatan aset Kabupaten	Meningkatkan sumber pendapatan daerah di Kabupaten Barito Timur.

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	2	3	4
		<p>berupa jalan perlintasan yang digunakan oleh Perusahaan yang akan aktif dilaksanakan pada tahun 2025; 4. Pengadaan e-POS/Tapping Box pada November 2024 yang merupakan bagian dari strategi pengawasan pajak secara real-time guna meningkatkan transparansi dan akurasi dalam pencatatan transaksi wajib pajak (WP); 5. Program "PBB-P2 Sapa ASN" yaitu Sosialisasi dilakukan saat apel gabungan OPD, sehingga mampu menjangkau banyak pihak sekaligus menciptakan budaya kepatuhan pajak di kalangan pegawai negeri; 6. Gerakan Cek Pajak Mandiri dan Pembayaran Non Tunai (Gercep MBA NONI) dimana Eksplorasi ini bertujuan untuk memahami lebih dalam aspek teknis, ekonomi, dan sosial dari Gerakan Cek Pajak Mandiri dan Pembayaran Non Tunai di Kabupaten Barito Timur; 7. PIWARAAN, yang telah diluncurkan secara resmi, merupakan langkah strategis Pemerintah Kabupaten Barito Timur dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB). Melalui sistem ini, pelaporan pajak dilakukan secara interaktif dan instan, yang tidak hanya memudahkan wajib pajak tetapi juga meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam pengelolaan pajak; 8. Pajak Daerah yang sepenuhnya telah menggunakan Elektronifikasi Pembayaran (QRIS, Internet/Mobile Banking, EDC) dan Retribusi Daerah hampir sepenuhnya telah menggunakan Elektronifikasi Pembayaran (QRIS, Internet/Mobile Banking, EDC) dan Semi Digital (ATM, Teller/Loket Bank).</p>	

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	2	3	4
c.	Diharapkan adanya kajian mengenai potensi daerah yang cermat dan akurat yang dapat dipergunakan sebagai landasan dalam perencanaan pendapatan daerah.	Dalam upaya pengelolaan Pendapatan Daerah yang lebih baik maka telah dilakukan berbagai upaya yaitu Bapenda sudah membuat Perbup tentang Perhitungan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah dan telah ditetapkan menjadi Perbup Nomor 26 Tahun 2024 Tentang tata cara perhitungan potensi pajak daerah dan proyeksi pendapatan pajak daerah, adanya penggalian potensi pemakaian jalan kabupaten yang rencana dilaksanakan di tahun 2025 dan ada pada kegiatan anggaran Bapenda, saat ini masih tahap uji kajian bersama KPK RI dan penyusunan metode pembayaran. Adanya aplikasi PIWARAAN salah satu inovasi dimana data potensi pajak akan diperluas ke sektor potensi pajak lainnya ditahun anggaran 2025. Terbangunnya sistem PIWARAAN untuk pendataan potensi pajak (2024 sektor MBLB dilanjutkan untuk 2025 untuk pendataan sektor pajak lainnya) serta adanya SOP pendataan pajak MBLB dan Manual Book sistem Inovasi PIWARAAN (Pelaporan Interaktif Wajib Pajak Secara Instant)	Peningkatan pendapatan daerah melalui sumber pendapatan yang baru dan potensial sesuai dengan kondisi daerah.
d.	Kurangnya dukungan sumber anggaran yang cukup dan kualitas SDM yang kurang sehingga pengelolaan sumber-sumber potensi PAD yang besar belum terkelola maksimal.	Dengan adanya Gerakan Cek Pajak Mandiri dan Pembayaran Non Tunai (Gercep MBA NONI) meraih juara II Tingkat Provinsi sehingga adanya peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui kanal pembayaran non tunai/online dan Barito Timur mendapat raport dari Bank Indonesia sebagai kabupaten digital dengan skor 95.0%,Peringkat ke 5 dari 14 kabupaten di kalteng dan peringkat 115 nasional dari 415 daerah di Indonesia untuk	Peningkatan pendapatan daerah melalui sumber pendapatan yang baru dan potensial sesuai dengan kondisi daerah.

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	2	3	4
		elektronifikasi transaksi pembayaran daerah.	
		PIWARAAN adalah salah satu upaya penggalan dan pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB). Melalui sistem ini, pelaporan pajak dilakukan secara interaktif dan instan, yang tidak hanya memudahkan wajib pajak tetapi juga meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam pengelolaan pajak. Dengan adanya PIWARAAN, diharapkan potensi pajak MLB dapat dimaksimalkan secara optimal, sehingga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD Kabupaten Barito Timur.	
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
Pengelolaan Belanja Daerah			
a.	Pemerintah Daerah seharusnya bisa Pemerintah Daerah seharusnya bisa mengembangkan usaha-usaha Daerah seperti mengaktifkan kembali Perusahaan Daerah yang diharapkan bisa menyumbangkan PAD. Sehingga bisa meningkatkan Kapasitas SDM agar lebih Profesional dalam berkerja dan dapat terlaksana sesuai dengan target yang diharapkan.	BPKAD selaku Sekretariat TAPD bersama dengan Pj. Bupati melaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap realisasi belanja SKPD pada setiap bulannya.	Meningkatkan sumber pendapatan daerah
b.	Agar APBD Tahun 2023 ini bisa mengoptimalkan penggunaan SILPA ini untuk Pembangunan Daerah baik Pembangunan Infrastruktur, Peningkatan Kapasitas SDM ASN maupun program yang lebih produktif sehingga dapat mendorong PAD misalnya dengan mengembangkan pembangunan	Suplus TA. 2023 yang merupakan hasil audit BPK-RI digunakan untuk menambah kekurangan belanja pada setiap SKPD khususnya belanja pegawai dan belanja pembangunan infrtastruktur.	Meningkatkan penggunaan SILPA untuk program Pembangunan dan peningkatan kapasitas ASN

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	2	3	4
	pariwisata dan fasilitas ekonomi bagi daerah.		
		Berdasarkan hasil audit BPK-RI terhadap SILPA TA. 2023 penggunaannya difokuskan untuk belanja pegawai, belanja Barang dan JAsa pada kegiatan SKPD serta kekurangan belanja infrastruktur untuk pembangunan daerah.	
c.	Perlunya Bimtek untuk menambah pengetahuan.	Telah mengikuti bimtek dan pelatihan untuk menambah pengetahuan.	Peningkatan kompetensi ASN
d.	Peningkatan Penata Usahaan Barang Milik Daerah dengan Inventarisasi dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah yang rutin dengan semua OPD.	Telah dilakukan inventarisasi dan rekonsiliasi keuangan dan aset dengan seluruh SKPD	Peningkatan Pengelolaan keuangan dan asset daerah
Unsur Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar			
	DINAS PENDIDIKAN		
	Urusan Pendidikan		
a.	LAKIP disusun berdasarkan Pemenpan 53/2014 perlunya sinkronisasi dengan instansi terkait yaitu Inspektorat.	Dinas Pendidikan telah menyinkronkan LAKIP dengan Inspektorat	Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	2	3	4
b.	Dokumen Laporan Kinerja dipublikasi sesuai waktu yang ditentukan	Tahun 2024 Dokumen Laporan Kinerja telah di publikasikan sebelum batas waktu yang telah ditentukan	
DINAS KESEHATAN			
Urusan Kesehatan			
a.	<p>Pelayanan ANC (Antenatal Care - pemeriksaan ibu hamil) secara standar masih belum maksimal dilaksanakan karena beberapa SDM Kesehatan (dokter, bidan) baru mendapat pelatihan.</p> <p>1. Perlunya peningkatan Kembali kapasitas SDM Kesehatan yang lebih optimal di tahun berikutnya</p>	melaksanakan pelatihan dalam rangka peningkatan teknis bidang kesehatan baik diklat maupun penambahan beasiswa daerah	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayananan Kesehatan di daerah
b.	<p>Masih kurangnya data pada pelaporan pelayanan Kesehatan.</p> <p>1. Mengoptimalkan pelaporan terhadap pelayanan Kesehatan dalam kegiatan skrining Kesehatan.</p>	<p>Saat ini sudah ada beberapa aplikasi pelaporan online dan <i>realtime</i> sehingga data yang disampaikan dapat secara langsung diterima dan Memberikan target untuk pelaksanaan skrining, melakukan follow up pelaksanaan skrining yang telah dilakukan serta memastikan semua kegiatan skrining kesehatan terlaporkan baik offline maupun online.</p> <p>Dinas Kesehatan melakukan Monev data pada FKTP secara berkala untuk memastikan pelaporan kegiatan skrining kesehatan terutama yang berbasis web, karena pelaporan terkadang masih terkendala jaringan internet.</p>	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayananan Kesehatan di daerah

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	2	3	4
c.	<p>Terdapat beberapa puskesmas yang belum mencapai target skrining dan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) untuk skrining DM (Diabetes Militus) ke Masyarakat terbatas yaitu hanya mencapai 55,55 persen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi skrining deteksi dini DM di Kesehatan/posbindu dan menyediakan BMHP fasilitas untuk menunjang skrining DM melalui Puskesmas-puskesmas. 	<p>Tahun 2024 untuk BMHP Skrining Deteksi Dini DM sudah terpenuhi. Pelaksanaan Skrining DM sudah terjalin kerjasama yang baik antara Dinas Kesehatan dan Puskesmas</p>	<p>Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayananan Kesehatan di daerah</p>
d.	<p>Terdapat beberapa desa yang PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) belum terealisasi dari yang ditargetkan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlunya Mengoptimalkan peran Puskesmas sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Kesehatan terkait penanganan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 	<p>Optimalisasi kegiatan promosi kesehatan UPTD Puskesmas di wilayah kabupaten barito timur untuk segera menindaklanjuti terkait desa yang PHBSnya belum terealisasi serta berkoordinasi dengan pihak kecamatan dimasing-masing wilayah agar bisa menyampaikan kepada kepala desa yang ada diwilayah tersebut khususnya desa yang belum melakukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).</p>	<p>Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayananan Kesehatan di daerah</p>
e.	<p>Perlunya kesadaran kelompok beresiko untuk melakukan deteksi dini HIV serta rendahnya SDM Kesehatan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlunya meningkatkan koordinasi dengan pihak pengelola lokalisasi dan pemerintah desa setempat, serta tetap mengoptimalkan peningkatan kopetensi SDM Kesehatan melalui Diklat serta tambahan beasiswa. 	<p>Melaksanakan sosialisasi HIV pada kelompok berisiko. dan pelaksanaan Diklat untuk meningkatkan kompetensi tenaga Kesehatan</p>	<p>Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayananan Kesehatan di daerah</p>
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	2	3	4
a.	<p>Belum adanya data secara menyeluruh permukiman rawan banjir data base Sungai yang terupdate, sehingga realisasi yang ada merupakan rekapan total pekerjaan yang telah dilaksanakan sampai tahun 2023.</p> <p>1. Peningkatan anggaran untuk pekerjaan pembuatan Data Base Sungai sehingga dalam menangani permukiman banjir bisa terntegrasi dalam tahun ke tahun.</p>	<p>Akan diprogramkan dan di anggarkan di APBD Perubahan Tahun 2025.</p>	<p>Meningkatkan penanganan daerah rawan banjir dan Peningkatan serta pemeliharaan jalan</p>
b.	<p>Belum adanya update data inventarisasi secara menyeluruh untuk Kawasan persawahan yang aktif sehingga pekerjaan yang ada dilaksanakan bedasarkan usulan dan rekomendasi.</p> <p>1. Harus berkoordinasi dengan pihak Dinas Pertanian untuk melaksanakan inventarisasi menyeluruh persawahan yang aktif dan memerlukan jaringan irigasi.</p>	<p>Di Programkan di Kegiatan E-Paksi tahun 2025 dan Survei Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)Tahun 2025</p>	<p>Peningkatan serta pemeliharaan Irigasi</p>
c.	<p>Kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung penanganan persampahan.</p> <p>1. Perlunya membangun fasilitas sarana prasarana penanganan persampahan.</p>	<p>Akan ditindaklanjuti dengan melakukan evaluasi kebijakan pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah baik dari sisi SDM, kurangnya anggaran yang disediakan, juga jumlah TPA dan TPS yang masih kurang memadai sehingga tidak mampu mengakomodir volume sampah.</p>	<p>Meningkatkan penanganan sampah daerah rawan banjir</p>
d.	<p>Belum tersedianya fasilitas pengaturan limpasan air hujan di saluran drainase perkotaan tamiang layang dan ampah.</p> <p>1. Perlunya membangun fasilitas pengaturan limpasan air hujan seperti penggunaan sisten pengumpulan air hujan dan juga untuk resapan air hujan.</p>	<p>Tidak dapat melaksanakan karena program pemeliharaan drainase dihilangkan dari APBD 2025, tindak lanjut akan menganggarkan program pemeliharaan drainase melalui mekanisme Perencanaan di Renja Perubahan supaya bisa di programkan di APBD Perubahan tahun 2025.</p>	<p>Peningkatan fungsi drainase dan penanggulangan banjir</p>

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	2	3	4
e.	Belum tercapainya target kegiatan dalam penerbitan sertifikat dan registrasi pengembangan perumahan. 1. Perlunya mempercepat Proses pendataan pengembangan	Pada tahun 2025 sudah di programkan di program Pengembangan Perumahan dan akan dilaksanakan pertemuan rutin tiap triwulan dengan pengembang perumahan resmi yang terdata di REI (Real Estate Indonesia) Kalimantan Tengah.	Penanganan Kawasan Kumuh
f.	Rendahnya Capaian target dari 15 persen hanya yang terealisasi 6 persen karena kegiatan masih dalam prgses lelang (Rumah Tidak Layak Huni). 1. Perlunya mempercepat proses pelaksanaan lelang fisik.	Sudah di programkan di Program Kawasan Permukiman dengan Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dan akan segera dilaksanakan pada tahun 2025	Penanganan Kawasan Kumuh
SATPOL PP & BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN			
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat			
a.	Belum maksimalnya koordinasi dan sosialisasi antar OPD teknis pemilik PERDA dan PERKADA kepada masyarakat serta Pemerintah Barito Timur. 1. Perlunya memaksimalkan Koordinasi, Pendampingan serta Sosialisasi OPD pemegang PERDA dan PERKADA kepada Masyarakat dan organisasi perangkat daerah lainnya.	Memaksimalkan koordinasi, Pendampingan dan sosialisasi OPD pemegang PERDA dan PERKADA kepada Masyarakat dan OPD lainnya	Meningkatkan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
b.	Belum ada SK Kepala Daerah terkait Kawasan rawan bencana di Kabupaten Barito Timur. 1. Melakukan koordinasi dengan pihak BPBD Damkar Kabupaten Barito Timur terkait Data Wilayah rawan bencana, sehingga bisa tepat sasaran.	Penetapan kawasan rawan bencana didasarkan pada Kajian Resiko Bencana (KRB). Untuk penyusunan dokumen KRB dimaksud telah dianggarkan dalam DPA BPBDDAMKAR Tahun 2025 sebesar Rp. 300.000.000 dan ditargetkan telah selesai paling lambat pada bulan Agustus 2025	Meningkatkan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
c.	Masih belum tersedianya rumah layak huni bagi Masyarakat korban bencana, longsor, kebakaran.	Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana didasarkan pada dokumen Rencana Kontijensi (RENKON)	Meningkatkan ketentraman, ketertiban umum, dan

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	2	3	4
	<p>1. Perlunya koordinasi dengan BPBD Damkar Kabupaten Barito Timur terkait SK Kepala Daerah tentang Kawasan rawan bencana sehingga dapat dilakukan penanganan terhadap korban bencana.</p>	<p>yang merupakan turunan dan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB). Untuk Penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi, kepada Pemerintah Daerah diusulkan jumlah kebutuhan biaya sebesar Rp. 250.000.000 dan diharapkan dapat dipenuhi pada tahun anggaran 2026</p>	<p>perlindungan masyarakat</p>
d.	<p>Belum maksimalnya warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yaitu hanya 29,24 persen dari target 75 persen.</p> <p>1. Perlunya meningkatkan layanan penyelamatan dan evaluasi bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana.</p>	<p>Untuk mewujudkan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana bagi masyarakat korban bencana didasarkan pada dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang merupakan turunan dan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB). Untuk Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), kepada Pemerintah Daerah diusulkan jumlah kebutuhan biaya sebesar Rp. 280.000.000 dan diharapkan dapat dipenuhi pada tahun anggaran 2026</p>	<p>Meningkatkan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat</p>
DINAS PEMBERDAYAAN DESA DAN SOSIAL			
Urusan Sosial			
a.	<p>Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dari target sebesar 75% yang tercapai baru 30,84%.</p> <p>1. Perlu adanya anggaran yang cukup untuk pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti.</p>	<p>(1). Memasukkan penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti kedalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai dasar untuk mendapatkan bantuan sosial dari Kemensos RI; (2). Tahun 2025 akan membuat Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai penyandang disabilitas</p>	<p>Meningkatkan kualitas sasaran penerima bantuan</p>
b.	<p>Persentase fakir miskin yang mendapat bantuan dari target sebesar 80% yang tercapai hanya</p>	<p>Pendataan DTKS harus dilakukan dengan seksama, karena apabila datanya bertambah maka akan</p>	<p>Optimalisasi pengentasan kemiskinan</p>

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	2	3	4
	<p>43,25% sehingga masih rendah dan belum memenuhi target.</p> <p>1. Pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) diharapkan secara online dapat di pantau semua pihak progresnya sehingga dapat di tangani secara tepat dan cepat.</p>	<p>menjadi salah satu penyumbang terbesar data kemiskinan di suatu daerah. Dan Pendataan DTKS memang dilakukan secara online namun tetap dalam pengawasan DPMSos Bidang Sosial selaku verifikator yang tetap melaksanakan pendataan tetap dalam tata cara yang telah ditentukan. Dan pihak Desa juga berperan besar dalam pendataan tersebut dengan melakukan Musyawarah Desa yang dilakukan secara berkala sebagai tindak lanjut untuk setiap keputusan yang berkenaan dengan persentase fakir miskin di desa tersebut.</p>	
c.	<p>Meningkatnya angka kemiskinan di Barito Timur berdasarkan Data BPS naik 0,04 persen.</p> <p>1. Perlunya meningkatkan SDM dengan melakukan Pendidikan dan Pelatihan serta peran dari semua lini.</p>	<p>DPMSos melalui bidang sosial selaku pembina teknis dari PSKS (TKSK, PSM, Pendamping PKH, TAGANA dan Karang Taruna) akan melakukan pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas yang berkaitan dengan data Kesejahteraan Sosial sehingga setiap Pilar Sosial mempunyai peran dalam penanganan penurunan angka kemiskinan.</p>	<p>Optimalisasi pengentasan kemiskinan</p>
DISNAKERTRANS			
Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
a.	<p>Belum adanya data tenaga kerja yang bersertifikat Kompetensi di perusahaan.</p> <p>1. Perlunya mengevaluasi dan memperbaiki teknis permintaan data ke perusahaan terkait data tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi.</p>	<p>Telah dilakukan permintaan data bersama-sama bidang Hubungan Industrial sekaligus pembinaan namun belum maksimal karena perusahaan masih menganggap bahwa tenaga kerja potensial (yang memiliki keahlian sertifikasi tertentu) yang mereka miliki adalah hal yang rahasia</p>	<p>Meningkatkan kebijakan ketenagakerjaan Kabupaten Barito Timur.</p>
b.	<p>2. Perlunya memberikan informasi terkait pembukaan lapangan</p>	<p>Sudah dilaksanakan penyebaran informasi terkait pembukaan</p>	

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	2	3	4
	perkerjaan melalui media sosial.	lapangan perkerjaan melalui media sosial (grup2 WA), Website Disnakertransperin Kab. Barito Timur belum maksimal dikarenakan kekurangan SDM	
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA			
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana			
a.	Rendahnya persentase Data Gender dan Anak yang dikelola dari target 100 persen hanya terealisasi 50 persen sehingga belum memenuhi kebutuhan. 1. Perlunya Advokasi pengisian sesuai kebutuhan data pada setiap OPD /Lembaga.	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dibuat	Meningkatkan kualitas kinerja pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak
DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN.			
Urusan Pangan			
a.	Belum adanya Peraturan Bupati terkait ketersediaan pangan (cadangan beras, jagung sesuai kebutuhan). 1. Perlunya Pembentukan Peraturan Daerah tentang Cadangan Pangan pada PERDA Tahun 2024.	Peraturan Daerah Dalam Proses Pengerjaan di Bagian Hukum	Meningkatkan kualitas kinerja melalui peningkatan skala prioritas
b.	Belum adanya alat penguji (Pangan Segar yang aman di konsumsi). 1. Perlunya Pengadaan Alat uji yang memadai.	Sudah di anggarkan Dana Untuk Pengadaan Alat Penguji	
DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
Urusan Lingkungan Hidup			
a.	Belum maksimalnya jumlah IUP yang ada di Kabupaten Barito Timur sehingga banyak yang tidak aktif. 1. Perlunya melaksanakan pengawasan aktif dan pasif ke semua perusahaan	Melaksanakan pengawasan aktif dan pasif ke perusahaan dan pelaku usaha	Meningkatkan kualitas kinerja melalui peningkatan skala prioritas

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	2	3	4
	pertambahan dan perkebunan kelapa sawit.		
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL			
Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
a.	Rusaknya Peralatan Cetak KIA. 1. Perlunya Pengadaan Printer Cetak KIA 2. Perlunya keseriusan dalam meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	1. Pengadaan Alat Cetak KIA Telah Terlaksana. 2. siap dilaksanakan di Tahun 2025	Meningkatkan capaian target kinerja dan pelayanan
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL			
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
a.	Terbatasnya Anggaran sehingga tidak semua desa mendapatkan pelatihan. Perlunya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meningkatkan Kerjasama agar desa dengan pemberian pelatihan yang banyak kepada desa.	DPMDSos melalui bidang Informasi Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan telah melakukan upaya peningkatan kerjasama antar desa yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 370 Tahun 2018; Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 371 Tahun 2018; Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 372 Tahun 2018; Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 373 Tahun 2018; Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 586 Tahun 2019; Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/499/HUK Tahun 2020; Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Kaqwasan Perdesaan melalui Kerjasama	Peningkatan kualitas SDM

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	2	3	4
		Antar Desa Tahun 2024; dan Berita Acara Kesepakatan Rapat Pembangunan Kawasan Perdesaan	
b.	Persentase LKD tidak terpenuhi dari target 35 persen. Perlunya melakukan pembinaan LKD dalam pelaksanaan event-event baik ditingkat kabupaten, Provinsi maupun Nasional.	Setiap tahun melalui kegiatan PKK dilaksanakan berbagai lomba dalam rangka memeriahkan Hari Kartini dan Hari Ibu; Untuk tahun 2025 akan dilaksanakan lomba posyandu ditingkat Kabupaten dan tingkat Provinsi	Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan Desa
c.	Belum terkelola dengan baik BUMDes yang dibuat hampir di setiap kecamatan. Perlunya peraturan dan perencanaan yang menyangkut Tata Kelola BUMDes.	Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman, Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa	Peningkatan Badan Usaha Milik Desa
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA			
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
a.	Terbatasnya sarana dan tenaga teknis yang aktif dan terlapor dalam SIGA. 1. Perlunya pembinaan keaktifan fungsi dan tugas tenaga teknis.	akan dilaksanakan Pembinaan melalui BOKB pada Tahun 2025	Meningkatkan kualitas kinerja melalui peningkatan skala prioritas
DINAS PERHUBUNGAN			
Urusan Perhubungan			
a.	Belum adanya angkutan umum perintis perdesaan di Kabupaten Barito Timur. 1. Perlunya Anggaran yang cukup untuk pengadaan Angkutan Perintis.	Akan dianggarkan pada perubahan APBD Tahun 2025	Meningkatkan kualitas kinerja melalui peningkatan skala prioritas program
b.	Masih belum beroperasinya Pelabuhan Telang Baru. 1. Perlunya percepatan dalam pembentukan Perusahaan Daerah yang bergerak di Bidang Usaha Kepelabuhanan agar dapat berproses pada tahun 2024.	Saat ini masih dalam proses pembentukan Perusda dalam bidang Pelabuhan	

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	2	3	4
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN BARITO TIMUR			
Urusan Komunikasi dan Informasi			
a.	Tidak optimalnya layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi. 1. Perlunya Peningkatan Dukungan Kebijakan dan prioritas Anggaran SPBE serta peningkatan SDM TIK.	Pada tahun 2024 Indeks SPBE Kab. Barito Timur mencapai 2,82 dan masuk ke dalam kategori BAIK. Beberapa dukungan kebijakan sudah diselesaikan seperti peraturan bupati tentang SPBE serta surat-surat keputusan bupati terkait tata laksana dan manajemen spbe. Untuk penganggaran masih menyesuaikan kemampuan daerah.	Upaya koordinasi prioritas kegiatan agar lebih terarah
b.	Tidak Optimalnya Layanan Komunikasi secara Publik. 1. Perlunya pengembangan Sistem Jaringan Internet di wilayah pedesaan yang terisolir serta perlu dibangunnya radio milik Pemda sebagai salah satu media informasi yang bisa diakses masyarakat yang tertinggal di pedesaan.	Melakukan uji coba internet satelit yang disediakan oleh Starlink di area blankspot	Pengembangan Sistem Jaringan Internet di Kawasan pedesaan yang terisolir.
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH			
Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
a.	Belum Optimalnya Koperasi yang berkualitas sehingga persentasenya hanya 19,71 Persen dari Target 100 Persen. 1. Perlunya pembinaan dan pendampingan dalam menjalankan usaha Koperasi yang berkualitas.	Telah dilaksanakan pendampingan usaha Koperasi	Peningkatan perekonomian daerah melalui Koperasi
b.	Kurangnya Dukungan Fasilitas Pendampingan Kelembagaan dan usaha untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten. 1. Perlunya Penyuluhan dan Pembinaan tentang Regulasi Koperasi, Kelembagaan Koperasi dan Pelaporan Keuangan.	Sudah dilaksanakan penyuluhan dan pembinaan tentang regulasi koperasi	Peningkatan perekonomian daerah melalui Koperasi

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	2	3	4
C.	Rendahnya Persentasi usaha Mikro yang bermitra di bidang UMKM sehingga hanya mencapai target 80 Persen. 1. Perlunya mengembangkan kemitraan dengan pihak Perbankan.	Telah dilaksanakan pendampingan pengembangan kemitraan pelaku usaha mikro dengan pihak perbankan dan pihak perusahaan	Peningkatan perekonomian daerah melalui sektor UMKM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
Urusan Penanaman Modal			
a.	Tidak semua Perusahaan melaporkan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal). 1. Perlunya melakukan Pengawasan dan Pembinaan pada Perusahaan, Agar Persentase nya tidak hanya 55 Persen saja.	Telah dilakukan pengawasan dan pembinaan Perusahaan tentang LKPM	Meningkatkan rasa aman dan kemudahan bagi investor untuk berinvestasi di Kabupaten Barito Timur
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
Urusan Kepemudaan dan Olah Raga			
a.	Kurangnya tingkat Prtisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan. 1. Perlunya Pendampingan atau stimulus bagi Kegiatan Organisasi Kepemudaan.	Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada organisasi kepemudaan dalam bentuk peningkatan kapasitas sumberdaya manusia melalui pelatihan	Telah dibuat rencana kegiatan untuk meningkatkan daya saing keolahragaan.
b.	Kurangnya tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri (kegiatan wirausaha muda pemula). 1. Perlunya meningkatkan Jumlah Kegiatan Pelatihan dan Kegiatan Kewirausahaan bagi Pemuda pemula.	Melakukan pelatihan wirausaha muda pemula kepada pemuda dengan melibatkan pelaku usaha lokal	meningkatkan daya saing ekonomi
c.	Belum maksimal nya kegiatan yang melibatkan organisasi Kepemudaan. 1. Perlunya melibatkan kesempatan kepada atlit muda dalam rangka	Melakukan koordinasi lintas sektoral baik dalam rangka penjaringan bibit-bibit atlet muda ditingkat satuan sekolah	meningkatkan daya saing kepemudaan

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	2	3	4
	pembibitan prestasi olahraga.		
d.	<p>Kurangnya minat masyarakat terkait kesenian tradisional dalam pelaksanaan event-event yang terbatas.</p> <p>1. Perlunya Dukungan Penyelenggaraan event-event mandiri.</p>	<p>Sudah ada festival budaya mandiri diadakan oleh komunitas seni budaya didukung oleh Disbudparpora dan Disbudparpora juga mendukung festival yang diadakan Pokdarwis lokal dengan bentuk promosi dan dari DPA APBD berupa hadiah lomba</p>	<p>meningkatkan daya saing kesenian</p>
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			
Urusan Perpustakaan dan Kearsipan			
a.	<p>Rendahnya Persentase Fasilitas Depo Kearsipan tidak memadai sebagai media penyimpanan arsip fisik, dalam hal ini Rak Arsip dan Box arsip sudah Rapuh dan Gudang Penyimpanan terlalu Kecil untuk menampung keseluruhan arsip dari seluruh OPD di Kabupaten Barito Timur.</p> <p>1. Perlunya peningkatan dengan melakukan upaya peningkatan Fasilitas Depo Kearsipan dan berkoordinasi dengan ANRI terkait Kualifikasi Depo yang Berstandar Nasional sehingga dapat mencapai target.</p>	<p>Belum Terlaksana peningkatan fasilitas Depo Kearsipan terkendala pagu anggaran belum mencukupi untuk rehabilitasi sedang/berat</p>	<p>Meningkatkan pelayanan dan kinerja perpustakaan dan kearsipan</p>
b.	<p>Belum Tersedianya perangkat IT yang memadai sebagai Pengalih media Arsip Fisik sebagai Arsip Digital.</p> <p>1. Perlunya mengupayakan peningkatan Perangkat IT yang memadai sebagai Media Penyimpanan Arsip Digital.</p>	<p>Sudah dilaksanakan pengadaan perangkat IT yang memadai melalui Pokir TA 2024</p>	<p>Meningkatkan pelayanan dan kinerja perpustakaan dan kearsipan</p>

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	2	3	4
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN			
Urusan Kelautan dan Perikanan			
a.	Rendahnya jumlah produksi perikanan tangkap dikarenakan penangkapan dengan menggunakan alat yang tidak ramah lingkungan sehingga populasi ikan di perairan umum berkurang. 1. Perlunya pengawasan perairan dengan razia/patrolis bersama Pokmaswas, TNI dan Polri	Sudah dibentuknya Tim Razia/Patrolis	Peningkatan sektor perikanan sebagai sektor unggulan daerah
b.	Mahalnya harga pakan ikan sehingga membuat pengusaha ikan mengurangi aktivitas usaha pembudidayaan ikan. 1. Perlunya adanya bantuan alat pembuat pakan ikan.	Memberikan bantuan benih ikan dan pakan ikan	
c.	Sarana dan Prasarana Budidaya yang belum memadai. 1. Perlu adanya bantuan sarana dan prasarana budidaya	Memberikan bantuan kolam Gali, Kolam Terpal, Kolam Bioflok dan karamba untuk pembudidayaan ikan	
d.	Berkurang populasi ikan di perairan. 1. Perlu adanya kegiatan Restocking	Terkait anggaran yang tidak mencukupi untuk kegiatan restocking	
e.	Sarana dan Prasarana Tangkap yang belum memadai. 1. Perlu adanya bantuan sarana dan prasarana tangkap	Memberikan bantuan alat tangkap kepada nelayan	
Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM			
Urusan Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi			
a.	Tidak adanya pengajuan ijin atau rekomendasi ijin pendirian usaha ke Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM. 1. Perlunya membuat regulasi aturan yang lebih mempermudah dalam pengurusan ijin usaha di wilayah Kabupaten Barito Timur.	Telah difasilitasinya petugas/admin pada bidang bina UMK terkait penerbitan NIB	Peningkatan peran UKM dalam legalitas dan produktivitas

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	2	3	4
b.	Kurangnya minat pelaku usaha UMKM dalam partisipasi keikutsertaan pameran atau ajang promosi pemasaran hasil UMKM. 1. Perlunya meningkatkan sosialisasi pemahaman terhadap pentingnya promosi produk lokal UMKM dalam meningkatkan mutu dan kualitas produk.	Telah dilaksanakannya sosialisasi dan fasilitasi sarana promosi produk usaha mikro	Peningkatan peran UKM dalam legalitas dan produktivitas
c.	Belum terbentuknya IKM (Industri Kecil Menengah) sehingga tidak memiliki ijin industri. 1. Perlunya mengefektifkan pembinaan dan mendorong IKM untuk membuat perijinan, serta mendaftarkan ke dalam SIINas.	Akan difasilitasi industry kecil yang berminat dalam mengurus ijin industry	Peningkatan Perindustrian daerah
SEKRETARIAT DAERAH			
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan			
a.	Belum optimalnya penyaluran dana bansos sehingga belum tepat sasaran. 1. Perlunya Pemutahiran data penenerima dana bansos sehingga tepat sasaran	Sudah dilaksanakan pemuktahiran data penerima dana bansos yang sesuai dengan syarat yang ada	Optimalisasi Penerima Bantuan Pemerintah
b.	Belum terlaksananya tentang status kejelasan perangkat desa. 1. Perlunya Keputusan bersama tentang status perangkat desa.	Akan dilaksanakan rapat FGD penentuan status perangkat desa	Optimalisasi Dasar Hukum
d.	Pengelolaan Dana Hibah penerima perlu perbaikan karena realisasi belanja tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. 1. Struktur pelaksana hibah dijalankan sesuai fungsi dan tugasnya.	Perlu adanya platform teknis pengajuan hibah secara elektronik, sehingga bisa di akses oleh kelompok masyarakat yang memang memenuhi standar penerima dana hibah	

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	2	3	4
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
Capaian Kinerja Program untuk Penunjang Urusan			
a.	Kurangnya minat PNS untuk mengikuti ujian dinas dan tugas belajar. 1. Perlunya Pemerintah Kabupaten Barito Timur memberikan kesempatan bagi PNS untuk mengikuti ujian Dinas dan tugas belajar	- ujian dinas dilaksanakan setiap tahun untuk Ujian Dinas TK.I dan Ujian Dinas TK.II - Tugas belajar diberi untuk PNS dan dianggarkan pada DPA BKPSDM setiap tahun khusus untuk Dr. Spesialis - Ijin belajar (Tugas belajar mandiri) diikuti oleh seluruh ASN yang memiliki minat mengembangkan kompetensi dengan biaya sendiri	Peningkatan Kompetensi ASN di Daerah
INSPEKTORAT			
Capaian Kinerja Program untuk Penunjang Urusan			
a.	LAKIP belum sepenuhnya mengacu pada Permenpan 53/2014; 1. Perlunya penyusunan LAKIP berdasarkan Pemenpan 53/2014;	Sudah dilaksanakan di tahun 2024 dengan dilakukan pendampingan dari Kemenpan dan hasilnya nilai Lakip Pemerintah Daerah. hal ini dapat terlihat dari peningkatan perolehan selama 3 tahun terakhir yakni tahun 2022 predikat CC (nilai 51,77) tahun 2023 predikat CC (nilai 57,96) atau naik sebanyak 6,19 point. Selanjutnya tahun 2024 naik ke predikat B (nilai 60,85) atau naik 2,89 point.	Dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
b.	Belum terlaksananya audit kinerja. 1. Perlunya melakukan audit kinerja	sudah dilaksanakan audit kinerja oleh inspektorat tahun 2024 : Audit kinerja ketahanan pangan Audit kinerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil Audit kinerja DPMPTSP Audit kinerja Dinas Pendidikan Audit Kinerja Dinas Kesehatan	
Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah			
a.	LAKIP belum sepenuhnya mengacu pada Permenpan 53/2014; 1. Perlunya penyusunan LAKIP berdasarkan Pemenpan 53/2014;	Sudah dilaksanakan di tahun 2024 dengan dilakukan pendampingan dari Kemenpan dan hasilnya nilai Lakip Pemerintah Daerah. hal ini dapat terlihat dari peningkatan perolehan selama 3 tahun terakhir yakni tahun 2022 predikat CC (nilai 51,77) tahun 2023 predikat CC (nilai 57,96) atau naik sebanyak 6,19 point. Selanjutnya	

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	2	3	4
		tahun 2024 naik ke predikat B (nilai 60,85) atau naik 2,89 point.	
b.	Belum maksimal program perencanaan dalam penanggulangan kemiskinan. 1. Perlunya trobosan dalam penanganan kemiskinan melalui kegiatan-kegiatan yang terdapat di SKPD	Sudah dibentuk Tim Penanggulangan Kemiskinan Bersama SKPD terkait bersinergi mengetasi kemiskinan melalui Rencana Aksi Daerah dengan pemetaan intervensi secara langsung.	
KECAMATAN			
Unsur Kewilayahan			
a.	Belum Optimalnya Peningkatan SDM terkait Nilai LAKIP demi menunjang kegiatan di setiap kantor Kecamatan 1. Perlunya meningkatkan SDM Aparatur dengan Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek sesuai bidang masing-masing serta meningkatkan sarana dan prasana yang memadai di setiap Kecamatan	Sudah dianggarkan oleh semua kecamatan untuk kegiatan pelatihan guna meningkatkan kinerja	Upaya peningkatan kinerja unsur kewilayahan

3.4 Prestasi

Dalam pelaksanaan pembangunan di Tahun 2024 ada beberapa penghargaan yang diterima oleh Kabupaten Barito Timur yaitu:

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan RI.
2. Penganugerahan Predikat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kepada Puskesmas Tamiang Layang dengan predikat Opini Kualitas Tinggi Tahun 2024 oleh Ombudsman RI.
3. Piagam Penghargaan untuk Kabupaten Barito Timur sebagai Kabupaten bebas Frambusia Tahun 2024 dari Kemenkes RI .
4. Desa Bagok, Tangkan, Mangkarap, Tampa, Kalamus, & Lebo meraih Penghargaan Kategori Proklim Utama dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 .

5. Penghargaan Perpustakaan Desa Tangkum sebagai Perpustakaan Desa Terbaik Tingkat Nasional.
6. Penghargaan atas Capaian Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Terbaik 2 Se-Kalimantan Tengah.
7. Penghargaan atas Capaian Penyaluran Dana Desa Terbaik 1 Se-Kalimantan Tengah.
8. Penghargaan atas Capaian Penyaluran Insentif Fiskal Terbaik 1 Se-Kalimantan Tengah
9. Dekranasda Kabupaten Barito Timur Juara II Lomba Parade Mobil Hias Kriya dan Budaya Dekranasda di Solo.
10. Piagam Penghargaan untuk Desa Bagok Juara II Lomba Desa Kategori Regional Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.
11. Piagam Penghargaan untuk Desa Pulau Patai Juara III Lomba Desa Tingkat Wilayah Timur DAS Barito Tahun 2024.

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1, serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, yang dimaksud tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Pembiayaan Tugas Pembantuan dari Pemerintah kepada daerah sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sedangkan biaya penyelenggaraan Tugas Pembantuan dari Kabupaten kepada desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Pada Tahun 2024 Kabupaten Barito Timur tidak ada menerima Tugas Pembantuan sehingga tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang pelaksanaan tugas ini.

BAB V

PENUTUP

LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 disamping sebagai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada DPRD Kabupaten Barito Timur juga berfungsi sebagai Informasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama Tahun 2024. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2024 saling melengkapi dengan dokumen laporan lainnya yaitu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 yang memuat tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pembinaan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Barito Timur selama Tahun 2024.

Pemerintah Kabupaten Barito Timur melaksanakan tugas dan kewajiban untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang dijabarkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini merupakan hasil perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan berkoordinasi, bekerja sama serta partisipasi semua stakeholders sesuai dengan dengan fungsi dan tugas masing-masing. Hasil-hasil pencapaian kinerja program yang dilaksanakan sepanjang Tahun 2024 merupakan realisasi dari seluruh aktivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang dijalankan oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Barito Timur bersama DPRD berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan selama kurun waktu satu tahun anggaran.

Pemerintah memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi serta ucapan terima kasih kepada seluruh stakeholders pelaksana pembangunan, segenap Pimpinan dan Anggota DPRD, jajaran Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur, aparat keamanan, termasuk jajaran pemerintahan desa dan masyarakat Kabupaten Barito Timur secara keseluruhan, serta pihak swasta yang telah memberikan dukungan dan bekerja keras bahu membahu dalam melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Laporan ini telah disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2020, namun demikian kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan hingga penyampaian LKPJ Tahun Anggaran 2024 ini terdapat kekurangan maupun kekeliruan, baik yang mencakup substansi maupun redaksional laporan. Kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan kinerja yang lebih baik pada tahun-tahun mendatang.

Akhirnya, kiranya Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan hikmat dan hidayah-Nya bagi kita semua baik sebagai penentu kebijakan maupun sebagai pelaksana pembangunan, serta masyarakat untuk dapat meningkatkan kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat Barito Timur sesuai dengan cita-cita kita bersama menuju *Gumi Jari Janang kalalawah*.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Realisasi Anggaran TA. 2024

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	227.211.885.487	219.634.223.556	96.66	100
0.00.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	139.849.650	138.084.932	98.74	100
0.00.01.2.01.01	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	71.722.650	71.665.300	99.92	100.00
0.00.01.2.01.07	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	68.127.000	66.419.632	97.49	100.00
0.00.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	205.281.863.465	197.958.919.373	96.43	100
0.00.01.2.02.01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	204.535.673.565	197.218.791.873	96.42	100.00
0.00.01.2.02.02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	517.160.000	514.440.000	99.47	100.00
0.00.01.2.02.03	<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	229.029.900	225.687.500	98.54	100.00
0.00.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	17.000.000	16.995.000	99.97	100
0.00.01.2.03.06	<i>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	17.000.000	16.995.000	99.97	100.00
0.00.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	329.008.110	311.258.532	94.61	100
0.00.01.2.05.00	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	54.997.065	38.672.350	70.32	100.00
0.00.01.2.05.02	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	59.993.750	59.886.720	99.82	100.00
0.00.01.2.05.03	<i>Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	214.017.295	212.699.462	99.38	100.00
0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.078.366.145	2.076.603.683	99.92	100
0.00.01.2.06.00	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	955.765.900	954.405.338	99.86	100.00
0.00.01.2.06.02	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	188.046.395	187.982.895	99.97	100.00
0.00.01.2.06.04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	54.738.000	54.737.500	100.00	100.00
0.00.01.2.06.05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	126.559.850	126.325.950	99.82	100.00
0.00.01.2.06.06	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	23.000.000	22.896.000	99.55	100.00
0.00.01.2.06.08	<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	730.256.000	730.256.000	100.00	100.00
0.00.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.745.180.000	17.571.877.500	99.02	100
0.00.01.2.08.01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	7.500.000	7.410.000	98.80	100.00
0.00.01.2.08.02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	277.680.000	179.867.500	64.78	100.00
0.00.01.2.08.04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	17.460.000.000	17.384.600.000	99.57	100.00
0.00.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.620.618.117	1.560.484.536	96.29	100
0.00.01.2.00.02	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	116.393.440	86.711.296	74.50	100.00
0.00.01.2.00.09	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	1.126.154.677	1.124.075.790	99.82	100.00
0.00.01.2.00.10	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	378.070.000	349.697.450	92.50	100.00
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	42.113.010.965	22.563.047.090	53.58	97.81
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	22.890.558.670	12.246.340.833	53.5	100
1.01.02.2.01.01	<i>Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)</i>	200.000.000	199.675.600	99.84	100.00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	4.663.949.316	4.168.332.531	89.37	100.00
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	6.387.875.671	6.287.594.353	98.43	100.00
1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	196.142.800	191.733.200	97.75	100.00
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	191.737.100	183.583.350	95.75	100.00
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	292.097.260	201.001.299	68.81	100.00
1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	28.179.080	9.241.500	32.80	100.00
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	124.702.550	104.089.900	83.47	100.00
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	139.552.800	116.990.800	83.83	100.00
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	9.764.349.858	25.000.000	0.26	100.00
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	345.858.100	286.324.750	82.79	100.00
1.01.02.2.01.35	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi TIK untuk Pendidikan	51.061.580	47.489.900	93.01	100.00
1.01.02.2.01.36	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	80.348.680	71.811.900	89.38	100.00
1.01.02.2.01.37	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	80.572.280	72.574.750	90.07	100.00
1.01.02.2.01.38	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	30.275.000	21.940.800	72.47	100.00
1.01.02.2.01.39	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	69.477.550	65.989.000	94.98	100.00
1.01.02.2.01.41	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga	48.539.765	41.995.900	86.52	100.00
1.01.02.2.01.43	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	49.999.650	30.175.000	60.35	100.00
1.01.02.2.01.49	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	145.839.630	120.796.300	82.83	100.00
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	14.232.643.510	8.314.104.437	58.42	99.07
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	4.204.014.000	3.990.295.320	94.92	100.00
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.402.411.740	3.275.843.517	96.28	100.00
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	131.999.850	0	0.00	0.00
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	221.015.475	205.392.000	92.93	100.00
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	444.520.330	324.293.050	72.95	100.00
1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	25.147.750	18.251.850	72.58	100.00
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	76.120.500	51.864.450	68.13	100.00
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	92.592.000	90.060.000	97.27	100.00
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	5.259.330.000	25.000.000	0.48	100.00
1.01.02.2.02.48	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi TIK untuk Pendidikan	27.067.050	23.309.250	86.12	100.00
1.01.02.2.02.49	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	27.067.050	24.874.800	91.90	100.00
1.01.02.2.02.50	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	26.927.050	23.782.050	88.32	100.00
1.01.02.2.02.51	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi	29.999.950	21.489.950	71.63	100.00
1.01.02.2.02.54	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	199.384.445	179.284.400	89.92	100.00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
1.01.02.2.02.55	<i>Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi</i>	44.061.500	40.824.000	92.65	100.00
1.01.02.2.02.60	<i>Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan</i>	20.984.820	19.539.800	93.11	100.00
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	4.187.405.785	1.997.701.820	47.71	100
1.01.02.2.03.02	<i>Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD</i>	1.075.400.455	1.020.969.200	94.94	100.00
1.01.02.2.03.03	<i>Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD</i>	618.237.000	615.559.265	99.57	100.00
1.01.02.2.03.13	<i>Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD</i>	141.953.955	90.210.195	63.55	100.00
1.01.02.2.03.16	<i>Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD</i>	0	0	0.00	0.00
1.01.02.2.03.17	<i>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD</i>	9.999.900	5.271.000	52.71	100.00
1.01.02.2.03.18	<i>Pengelolaan Dana BOP PAUD</i>	2.004.799.810	19.999.810	1.00	100.00
1.01.02.2.03.19	<i>Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD</i>	101.143.795	94.651.450	93.58	100.00
1.01.02.2.03.23	<i>Pengembangan konten digital untuk pendidikan</i>	46.144.200	36.700.900	79.54	100.00
1.01.02.2.03.24	<i>Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan</i>	49.390.150	39.898.150	80.78	100.00
1.01.02.2.03.25	<i>Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan</i>	26.373.100	6.070.000	23.02	100.00
1.01.02.2.03.26	<i>Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan</i>	52.641.260	39.898.150	75.79	100.00
1.01.02.2.03.39	<i>Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk</i>	61.322.160	28.473.700	46.43	100.00
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	802.403.000	4.900.000	0.61	1.62
1.01.02.2.04.17	<i>Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan</i>	789.400.000	0	0.00	0.00
1.01.02.2.04.27	<i>Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan</i>	13.003.000	4.900.000	37.68	100.00
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	63.396.100	60.115.000	94.82	100
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	63.396.100	60.115.000	94.82	100
1.01.04.2.01.01	<i>Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i>	31.698.050	30.335.000	95.70	100.00
1.01.04.2.01.02	<i>Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i>	31.698.050	29.780.000	93.95	100.00
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	12.629.900	5.475.000	43.35	100
1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	12.629.900	5.475.000	43.35	100
1.01.05.2.02.01	<i>Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</i>	12.629.900	5.475.000	43.35	100.00
Total		269.400.922.452	242.262.860.646	89.93	99.66

Kode	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	297.780.025	278.342.610	93,47%	100
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	101.259.525	101.251.810	99,99%	100
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	119.040.000	105.558.200	88,67%	90
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	77.480.500	71.532.600	92,32%	95
1.2.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	67.159.341.145	62.358.526.319	92,85%	95
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	65.865.869.215	61.207.964.294	92,93%	95
1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.246.410.000	1.109.905.000	89,05%	94
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	47.061.930	40.657.025	86,39%	90
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	167.477.225	163.233.999	97,47%	100
1.02.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	64.370.215	61.517.800	95,57%	100
1.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	103.107.010	101.716.199	98,65%	100
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	140.960.500	138.547.860	98,29%	100
1.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	70.096.480	69.866.860	99,67%	100
1.02.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	44.600.830	42.666.000	95,66%	100
1.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	26.263.190	26.015.000	99,05%	100
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.267.033.220	1.258.538.181	99,33%	100
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	38.094.750	38.094.750	100,00%	100
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	110.971.000	110.759.000	99,81%	100
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	120.589.670	119.839.670	99,38%	100
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46.060.000	42.766.500	92,85%	100
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	120.275.600	120.185.550	99,93%	100
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	61.300.000	61.200.000	99,84%	100
1.02.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	95.150.000	95.098.500	99,95%	100
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	674.592.200	670.594.211	99,41%	100
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	578.984.275	577.814.660	99,80%	100
1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	238.504.880	237.926.060	99,76%	100
1.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	340.479.395	339.888.600	99,83%	100
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.373.216.600	8.300.562.138	80,02%	93
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40.290.000	32.487.000	80,63%	95
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	263.198.600	167.547.138	63,66%	80
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.069.728.000	8.100.528.000	80,44%	95

Kode	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.610.491.230	1.591.211.700	98,80%	99
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	396.491.230	396.401.000	99,98%	100
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	139.000.000	121.359.550	87,31%	95
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.075.000.000,00	1.073.451.149,99	99,86%	100
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	15.129.415.304	14.716.960.285	97,27%	100
1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	6.045.795.756	6.005.647.479,19	99,34%	100
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	450.000.000	449.455.000	99,88%	100
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.650.000.000	1.647.803.592	99,87%	100
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4.570.660.000	4.346.474.300	95,10%	100
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	107.733.815	30.408.915	28,23%	29
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	116.120.790	56.761.000	48,88%	55
1.02.02.2.01.23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2.034.774.193	2.027.768.349	99,66%	100
1.02.02.2.01.26	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	154.330.750	152.641.650	98,91%	100
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	31.188.865.350	26.008.588.713	83,39%	97
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	350.195.260	346.944.260	99,07%	100
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	461.366.920	417.459.072	90,48%	95
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	387.627.930	244.562.885	63,09%	75
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	776.321.715	682.519.009	87,92%	93
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	289.152.455	246.770.020	85,34%	94
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	206.884.930	180.516.730	87,25%	93
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	156.838.505	72.519.400	46,24%	58
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	474.114.890	454.158.398	95,79%	96
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	457.233.110	453.866.178	99,26%	100
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	436.874.055	433.908.096	99,32%	100
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	254.891.105	243.032.900	95,35%	100
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	130.125.145	128.217.331	98,53%	100
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	79.177.920	74.547.920	94,15%	100
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	899.653.450	749.703.540	83,33%	93
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	65.605.155	51.115.300	77,91%	92
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	163.493.230	159.015.600	97,26%	100

Kode	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	45.251.005	42.844.405	94,68%	100
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	429.095.800	426.379.778	99,37%	100
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	65.581.980	61.517.650	93,80%	100
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	424.676.150	362.321.108	85,32%	93
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	4.260.679.700	4.254.103.726	99,85%	100
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	132.622.825	128.122.825	96,61%	100
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	13.210.631.900	12.274.198.733	92,91%	96
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	6.047.997.543,99	3.533.570.881	58,43%	80
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	550.039.796	424.565.200	77,19%	90
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	162.128.600	160.114.366	98,76%	100
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	55.453.480	54.150.800	97,65%	100
1.02.02.2.02.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	189.834.995	178.303.400	93,93%	100
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	25.315.800	23.530.200	92,95%	97
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	77.646.550	69.991.350	90,14%	96
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	77.646.550	69.991.350	90,14%	96
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	42.602.480	22.596.000	53,04%	65
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	38.477.100	37.302.100	96,95%	100
1.02.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	38.477.100	37.302.100	96,95%	100
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	191.522.425	190.151.669	99,28%	100
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	129.303.400	127.949.769	98,95%	100
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	62.219.025	62.201.900	99,97%	100
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	347.565.480	334.201.600	96,16%	100
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	347.565.480	334.201.600	96,16%	100
1.02.03.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	65.543.700	58.237.100	88,85%	95

Kode	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
1.02.03.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air	65.543.700	58.237.100	88,85%	95
1.02.03.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	379.656.350	278.418.892	73,33%	86
1.02.03.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	379.656.350	278.418.892	73,33%	86
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	103.002.800	99.673.600	96,77%	100
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	103.002.800	99.673.600	96,77%	100
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	313.814.470	227.533.183	72,51%	80
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	313.814.470	227.533.183	72,51%	86
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	57.209.440	57.179.790	99,95%	100
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	57.209.440	57.179.790	99,95%	100
Jumlah		129.530.605.668,99	117.621.602.747,18	90,81%	93

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.117.134.889	11.628.552.424	95.97	100
0.00.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	73.682.100	73.628.900	99.93	100
0.00.01.2.01.01	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	52.636.300	52.607.800	99.95	100.00
0.00.01.2.01.07	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	21.045.800	21.021.100	99.88	100.00
0.00.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.341.817.295	6.141.977.116	96.85	100
0.00.01.2.02.01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	5.913.699.295	5.713.864.616	96.62	100.00
0.00.01.2.02.02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	401.700.000	401.700.000	100.00	100.00
0.00.01.2.02.07	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	26.418.000	26.412.500	99.98	100.00
0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.110.046.200	2.081.495.102	98.65	100
0.00.01.2.06.00	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	655.046.000	654.025.349	99.84	100.00
0.00.01.2.06.01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	100.000.000	99.999.973	100.00	100.00
0.00.01.2.06.02	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	740.950.200	739.878.317	99.86	100.00
0.00.01.2.06.04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	130.762.000	130.644.175	99.91	100.00
0.00.01.2.06.05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	175.000.000	174.775.512	99.87	100.00
0.00.01.2.06.06	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	30.000.000	25.820.000	86.07	100.00
0.00.01.2.06.08	<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	278.288.000	256.351.776	92.12	100.00
0.00.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.846.700.000	1.673.754.957	90.63	100
0.00.01.2.08.01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	12.000.000	12.000.000	100.00	100.00
0.00.01.2.08.02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	286.700.000	152.154.957	53.07	100.00
0.00.01.2.08.04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	1.548.000.000	1.509.600.000	97.52	100.00
0.00.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.744.889.294	1.657.696.349	95	100
0.00.01.2.00.02	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	225.950.020	161.477.024	71.47	100.00
0.00.01.2.00.09	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	1.518.939.274	1.496.219.325	98.50	100.00
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	10.856.000.000	9.694.953.030	89.31	94.94
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.240.944.900	3.235.100.847	99.82	100
1.03.02.2.01.09	<i>Pembangunan Tanggul Sungai</i>	1.439.300.000	1.436.267.002	99.79	100.00
1.03.02.2.01.10	<i>Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing</i>	1.366.826.900	1.364.821.845	99.85	100.00
1.03.02.2.01.46	<i>Normalisasi/Restorasi Sungai</i>	434.818.000	434.012.000	99.81	100.00
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah Ha dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.615.055.100	6.459.852.183	84.83	92.78
1.03.02.2.02.01	<i>Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa</i>	1.074.515.573	1.063.974.556	99.02	100.00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
1.03.02.2.02.08	<i>Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan</i>	4.779.500.000	3.635.502.200	76.06	88.50
1.03.02.2.02.10	<i>Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa</i>	300.000.000	299.800.000	99.93	100.00
1.03.02.2.02.16	<i>Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa</i>	150.000.000	149.900.000	99.93	100.00
1.03.02.2.02.23	<i>Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa</i>	1.311.039.527	1.310.675.427	99.97	100.00
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	3.828.592.202	3.793.827.569	99.09	100
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	3.828.592.202	3.793.827.569	99.09	100
1.03.03.2.01.19	<i>Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan</i>	3.828.592.202	3.793.827.569	99.09	100.00
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	661.240.000	645.106.476	97.56	100
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	661.240.000	645.106.476	97.56	100
1.03.04.2.01.17	<i>Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS</i>	661.240.000	645.106.476	97.56	100.00
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.539.800.289	2.525.503.527	99.44	100
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.539.800.289	2.525.503.527	99.44	100
1.03.05.2.01.06	<i>Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat</i>	2.539.800.289	2.525.503.527	99.44	100.00
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	7.250.990.759	7.219.433.448	99.56	100
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.250.990.759	7.219.433.448	99.56	100
1.03.06.2.01.09	<i>Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase</i>	555.053.200	544.888.000	98.17	100.00
1.03.06.2.01.13	<i>Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan</i>	6.695.937.559	6.674.545.448	99.68	100.00
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	204.545.800	109.412.140	53.49	100
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	204.545.800	109.412.140	53.49	100
1.03.08.2.01.01	<i>Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG</i>	204.545.800	109.412.140	53.49	100.00
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	42.421.734.073	41.913.358.191	98.8	100
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	42.421.734.073	41.913.358.191	98.8	100
1.03.09.2.01.01	<i>Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota</i>	459.379.692	457.570.653	99.61	100.00
1.03.09.2.01.03	<i>Penataan Bangunan dan Lingkungan</i>	41.962.354.381	41.455.787.538	98.79	100.00
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	122.878.849.124	110.656.207.991	90.05	99.22
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	122.878.849.124	110.656.207.991	90.05	99.22
1.03.10.2.01.01	<i>Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan</i>	1.369.755.092	1.332.294.174	97.27	100.00
1.03.10.2.01.05	<i>Pembangunan Jalan</i>	24.575.478.607	24.416.843.510	99.35	100.00
1.03.10.2.01.08	<i>Rekonstruksi Jalan</i>	91.692.402.263	79.874.509.304	87.11	98.95

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
1.03.10.2.01.11	<i>Pemeliharaan Rutin Jalan</i>	2.838.557.083	2.816.939.083	99.24	100.00
1.03.10.2.01.12	<i>Pembangunan Jembatan</i>	1.343.313.560	1.175.183.400	87.48	100.00
1.03.10.2.01.19	<i>Pemeliharaan Rutin Jembatan</i>	1.059.342.519	1.040.438.519	98.22	100.00
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	367.817.320	181.673.752	49.39	81.8
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	367.817.320	181.673.752	49.39	81.8
1.03.11.2.01.04	<i>Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</i>	243.309.000	110.230.943	45.30	91.67
1.03.11.2.01.07	<i>Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi</i>	124.508.320	71.442.809	57.38	62.50
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.247.032.250	779.514.636	34.69	97.07
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	2.026.513.610	650.014.136	32.08	96.75
1.03.12.2.01.01	<i>Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota</i>	1.430.408.525	354.516.080	24.78	100.00
1.03.12.2.01.02	<i>Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota</i>	530.281.675	295.498.056	55.72	100.00
1.03.12.2.01.04	<i>Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang</i>	65.823.410	0	0.00	0.00
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	130.958.380	81.591.700	62.3	100
1.03.12.2.02.02	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota</i>	130.958.380	81.591.700	62.30	100.00
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	89.560.260	47.908.800	53.49	100
1.03.12.2.03.02	<i>Sistem Informasi Penataan Ruang</i>	89.560.260	47.908.800	53.49	100.00
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	65.821.480	50.039.306	76.02	100
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	65.821.480	50.039.306	76.02	100
1.04.02.2.01.01	<i>Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>	65.821.480	50.039.306	76.02	100.00
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	722.168.900	712.539.981	98.67	100
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah (sepuluh) Ha	722.168.900	712.539.981	98.67	100
1.04.03.2.03.02	<i>Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni</i>	200.000.000	200.000.000	100.00	100.00
1.04.03.2.03.07	<i>Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh</i>	522.168.900	512.539.981	98.16	100.00
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	3.290.725.573	3.174.400.225	96.47	100
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	3.290.725.573	3.174.400.225	96.47	100
1.04.05.2.01.02	<i>Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian</i>	3.290.725.573	3.174.400.225	96.47	100.00
Total		209.452.452.659	193.084.522.695	92.19	99.21
KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.086.664.559	7.008.606.824	86.67	100

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
0.00.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.562.617.126	4.537.836.334	81.58	100
0.00.01.2.02.01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	5.174.024.326	4.168.407.817	80.56	100.00
0.00.01.2.02.02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	388.592.800	369.428.517	95.07	100.00
0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	63.289.460	63.231.350	99.91	100
0.00.01.2.06.02	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	43.072.160	43.014.500	99.87	100.00
0.00.01.2.06.05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	14.817.300	14.816.850	100.00	100.00
0.00.01.2.06.06	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	5.400.000	5.400.000	100.00	100.00
0.00.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.365.400.400	2.312.198.540	97.75	100
0.00.01.2.08.02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	19.400.400	19.398.540	99.99	100.00
0.00.01.2.08.04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	2.346.000.000	2.292.800.000	97.73	100.00
0.00.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.357.573	95.340.600	99.98	100
0.00.01.2.00.01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	38.033.641	38.032.600	100.00	100.00
0.00.01.2.00.02	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	57.323.932	57.308.000	99.97	100.00
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.282.752.835	1.252.523.954	97.64	98.17
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.146.334.455	1.140.745.245	99.51	100
1.05.02.2.01.01	<i>Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan</i>	179.951.700	179.608.000	99.81	100.00
1.05.02.2.01.02	<i>Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa</i>	241.810.000	239.731.000	99.14	100.00
1.05.02.2.01.03	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota</i>	106.902.850	106.579.200	99.70	100.00
1.05.02.2.01.04	<i>Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	35.304.305	35.063.045	99.32	100.00
1.05.02.2.01.05	<i>Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia</i>	582.365.600	579.764.000	99.55	100.00
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	136.418.380	111.778.709	81.94	82.78
1.05.02.2.02.02	<i>Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota</i>	136.418.380	111.778.709	81.94	82.78
	Total	9.369.417.394	8.261.130.778	88.17	99.75

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.557.467.308	7.607.939.826	88,90	88,9
0.00.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.294.516.372	5.921.079.472	94,07	94,07
0.00.01.2.02.01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	4.091.096.372	3.754.766.472	91,78	91,78
0.00.01.2.02.02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	2.155.770.000	2.118.750.000	98,28	100
0.00.01.2.02.05	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	47.650.000	47.563.000	99,82	100
0.00.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	179.797.000	178.114.935	99,06	100
2.21.01.2.05.0001	<i>Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>	51.922.000	51.424.135	99,04	100
0.00.01.2.05.02	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	124.375.000	124.239.800	99,89	100
0.00.01.2.05.03	<i>Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	3.500.000	2.451.000	70,03	70,03
0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	307.348.342	305.336.567	99,35	100
0.00.01.2.06.00	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	251.402.602	249.850.367	99,38	100
0.00.01.2.06.01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	6.460.000	6.405.000	99,15	100
0.00.01.2.06.02	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	8.919.540	8.765.000	98,27	100
0.00.01.2.06.05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	28.366.200	28.316.200	99,82	100
0.00.01.2.06.06	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	12.200.000	12.000.000	98,36	100
0.00.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	150.619.407	150.300.000	99,79	100
0.00.01.2.07.06	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	150.619.407	150.300.000	99,79	100
0.00.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	406.906.704	399.176.765	98,10	100
0.00.01.2.08.01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	8.250.000	8.048.000	97,55	100
0.00.01.2.08.02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	50.416.386	47.985.565	95,18	95,18
0.00.01.2.08.04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	348.240.318	343.143.200	98,54	100
0.00.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	280.481.437	264.974.000	94,47	94,47
0.00.01.2.00.01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	35.969.538	33.531.000	93,22	93,22
0.00.01.2.00.02	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	75.991.899	69.153.200	91,00	91
0.00.01.2.00.06	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	8.520.000	2.825.000	33,16	33,16
0.00.01.2.00.09	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	160.000.000	159.464.800	99,67	100
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	377.081.230	245.551.225	65,12	65,12
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	54.800.000	53.678.100	97,95	100
1.05.03.2.01.02	<i>Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)</i>	54.800.000	53.678.100	97,95	100
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	58.803.300	55.562.750	94,49	100

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
1.05.03.2.02.02	<i>Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota</i>	58.803.300	55.562.750	94,49	100
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	149.543.150	91.560.800	61,23	61,23
1.05.03.2.03.02	<i>Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota</i>	32.935.450	25.775.800	78,26	78,26
1.05.03.2.03.03	<i>Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota</i>	37.500.000	3.250.000	8,67	8,67
1.05.03.2.03.04	<i>Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota</i>	32.467.700	32.350.000	99,64	100
1.05.03.2.03.05	<i>Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana</i>	46.640.000	30.185.000	64,72	64,72
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	113.934.780	115.297.175	101,20	100
1.05.03.2.04.03	<i>Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota</i>	91.375.830	93.091.100	101,88	100
1.05.03.2.04.05	<i>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</i>	22.558.950	22.206.075	98,44	100
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	560.716.816	408.456.200	72,85	72,85
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	379.153.016	380.917.300	100,47	100
1.05.04.2.01.01	<i>Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	164.153.016	166.023.100	101,14	100
1.05.04.2.01.02	<i>Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	65.000.000	65.000.000	100,00	100
1.05.04.2.01.05	<i>Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri</i>	150.000.000	149.894.200	99,93	100
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	181.563.800	181.358.900	99,89	100
1.05.04.2.04.02	<i>Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran</i>	31.563.800	31.558.900	99,98	100
1.05.04.2.04.03	<i>Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana</i>	150.000.000	149.800.000	99,87	100
Total		8.557.467.308	8.097.356.764	94,62	98

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.539.800.486	4.000.038.494	88,11	100

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.585.800	49.441.800	97,74	100
2.07.01.2.01.01	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	25.816.600	24.682.600	95,61	100
2.07.01.2.01.06	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	13.959.200	13.954.200	99,96	100
2.07.01.2.01.07	<i>Evaluasi Kinerja perangkat Daerah</i>	10.810.000	10.805.000	99,95	100
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.534.349.095	3.074.976.280	87,00	100
2.07.01.2.02.01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	3.345.697.245	2.886.356.430	86,27	100
2.07.01.2.02.02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	166.565.200	166.565.200	100,00	100
2.07.01.2.02.05	<i>koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	9.523.350	9.500.350	99,76	100
2.07.01.2.02.07	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD</i>	12.563.300	12.554.300	99,93	100
2.07.01.2.02	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.985.100	5.372.250	89,76	100
2.07.01.2.03.02	<i>Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>	5.985.100	5.372.250	89,76	100
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	12.718.100	12.714.900	99,97	100
2.07.01.2.05.03	<i>Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	12.718.100	12.714.900	99,97	100
2.07.01.2.05	Administrasi umum Perangkat Daerah	392.769.455	386.540.560	98,41	100
2.07.01.2.06.01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	5.268.750	5.268.000	99,99	100
2.07.01.2.06.02	<i>Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	27.171.145	27.163.046	99,97	100
2.07.01.2.06.04	<i>Penyediaan Bahan logistik Kantor</i>	96.646.000	92.231.000	95,43	98,61
2.07.01.2.06.05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	19.083.000	18.282.728	95,81	100
2.07.01.2.06.06	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan</i>	18.600.000	18.000.000	96,77	100
2.07.01.2.06.08	<i>Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	4.815.000	4.811.250	99,92	100
2.07.01.2.06.09	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	221.185.560	220.784.536	99,82	100
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	440.651.466	404.121.740	91,71	100
2.07.01.2.08.01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	7.140.000	6.888.500	96,48	100
2.07.01.2.08.02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan listrik</i>	61.511.466	45.633.240	74,19	100
2.07.01.2.08.04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	372.000.000	351.600.000	94,52	100
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102.741.470	66.870.964	65,09	100
2.07.01.2.09.01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	66.681.470	30.873.050	46,30	100
2.07.01.2.09.06	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	24.450.000	24.450.000	100,00	100
2.07.01.2.09.09	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	11.610.000	11.547.914	99,47	100
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	59.008.600	49.505.391	83,90	85

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	59.008.600	49.505.391	83,90	85
2.07.02.2.01.0001	<i>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro</i>	59.008.600	49.505.391	83,90	85
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	159.327.490	153.639.098	96,43	100
2.07.03.2.01	<i>Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi</i>	77.047.830	76.483.190	99,27	100
2.07.03.2.01.01	<i>Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi</i>	77.047.830	76.483.190	99,27	100
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	82.279.660	77.155.908	93,77	100
2.07.03.2.02.01	<i>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</i>	82.279.660	77.155.908	93,77	100
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	61.042.400	60.465.730	99,06	100
2.07.04.2.01	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	61.042.400	60.465.730	99,06	100
2.07.04.2.01.0001	<i>Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja</i>	61.042.400	60.465.730	99,06	100
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	159.218.520	158.537.600	99,57	100
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja sama untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	56.014.400	55.475.400	99,04	100
2.07.05.2.01.01	<i>Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan</i>	19.904.500	19.647.900	98,71	100
2.07.05.2.01.02	<i>Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan</i>	8.757.700	8.757.700	100,00	100
2.07.05.2.01.03	<i>Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan</i>	27.352.200	27.069.800	98,97	100
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	103.204.120	103.062.200	99,86	100
2.07.05.2.02.01	<i>Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	33.006.480	32.962.300	99,87	100
2.07.05.2.02.02	<i>Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	30.422.300	30.404.700	99,94	100
2.07.05.2.02.03	<i>Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi</i>	5.717.000	5.712.300	99,92	100
2.07.05.2.02.04	<i>Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota</i>	34.058.340	33.982.900	99,78	100
2.07.05	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	77.082.640	76.837.000	99,68	100
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	77.082.640	76.837.000	99,68	100
3.31.02.2.01.01	<i>Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</i>	14.040.000	13.993.600	99,67	100
3.31.02.2.01.04	<i>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Industri</i>	8.822.000	8.822.000	100,00	100

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
3.31.02.2.01.05	<i>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Inudstri dan Peran Serta Masyarakat</i>	54.220.640	54.021.400	99,63	100
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	59.887.900	59.514.048	99,38	100
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	42.436.200	42.316.948	99,72	100
3.31.04.2.01.01	Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	35.239.200	35.119.948	99,66	100
3.31.04.2.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	7.197.000	7.197.000	100,00	100
3.32.04.2.01	Pembangunan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	17.451.700	17.197.100	98,54	100
3.32.04.2.01.02	<i>Penguatan Infrastruktur Sosial, ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman</i>	17.451.700	17.197.100	98,54	100
Total		5.115.368.036	4.558.537.361	89,11	98

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.863.547.973	4.551.459.289	93.58	93.58
0.00.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.000.000	38.764.000	99.39	99.39
0.00.01.2.01.07	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	39.000.000	38.764.000	99.39	99.39
0.00.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.652.528.071	3.379.862.896	92.53	92.54
0.00.01.2.02.01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	3.531.808.071	3.260.502.896	92.32	92.32
0.00.01.2.02.02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	120.720.000	119.360.000	98.87	98.87
0.00.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	31.250.000	31.080.000	99.46	99.46
0.00.01.2.05.02	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	31.250.000	31.080.000	99.46	99.46
0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	420.708.789	416.989.871	99.12	99.12
0.00.01.2.06.00	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	234.030.440	233.317.621	99.70	99.70
0.00.01.2.06.01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	14.950.000	12.640.000	84.55	84.55
0.00.01.2.06.04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	47.000.000	46.782.300	99.54	99.54
0.00.01.2.06.05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	12.000.000	11.999.950	100.00	100.00
0.00.01.2.06.06	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	1.800.000	1.800.000	100.00	100.00
0.00.01.2.06.08	<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	110.928.349	110.450.000	99.57	99.57
0.00.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	667.309.927	638.444.933	95.67	95.68
0.00.01.2.08.02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	78.000.000	54.669.033	70.09	70.09
0.00.01.2.08.03	<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	34.709.927	34.575.900	99.61	99.61
0.00.01.2.08.04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	554.600.000	549.200.000	99.03	99.03
0.00.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.751.186	46.317.589	87.8	87.8
0.00.01.2.00.01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	29.141.626	22.708.029	77.92	77.92
0.00.01.2.00.07	<i>Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya</i>	23.609.560	23.609.560	100.00	100.00
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	186.809.500	186.790.800	99.99	99.99
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	44.991.450	44.973.950	99.96	99.96
2.08.02.2.01.01	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG</i>	44.991.450	44.973.950	99.96	99.96
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	41.818.050	41.816.850	100	100
2.08.02.2.02.01	<i>Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi</i>	35.000.000	35.000.000	100.00	100.00
2.08.02.2.02.02	<i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi</i>	6.818.050	6.816.850	99.98	99.98

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000	100.000.000	100	100
2.08.02.2.03.02	<i>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	100.000.000	100.000.000	100.00	100.00
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	121.000.425	119.250.325	98.55	98.55
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	27.832.100	26.082.000	93.71	93.71
2.08.03.2.01.02	<i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	27.832.100	26.082.000	93.71	93.71
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	93.168.325	93.168.325	100	100
2.08.03.2.02.01	<i>Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	93.168.325	93.168.325	100.00	100.00
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	192.192.475	189.172.875	98.43	98.43
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14.688.500	14.110.400	96.06	96.06
2.08.04.2.01.03	<i>Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	14.688.500	14.110.400	96.06	96.06
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	177.503.975	175.062.475	98.62	98.63
2.08.04.2.02.01	<i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	56.866.500	55.716.500	97.98	97.98
2.08.04.2.02.02	<i>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	56.384.475	55.092.975	97.71	97.71
2.08.04.2.02.03	<i>Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	64.253.000	64.253.000	100.00	100.00
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	20.995.000	20.795.100	99.05	99.05
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.995.000	20.795.100	99.05	99.05
2.08.05.2.01.01	<i>Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	20.995.000	20.795.100	99.05	99.05
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	125.880.870	122.464.656	97.29	97.29
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	30.732.975	30.147.656	98.1	98.1
2.08.06.2.01.01	<i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	30.732.975	30.147.656	98.10	98.10
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	95.147.895	92.317.000	97.02	97.02

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
2.08.06.2.02.01	<i>Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	62.609.800	62.548.000	99.90	99.90
2.08.06.2.02.02	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	32.538.095	29.769.000	91.49	91.49
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	35.000.000	35.000.000	100	100
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000	35.000.000	100	100
2.08.07.2.01.01	<i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	35.000.000	35.000.000	100.00	100.00
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	228.048.999	227.449.417	99.74	99.74
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	181.666.279	181.536.845	99.93	99.93
2.14.02.2.01.02	<i>Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota</i>	181.666.279	181.536.845	99.93	99.93
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	46.382.720	45.912.572	98.99	98.99
2.14.02.2.02.11	<i>Penyediaan Data dan Informasi Keluarga</i>	46.382.720	45.912.572	98.99	98.99
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.744.994.050	1.689.191.795	96.8	96.8
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	672.468.000	646.438.145	96.13	96.13
2.14.03.2.01.01	<i>Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja</i>	66.468.000	66.432.395	99.95	99.95
2.14.03.2.01.07	<i>Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK</i>	606.000.000	580.005.750	95.71	95.71
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	28.500.000	28.169.400	98.84	98.84
2.14.03.2.02.04	<i>Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)</i>	19.750.000	19.419.400	98.33	98.33
2.14.03.2.02.06	<i>Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)</i>	8.750.000	8.750.000	100.00	100.00
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	194.476.050	165.300.750	85	85
2.14.03.2.03.01	<i>Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya</i>	23.655.050	21.901.750	92.59	92.59
2.14.03.2.03.03	<i>Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)</i>	47.532.000	45.314.000	95.33	95.33
2.14.03.2.03.11	<i>Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak</i>	123.289.000	98.085.000	79.56	79.56
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	849.550.000	849.283.500	99.97	99.97

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
2.14.03.2.04.01	<i>Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</i>	530.800.000	530.533.500	99.95	99.95
2.14.03.2.04.04	<i>Pembinaan Terpadu Kampung KB</i>	318.750.000	318.750.000	100.00	100.00
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.102.097.340	2.100.088.340	99.9	99.9
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.999.489.930	1.997.569.130	99.9	99.9
2.14.04.2.01.02	<i>Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</i>	1.978.900.000	1.976.980.000	99.90	99.90
2.14.04.2.01.04	<i>Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</i>	20.589.930	20.589.130	100.00	100.00
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	102.607.410	102.519.210	99.91	99.92
2.14.04.2.02.03	<i>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</i>	83.197.145	83.178.145	99.98	99.98
2.14.04.2.02.04	<i>Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja</i>	19.410.265	19.341.065	99.64	99.64
Total		9.620.566.632	9.241.662.597	96.06	96.06

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.136.379.126	8.951.725.755	97.98	99.2
0.00.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	125.985.500	125.717.300	99.79	100
0.00.01.2.01.01	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	10.267.000	10.267.000	100.00	100.00
0.00.01.2.01.06	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	10.450.300	10.450.300	100.00	100.00
0.00.01.2.01.07	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	105.268.200	105.000.000	99.75	100.00
0.00.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.148.545.294	4.044.550.726	97.49	99.49
0.00.01.2.02.01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	3.900.825.194	3.805.556.426	97.56	99.56
0.00.01.2.02.02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	227.320.000	218.680.000	96.20	98.20
0.00.01.2.02.05	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	10.200.050	10.121.200	99.23	100.00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
0.00.01.2.02.07	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	10.200.050	10.193.100	99.93	100.00
0.00.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	258.181.000	257.867.654	99.88	100
0.00.01.2.05.00	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	86.531.000	86.530.618	100.00	100.00
0.00.01.2.05.02	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	171.650.000	171.337.036	99.82	100.00
0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	650.227.080	642.757.990	98.85	99.41
0.00.01.2.06.00	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	255.363.000	255.216.443	99.94	100.00
0.00.01.2.06.01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	8.089.250	8.066.000	99.71	100.00
0.00.01.2.06.02	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	168.805.130	167.595.649	99.28	100.00
0.00.01.2.06.03	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	9.508.000	9.153.000	96.27	98.28
0.00.01.2.06.04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	127.567.500	127.108.198	99.64	100.00
0.00.01.2.06.05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	36.954.200	34.688.700	93.87	95.87
0.00.01.2.06.06	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	14.400.000	12.600.000	87.50	89.50
0.00.01.2.06.08	<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	29.540.000	28.330.000	95.90	97.90
0.00.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	46.010.000	45.965.000	99.9	100
0.00.01.2.07.05	<i>Pengadaan Mebel</i>	46.010.000	45.965.000	99.90	100.00
0.00.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.952.285.000	2.887.541.835	97.81	98.48
0.00.01.2.08.01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	9.495.000	9.490.000	99.95	100.00
0.00.01.2.08.02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	87.990.000	41.336.835	46.98	48.98
0.00.01.2.08.04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	2.854.800.000	2.836.715.000	99.37	100.00
0.00.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	944.913.602	937.121.600	99.18	99.63
0.00.01.2.00.01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	97.572.258	92.125.600	94.42	96.42
0.00.01.2.00.06	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	15.100.000	14.960.000	99.07	100.00
0.00.01.2.00.09	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	832.241.344	830.036.000	99.74	100.00
0.00.01.2.13	Penataan Organisasi	10.231.650	10.203.650	99.73	100
0.00.01.2.13.01	<i>Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan</i>	10.231.650	10.203.650	99.73	100.00
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	293.366.900	278.060.160	94.78	96.58
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	17.406.700	13.393.700	76.95	75.49
2.11.02.2.01.01	<i>Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota</i>	9.088.050	6.396.000	70.38	72.38
2.11.02.2.01.02	<i>Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota</i>	8.318.650	6.997.700	84.12	78.89

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	275.960.200	264.666.460	95.91	97.91
2.11.02.2.02.02	<i>Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD</i>	275.960.200	264.666.460	95.91	97.91
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	237.765.500	231.138.400	97.21	98.83
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	109.035.500	105.428.800	96.69	98.46
2.11.03.2.01.02	<i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim</i>	25.192.950	24.768.000	98.31	99.31
2.11.03.2.01.07	<i>Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air dan Laut</i>	61.842.800	60.069.800	97.13	99.13
2.11.03.2.01.11	<i>Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah</i>	21.999.750	20.591.000	93.60	95.60
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	60.864.800	59.154.400	97.19	99.08
2.11.03.2.02.02	<i>Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</i>	10.000.000	9.866.000	98.66	100.00
2.11.03.2.02.03	<i>Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</i>	50.864.800	49.288.400	96.90	98.90
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	67.865.200	66.555.200	98.07	99.21
2.11.03.2.03.04	<i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi</i>	57.865.200	57.045.200	98.58	99.58
2.11.03.2.03.07	<i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Restorasi</i>	10.000.000	9.510.000	95.10	97.10
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	325.159.535	309.392.125	95.15	96.93
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	325.159.535	309.392.125	95.15	96.93
2.11.04.2.01.01	<i>Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati</i>	76.337.850	66.870.000	87.60	89.60
2.11.04.2.01.04	<i>Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</i>	193.821.685	187.905.025	96.95	98.95
2.11.04.2.01.07	<i>Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati</i>	55.000.000	54.617.100	99.30	100.00
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B)	35.368.800	34.824.800	98.46	99.42
2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B	1.740.000	1.500.000	86.21	88.21
2.11.05.2.01.02	<i>Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B</i>	1.740.000	1.500.000	86.21	88.21
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota	33.628.800	33.324.800	99.1	100
2.11.05.2.02.02	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan</i>	16.760.800	16.642.800	99.30	100.00
2.11.05.2.02.04	<i>Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota</i>	16.868.000	16.682.000	98.90	100.00
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	43.173.900	41.354.000	95.78	97.79

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	43.173.900	41.354.000	95.78	97.79
2.11.06.2.01.01	<i>Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH</i>	19.539.900	19.113.000	97.82	99.82
2.11.06.2.01.05	<i>Pengawasan Perizinan berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang - Undangan dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</i>	19.134.000	18.491.000	96.64	98.64
2.11.06.2.01.06	<i>Pengendalian Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup</i>	4.500.000	3.750.000	83.33	85.33
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	22.081.700	21.639.000	98	100
2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	22.081.700	21.639.000	98	100
2.11.07.2.01.01	<i>Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH</i>	22.081.700	21.639.000	98.00	100.00
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	20.115.600	18.471.000	91.82	93.87
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.115.600	18.471.000	91.82	93.87
2.11.08.2.01.02	<i>Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup</i>	13.416.600	12.522.000	93.33	95.41
2.11.08.2.01.05	<i>Penginkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Pendidikan Formal/Lembaga Masyarakat/Komunitas/Kelompok Masyarakat</i>	6.699.000	5.949.000	88.80	90.80
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	38.162.550	23.240.050	60.9	62.89
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	38.162.550	23.240.050	60.9	62.89
2.11.10.2.01.03	<i>Pengelolaan Pengaduan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten / Kota</i>	21.801.400	11.244.050	51.57	53.57
2.11.10.2.01.04	<i>Penerapan Sanksi Administrasi yang menjadi Kewenangan Kabupaten / Kota</i>	16.361.150	11.996.000	73.32	75.32
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.830.918.700	1.827.095.844	99.79	100
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	1.830.918.700	1.827.095.844	99.79	100
2.11.11.2.01.03	<i>Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota</i>	882.783.450	881.782.200	99.89	100.00
2.11.11.2.01.05	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan</i>	948.135.250	945.313.644	99.70	100.00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
	Total	11.982.492.311	11.736.941.134	97.95	99.06

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.101.217.992	4.828.120.625	94.65	94.66
0.00.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.965.385.291	2.735.415.483	92.24	92.26
0.00.01.2.02.01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	2.793.785.291	2.564.014.483	91.78	91.78
0.00.01.2.02.02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	171.600.000	171.401.000	99.88	100.00
0.00.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	49.375.000	49.049.000	99.34	100
0.00.01.2.05.02	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	49.375.000	49.049.000	99.34	100.00
0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.087.826.295	1.084.130.842	99.66	99.66
0.00.01.2.06.00	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	421.557.880	420.927.005	99.85	99.85
0.00.01.2.06.01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	13.125.000	13.125.000	100.00	100.00
0.00.01.2.06.02	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	561.542.515	558.507.337	99.46	99.46
0.00.01.2.06.04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	17.502.100	17.501.800	100.00	100.00
0.00.01.2.06.05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	19.538.800	19.509.700	99.85	99.85
0.00.01.2.06.06	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	39.600.000	39.600.000	100.00	100.00
0.00.01.2.06.08	<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	14.960.000	14.960.000	100.00	100.00
0.00.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	825.528.000	787.249.200	95.36	95.36
0.00.01.2.08.02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	54.240.000	48.585.200	89.57	89.57
0.00.01.2.08.04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	771.288.000	738.664.000	95.77	95.77
0.00.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	173.103.406	172.276.100	99.52	99.52
0.00.01.2.00.02	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	42.006.866	41.180.100	98.03	98.03
0.00.01.2.00.09	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	79.946.540	79.946.000	100.00	100.00
0.00.01.2.00.11	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	51.150.000	51.150.000	100.00	100.00
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	95.916.000	95.121.500	99.17	100
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	95.916.000	95.121.500	99.17	100
2.12.02.2.01.02	<i>Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk</i>	95.916.000	95.121.500	99.17	100.00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	133.092.000	132.959.000	99.9	100
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	77.666.000	77.571.000	99.88	100
2.12.03.2.01.01	<i>Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting</i>	20.943.000	20.882.000	99.71	100.00
2.12.03.2.01.02	<i>Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil</i>	56.723.000	56.689.000	99.94	100.00
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	55.426.000	55.388.000	99.93	100
2.12.03.2.02.04	<i>Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil</i>	44.866.000	44.850.000	99.96	100.00
2.12.03.2.02.08	<i>Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil</i>	10.560.000	10.538.000	99.79	100.00
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	75.720.000	75.624.100	99.87	100
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	75.720.000	75.624.100	99.87	100
2.12.04.2.01.01	<i>Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan</i>	75.720.000	75.624.100	99.87	100.00
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	6.153.900	6.153.900	100	100
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	6.153.900	6.153.900	100	100
2.12.05.2.01.02	<i>Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain</i>	6.153.900	6.153.900	100.00	100.00
Total		5.412.099.892	5.137.979.125	94.94	94.97

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.142.327.887	3.714.794.816	89.68	98.74
0.00.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.550.700	14.539.700	99.92	100
0.00.01.2.01.06	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	14.550.700	14.539.700	99.92	100.00
0.00.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.185.062.493	2.831.318.464	88.89	100
0.00.01.2.02.01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	3.036.542.493	2.690.858.464	88.62	100.00
0.00.01.2.02.02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	148.520.000	140.460.000	94.57	100.00
0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	310.578.520	310.143.725	99.86	100
0.00.01.2.06.00	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	209.050.000	208.683.028	99.82	100.00
0.00.01.2.06.02	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	51.735.520	51.667.697	99.87	100.00
0.00.01.2.06.03	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	3.240.000	3.240.000	100.00	100.00
0.00.01.2.06.04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	5.000.000	5.000.000	100.00	100.00
0.00.01.2.06.05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	18.081.000	18.081.000	100.00	100.00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
0.00.01.2.06.06	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	10.200.000	10.200.000	100.00	100.00
0.00.01.2.06.08	<i>Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	13.272.000	13.272.000	100.00	100.00
0.00.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	541.108.000	489.450.202	90.45	93.72
0.00.01.2.08.01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	3.000.000	2.990.309	99.68	100.00
0.00.01.2.08.02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	54.700.000	37.033.893	67.70	100.00
0.00.01.2.08.04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	483.408.000	449.426.000	92.97	92.97
0.00.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91.028.174	69.342.725	76.18	79.89
0.00.01.2.00.02	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	78.478.174	60.166.025	76.67	76.67
0.00.01.2.00.06	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	12.550.000	9.176.700	73.12	100.00
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	122.639.825	121.368.925	98.96	99.12
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	122.639.825	121.368.925	98.96	99.12
1.06.02.2.03.01	<i>Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	10.011.210	9.904.310	98.93	100.00
1.06.02.2.03.02	<i>Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	60.000.000	60.000.000	100.00	100.00
1.06.02.2.03.03	<i>Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	15.035.000	14.943.000	99.39	100.00
1.06.02.2.03.04	<i>Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	33.546.615	32.474.615	96.80	96.80
1.06.02.2.03.05	<i>Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK)</i>	4.047.000	4.047.000	100.00	100.00
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	191.406.800	186.500.600	97.44	100
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	179.505.500	176.493.900	98.32	100
1.06.04.2.01.06	<i>Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat</i>	32.598.700	32.465.700	99.59	100.00
1.06.04.2.01.12	<i>Pemberian Layanan Rujukan</i>	146.906.800	144.028.200	98.04	100.00
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	11.901.300	10.006.700	84.08	100
1.06.04.2.02.07	<i>Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial</i>	11.901.300	10.006.700	84.08	100.00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	181.363.980	84.011.536	46.32	46.54
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	14.021.000	14.021.000	100	100
1.06.05.2.01.02	<i>Rujukan Anak-Anak Terlantar</i>	12.971.000	12.971.000	100.00	100.00
1.06.05.2.01.03	<i>Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar</i>	1.050.000	1.050.000	100.00	100.00
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	167.342.980	69.990.536	41.82	42.06
1.06.05.2.02.01	<i>Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i>	10.316.025	10.171.025	98.59	100.00
1.06.05.2.02.02	<i>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i>	55.365.000	55.115.111	99.55	100.00
1.06.05.2.02.03	<i>Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga</i>	101.661.955	4.704.400	4.63	4.63
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	63.917.750	61.633.900	96.43	96.86
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	45.306.750	43.153.900	95.25	95.57
1.06.06.2.01.01	<i>Penyediaan Makanan</i>	35.945.350	33.936.500	94.41	94.41
1.06.06.2.01.02	<i>Penyediaan Sandang</i>	3.000.000	3.000.000	100.00	100.00
1.06.06.2.01.05	<i>Pelayanan Dukungan Psikososial</i>	6.361.400	6.217.400	97.74	100.00
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	18.611.000	18.480.000	99.3	100
1.06.06.2.02.02	<i>Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana</i>	18.611.000	18.480.000	99.30	100.00
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	5.148.900	5.148.900	100	100
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	5.148.900	5.148.900	100	100
1.06.07.2.01.01	<i>Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</i>	1.853.900	1.853.900	100.00	100.00
1.06.07.2.01.02	<i>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</i>	3.295.000	3.295.000	100.00	100.00
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	33.158.000	15.436.800	46.56	46.56
2.13.03.2.01	Fasilitas Kerja sama antar Desa	33.158.000	15.436.800	46.56	46.56
2.13.03.2.01.03	<i>Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan</i>	33.158.000	15.436.800	46.56	46.56
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	316.795.065	314.294.054	99.21	99.44
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	316.795.065	314.294.054	99.21	99.44
2.13.04.2.01.01	<i>Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</i>	88.366.195	88.113.700	99.71	100.00
2.13.04.2.01.04	<i>Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa</i>	60.969.890	60.956.474	99.98	100.00
2.13.04.2.01.05	<i>Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</i>	17.617.010	15.817.010	89.78	90.00
2.13.04.2.01.06	<i>Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa</i>	37.447.325	37.257.325	99.49	100.00
2.13.04.2.01.08	<i>Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa</i>	34.889.115	34.887.365	99.99	100.00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
2.13.04.2.01.11	<i>Fasilitasi Penyusunan Profil Desa</i>	23.890.800	23.883.200	99.97	100.00
2.13.04.2.01.13	<i>Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa</i>	30.841.450	30.610.350	99.25	100.00
2.13.04.2.01.18	<i>Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan</i>	22.773.280	22.768.630	99.98	100.00
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	608.446.330	600.495.740	98.69	100
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	608.446.330	600.495.740	98.69	100
2.13.05.2.01.02	<i>Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</i>	19.082.000	19.074.000	99.96	100.00
2.13.05.2.01.03	<i>Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</i>	83.962.540	83.849.040	99.86	100.00
2.13.05.2.01.05	<i>Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa</i>	21.319.890	21.317.540	99.99	100.00
2.13.05.2.01.06	<i>Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</i>	34.008.050	33.762.450	99.28	100.00
2.13.05.2.01.07	<i>Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat</i>	23.074.100	22.714.700	98.44	100.00
2.13.05.2.01.09	<i>Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga</i>	426.999.750	419.778.010	98.31	100.00
Total		5.665.204.537	5.103.685.271	90.09	96.97

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.729.006.382	5.425.963.351	94.71	100
0.00.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.738.294	11.694.000	99.62	100
0.00.01.2.01.01	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	6.785.000	6.761.200	99.65	100.00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
0.00.01.2.01.06	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	4.953.294	4.932.800	99.59	100.00
0.00.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.188.669.167	4.030.086.793	96.21	100
0.00.01.2.02.01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	4.035.369.167	3.876.786.793	96.07	100.00
0.00.01.2.02.02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	153.300.000	153.300.000	100.00	100.00
0.00.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.500.150	3.477.500	99.35	100
0.00.01.2.03.06	<i>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	3.500.150	3.477.500	99.35	100.00
0.00.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	3.500.000	3.498.900	99.97	100
0.00.01.2.04.07	<i>Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah</i>	3.500.000	3.498.900	99.97	100.00
0.00.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	28.685.100	24.365.000	84.94	100
0.00.01.2.05.00	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	15.000.000	12.187.000	81.25	100.00
0.00.01.2.05.04	<i>Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>	6.427.550	6.261.000	97.41	100.00
0.00.01.2.05.10	<i>Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	7.257.550	5.917.000	81.53	100.00
0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	493.018.981	491.641.534	99.72	100
0.00.01.2.06.00	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	409.207.440	410.437.734	100.30	100.00
0.00.01.2.06.01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	5.655.000	5.650.000	99.91	100.00
0.00.01.2.06.02	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	27.853.525	27.700.000	99.45	100.00
0.00.01.2.06.04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	6.260.000	6.211.000	99.22	100.00
0.00.01.2.06.05	<i>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</i>	15.643.016	15.642.800	100.00	100.00
0.00.01.2.06.06	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	11.400.000	9.000.000	78.95	100.00
0.00.01.2.06.08	<i>Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	17.000.000	17.000.000	100.00	100.00
0.00.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	81.481.300	79.660.000	97.76	100
0.00.01.2.07.05	<i>Pengadaan Mebel</i>	6.500.000	6.489.060	99.83	100.00
0.00.01.2.07.07	<i>Pengadaan Aset Tetap Lainnya</i>	74.981.300	73.170.940	97.59	100.00
0.00.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	722.971.994	592.341.624	81.93	100
0.00.01.2.08.01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	3.851.994	3.850.000	99.95	100.00
0.00.01.2.08.02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	86.000.000	74.331.624	86.43	100.00
0.00.01.2.08.04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	633.120.000	514.160.000	81.21	100.00
0.00.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	195.441.396	189.198.000	96.81	100
0.00.01.2.00.01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	48.634.882	43.709.700	89.87	100.00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
0.00.01.2.00.02	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	62.391.822	61.278.300	98.22	100.00
0.00.01.2.00.06	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	10.750.000	10.715.000	99.67	100.00
0.00.01.2.00.09	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	73.664.692	73.495.000	99.77	100.00
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	292.070.900	283.065.330	96.92	100
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	40.460.000	39.818.400	98.41	100
2.15.02.2.02.02	<i>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</i>	22.000.000	21.500.000	97.73	100.00
2.15.02.2.02.03	<i>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan</i>	18.460.000	18.318.400	99.23	100.00
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	13.375.000	10.000.000	74.77	100
2.15.02.2.03.04	<i>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)</i>	13.375.000	10.000.000	74.77	100.00
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	18.633.000	18.550.000	99.55	100
2.15.02.2.04.02	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	18.633.000	18.550.000	99.55	100.00
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	74.427.600	74.318.830	99.85	100
2.15.02.2.05.04	<i>Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	25.000.000	25.000.000	100.00	100.00
2.15.02.2.05.07	<i>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	49.427.600	49.318.830	99.78	100.00
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	64.353.600	64.336.600	99.97	100
2.15.02.2.06.05	<i>Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota</i>	64.353.600	64.336.600	99.97	100.00
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota	80.821.700	76.041.500	94.09	100
2.15.02.2.09.02	<i>Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam (satu) Kabupaten/Kota</i>	80.821.700	76.041.500	94.09	100.00
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	42.000.000	40.280.100	95.91	100
2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	42.000.000	40.280.100	95.91	100
2.15.03.2.13.04	<i>Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau</i>	42.000.000	40.280.100	95.91	100.00
Total		6.063.077.282	5.749.308.781	94.82	100

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.661.260.040	3.440.748.112	93.98	94.17
0.00.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.743.200	46.935.500	98.31	98.51
0.00.01.2.01.01	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	35.913.200	35.453.500	98.72	98.92
0.00.01.2.01.06	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	11.830.000	11.482.000	97.06	97.26
0.00.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.378.183.713	2.283.918.144	96.04	96.24
0.00.01.2.02.01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	2.210.833.713	2.123.291.144	96.04	96.24
0.00.01.2.02.02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	143.480.000	136.885.000	95.40	95.60
0.00.01.2.02.05	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	6.260.000	6.240.000	99.68	99.88
0.00.01.2.02.07	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	17.610.000	17.502.000	99.39	99.59
0.00.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	77.249.895	57.400.000	74.3	74.5
0.00.01.2.05.02	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	77.249.895	57.400.000	74.30	74.50
0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	386.369.670	372.740.306	96.47	96.66
0.00.01.2.06.00	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	296.040.400	294.573.206	99.50	99.70
0.00.01.2.06.01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	3.665.000	3.665.000	100.00	100.00
0.00.01.2.06.02	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	64.286.620	62.513.000	97.24	97.44
0.00.01.2.06.04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	10.388.250	0	0.00	0.00
0.00.01.2.06.05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	11.989.400	11.989.100	100.00	100.00
0.00.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	38.384.280	38.295.000	99.77	99.97
0.00.01.2.07.06	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	38.384.280	38.295.000	99.77	99.97
0.00.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	667.626.000	611.531.692	91.6	91.8
0.00.01.2.08.02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	368.724.000	333.709.692	90.50	90.70
0.00.01.2.08.04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	298.902.000	277.822.000	92.95	93.15
0.00.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.703.282	29.927.470	45.55	45.75
0.00.01.2.00.01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	45.786.782	21.674.870	47.34	47.54
0.00.01.2.00.10	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	19.916.500	8.252.600	41.44	41.64
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.897.083.500	1.782.987.100	93.99	94.17
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.897.083.500	1.782.987.100	93.99	94.17
2.16.02.2.01.04	<i>Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik</i>	183.749.500	166.707.500	90.73	90.83
2.16.02.2.01.07	<i>Layanan Hubungan Media</i>	40.000.000	40.000.000	100.00	100.00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
2.16.02.2.01.12	<i>Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas</i>	1.673.334.000	1.576.279.600	94.20	94.40
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	288.826.000	264.182.408	91.47	91.67
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	288.826.000	264.182.408	91.47	91.67
2.16.03.2.02.03	<i>Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah</i>	91.200.000	79.362.408	87.02	87.22
2.16.03.2.02.07	<i>Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	126.476.000	117.250.000	92.71	92.91
2.16.03.2.02.10	<i>Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah</i>	71.150.000	67.570.000	94.97	95.17
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	79.401.035	78.391.000	98.73	98.93
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	79.401.035	78.391.000	98.73	98.93
2.20.02.2.01.01	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral</i>	50.240.900	49.528.000	98.58	98.78
2.20.02.2.01.05	<i>Pengembangan Infrastruktur</i>	29.160.135	28.863.000	98.98	99.18
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	175.352.200	162.563.527	92.71	92.91
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	151.653.600	139.409.227	91.93	92.13
2.21.02.2.01.02	<i>Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	151.653.600	139.409.227	91.93	92.13
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	23.698.600	23.154.300	97.7	97.9
2.21.02.2.02.01	<i>Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	23.698.600	23.154.300	97.70	97.90
Total		6.101.922.775	5.728.872.147	93.89	94.08

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	3.843.812.280	3.760.836.081	97.84	97.84
0.00.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.295.000	34.051.861	99.29	99.29
0.00.01.2.01.02	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	14.125.000	13.952.000	98.78	98.78
0.00.01.2.01.06	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	20.170.000	20.099.861	99.65	99.65
0.00.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.611.502.060	2.573.717.393	98.55	98.56
0.00.01.2.02.01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	2.481.627.260	2.446.039.393	98.57	98.57
0.00.01.2.02.02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	112.800.000	112.800.000	100.00	100.00
0.00.01.2.02.07	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	17.074.800	14.878.000	87.13	87.13

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
0.00.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	151.660.000	148.439.863	97.88	97.88
0.00.01.2.05.00	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	122.480.000	119.759.863	97.78	97.78
0.00.01.2.05.02	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	29.180.000	28.680.000	98.29	98.29
0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	251.565.900	248.373.500	98.73	98.73
0.00.01.2.06.00	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	187.866.800	187.829.800	99.98	99.98
0.00.01.2.06.01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	5.999.500	4.419.600	73.67	73.67
0.00.01.2.06.02	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	30.000.500	29.925.000	99.75	99.75
0.00.01.2.06.04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	6.000.000	4.500.000	75.00	75.00
0.00.01.2.06.05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	10.649.100	10.649.100	100.00	100.00
0.00.01.2.06.06	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	4.800.000	4.800.000	100.00	100.00
0.00.01.2.06.08	<i>Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	6.250.000	6.250.000	100.00	100.00
0.00.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	730.409.400	705.307.764	96.56	96.56
0.00.01.2.08.01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	12.195.000	12.195.000	100.00	100.00
0.00.01.2.08.02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	52.790.400	37.588.764	71.20	71.20
0.00.01.2.08.04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	665.424.000	655.524.000	98.51	98.51
0.00.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.379.920	50.945.700	79.13	79.14
0.00.01.2.00.01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	55.039.920	41.625.700	75.63	75.63
0.00.01.2.00.06	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	9.340.000	9.320.000	99.79	99.79
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	19.999.700	19.960.200	99.8	99.8
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	19.999.700	19.960.200	99.8	99.8
2.18.02.2.02.02	<i>Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota</i>	19.999.700	19.960.200	99.80	99.80
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	9.999.800	9.999.800	100	100
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	9.999.800	9.999.800	100	100
2.18.03.2.01.02	<i>Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota</i>	9.999.800	9.999.800	100.00	100.00
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	940.804.813	937.939.400	99.7	99.7
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	940.804.813	937.939.400	99.7	99.7

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
2.18.04.2.01.06	<i>Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik</i>	920.805.813	918.681.900	99.77	99.77
2.18.04.2.01.08	<i>Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</i>	19.999.000	19.257.500	96.29	96.29
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	587.672.257	554.380.757	94.34	94.33
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	587.672.257	554.380.757	94.34	94.33
2.18.05.2.01.04	<i>Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya</i>	88.150.900	80.155.900	90.93	90.93
2.18.05.2.01.05	<i>Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha</i>	323.220.607	314.568.107	97.32	97.32
2.18.05.2.01.06	<i>Pengawasan Penanaman Modal</i>	176.300.750	159.656.750	90.56	90.56
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	129.999.400	129.660.600	99.74	99.74
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	129.999.400	129.660.600	99.74	99.74
2.18.06.2.01.01	<i>Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</i>	129.999.400	129.660.600	99.74	99.74
Total		5.532.288.250	5.412.776.838	97.84	97.84

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.647.356.573	6.111.426.613	91.94	98.48
0.00.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	59.148.000	47.211.000	79.82	80.72
0.00.01.2.01.01	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	48.448.000	38.257.000	78.97	80.00
0.00.01.2.01.06	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	10.700.000	8.954.000	83.68	84.00
0.00.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.884.035.374	3.617.467.853	93.14	99.16
0.00.01.2.02.01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	3.642.729.174	3.408.937.853	93.58	100.00
0.00.01.2.02.02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	241.306.200	208.530.000	86.42	86.42
0.00.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	222.972.000	174.467.994	78.25	78.28
0.00.01.2.05.00	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	106.872.000	65.685.794	61.46	61.46

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
0.00.01.2.05.02	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	92.500.000	87.115.200	94.18	94.18
0.00.01.2.05.04	<i>Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>	23.600.000	21.667.000	91.81	92.15
0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.093.981.435	1.004.566.856	91.83	100
0.00.01.2.06.00	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	412.740.480	399.109.280	96.70	100.00
0.00.01.2.06.02	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	353.859.655	347.747.426	98.27	100.00
0.00.01.2.06.04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	34.965.000	34.009.000	97.27	100.00
0.00.01.2.06.05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	55.486.300	38.614.150	69.59	100.00
0.00.01.2.06.06	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	10.800.000	7.200.000	66.67	100.00
0.00.01.2.06.08	<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	226.130.000	177.887.000	78.67	100.00
0.00.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.117.830.000	1.052.670.550	94.17	99.22
0.00.01.2.08.02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	173.430.000	108.270.550	62.43	95.00
0.00.01.2.08.04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	944.400.000	944.400.000	100.00	100.00
0.00.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	269.389.764	215.042.360	79.83	100
0.00.01.2.00.01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	70.629.764	19.534.860	27.66	100.00
0.00.01.2.00.06	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	73.760.000	71.257.500	96.61	100.00
0.00.01.2.00.10	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	125.000.000	124.250.000	99.40	100.00
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	308.495.505	259.026.891	83.96	95.81
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	308.495.505	259.026.891	83.96	95.81
2.19.02.2.01.02	<i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula</i>	49.702.190	41.475.680	83.45	100.00
2.19.02.2.01.03	<i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota</i>	258.793.315	217.551.211	84.06	95.00
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1.146.219.010	988.737.500	86.26	93.43
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	131.410.567	116.585.956	88.72	100
2.19.03.2.01.03	<i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota</i>	131.410.567	116.585.956	88.72	100.00
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	339.808.299	247.151.400	72.73	92.55
2.19.03.2.03.02	<i>Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)</i>	310.879.935	243.527.700	78.33	100.00
2.19.03.2.03.03	<i>Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota</i>	28.928.364	3.623.700	12.53	12.53
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	675.000.144	625.000.144	92.59	92.59
2.19.03.2.04.02	<i>Pengembangan Organisasi Keolahragaan</i>	675.000.144	625.000.144	92.59	92.59
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	175.000.000	175.000.000	100	100

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	175.000.000	175.000.000	100	100
2.19.04.2.01.02	<i>Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah</i>	175.000.000	175.000.000	100.00	100.00
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	142.282.000	133.128.424	93.57	94.06
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	142.282.000	133.128.424	93.57	94.06
2.22.02.2.01.01	<i>Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan</i>	62.282.000	53.128.424	85.30	86.42
2.22.02.2.01.02	<i>Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan</i>	80.000.000	80.000.000	100.00	100.00
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	675.002.740	675.002.740	100	100
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	675.002.740	675.002.740	100	100
2.22.03.2.01.03	<i>Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional</i>	675.002.740	675.002.740	100.00	100.00
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	20.022.000	8.590.000	42.9	42.9
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	20.022.000	8.590.000	42.9	42.9
2.22.05.2.02.02	<i>Pengembangan Cagar Budaya</i>	20.022.000	8.590.000	42.90	42.90
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	29.983.300	29.983.300	100	100
2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	29.983.300	29.983.300	100	100
2.22.06.2.01.04	<i>Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum</i>	29.983.300	29.983.300	100.00	100.00
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	461.743.580	446.871.580	96.78	100
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	461.743.580	446.871.580	96.78	100
3.26.02.2.03.03	<i>Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	461.743.580	446.871.580	96.78	100.00
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	351.445.110	328.775.631	93.55	93.61
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	351.445.110	328.775.631	93.55	93.61
3.26.03.2.01.01	<i>Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri</i>	309.446.795	309.246.795	99.94	100.00
3.26.03.2.01.03	<i>Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri</i>	41.998.315	19.528.836	46.50	46.50
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	89.863.200	71.009.080	79.02	100
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	89.863.200	71.009.080	79.02	100
3.26.05.2.01.08	<i>Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata</i>	89.863.200	71.009.080	79.02	100.00
Total		10.047.413.018	9.227.551.759	91.84	97.69

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.000.948.918	3.233.856.239	80.83	81.75
0.00.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.490.350	39.489.950	100	100
0.00.01.2.01.01	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	21.420.000	21.419.600	100.00	100.00
0.00.01.2.01.03	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	7.680.000	7.680.000	100.00	100.00
0.00.01.2.01.06	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	10.390.350	10.390.350	100.00	100.00
0.00.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.793.086.804	2.093.054.195	74.94	75.88
0.00.01.2.02.01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	2.654.995.804	1.954.963.195	73.63	74.63
0.00.01.2.02.02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	121.609.000	121.609.000	100.00	100.00
0.00.01.2.02.05	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	6.222.900	6.222.900	100.00	100.00
0.00.01.2.02.07	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	10.259.100	10.259.100	100.00	100.00
0.00.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	34.518.000	34.471.500	99.87	100
0.00.01.2.05.02	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	16.240.000	16.240.000	100.00	100.00
0.00.01.2.05.04	<i>Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>	18.278.000	18.231.500	99.75	100.00
0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	266.102.294	265.636.212	99.82	100
0.00.01.2.06.00	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	187.989.000	187.522.918	99.75	100.00
0.00.01.2.06.01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	8.750.000	8.750.000	100.00	100.00
0.00.01.2.06.02	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	48.635.175	48.635.175	100.00	100.00
0.00.01.2.06.04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	2.184.000	2.184.000	100.00	100.00
0.00.01.2.06.05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	9.704.119	9.704.119	100.00	100.00
0.00.01.2.06.08	<i>Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	8.840.000	8.840.000	100.00	100.00
0.00.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	317.817.395	314.214.405	98.87	100
0.00.01.2.07.06	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	2.754.635	2.754.635	100.00	100.00
0.00.01.2.07.10	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	204.420.000	202.560.000	99.09	100.00
0.00.01.2.07.11	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	110.642.760	108.899.770	98.42	100.00
0.00.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	488.185.275	441.280.977	90.39	91.43
0.00.01.2.08.01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	7.985.365	7.985.365	100.00	100.00
0.00.01.2.08.02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	26.999.960	21.225.612	78.61	80.61
0.00.01.2.08.04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	453.199.950	412.070.000	90.92	91.92
0.00.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.748.800	45.709.000	74.02	75.84
0.00.01.2.00.01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	56.148.800	40.109.000	71.43	73.43

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
0.00.01.2.00.06	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	5.600.000	5.600.000	100.00	100.00
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	888.777.270	850.179.999	95.66	96.5
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	547.948.390	511.907.235	93.42	94.32
2.23.02.2.01.01	<i>Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik</i>	29.496.455	19.884.700	67.41	69.41
2.23.02.2.01.02	<i>Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	305.959.855	303.354.855	99.15	100.00
2.23.02.2.01.03	<i>Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	15.238.600	5.178.600	33.98	35.98
2.23.02.2.01.04	<i>Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan</i>	76.308.300	76.212.400	99.87	100.00
2.23.02.2.01.05	<i>Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota</i>	8.235.695	8.215.695	99.76	100.00
2.23.02.2.01.06	<i>Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	10.650.000	10.650.000	100.00	100.00
2.23.02.2.01.07	<i>Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota</i>	38.282.200	37.217.000	97.22	98.22
2.23.02.2.01.09	<i>Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka</i>	39.986.490	27.536.490	68.86	70.86
2.23.02.2.01.10	<i>Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	23.790.795	23.657.495	99.44	100.00
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	340.828.880	338.272.764	99.25	100
2.23.02.2.02.01	<i>Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat</i>	59.560.750	59.088.750	99.21	100.00
2.23.02.2.02.02	<i>Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	24.998.650	24.998.650	100.00	100.00
2.23.02.2.02.03	<i>Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca</i>	20.775.400	19.763.712	95.13	100.00
2.23.02.2.02.04	<i>Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial</i>	174.995.050	174.992.622	100.00	100.00
2.23.02.2.02.05	<i>Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	60.499.030	59.429.030	98.23	100.00
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	154.008.270	152.379.250	98.94	100
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	29.008.570	28.462.950	98.12	100
2.24.02.2.01.02	<i>Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis</i>	29.008.570	28.462.950	98.12	100.00
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	124.999.700	123.916.300	99.13	100
2.24.02.2.03.01	<i>Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN</i>	124.999.700	123.916.300	99.13	100.00
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	63.523.240	59.679.630	93.95	94.81
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah (sepuluh) Tahun	27.245.450	23.401.850	85.89	87.89
2.24.03.2.01.01	<i>Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah (sepuluh) Tahun</i>	27.245.450	23.401.850	85.89	87.89
2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	36.277.790	36.277.780	100	100
2.24.03.2.03.02	<i>Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	36.277.790	36.277.780	100.00	100.00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
	Total	5.107.257.698	4.296.095.118	84.12	85.03

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.528.073.858	7.367.806.663	97.87	99.99
0.00.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	157.786.100	156.775.170	99.36	100
0.00.01.2.01.01	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	157.786.100	156.775.170	99.36	100.00
0.00.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.095.103.236	4.946.314.652	97.08	100
0.00.01.2.02.01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	4.888.463.236	4.739.674.652	96.96	100.00
0.00.01.2.02.02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	206.640.000	206.640.000	100.00	100.00
0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	503.783.070	503.523.569	99.95	100
0.00.01.2.06.00	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	262.804.860	262.749.456	99.98	100.00
0.00.01.2.06.02	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	57.874.010	57.870.833	99.99	100.00
0.00.01.2.06.04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	17.492.000	17.313.000	98.98	100.00
0.00.01.2.06.05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	33.150.200	33.150.100	100.00	100.00
0.00.01.2.06.06	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	15.150.000	15.150.000	100.00	100.00
0.00.01.2.06.08	<i>Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	117.312.000	117.290.180	99.98	100.00
0.00.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.054.186.000	1.050.205.137	99.62	99.93
0.00.01.2.08.01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	10.005.000	10.001.000	99.96	100.00
0.00.01.2.08.02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	116.581.000	112.604.137	96.59	99.41
0.00.01.2.08.04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	927.600.000	927.600.000	100.00	100.00
0.00.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	717.215.452	710.988.135	99.13	100

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
0.00.01.2.00.02	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	55.736.353	55.700.100	99.93	100.00
0.00.01.2.00.09	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	641.939.099	635.748.035	99.04	100.00
0.00.01.2.00.10	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	19.540.000	19.540.000	100.00	100.00
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1.114.645.850	1.091.507.995	97.92	99.16
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	36.170.250	36.044.900	99.65	100
3.25.03.2.01.01	<i>Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan</i>	36.170.250	36.044.900	99.65	100.00
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.078.475.600	1.055.463.095	97.87	99.13
3.25.03.2.02.01	<i>Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil</i>	1.078.475.600	1.055.463.095	97.87	99.13
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.754.025.992	1.731.282.765	98.7	99.52
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	1.413.219.052	1.393.309.065	98.59	99.41
3.25.04.2.02.01	<i>Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil</i>	1.413.219.052	1.393.309.065	98.59	99.41
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	340.806.940	337.973.700	99.17	100
3.25.04.2.04.01	<i>Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	65.706.340	65.666.800	99.94	100.00
3.25.04.2.04.03	<i>Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	275.100.600	272.306.900	98.98	100.00
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	120.837.350	98.497.350	81.51	84.49
3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	120.837.350	98.497.350	81.51	84.49
3.25.05.2.01.01	<i>Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota</i>	120.837.350	98.497.350	81.51	84.49
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	234.049.485	233.262.785	99.66	99.96
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	211.027.445	210.840.745	99.91	100
3.25.06.2.02.01	<i>Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</i>	211.027.445	210.840.745	99.91	100.00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	23.022.040	22.422.040	97.39	99.61
3.25.06.2.03.02	<i>Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	23.022.040	22.422.040	97.39	99.61
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.758.498.420	3.714.010.149	98.82	99.75
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	610.995.000	603.117.350	98.71	100
3.27.02.2.01.02	<i>Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian</i>	610.995.000	603.117.350	98.71	100.00
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	101.448.600	101.069.600	99.63	100
3.27.02.2.02.02	<i>Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman</i>	101.448.600	101.069.600	99.63	100.00
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	92.699.320	80.680.870	87.04	89.96
3.27.02.2.05.05	<i>Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak</i>	92.699.320	80.680.870	87.04	89.96
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	2.953.355.500	2.929.142.329	99.18	100
3.27.02.2.06.01	<i>Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain</i>	2.953.355.500	2.929.142.329	99.18	100.00
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.331.761.490	1.329.156.260	99.8	100
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	131.761.490	131.761.260	100	100
3.27.03.2.01.03	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya</i>	131.761.490	131.761.260	100.00	100.00
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	1.200.000.000	1.197.395.000	99.78	100
3.27.03.2.02.09	<i>Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya</i>	1.200.000.000	1.197.395.000	99.78	100.00
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	388.879.655	381.744.060	98.17	98.99
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	332.310.980	330.292.385	99.39	100
3.27.04.2.01.02	<i>Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	332.310.980	330.292.385	99.39	100.00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	56.568.675	51.451.675	90.95	93.05
3.27.04.2.02.02	<i>Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya</i>	56.568.675	51.451.675	90.95	93.05
Total		16.230.772.100	15.947.268.027	98.25	99.69

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.153.837.965	18.582.203.574	92.2	100
0.00.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	146.461.430	144.316.280	98.54	100
0.00.01.2.01.01	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	116.461.630	114.739.830	98.52	100.00
0.00.01.2.01.06	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	29.999.800	29.576.450	98.59	100.00
0.00.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.541.078.742	14.246.451.675	91.67	100
0.00.01.2.02.01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	15.088.070.667	13.807.508.075	91.51	100.00
0.00.01.2.02.02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	379.000.000	366.360.000	96.66	100.00
0.00.01.2.02.05	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	74.008.075	72.583.600	98.08	100.00
0.00.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	153.750.000	153.596.250	99.9	100
0.00.01.2.05.02	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	153.750.000	153.596.250	99.90	100.00
0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.044.811.925	1.012.773.167	96.93	100
0.00.01.2.06.00	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	298.011.000	297.397.329	99.79	100.00
0.00.01.2.06.01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	14.157.000	14.097.000	99.58	100.00
0.00.01.2.06.02	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	50.850.725	50.744.538	99.79	100.00
0.00.01.2.06.04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	53.562.000	47.819.500	89.28	100.00
0.00.01.2.06.05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	38.589.200	38.547.200	99.89	100.00
0.00.01.2.06.06	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	120.960.000	97.320.000	80.46	100.00
0.00.01.2.06.08	<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	468.682.000	466.847.600	99.61	100.00
0.00.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	348.734.827	346.933.677	99.48	100

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
0.00.01.2.07.10	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	348.734.827	346.933.677	99.48	100.00
0.00.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.292.197.600	2.097.704.608	91.51	100
0.00.01.2.08.01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	13.800.000	15.091.150	109.36	100.00
0.00.01.2.08.02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	229.997.600	123.013.458	53.48	100.00
0.00.01.2.08.04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	2.048.400.000	1.959.600.000	95.66	100.00
0.00.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	443.836.491	424.020.317	95.54	100
0.00.01.2.00.01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	129.928.867	121.476.467	93.49	100.00
0.00.01.2.00.07	<i>Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya</i>	87.508.624	87.469.550	99.96	100.00
0.00.01.2.00.11	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	226.399.000	215.074.300	95.00	100.00
0.00.01.2.13	Penataan Organisasi	182.966.950	156.407.600	85.48	100
0.00.01.2.13.01	<i>Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan</i>	80.787.150	54.290.000	67.20	100.00
0.00.01.2.13.03	<i>Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi</i>	102.179.800	102.117.600	99.94	100.00
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	50.000.000	39.991.600	79.98	100
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	39.991.600	79.98	100
2.09.02.2.01.04	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik</i>	50.000.000	39.991.600	79.98	100.00
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	996.659.180	666.440.091	66.87	100
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	387.645.550	378.689.011	97.69	100
2.09.03.2.01.02	<i>Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</i>	137.789.640	134.893.656	97.90	100.00
2.09.03.2.01.03	<i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya</i>	24.999.130	24.770.409	99.09	100.00
2.09.03.2.01.05	<i>Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan</i>	29.999.740	28.467.650	94.89	100.00
2.09.03.2.01.06	<i>Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia</i>	144.868.545	144.629.096	99.83	100.00
2.09.03.2.01.14	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok , Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis</i>	24.988.795	22.221.700	88.93	100.00
2.09.03.2.01.16	<i>Penyusunan Neraca Bahan Makanan</i>	24.999.700	23.706.500	94.83	100.00
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	378.645.895	77.279.845	20.41	100

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
2.09.03.2.02.02	<i>Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal</i>	32.749.250	32.411.400	98.97	100.00
2.09.03.2.02.04	<i>Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota</i>	31.875.000	12.584.000	39.48	100.00
2.09.03.2.02.06	<i>Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota</i>	314.021.645	32.284.445	10.28	100.00
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	230.367.735	210.471.235	91.36	100
2.09.03.2.04.01	<i>Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun</i>	24.999.955	24.956.155	99.82	100.00
2.09.03.2.04.02	<i>Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</i>	135.367.900	132.231.000	97.68	100.00
2.09.03.2.04.03	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun</i>	69.999.880	53.284.080	76.12	100.00
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	409.184.180	399.843.476	97.72	100
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	96.270.080	96.233.412	99.96	100
2.09.04.2.01.01	<i>Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan</i>	96.270.080	96.233.412	99.96	100.00
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	312.914.100	303.610.064	97.03	100
2.09.04.2.02.02	<i>Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	312.914.100	303.610.064	97.03	100.00
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	54.931.950	54.927.685	99.99	100
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	54.931.950	54.927.685	99.99	100
2.09.05.2.01.06	<i>Penguatan Kelembagaan Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar asal Tumbuhan</i>	54.931.950	54.927.685	99.99	100.00
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.355.961.945	2.308.435.299	97.98	100
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	892.908.695	882.060.609	98.79	100
3.27.02.2.01.01	<i>Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi</i>	231.308.765	223.997.280	96.84	100.00
3.27.02.2.01.02	<i>Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian</i>	661.599.930	658.063.329	99.47	100.00
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	1.463.053.250	1.426.374.690	97.49	100
3.27.02.2.02.01	<i>Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman</i>	33.757.860	33.754.000	99.99	100.00
3.27.02.2.02.02	<i>Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman</i>	99.947.540	69.110.914	69.15	100.00
3.27.02.2.02.03	<i>Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman</i>	1.329.347.850	1.323.509.776	99.56	100.00
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	23.493.234.210	23.256.686.907	98.99	100
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	5.585.880.980	5.541.426.166	99.2	100

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
3.27.03.2.01.01	<i>Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LPB, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KPB dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCPB</i>	557.566.780	537.741.087	96.44	100.00
3.27.03.2.01.17	<i>Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian</i>	5.028.314.200	5.003.685.079	99.51	100.00
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	17.907.353.230	17.715.260.741	98.93	100
3.27.03.2.02.01	<i>Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani</i>	216.793.660	120.803.033	55.72	100.00
3.27.03.2.02.02	<i>Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian</i>	182.105.435	181.815.000	99.84	100.00
3.27.03.2.02.03	<i>Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani</i>	12.541.473.305	12.531.348.726	99.92	100.00
3.27.03.2.02.06	<i>Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air</i>	421.259.000	421.194.000	99.98	100.00
3.27.03.2.02.08	<i>Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya</i>	346.539.620	345.865.460	99.81	100.00
3.27.03.2.02.09	<i>Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya</i>	4.199.182.210	4.114.234.522	97.98	100.00
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	337.607.225	315.022.690	93.31	100
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	337.607.225	315.022.690	93.31	100
3.27.05.2.01.01	<i>Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan</i>	210.367.605	209.079.390	99.39	100.00
3.27.05.2.01.03	<i>Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan</i>	76.519.760	55.263.400	72.22	100.00
3.27.05.2.01.05	<i>Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan</i>	50.719.860	50.679.900	99.92	100.00
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	179.691.830	178.845.000	99.53	100
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	179.691.830	178.845.000	99.53	100
3.27.06.2.01.02	<i>Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian</i>	83.414.480	83.168.000	99.70	100.00
3.27.06.2.01.03	<i>Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian</i>	96.277.350	95.677.000	99.38	100.00
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.175.000.650	1.034.993.440	88.08	100
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.175.000.650	1.034.993.440	88.08	100
3.27.07.2.01.01	<i>Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa</i>	230.253.725	115.253.025	50.05	100.00
3.27.07.2.01.02	<i>Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa</i>	260.746.925	259.740.415	99.61	100.00
3.27.07.2.01.03	<i>Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian</i>	684.000.000	660.000.000	96.49	100.00
Total		49.206.109.135	46.837.389.762	95.19	100

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.721.054.761	6.493.478.611	96.61	100
0.00.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.767.100	20.761.900	99.97	100
0.00.01.2.01.01	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	20.767.100	20.761.900	99.97	100.00
0.00.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.064.171.533	4.874.553.580	96.26	100
0.00.01.2.02.01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	4.868.756.533	4.679.187.580	96.11	100.00
0.00.01.2.02.02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	195.415.000	195.366.000	99.97	100.00
0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	555.029.580	550.047.500	99.1	100
0.00.01.2.06.00	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	328.232.800	328.066.600	99.95	100.00
0.00.01.2.06.01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	6.690.500	6.690.500	100.00	100.00
0.00.01.2.06.02	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	32.590.130	32.513.300	99.76	100.00
0.00.01.2.06.04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	7.030.200	7.028.200	99.97	100.00
0.00.01.2.06.05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	31.169.950	28.739.900	92.20	100.00
0.00.01.2.06.06	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	14.400.000	13.500.000	93.75	100.00
0.00.01.2.06.08	<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	134.916.000	133.509.000	98.96	100.00
0.00.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.004.582.000	978.670.231	97.42	100
0.00.01.2.08.02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	60.182.000	52.270.231	86.85	100.00
0.00.01.2.08.04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	944.400.000	926.400.000	98.09	100.00
0.00.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76.504.548	69.445.400	90.77	100
0.00.01.2.00.01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	64.324.548	57.265.400	89.03	100.00
0.00.01.2.00.06	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	12.180.000	12.180.000	100.00	100.00
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	82.367.450	82.053.756	99.62	100
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	82.367.450	82.053.756	99.62	100
2.17.03.2.01.03	<i>Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi</i>	66.994.650	66.731.356	99.61	100.00
2.17.03.2.01.04	<i>Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota</i>	15.372.800	15.322.400	99.67	100.00
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	12.670.300	12.660.500	99.92	100
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota	12.670.300	12.660.500	99.92	100
2.17.04.2.01.01	<i>Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	12.670.300	12.660.500	99.92	100.00
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	34.999.900	34.667.500	99.05	100

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	34.999.900	34.667.500	99.05	100
2.17.06.2.01.01	<i>Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	34.999.900	34.667.500	99.05	100.00
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	118.529.390	118.529.390	100	100
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	118.529.390	118.529.390	100	100
2.17.07.2.01.02	<i>Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro</i>	18.421.090	18.421.090	100.00	100.00
2.17.07.2.01.03	<i>Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro</i>	25.771.090	25.771.090	100.00	100.00
2.17.07.2.01.04	<i>Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro</i>	17.440.000	17.440.000	100.00	100.00
2.17.07.2.01.05	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro</i>	24.864.000	24.864.000	100.00	100.00
2.17.07.2.01.06	<i>Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan</i>	32.033.210	32.033.210	100.00	100.00
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	64.470.060	64.430.060	99.94	100
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	64.470.060	64.430.060	99.94	100
2.17.08.2.01.02	<i>Pengembangan Usaha Mikro</i>	47.288.050	47.248.050	99.92	100.00
2.17.08.2.01.03	<i>Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan</i>	17.182.010	17.182.010	100.00	100.00
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	10.000.000	10.000.000	100	100
3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	10.000.000	10.000.000	100	100
3.30.02.2.06.03	<i>Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B) maupun Produsen B (P-B)</i>	10.000.000	10.000.000	100.00	100.00
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	306.199.400	303.956.656	99.27	100
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	286.199.400	283.956.656	99.22	100
3.30.03.2.01.01	<i>Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>	199.999.900	198.823.400	99.41	100.00
3.30.03.2.01.02	<i>Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>	86.199.500	85.133.256	98.76	100.00
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	20.000.000	20.000.000	100	100
3.30.03.2.02.01	<i>Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan</i>	10.000.000	10.000.000	100.00	100.00
3.30.03.2.02.02	<i>Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan</i>	10.000.000	10.000.000	100.00	100.00
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	259.999.500	259.040.480	99.63	100
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	249.999.700	249.040.680	99.62	100

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
3.30.04.2.02.02	<i>Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan</i>	99.999.800	99.633.305	99.63	100.00
3.30.04.2.02.03	<i>Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam (satu) Kabupaten/Kota</i>	149.999.900	149.407.375	99.60	100.00
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.999.800	9.999.800	100	100
3.30.04.2.03.03	<i>Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi</i>	9.999.800	9.999.800	100.00	100.00
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	29.999.900	24.933.350	83.11	100
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	29.999.900	24.933.350	83.11	100
3.30.06.2.01.01	<i>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang</i>	23.753.900	18.765.800	79.00	100.00
3.30.06.2.01.02	<i>Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal</i>	6.246.000	6.167.550	98.74	100.00
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	149.999.880	140.599.880	93.73	100
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	149.999.880	140.599.880	93.73	100
3.30.07.2.01.01	<i>Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota</i>	149.999.880	140.599.880	93.73	100.00
Total		7.790.290.541	7.544.350.183	96.84	100

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	78.584.160.591	66.681.687.921	84,85	84,85
0.00.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	903.328.100	783.807.856	86,8	95,2
0.00.01.2.01.01	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	432.859.290	381.945.931	88,2	97,5
0.00.01.2.01.02	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	158.172.630	101.091.135	63,9	82,9
0.00.01.2.01.04	<i>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</i>	120.000.035	115.026.290	95,9	99,5
0.00.01.2.01.07	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	192.296.145	185.744.500	96,6	99,7
0.00.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.874.378.646	16.647.428.717	88,2	95,1
0.00.01.2.02.01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	15.201.683.777	13.719.447.825	90,2	97,5
0.00.01.2.02.02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	2.179.114.000	2.005.684.513	92,0	98,6
0.00.01.2.02.03	<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	476.054.475	342.952.970	72,0	88,5
0.00.01.2.02.05	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	376.010.285	235.529.933	62,6	76,4
0.00.01.2.02.06	<i>Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan</i>	641.516.109	343.813.476	53,6	69,7
0.00.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	145.464.000	120.715.000	83,0	92,3
0.00.01.2.03.06	<i>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	145.464.000	120.715.000	83,0	92,3
0.00.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	768.714.500	338.357.440	44,0	62,5
0.00.01.2.05.02	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	768.714.500	338.357.440	44,0	62,5
0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.680.732.520	2.232.379.820	60,7	85,3
0.00.01.2.06.00	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	490.298.520	396.788.600	80,9	92,3
0.00.01.2.06.02	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	1.877.688.000	939.648.830	50,0	72,2
0.00.01.2.06.03	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	1.014.390.000	636.595.625	62,8	85,6
0.00.01.2.06.05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	298.356.000	259.346.765	86,9	95,4
0.00.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17.894.691.960	17.207.300.000	96,2	99,5
0.00.01.2.07.01	<i>Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	17.894.691.960	17.207.300.000	96,16	99,5
0.00.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.173.405.000	7.056.292.680	76,9	90,3
0.00.01.2.08.01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	35.385.000	29.560.000	83,5	96,6
0.00.01.2.08.02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	3.282.250.000	2.299.522.330	70,1	89,4
0.00.01.2.08.04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	5.855.770.000	4.727.210.350	80,7	93,7
0.00.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.799.025.060	6.333.615.515	64,6	84,6

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
0.00.01.2.00.01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	3.713.256.354	2.108.692.555	56,8	70,5
0.00.01.2.00.09	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	5.168.898.706	3.725.159.133	72,1	87,6
0.00.01.2.00.10	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	916.870.000	499.763.827	54,5	72,3
0.00.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	581.534.420	399.995.300	68,8	75,6
0.00.01.2.11.01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>	581.534.420	399.995.300	68,8	75,6
0.00.01.2.12	Fasilitas Kerumahaan Sekretariat Daerah	4.509.587.300	3.648.094.497	58,88	67,34
0.00.01.2.12.01	<i>Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah</i>	3.504.952.300	2.711.759.597	77,4	69,88
0.00.01.2.12.03	<i>Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah</i>	1.004.635.000	936.334.900	93,2	98,8
0.00.01.2.13	Penataan Organisasi	1.496.022.845	1.342.637.604	71,03	84,6
0.00.01.2.13.01	<i>Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan</i>	411.537.140	402.224.205	97,7	99,8
0.00.01.2.13.02	<i>Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana</i>	382.278.945	373.599.995	97,7	80,38
0.00.01.2.13.03	<i>Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi</i>	702.206.760	566.813.404	80,7	93,5
0.00.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	10.757.276.240	10.571.063.492	85,36	88,75
0.00.01.2.14.01	<i>Fasilitas Keprotokolan</i>	10.317.704.000	10.212.339.455	99,0	99,96
0.00.01.2.14.02	<i>Fasilitas Komunikasi Pimpinan</i>	439.572.240	358.724.037	81,6	96,5
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	37.810.838.519	32.051.492.536	61,99	66,35
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	14.747.041.524	11.255.260.333	66,83	71,67
4.01.02.2.01.01	<i>Penataan Administrasi Pemerintahan</i>	12.278.280.800	9.249.441.000	75,3	83,6
4.01.02.2.01.02	<i>Pengelolaan Administrasi Kewilayahan</i>	184.189.600	110.791.176	60,2	79,3
4.01.02.2.01.03	<i>Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah</i>	2.284.571.124	1.895.028.157	82,9	93,7
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	21.099.477.955	19.331.867.630	58,58	62,77
4.01.02.2.02.01	<i>Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual</i>	2.052.577.220	2.033.352.950	99,1	99,98
4.01.02.2.02.02	<i>Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial</i>	9.771.923.590	9.001.901.180	92,1	98,8
4.01.02.2.02.03	<i>Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat</i>	9.274.977.145	8.296.613.500	89,5	96,7
4.01.02.2.03	Fasilitas dan Koordinasi Hukum	1.714.658.540	1.342.481.695	65,73	67,87
4.01.02.2.03.01	<i>Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah</i>	503.665.210	293.542.857	58,3	68,56
4.01.02.2.03.02	<i>Fasilitas Bantuan Hukum</i>	1.051.555.660	918.190.487	87,3	93,46
4.01.02.2.03.03	<i>Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum</i>	159.437.670	130.748.351	82,0	92,35
4.01.02.2.04	Fasilitas Kerjasama Daerah	249.660.500	121.882.878	39,27	45,04
4.01.02.2.04.01	<i>Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri</i>	189.005.900	85.669.278	45,3	63,54

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
4.01.02.2.04.03	<i>Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama</i>	60.654.600	36.213.600	59,7	73,62
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	6.108.358.497	3.827.602.546	45.35	49.43
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	2.776.943.385	982.243.568	26.38	28.26
4.01.03.2.01.01	<i>Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD</i>	409.052.435	378.831.230	92,6	98,53
4.01.03.2.01.02	<i>Pengendalian dan Distribusi Perekonomian</i>	175.484.500	160.913.648	91,7	99,2
4.01.03.2.01.03	<i>Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil</i>	204.499.830	147.675.280	72,2	83,54
4.01.03.2.01.04	<i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD</i>	187.906.260	150.255.442	80,0	93,58
4.01.03.2.01.05	<i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD</i>	1.800.000.240	144.567.968	8,0	12,3
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	1.362.703.645	1.188.571.688	60.61	67.58
4.01.03.2.02.01	<i>Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan</i>	602.702.035	473.132.463	78,5	85,46
4.01.03.2.02.02	<i>Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan</i>	432.483.730	411.955.625	95,3	98,72
4.01.03.2.02.03	<i>Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan</i>	327.517.880	303.483.600	92,7	97,58
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.478.035.087	1.275.186.290	66.38	71.47
4.01.03.2.03.01	<i>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</i>	603.958.610	491.487.374	81,4	95,23
4.01.03.2.03.02	<i>Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik</i>	522.522.915	501.750.838	96,0	99,25
4.01.03.2.03.03	<i>Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa</i>	351.553.562	281.948.078	80,2	93,52
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	490.676.380	381.601.000	46.96	52.47
4.01.03.2.04.01	<i>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan</i>	185.443.940	135.294.200	73,0	84,34
4.01.03.2.04.02	<i>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup</i>	183.224.040	134.601.300	73,5	84,56
4.01.03.2.04.03	<i>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air</i>	122.008.400	111.705.500	91,6	96,58
Total		122.503.357.607	102.560.783.003	83,72	98,53

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	30.842.362.426	29.972.603.975	97.18	97.18
0.00.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	104.022.640	103.924.640	99.91	99.91
0.00.01.2.01.02	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	71.910.285	71.843.285	99.91	99.91
0.00.01.2.01.03	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	32.112.355	32.081.355	99.90	99.90
0.00.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.595.276.294	3.441.496.885	95.72	95.72
0.00.01.2.02.01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	2.976.141.219	2.848.309.410	95.70	95.70
0.00.01.2.02.02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	363.800.000	341.900.000	93.98	93.98
0.00.01.2.02.04	<i>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>	81.546.775	81.540.775	99.99	99.99
0.00.01.2.02.05	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	35.513.100	35.510.700	99.99	99.99
0.00.01.2.02.06	<i>Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan</i>	22.726.500	22.540.500	99.18	99.18
0.00.01.2.02.07	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	115.548.700	111.695.500	96.67	96.67
0.00.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.199.693.440	1.188.517.940	99.07	99.07
0.00.01.2.05.02	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	105.000.000	104.665.230	99.68	99.68
0.00.01.2.05.03	<i>Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	43.587.000	41.120.000	94.34	94.34
0.00.01.2.05.11	<i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	1.051.106.440	1.042.732.710	99.20	99.20
0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.740.797.965	2.720.775.638	99.27	99.27
0.00.01.2.06.00	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	590.114.080	589.568.553	99.91	99.91
0.00.01.2.06.01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	335.958.260	334.223.760	99.48	99.48
0.00.01.2.06.02	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	108.022.125	108.022.125	100.00	100.00
0.00.01.2.06.03	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	60.985.000	60.985.000	100.00	100.00
0.00.01.2.06.04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	38.500.000	38.500.000	100.00	100.00
0.00.01.2.06.05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	69.495.000	69.495.000	100.00	100.00
0.00.01.2.06.06	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	387.280.000	375.499.200	96.96	96.96
0.00.01.2.06.08	<i>Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	1.150.443.500	1.144.482.000	99.48	99.48
0.00.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	766.183.095	763.318.300	99.63	99.63
0.00.01.2.07.11	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	766.183.095	763.318.300	99.63	99.63
0.00.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.304.871.200	2.216.247.220	96.15	96.15
0.00.01.2.08.02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	411.607.200	339.591.220	82.50	82.50
0.00.01.2.08.04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	1.893.264.000	1.876.656.000	99.12	99.12
0.00.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.747.374.807	1.657.575.124	94.86	94.86

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
0.00.01.2.00.01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	300.346.787	213.453.124	71.07	71.07
0.00.01.2.00.06	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	444.628.020	443.032.000	99.64	99.64
0.00.01.2.00.09	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	702.400.000	701.090.000	99.81	99.81
0.00.01.2.00.11	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	300.000.000	300.000.000	100.00	100.00
0.00.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	13.352.044.085	12.911.774.516	96.7	96.71
0.00.01.2.15.01	<i>Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD</i>	12.369.459.435	11.981.830.676	96.87	96.87
0.00.01.2.15.02	<i>Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD</i>	407.031.250	381.424.250	93.71	93.71
0.00.01.2.15.03	<i>Pelaksanaan Medical Check Up DPRD</i>	575.553.400	548.519.590	95.30	95.30
0.00.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	5.032.098.900	4.968.973.712	98.75	98.75
0.00.01.2.16.03	<i>Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD</i>	3.927.106.000	3.927.093.418	100.00	100.00
0.00.01.2.16.04	<i>Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD</i>	1.104.992.900	1.041.880.294	94.29	94.29
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	20.854.238.642	20.109.277.639	96.43	96.43
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1.045.757.454	919.250.496	87.9	87.9
4.02.02.2.01.01	<i>Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah</i>	21.757.500	21.454.600	98.61	98.61
4.02.02.2.01.02	<i>Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah</i>	15.564.400	6.442.000	41.39	41.39
4.02.02.2.01.03	<i>Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan</i>	511.714.940	462.243.712	90.33	90.33
4.02.02.2.01.04	<i>Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik</i>	359.632.750	309.266.800	86.00	86.00
4.02.02.2.01.05	<i>Penyusunan Tata Tertib DPRD</i>	12.883.000	12.158.000	94.37	94.37
4.02.02.2.01.06	<i>Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah</i>	124.204.864	107.685.384	86.70	86.70
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	612.882.640	563.886.682	92.01	92
4.02.02.2.02.01	<i>Pembahasan KUA dan PPAS</i>	29.999.780	28.126.780	93.76	93.76
4.02.02.2.02.02	<i>Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS</i>	12.679.550	11.474.550	90.50	90.50
4.02.02.2.02.03	<i>Pembahasan APBD</i>	344.713.850	300.212.252	87.09	87.09
4.02.02.2.02.04	<i>Pembahasan APBD Perubahan</i>	13.489.850	12.683.850	94.03	94.03
4.02.02.2.02.05	<i>Pembahasan Laporan Semester</i>	11.999.850	11.459.850	95.50	95.50
4.02.02.2.02.06	<i>Pembahasan Pertanggungjawaban APBD</i>	199.999.760	199.929.400	99.96	99.96
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	287.322.800	260.341.290	90.61	90.61
4.02.02.2.03.01	<i>Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum</i>	100.998.480	90.408.000	89.51	89.51
4.02.02.2.03.02	<i>Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur</i>	24.999.720	24.887.520	99.55	99.55
4.02.02.2.03.03	<i>Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat</i>	97.655.910	82.181.080	84.15	84.15

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
4.02.02.2.03.04	<i>Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian</i>	24.160.110	23.942.110	99.10	99.10
4.02.02.2.03.05	<i>Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam</i>	13.597.490	13.276.490	97.64	97.64
4.02.02.2.03.06	<i>Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan</i>	11.790.890	11.649.890	98.80	98.80
4.02.02.2.03.07	<i>Pengawasan Penggunaan Anggaran</i>	14.120.200	13.996.200	99.12	99.12
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	3.806.743.253	3.608.888.340	94.8	94.8
4.02.02.2.04.02	<i>Pendalaman Tugas DPRD</i>	2.148.600.044	2.077.536.325	96.69	96.69
4.02.02.2.04.03	<i>Publikasi dan Dokumentasi Dewan</i>	1.004.052.094	968.288.700	96.44	96.44
4.02.02.2.04.04	<i>Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli</i>	336.000.000	294.000.000	87.50	87.50
4.02.02.2.04.05	<i>Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi</i>	252.000.000	210.000.000	83.33	83.33
4.02.02.2.04.06	<i>Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</i>	22.539.835	22.459.215	99.64	99.64
4.02.02.2.04.07	<i>Penyusunan Program Kerja DPRD</i>	43.551.280	36.604.100	84.05	84.05
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	2.854.919.885	2.617.777.895	91.69	91.69
4.02.02.2.05.01	<i>Kunjungan Kerja dalam Daerah</i>	473.627.700	381.292.850	80.50	80.50
4.02.02.2.05.02	<i>Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD</i>	222.301.445	217.542.875	97.86	97.86
4.02.02.2.05.03	<i>Pelaksanaan Reses</i>	2.158.990.740	2.018.942.170	93.51	93.51
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	12.246.612.610	12.139.132.936	99.12	99.13
4.02.02.2.08.01	<i>Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD</i>	10.174.835.080	10.152.050.943	99.78	99.78
4.02.02.2.08.03	<i>Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah</i>	61.370.530	44.498.100	72.51	72.51
4.02.02.2.08.04	<i>Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD</i>	2.010.407.000	1.942.583.893	96.63	96.63
Total		51.696.601.068	50.081.881.614	96.88	96.88

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.696.230.373	5.598.167.512	98.28	98.28
0.00.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62.397.765	58.161.515	93.21	93.21
0.00.01.2.01.01	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	33.999.850	31.740.850	93.36	93.36
0.00.01.2.01.06	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	28.397.915	26.420.665	93.04	93.04
0.00.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.137.634.652	4.097.254.796	99.02	99.02
0.00.01.2.02.01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	3.930.826.652	3.898.568.826	99.18	99.18
0.00.01.2.02.02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	167.358.000	159.240.020	95.15	95.15
0.00.01.2.02.08	<i>Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>	39.450.000	39.445.950	99.99	99.99
0.00.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.686.600	4.658.200	99.39	99.39
0.00.01.2.03.05	<i>Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	4.686.600	4.658.200	99.39	99.39
0.00.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	27.000.000	27.000.000	100	100
0.00.01.2.05.00	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	27.000.000	27.000.000	100.00	100.00
0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	550.830.419	544.843.663	98.91	98.91
0.00.01.2.06.00	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	240.840.249	239.687.843	99.52	99.52
0.00.01.2.06.01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	84.150.000	83.717.050	99.49	99.49
0.00.01.2.06.02	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	30.038.170	30.038.170	100.00	100.00
0.00.01.2.06.04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	111.614.900	110.604.900	99.10	99.10
0.00.01.2.06.05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	22.202.100	21.920.700	98.73	98.73
0.00.01.2.06.06	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	15.000.000	11.940.000	79.60	79.60
0.00.01.2.06.08	<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	46.985.000	46.935.000	99.89	99.89
0.00.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	286.575.750	283.948.800	99.08	99.08
0.00.01.2.07.06	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	112.956.610	111.768.800	98.95	98.95
0.00.01.2.07.11	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	173.619.140	172.180.000	99.17	99.17
0.00.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	390.091.592	355.503.836	91.13	91.13
0.00.01.2.08.01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	2.490.000	2.490.000	100.00	100.00
0.00.01.2.08.02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	108.001.592	91.413.836	84.64	84.64
0.00.01.2.08.04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	279.600.000	261.600.000	93.56	93.56
0.00.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	237.013.595	226.796.702	95.69	95.69

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
0.00.01.2.00.01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	48.296.466	44.764.702	92.69	92.69
0.00.01.2.00.06	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	26.400.000	23.727.000	89.88	89.88
0.00.01.2.00.09	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	162.317.129	158.305.000	97.53	97.53
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.275.244.380	1.260.919.959	98.88	98.87
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	680.356.610	675.896.766	99.34	99.34
5.01.02.2.01.03	<i>Pelaksanaan Konsultasi Publik</i>	23.038.540	23.038.540	100.00	100.00
5.01.02.2.01.04	<i>Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD</i>	51.027.780	50.527.780	99.02	99.02
5.01.02.2.01.05	<i>Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota</i>	77.328.060	73.768.445	95.40	95.40
5.01.02.2.01.07	<i>Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota</i>	528.962.230	528.562.001	99.92	99.92
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	24.485.600	22.934.800	93.67	93.67
5.01.02.2.02.03	<i>Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota</i>	24.485.600	22.934.800	93.67	93.67
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	253.425.980	245.167.203	96.74	96.74
5.01.02.2.03.01	<i>Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota</i>	124.919.615	124.153.207	99.39	99.39
5.01.02.2.03.03	<i>Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah</i>	128.506.365	121.013.996	94.17	94.17
5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	316.976.190	316.921.190	99.98	99.98
5.01.02.2.04.02	<i>Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</i>	316.976.190	316.921.190	99.98	99.98
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	626.581.000	595.869.605	95.1	95.1
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	231.186.150	205.377.008	88.84	88.84
5.01.03.2.01.02	<i>Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan</i>	46.750.750	41.102.028	87.92	87.92
5.01.03.2.01.05	<i>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	102.174.480	87.605.450	85.74	85.74
5.01.03.2.01.06	<i>Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia</i>	21.591.050	19.952.300	92.41	92.41
5.01.03.2.01.07	<i>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia</i>	60.669.870	56.717.230	93.49	93.49
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	95.327.800	95.246.600	99.91	99.91
5.01.03.2.02.02	<i>Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian</i>	20.165.900	20.165.900	100.00	100.00
5.01.03.2.02.04	<i>Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian</i>	75.161.900	75.080.700	99.89	99.89
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	300.067.050	295.245.997	98.39	98.39
5.01.03.2.03.01	<i>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	112.670.050	107.970.050	95.83	95.83

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
5.01.03.2.03.03	<i>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur</i>	51.790.200	51.777.050	99.97	99.97
5.01.03.2.03.04	<i>Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur</i>	32.500.000	32.499.850	100.00	100.00
5.01.03.2.03.05	<i>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	76.322.800	76.215.347	99.86	99.86
5.01.03.2.03.08	<i>Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan</i>	26.784.000	26.783.700	100.00	100.00
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	116.012.000	115.062.875	99.18	99.18
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	63.351.100	63.347.450	99.99	99.99
5.05.02.2.01.12	<i>Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan</i>	63.351.100	63.347.450	99.99	99.99
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	0	0	0	0
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	52.660.900	51.715.425	98.2	98.21
5.05.02.2.04.04	<i>Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan</i>	29.680.200	29.448.050	99.22	99.22
5.05.02.2.04.05	<i>Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual</i>	22.980.700	22.267.375	96.90	96.90
Total		7.714.067.753	7.570.019.951	98.13	98.13

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.805.580.975	4.602.296.534	95.77	100
0.00.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.424.700	19.310.200	99.41	100
0.00.01.2.01.01	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	19.424.700	19.310.200	99.41	100.00
0.00.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.803.243.025	2.660.364.641	94.9	100
0.00.01.2.02.01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	2.522.733.025	2.379.880.641	94.34	100.00
0.00.01.2.02.02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	272.280.000	272.280.000	100.00	100.00
0.00.01.2.02.07	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	8.230.000	8.204.000	99.68	100.00
0.00.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	111.972.148	109.004.636	97.35	100
0.00.01.2.04.01	<i>Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah</i>	8.160.000	7.998.000	98.01	100.00
0.00.01.2.04.02	<i>Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah</i>	44.421.595	43.310.750	97.50	100.00
0.00.01.2.04.03	<i>Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah</i>	11.536.148	10.781.900	93.46	100.00
0.00.01.2.04.04	<i>Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah</i>	32.838.800	32.520.955	99.03	100.00
0.00.01.2.04.05	<i>Pengolahan Data Retribusi Daerah</i>	6.150.435	5.528.801	89.89	100.00
0.00.01.2.04.07	<i>Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah</i>	8.865.170	8.864.230	99.99	100.00
0.00.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	110.797.280	110.787.816	99.99	100
0.00.01.2.05.00	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	110.797.280	110.787.816	99.99	100.00
0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	676.233.735	672.514.653	99.45	100
0.00.01.2.06.00	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	261.179.240	261.107.528	99.97	100.00
0.00.01.2.06.02	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	320.892.595	318.347.225	99.21	100.00
0.00.01.2.06.04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	9.999.700	9.998.000	99.98	100.00
0.00.01.2.06.05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	53.962.200	52.881.900	98.00	100.00
0.00.01.2.06.06	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	7.200.000	7.200.000	100.00	100.00
0.00.01.2.06.08	<i>Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	23.000.000	22.980.000	99.91	100.00
0.00.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	691.056.000	644.367.378	93.24	100
0.00.01.2.08.01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	6.000.000	6.000.000	100.00	100.00
0.00.01.2.08.02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	82.200.000	64.749.378	78.77	100.00
0.00.01.2.08.04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	602.856.000	573.618.000	95.15	100.00
0.00.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	392.854.087	385.947.210	98.24	100
0.00.01.2.00.01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	53.114.087	46.489.410	87.53	100.00
0.00.01.2.00.06	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	59.225.000	59.125.000	99.83	100.00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
0.00.01.2.00.09	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	280.515.000	280.332.800	99.94	100.00
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	479.756.400	476.561.153	99.33	100
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	479.756.400	476.561.153	99.33	100
5.02.04.2.01.02	<i>Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah</i>	121.242.000	120.713.305	99.56	100.00
5.02.04.2.01.03	<i>Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah</i>	13.558.400	13.440.000	99.13	100.00
5.02.04.2.01.07	<i>Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)</i>	11.637.600	11.600.000	99.68	100.00
5.02.04.2.01.08	<i>Penetapan Wajib Pajak Daerah</i>	143.826.700	142.071.490	98.78	100.00
5.02.04.2.01.10	<i>Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah</i>	6.256.300	6.256.300	100.00	100.00
5.02.04.2.01.11	<i>Penagihan Pajak Daerah</i>	28.881.000	28.881.000	100.00	100.00
5.02.04.2.01.13	<i>Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah</i>	69.684.800	69.281.071	99.42	100.00
5.02.04.2.01.14	<i>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah</i>	51.888.650	51.595.700	99.44	100.00
5.02.04.2.01.15	<i>Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah</i>	32.780.950	32.722.287	99.82	100.00
Total		5.285.337.375	5.078.857.687	96.09	100

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	33.285.183.377	26.249.455.499	78.86	97.48
0.00.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	466.980.000	351.680.000	75.31	75.31
0.00.01.2.01.01	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	233.490.000	175.840.000	75.31	75.31
0.00.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	466.980.000	351.680.000	75.31	75.31
0.00.01.2.01.01	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	233.490.000	175.840.000	75.31	75.31
0.00.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.506.382.064	21.330.882.988	77.55	99.66
0.00.01.2.02.01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	25.726.602.064	19.764.314.588	76.82	100.00
0.00.01.2.02.02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	1.257.320.000	1.137.620.000	90.48	100.00
0.00.01.2.02.07	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	522.460.000	428.948.400	82.10	82.10
0.00.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0	0	0	0
0.00.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	0	0	0	0
0.00.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	866.413.700	406.944.507	46.97	46.98
0.00.01.2.05.00	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	558.000.000	162.440.107	29.11	29.11
0.00.01.2.05.02	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	81.435.700	81.360.000	99.91	100.00
0.00.01.2.05.05	<i>Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	226.978.000	163.144.400	71.88	71.88
0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.464.187.490	1.378.291.778	94.13	96.39
0.00.01.2.06.00	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	815.435.200	800.250.403	98.14	98.14
0.00.01.2.06.01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	40.400.000	36.759.375	90.99	90.99
0.00.01.2.06.02	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	150.036.090	149.912.315	99.92	100.00
0.00.01.2.06.04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	49.275.000	45.943.190	93.24	100.00
0.00.01.2.06.05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	58.661.200	54.453.820	92.83	100.00
0.00.01.2.06.06	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	80.000.000	54.676.000	68.34	100.00
0.00.01.2.06.08	<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	270.380.000	236.296.675	87.39	87.39
0.00.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	756.267.725	749.633.034	99.12	99.15
0.00.01.2.07.05	<i>Pengadaan Mebel</i>	170.480.000	170.270.684	99.88	100.00
0.00.01.2.07.10	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	585.787.725	579.362.350	98.90	98.90
0.00.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	981.945.000	933.585.723	95.08	100
0.00.01.2.08.01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	239.735.000	234.370.420	97.76	100.00
0.00.01.2.08.02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	250.210.000	207.215.303	82.82	100.00
0.00.01.2.08.04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	492.000.000	492.000.000	100.00	100.00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
0.00.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.243.007.398	1.098.437.469	88.37	90.94
0.00.01.2.00.01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	158.130.198	45.518.790	28.79	28.79
0.00.01.2.00.06	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	167.307.200	152.148.255	90.94	100.00
0.00.01.2.00.09	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	917.570.000	900.770.424	98.17	100.00
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	203.522.593.088	189.021.104.432	92.87	92.87
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.153.677.600	1.616.054.769	75.04	75.04
5.02.02.2.01.01	<i>Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS</i>	206.982.000	153.309.678	74.07	74.07
5.02.02.2.01.02	<i>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS</i>	191.403.800	166.161.927	86.81	86.81
5.02.02.2.01.03	<i>Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD</i>	156.681.100	71.817.000	45.84	45.84
5.02.02.2.01.05	<i>Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD</i>	122.979.000	89.297.400	72.61	72.61
5.02.02.2.01.06	<i>Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD</i>	92.548.100	24.036.000	25.97	25.97
5.02.02.2.01.07	<i>Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD</i>	598.824.900	496.080.482	82.84	82.84
5.02.02.2.01.08	<i>Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD</i>	672.100.900	532.844.282	79.28	79.28
5.02.02.2.01.09	<i>Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran</i>	67.037.800	45.987.800	68.60	68.60
5.02.02.2.01.11	<i>Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah</i>	45.120.000	36.520.200	80.94	80.94
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.631.988.100	1.371.895.214	84.06	84.06
5.02.02.2.02.01	<i>Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah</i>	385.311.600	357.329.640	92.74	92.74
5.02.02.2.02.03	<i>Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD</i>	81.738.000	64.969.000	79.48	79.48
5.02.02.2.02.05	<i>Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya</i>	336.058.000	219.613.927	65.35	65.35
5.02.02.2.02.08	<i>Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas</i>	275.220.500	223.517.300	81.21	81.21
5.02.02.2.02.09	<i>Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait</i>	553.660.000	506.465.347	91.48	91.48
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.186.373.850	1.160.264.224	97.8	97.8
5.02.02.2.03.01	<i>Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah</i>	268.432.000	268.304.000	99.95	99.95
5.02.02.2.03.04	<i>Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</i>	490.942.300	486.638.951	99.12	99.12

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
5.02.02.2.03.05	<i>Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota</i>	209.999.800	206.744.593	98.45	98.45
5.02.02.2.03.06	<i>Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</i>	67.000.000	54.131.200	80.79	80.79
5.02.02.2.03.10	<i>Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah</i>	149.999.750	144.445.480	96.30	96.30
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	198.379.792.438	184.704.805.195	93.11	93.11
5.02.02.2.04.07	<i>Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi</i>	872.939.800	747.269.781	85.60	85.60
5.02.02.2.04.08	<i>Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan</i>	185.715.293.934	180.107.963.266	96.98	96.98
5.02.02.2.04.09	<i>Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak</i>	11.791.558.704	3.849.572.148	32.65	32.65
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	170.761.100	168.085.030	98.43	98.43
5.02.02.2.05.01	<i>Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah</i>	170.761.100	168.085.030	98.43	98.43
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	3.245.121.650	2.976.319.087	91.72	91.72
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.245.121.650	2.976.319.087	91.72	91.72
5.02.03.2.01.03	<i>Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah</i>	33.528.600	15.755.000	46.99	46.99
5.02.03.2.01.05	<i>Penatausahaan Barang Milik Daerah</i>	2.338.219.000	2.157.851.156	92.29	92.29
5.02.03.2.01.06	<i>Inventarisasi Barang Milik Daerah</i>	149.975.000	140.365.000	93.59	93.59
5.02.03.2.01.08	<i>Penilaian Barang Milik Daerah</i>	280.471.850	258.427.943	92.14	92.14
5.02.03.2.01.10	<i>Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah</i>	372.500.000	333.492.788	89.53	89.53
5.02.03.2.01.11	<i>Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah</i>	70.427.200	70.427.200	100.00	100.00
Total		239.819.408.115	218.071.039.018	90.93	93.51

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.092.816.646	4.833.289.472	94.9	99.7
0.00.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.172.550	45.151.150	97.79	100
0.00.01.2.01.01	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	34.473.050	34.003.050	98.64	100.00
0.00.01.2.01.06	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	11.699.500	11.148.100	95.29	100.00
0.00.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.038.647.993	2.922.209.264	96.17	100
0.00.01.2.02.01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	2.886.727.993	2.771.989.264	96.03	100.00
0.00.01.2.02.02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	151.920.000	150.220.000	98.88	100.00
0.00.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	111.794.400	85.408.780	76.4	95.31
0.00.01.2.05.02	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	36.071.250	35.351.530	98.00	100.00
0.00.01.2.05.03	<i>Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	34.756.050	34.614.250	99.59	100.00
0.00.01.2.05.10	<i>Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	19.973.100	15.243.000	76.32	100.00
0.00.01.2.05.11	<i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	20.994.000	200.000	0.95	75.00
0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	817.304.135	776.528.335	95.01	99.63
0.00.01.2.06.00	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	614.123.000	586.646.900	95.53	100.00
0.00.01.2.06.02	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	63.277.935	63.112.935	99.74	100.00
0.00.01.2.06.04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	7.279.500	6.752.500	92.76	100.00
0.00.01.2.06.05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	30.385.700	20.778.000	68.38	90.00
0.00.01.2.06.06	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	16.500.000	13.500.000	81.82	100.00
0.00.01.2.06.08	<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	85.738.000	85.738.000	100.00	100.00
0.00.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	78.329.930	69.745.879	89.04	100
0.00.01.2.07.11	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	78.329.930	69.745.879	89.04	100.00
0.00.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	689.690.000	650.647.444	94.34	100
0.00.01.2.08.01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	10.615.000	10.480.000	98.73	100.00
0.00.01.2.08.02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	104.275.000	65.367.444	62.69	100.00
0.00.01.2.08.04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	574.800.000	574.800.000	100.00	100.00
0.00.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	310.877.638	283.598.620	91.23	97.76
0.00.01.2.00.01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	39.089.388	27.437.800	70.19	88.00
0.00.01.2.00.06	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	45.686.000	32.601.000	71.36	95.00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
0.00.01.2.00.09	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	213.115.000	210.572.570	98.81	100.00
0.00.01.2.00.10	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	12.987.250	12.987.250	100.00	100.00
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.479.962.250	5.013.612.716	91.49	98.73
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	692.708.000	541.383.494	78.15	98.48
5.03.02.2.01.02	<i>Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN</i>	110.908.750	92.686.939	83.57	100.00
5.03.02.2.01.03	<i>Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK</i>	351.204.100	238.830.698	68.00	97.00
5.03.02.2.01.06	<i>Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian</i>	31.054.950	27.361.633	88.11	100.00
5.03.02.2.01.08	<i>Fasilitasi Lembaga Profesi ASN</i>	69.761.000	65.411.000	93.76	100.00
5.03.02.2.01.12	<i>Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian</i>	129.779.200	117.093.224	90.22	100.00
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	163.813.400	135.850.039	82.93	100
5.03.02.2.02.01	<i>Pengelolaan Mutasi ASN</i>	26.843.400	23.087.550	86.01	100.00
5.03.02.2.02.02	<i>Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN</i>	47.007.700	46.256.889	98.40	100.00
5.03.02.2.02.03	<i>Pengelolaan Promosi ASN</i>	89.962.300	66.505.600	73.93	100.00
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	4.525.904.800	4.268.149.930	94.3	98.79
5.03.02.2.03.02	<i>Pengelolaan Assessment Center</i>	260.874.000	89.151.267	34.17	79.00
5.03.02.2.03.04	<i>Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN</i>	2.808.862.100	2.804.518.709	99.85	100.00
5.03.02.2.03.05	<i>Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat</i>	1.428.781.400	1.347.289.054	94.30	100.00
5.03.02.2.03.14	<i>Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional</i>	27.387.300	27.190.900	99.28	100.00
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	97.536.050	68.229.253	69.95	95.34
5.03.02.2.04.02	<i>Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</i>	45.480.150	36.361.271	79.95	90.00
5.03.02.2.04.04	<i>Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai</i>	20.129.500	11.517.100	57.22	100.00
5.03.02.2.04.07	<i>Pembinaan Disiplin ASN</i>	16.781.600	9.319.682	55.54	100.00
5.03.02.2.04.08	<i>Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN</i>	15.144.800	11.031.200	72.84	100.00
	Total	10.572.778.896	9.846.902.188	93.13	99.19

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.398.448.611	6.988.888.538	94.46	94.46
0.00.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	109.773.000	106.290.802	96.83	96.83
0.00.01.2.01.01	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	11.206.000	10.901.960	97.29	97.29
0.00.01.2.01.02	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	20.124.000	19.623.969	97.52	97.52
0.00.01.2.01.03	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	9.748.000	9.458.000	97.03	97.03
0.00.01.2.01.04	<i>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</i>	9.286.000	8.990.000	96.81	96.81
0.00.01.2.01.05	<i>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD</i>	6.773.000	6.497.873	95.94	95.94
0.00.01.2.01.06	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	35.892.000	34.324.800	95.63	95.63
0.00.01.2.01.07	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	16.744.000	16.494.200	98.51	98.51
0.00.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.227.208.335	4.879.156.363	93.34	93.34
0.00.01.2.02.01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	4.914.206.335	4.624.426.363	94.10	94.10
0.00.01.2.02.02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	102.520.000	102.137.000	99.63	99.63
0.00.01.2.02.03	<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	178.220.000	121.140.000	67.97	67.97
0.00.01.2.02.05	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	11.814.000	11.624.000	98.39	98.39
0.00.01.2.02.07	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	7.260.000	7.110.000	97.93	97.93
0.00.01.2.02.08	<i>Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>	13.188.000	12.719.000	96.44	96.44
0.00.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.506.000	15.317.776	98.79	98.78
0.00.01.2.03.02	<i>Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>	8.496.000	8.318.776	97.91	97.91
0.00.01.2.03.05	<i>Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	7.010.000	6.999.000	99.84	99.84
0.00.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	555.435.200	544.666.491	98.06	98.07
0.00.01.2.05.00	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	490.160.200	480.040.071	97.94	97.94
0.00.01.2.05.05	<i>Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	65.275.000	64.626.420	99.01	99.01
0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	710.164.100	680.579.584	95.83	95.83
0.00.01.2.06.00	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	374.486.800	368.407.986	98.38	98.38
0.00.01.2.06.01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	16.548.000	16.107.094	97.34	97.34
0.00.01.2.06.02	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	60.326.130	58.283.610	96.61	96.61
0.00.01.2.06.03	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	5.400.000	5.295.000	98.06	98.06
0.00.01.2.06.04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	21.352.000	19.044.140	89.19	89.19

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
0.00.01.2.06.05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	76.276.170	64.409.978	84.44	84.44
0.00.01.2.06.06	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	24.000.000	19.640.000	81.83	81.83
0.00.01.2.06.08	<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	131.775.000	129.391.776	98.19	98.19
0.00.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	397.517.920	390.014.306	98.11	98.11
0.00.01.2.08.01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	7.500.000	7.430.520	99.07	99.07
0.00.01.2.08.02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	58.280.000	54.398.434	93.34	93.34
0.00.01.2.08.03	<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	45.211.920	44.612.920	98.68	98.68
0.00.01.2.08.04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	286.526.000	283.572.432	98.97	98.97
0.00.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	291.624.376	283.745.866	97.3	97.3
0.00.01.2.00.01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	113.564.376	106.655.712	93.92	93.92
0.00.01.2.00.06	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	33.060.000	32.590.235	98.58	98.58
0.00.01.2.00.09	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	145.000.000	144.499.919	99.66	99.66
0.00.01.2.13	Penataan Organisasi	91.219.680	89.117.350	97.7	97.7
0.00.01.2.13.01	<i>Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan</i>	18.150.000	16.333.000	89.99	89.99
0.00.01.2.13.02	<i>Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana</i>	20.194.840	20.194.400	100.00	100.00
0.00.01.2.13.03	<i>Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi</i>	52.874.840	52.589.950	99.46	99.46
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.801.349.220	1.742.418.432	96.73	96.73
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.478.982.820	1.429.049.106	96.62	96.62
6.01.02.2.01.01	<i>Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah</i>	313.698.680	282.632.892	90.10	90.10
6.01.02.2.01.02	<i>Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah</i>	215.376.840	214.836.800	99.75	99.75
6.01.02.2.01.03	<i>Reviu Laporan Kinerja</i>	303.710.000	295.671.000	97.35	97.35
6.01.02.2.01.04	<i>Reviu Laporan Keuangan</i>	137.204.000	137.107.400	99.93	99.93
6.01.02.2.01.05	<i>Pengawasan Desa</i>	140.000.000	139.999.781	100.00	100.00
6.01.02.2.01.07	<i>Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP</i>	368.993.300	358.801.233	97.24	97.24
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	322.366.400	313.369.326	97.21	97.21
6.01.02.2.02.01	<i>Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah</i>	71.835.400	69.491.326	96.74	96.74
6.01.02.2.02.02	<i>Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</i>	250.531.000	243.878.000	97.34	97.34
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	405.601.560	327.342.605	80.71	80.7

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	44.061.000	40.935.000	92.91	92.91
6.01.03.2.01.01	<i>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan</i>	21.642.000	21.330.000	98.56	98.56
6.01.03.2.01.02	<i>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan</i>	22.419.000	19.605.000	87.45	87.45
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	361.540.560	286.407.605	79.22	79.22
6.01.03.2.02.02	<i>Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi</i>	89.434.000	80.535.934	90.05	90.05
6.01.03.2.02.03	<i>Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</i>	255.050.560	197.031.671	77.25	77.25
6.01.03.2.02.04	<i>Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas</i>	17.056.000	8.840.000	51.83	51.83
Total		9.605.399.391	9.058.649.575	94.31	94.31

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.678.890.134	4.273.706.571	91.34	99.79
0.00.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.528.000	3.528.000	100	100
0.00.01.2.01.02	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	3.528.000	3.528.000	100.00	100.00
0.00.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.393.339.402	3.032.583.584	89.37	100
0.00.01.2.02.01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	3.275.739.402	2.914.983.584	88.99	100.00
0.00.01.2.02.02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	117.600.000	117.600.000	100.00	100.00
0.00.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000	0	0	0
0.00.01.2.05.00	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	10.000.000	0	0.00	0.00
0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	406.072.535	384.893.480	94.78	100
0.00.01.2.06.00	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	267.599.160	252.876.580	94.50	100.00
0.00.01.2.06.01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	3.500.000	3.493.795	99.82	100.00
0.00.01.2.06.02	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	31.555.275	31.554.405	100.00	100.00
0.00.01.2.06.05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	43.013.100	43.011.700	100.00	100.00
0.00.01.2.06.06	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	5.400.000	5.400.000	100.00	100.00
0.00.01.2.06.08	<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	55.005.000	48.557.000	88.28	100.00
0.00.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.039.000	13.038.000	99.99	100

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
0.00.01.2.07.10	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	13.039.000	13.038.000	99.99	100.00
0.00.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	760.946.000	754.659.007	99.17	100
0.00.01.2.08.02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	43.145.000	37.000.007	85.76	100.00
0.00.01.2.08.04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	717.801.000	717.659.000	99.98	100.00
0.00.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91.965.197	85.004.500	92.43	100
0.00.01.2.00.01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	51.828.347	46.007.700	88.77	100.00
0.00.01.2.00.02	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	8.820.800	7.800.800	88.44	100.00
0.00.01.2.00.06	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	12.140.000	12.140.000	100.00	100.00
0.00.01.2.00.09	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	19.176.050	19.056.000	99.37	100.00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	36.430.800	36.410.800	99.95	100
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	21.360.000	21.340.000	99.91	100
7.01.02.2.01.02	<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	21.360.000	21.340.000	99.91	100.00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	15.070.800	15.070.800	100	100
7.01.02.2.02.01	<i>Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan</i>	15.070.800	15.070.800	100.00	100.00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	627.069.885	619.264.600	98.76	100
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	14.470.000	14.458.000	99.92	100
7.01.03.2.01.03	<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	14.470.000	14.458.000	99.92	100.00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	224.999.885	217.206.600	96.54	100
7.01.03.2.02.02	<i>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</i>	70.437.335	70.000.000	99.38	100.00
7.01.03.2.02.03	<i>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	154.562.550	147.206.600	95.24	100.00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	387.600.000	387.600.000	100	100
7.01.03.2.03.01	<i>Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan</i>	387.600.000	387.600.000	100.00	100.00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.973.405	0	0	0
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.973.405	0	0	0
7.01.04.2.01.02	<i>Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	6.973.405	0	0.00	0.00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	3.375.000	875.000	25.93	100

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	3.375.000	875.000	25.93	100
7.01.05.2.01.08	<i>Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>	3.375.000	875.000	25.93	100.00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	106.999.925	105.596.080	98.69	100
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	106.999.925	105.596.080	98.69	100
7.01.06.2.01.16	<i>Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa</i>	99.999.925	98.596.080	98.60	100.00
7.01.06.2.01.17	<i>Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya</i>	7.000.000	7.000.000	100.00	100.00
Total		5.459.739.149	5.035.853.051	92.24	99.69

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.085.712.951	2.584.268.614	83.75	83.75
0.00.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.371.298.456	1.871.927.322	78.94	78.94
0.00.01.2.02.01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	2.288.378.456	1.789.007.322	78.18	78.18
0.00.01.2.02.02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	82.920.000	82.920.000	100.00	100.00
0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	354.374.800	354.176.037	99.94	99.94
0.00.01.2.06.00	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	183.882.000	183.796.737	99.95	99.95
0.00.01.2.06.01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	2.419.250	2.419.250	100.00	100.00
0.00.01.2.06.02	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	28.555.500	28.442.000	99.60	99.60
0.00.01.2.06.04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	75.945.000	75.945.000	100.00	100.00
0.00.01.2.06.05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	30.823.050	30.823.050	100.00	100.00
0.00.01.2.06.06	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	1.800.000	1.800.000	100.00	100.00
0.00.01.2.06.08	<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	30.950.000	30.950.000	100.00	100.00
0.00.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	42.810.160	42.810.160	100	100
0.00.01.2.07.06	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	42.810.160	42.810.160	100.00	100.00
0.00.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	299.230.370	298.391.109	99.72	99.72

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
0.00.01.2.08.02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	17.230.370	16.391.109	95.13	95.13
0.00.01.2.08.04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	282.000.000	282.000.000	100.00	100.00
0.00.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.999.165	16.963.986	94.25	94.25
0.00.01.2.00.01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	16.579.165	15.544.300	93.76	93.76
0.00.01.2.00.06	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	1.420.000	1.419.686	99.98	99.98
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	84.704.650	84.693.950	99.99	99.99
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	84.704.650	84.693.950	99.99	99.99
7.01.06.2.01.16	<i>Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa</i>	84.704.650	84.693.950	99.99	99.99
Total		3.170.417.601	2.668.962.564	84.18	84.18

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.901.429.685	2.889.364.456	99.58	99.02
0.00.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.751.750	1.678.750	29.19	29.19
0.00.01.2.01.01	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	5.751.750	1.678.750	29.19	29.19
0.00.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.341.680.707	2.358.083.458	100.7	100
0.00.01.2.02.01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	2.254.680.707	2.271.083.458	100.73	100.00
0.00.01.2.02.02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	87.000.000	87.000.000	100.00	100.00
0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	277.523.640	266.777.997	96.13	96.13
0.00.01.2.06.00	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	153.443.840	148.951.097	97.07	97.07
0.00.01.2.06.01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	3.859.000	3.851.500	99.81	99.81
0.00.01.2.06.02	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	24.343.000	24.341.000	99.99	99.99
0.00.01.2.06.03	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	3.410.000	3.410.000	100.00	100.00
0.00.01.2.06.04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	4.984.000	4.477.000	89.83	89.83
0.00.01.2.06.05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	19.153.600	15.044.400	78.55	78.55

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
0.00.01.2.06.07	<i>Penyediaan Bahan/Material</i>	10.560.200	10.534.000	99.75	99.75
0.00.01.2.06.08	<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	57.770.000	56.169.000	97.23	97.23
0.00.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0	0
0.00.01.2.07.06	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	0	0	0.00	0.00
0.00.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	235.315.000	224.437.851	95.38	95.38
0.00.01.2.08.01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	10.115.000	6.339.200	62.67	62.67
0.00.01.2.08.02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	14.960.000	7.858.651	52.53	52.53
0.00.01.2.08.04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	210.240.000	210.240.000	100.00	100.00
0.00.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41.158.588	38.386.400	93.26	93.26
0.00.01.2.00.01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	31.178.588	29.929.400	95.99	95.99
0.00.01.2.00.06	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	9.980.000	8.457.000	84.74	84.74
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	87.949.450	82.651.000	93.98	93.98
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	87.949.450	82.651.000	93.98	93.98
7.01.02.2.02.03	<i>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	87.949.450	82.651.000	93.98	93.98
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	10.500.000	10.100.000	96.19	96.19
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	10.500.000	10.100.000	96.19	96.19
7.01.03.2.01.01	<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	10.500.000	10.100.000	96.19	96.19
Total		2.999.879.135	2.982.115.456	99.41	98.86

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.531.378.495	2.337.466.207	92.34	98.93
0.00.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.871.769.342	1.712.578.567	91.5	100
0.00.01.2.02.01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	1.797.129.342	1.638.418.567	91.17	100.00
0.00.01.2.02.02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	74.640.000	74.160.000	99.36	100.00
0.00.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0	0

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
0.00.01.2.05.02	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	0	0	0.00	0.00
0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	327.712.390	324.018.850	98.87	100
0.00.01.2.06.00	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	176.920.000	176.607.250	99.82	100.00
0.00.01.2.06.01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	8.104.000	8.097.000	99.91	100.00
0.00.01.2.06.02	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	20.349.050	20.050.000	98.53	100.00
0.00.01.2.06.04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	32.997.340	32.932.000	99.80	100.00
0.00.01.2.06.05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	5.750.000	5.725.600	99.58	100.00
0.00.01.2.06.08	<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	83.592.000	80.607.000	96.43	100.00
0.00.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24.629.990	24.629.490	100	100
0.00.01.2.07.06	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	24.629.990	24.629.490	100.00	100.00
0.00.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	271.398.399	258.081.300	95.09	95.91
0.00.01.2.08.01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	15.000.000	15.000.000	100.00	100.00
0.00.01.2.08.02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	16.998.399	5.381.300	31.66	34.66
0.00.01.2.08.03	<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	0	0	0.00	0.00
0.00.01.2.08.04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	239.400.000	237.700.000	99.29	100.00
0.00.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.868.374	18.158.000	50.62	55.62
0.00.01.2.00.01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	19.949.200	18.158.000	91.02	100.00
0.00.01.2.00.09	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	15.919.174	0	0.00	0.00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10.000.000	10.000.000	100	100
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.000.000	10.000.000	100	100
7.01.02.2.01.01	<i>Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>	10.000.000	10.000.000	100.00	100.00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	50.800.000	50.628.000	99.66	100
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	50.800.000	50.628.000	99.66	100
7.01.03.2.03.02	<i>Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan</i>	50.800.000	50.628.000	99.66	100.00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0	0	0	0

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0	0	0	0
7.01.04.2.01.01	<i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	0	0	0.00	0.00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.750.000	25.750.000	100	100
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.750.000	25.750.000	100	100
7.01.05.2.01.06	<i>Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila</i>	25.750.000	25.750.000	100.00	100.00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	0	0	0	0
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0	0	0	0
7.01.06.2.01.03	<i>Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	0	0	0.00	0.00
Total		2.617.928.495	2.423.844.207	92.59	98.97

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.097.669.849	3.074.627.133	99.26	99.38
0.00.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.227.948	20.649.100	97.27	98
0.00.01.2.01.04	<i>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</i>	21.227.948	20.649.100	97.27	98.00
0.00.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.287.482.067	2.274.514.126	99.43	99.52
0.00.01.2.02.01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	2.188.222.067	2.175.254.126	99.41	99.50
0.00.01.2.02.02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	99.260.000	99.260.000	100.00	100.00
0.00.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.500.000	3.456.000	98.74	99
0.00.01.2.05.03	<i>Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	3.500.000	3.456.000	98.74	99.00
0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	277.447.585	272.530.228	98.23	98.72
0.00.01.2.06.00	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	146.427.000	142.621.928	97.40	98.00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
0.00.01.2.06.01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	4.885.000	4.861.500	99.52	100.00
0.00.01.2.06.02	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	19.974.385	19.962.900	99.94	100.00
0.00.01.2.06.04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	6.484.000	6.270.000	96.70	97.00
0.00.01.2.06.05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	6.920.200	6.915.900	99.94	100.00
0.00.01.2.06.06	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	6.000.000	6.000.000	100.00	100.00
0.00.01.2.06.08	<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	86.757.000	85.898.000	99.01	99.50
0.00.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	464.990.350	462.408.479	99.44	99.49
0.00.01.2.08.01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	3.975.000	3.940.000	99.12	100.00
0.00.01.2.08.02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	36.190.000	33.886.879	93.64	94.00
0.00.01.2.08.03	<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	14.425.350	14.181.600	98.31	98.50
0.00.01.2.08.04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	410.400.000	410.400.000	100.00	100.00
0.00.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.021.899	41.069.200	95.46	95.92
0.00.01.2.00.01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	27.116.899	25.636.000	94.54	95.00
0.00.01.2.00.06	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	8.000.000	7.530.000	94.13	95.00
0.00.01.2.00.09	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	7.905.000	7.903.200	99.98	100.00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	53.910.200	47.319.000	87.77	88.56
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	50.000.000	44.102.000	88.2	89
7.01.02.2.02.03	<i>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	50.000.000	44.102.000	88.20	89.00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	3.910.200	3.217.000	82.27	83
7.01.02.2.04.02	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan</i>	3.910.200	3.217.000	82.27	83.00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	399.655.515	272.230.800	68.12	69.83
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	116.375.515	113.402.300	97.45	98.89
7.01.03.2.01.01	<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	64.406.300	62.423.920	96.92	98.00
7.01.03.2.01.02	<i>Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan</i>	6.225.215	6.144.000	98.70	100.00
7.01.03.2.01.03	<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	45.744.000	44.834.380	98.01	100.00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	283.280.000	158.828.500	56.07	57.89
7.01.03.2.02.02	<i>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</i>	52.308.000	43.122.000	82.44	85.00
7.01.03.2.02.03	<i>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	154.772.000	39.506.500	25.53	28.00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
7.01.03.2.02.04	<i>Evaluasi Kelurahan</i>	76.200.000	76.200.000	100.00	100.00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.608.800	2.469.000	53.57	54
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.608.800	2.469.000	53.57	54
7.01.04.2.01.02	<i>Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	4.608.800	2.469.000	53.57	54.00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	4.550.000	4.482.000	98.51	99
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	4.550.000	4.482.000	98.51	99
7.01.05.2.01.02	<i>Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional</i>	4.550.000	4.482.000	98.51	99.00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	4.561.200	4.551.000	99.78	100
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.561.200	4.551.000	99.78	100
7.01.06.2.01.02	<i>Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	4.561.200	4.551.000	99.78	100.00
Total		3.564.955.564	3.405.678.933	95.53	95.85

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.796.516.416	2.474.710.739	88.49	99.92
0.00.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.570.000	15.513.000	99.63	100
0.00.01.2.01.01	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	15.570.000	15.513.000	99.63	100.00
0.00.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.094.459.459	1.776.457.522	84.82	100
0.00.01.2.02.01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	2.006.059.459	1.688.057.522	84.15	100.00
0.00.01.2.02.02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	88.400.000	88.400.000	100.00	100.00
0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	278.305.800	278.093.485	99.92	100
0.00.01.2.06.00	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	204.080.000	203.868.485	99.90	100.00
0.00.01.2.06.01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	7.800.000	7.800.000	100.00	100.00
0.00.01.2.06.04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	19.230.800	19.230.000	100.00	100.00
0.00.01.2.06.08	<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	47.195.000	47.195.000	100.00	100.00
0.00.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	81.370.205	81.340.000	99.96	100

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
0.00.01.2.07.06	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	81.370.205	81.340.000	99.96	100.00
0.00.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	237.396.070	236.558.550	99.65	100
0.00.01.2.08.01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	14.000.000	14.000.000	100.00	100.00
0.00.01.2.08.02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	17.312.000	16.771.000	96.88	100.00
0.00.01.2.08.03	<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	35.684.070	35.387.550	99.17	100.00
0.00.01.2.08.04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	170.400.000	170.400.000	100.00	100.00
0.00.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.414.882	86.748.182	97.02	97.5
0.00.01.2.00.01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	83.244.882	82.875.882	99.56	100.00
0.00.01.2.00.02	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	6.170.000	3.872.300	62.76	63.76
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	91.705.340	91.691.340	99.98	100
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	51.744.000	51.730.000	99.97	100
7.01.02.2.01.02	<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	51.744.000	51.730.000	99.97	100.00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	39.961.340	39.961.340	100	100
7.01.02.2.02.03	<i>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	39.961.340	39.961.340	100.00	100.00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	126.340.400	126.265.000	99.94	100
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	126.340.400	126.265.000	99.94	100
7.01.03.2.01.03	<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	126.340.400	126.265.000	99.94	100.00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	8.000.000	8.000.000	100	100
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8.000.000	8.000.000	100	100
7.01.06.2.01.09	<i>Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa</i>	8.000.000	8.000.000	100.00	100.00
Total		3.022.562.156	2.700.667.079	89.35	99.93

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.886.583.019	2.846.680.352	98.62	98.62
0.00.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.850.000	16.710.000	99.17	99.17
0.00.01.2.01.04	<i>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</i>	9.500.000	9.360.000	98.53	98.53
0.00.01.2.01.06	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	7.350.000	7.350.000	100.00	100.00
0.00.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.134.411.436	2.101.591.635	98.46	98.47
0.00.01.2.02.01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	2.047.411.436	2.014.591.635	98.40	98.40
0.00.01.2.02.02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	87.000.000	87.000.000	100.00	100.00
0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	497.096.701	495.214.717	99.62	99.62
0.00.01.2.06.00	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	212.397.323	212.274.678	99.94	99.94
0.00.01.2.06.01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	12.550.000	12.550.000	100.00	100.00
0.00.01.2.06.02	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	125.772.400	124.386.489	98.90	98.90
0.00.01.2.06.04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	87.418.442	87.192.000	99.74	99.74
0.00.01.2.06.05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	23.458.536	23.311.550	99.37	99.37
0.00.01.2.06.08	<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	35.500.000	35.500.000	100.00	100.00
0.00.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	195.900.000	194.043.000	99.05	99.05
0.00.01.2.08.01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	9.000.000	9.000.000	100.00	100.00
0.00.01.2.08.02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	12.900.000	11.043.000	85.60	85.60
0.00.01.2.08.04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	174.000.000	174.000.000	100.00	100.00
0.00.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.324.882	39.121.000	92.43	92.43
0.00.01.2.00.02	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	34.934.882	31.731.000	90.83	90.83
0.00.01.2.00.06	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	7.390.000	7.390.000	100.00	100.00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	19.920.200	19.920.200	100	100
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	19.920.200	19.920.200	100	100
7.01.02.2.01.02	<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	19.920.200	19.920.200	100.00	100.00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	54.401.800	44.053.280	80.98	80.98
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	54.401.800	44.053.280	80.98	80.98
7.01.03.2.01.03	<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	54.401.800	44.053.280	80.98	80.98

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.900.000	3.780.000	96.92	96.92
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.900.000	3.780.000	96.92	96.92
7.01.04.2.01.02	<i>Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	3.900.000	3.780.000	96.92	96.92
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	3.500.000	3.500.000	100	100
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	3.500.000	3.500.000	100	100
7.01.05.2.01.08	<i>Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>	3.500.000	3.500.000	100.00	100.00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.500.000	7.500.000	100	100
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.500.000	7.500.000	100	100
7.01.06.2.01.16	<i>Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa</i>	7.500.000	7.500.000	100.00	100.00
Total		2.975.805.019	2.925.433.832	98.31	98.31

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.331.604.282	2.259.264.134	96.9	96.9
0.00.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.687.970.132	1.618.416.262	95.88	95.88
0.00.01.2.02.01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	1.609.410.132	1.540.536.262	95.72	95.72
0.00.01.2.02.02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	78.560.000	77.880.000	99.13	99.13
0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	324.795.500	324.732.300	99.98	99.98
0.00.01.2.06.00	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	145.520.000	145.490.700	99.98	99.98
0.00.01.2.06.02	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	76.011.600	76.011.600	100.00	100.00
0.00.01.2.06.03	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	5.875.000	5.875.000	100.00	100.00
0.00.01.2.06.05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	31.999.900	31.998.000	99.99	99.99
0.00.01.2.06.07	<i>Penyediaan Bahan/Material</i>	12.849.000	12.849.000	100.00	100.00
0.00.01.2.06.08	<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	52.540.000	52.508.000	99.94	99.94
0.00.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	289.712.915	288.083.072	99.44	99.44
0.00.01.2.08.01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	15.240.275	15.220.000	99.87	99.87
0.00.01.2.08.02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	15.224.640	13.615.072	89.43	89.43
0.00.01.2.08.04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	259.248.000	259.248.000	100.00	100.00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
0.00.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.125.735	28.032.500	96.25	96.25
0.00.01.2.00.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29.125.735	28.032.500	96.25	96.25
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	43.510.000	43.410.509	99.77	99.77
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	43.510.000	43.410.509	99.77	99.77
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	43.510.000	43.410.509	99.77	99.77
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15.010.000	14.965.000	99.7	99.7
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	15.010.000	14.965.000	99.7	99.7
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15.010.000	14.965.000	99.70	99.70
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	2.475.000	2.450.000	98.99	98.99
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2.475.000	2.450.000	98.99	98.99
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2.475.000	2.450.000	98.99	98.99
Total		2.392.599.282	2.320.089.643	96.97	96.97

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.485.161.198	3.436.218.986	93.87	94.21
0.00.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.628.720.831	2.592.178.921	98,61	100
0.00.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.511.940.831	2.476.741.921	98.60	100
0.00.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	106.320.000	105.120.000	98.87	100
0.00.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.460.000	10.317.000	98.63	100.00
0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	465.210.885	464.656.306	99,88	100

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
0.00.01.2.06.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	228.865.000	228.830.086	99,98	100
0.00.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.479.800	2.450.000	98,80	100,00
0.00.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.421.985	40.073.220	99,14	100,00
0.00.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.733.000	22.733.000	100	100
0.00.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	97.618.800	97.478.000	99,86	100
0.00.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.502.300	22.502.000	100	100
0.00.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000	3.600.000	100	100
0.00.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	46.990.000	46.990.000	100	100
0.00.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	317.824.600	307.765.259	96,83	100
0.00.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18.000.000	17.985.000	99,92	100
0.00.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.224.600	40.180.259	80	100
0.00.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	249.600.000	249.600.000	100	100
0.00.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.404.882	71.618.500	97,57	100
0.00.01.2.00.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.644.882	20.866.500	92,15	100
0.00.01.2.00.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.760.000	15.752.000	99,95	100
0.00.01.2.00.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.000.000	35.000.000	100,00	100,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	62.680.200	62.535.200	99,77	100
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.480.000	10.450.000	99,71	100
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.480.000	10.450.000	99,93	100
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	52.200.200	52.085.200	99,78	100
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	22.200.000	22.185.000	99,93	100
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	30.000.200	29.900.200	99,67	100
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	300.049.000	299.978.700	99,98	100
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	170.950.000	170.950.000	100,00	100
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	157.200.000	157.200.000	100	100
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13.750.000	13.750.000	100	100
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	129.099.000	129.028.700	99,95	100
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	129.099.000	129.028.700	99,95	100

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.400.000	10.400.000	100,00	100
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10.400.000	10.400.000	100,00	100
7.01.04.2.01.02	<i>Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	10.400.000	10.400.000	100	100
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	6.000.000	6.000.000	100	100
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	6.000.000	6.000.000	100	100
7.01.05.2.01.08	<i>Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>	6.000.000	6.000.000	100,00	100,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	19.450.000	19.440.000	99,95	100
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	19.450.000	19.440.000	99,95	100
7.01.06.2.01.11	<i>Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	9.450.000	9.440.000	99,89	100,00
7.01.06.2.01.13	<i>Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif</i>	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00
	Total	3.883.740.398	3.834.572.886	91,14	91,51

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2526287258	2343513664	92,77	100
0.00.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.699.200	14690200	99,94	100
0.00.01.2.01.01	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	5.350.000	5.342.000	99,85	100
0.00.01.2.01.03	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	9.349.200	9.348.200	99,99	100
0.00.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.944.481.734	1765551895	90,80	100
0.00.01.2.02.01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	1.854.721.734	1.675.791.895	90,35	100
0.00.01.2.02.02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	89.760.000	89.760.000	100,00	100
0.00.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.999.635	4999635	100,00	100
0.00.01.2.05.02	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	0	0	-	
0.00.01.2.05.03	<i>Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	4.999.635	4.999.635	100,00	100

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	299.453.020	298376930	99,64	100
0.00.01.2.06.00	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	186.800.520	186.773.680	99,99	100
0.00.01.2.06.01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	1.302.000	1.300.000	99,85	100
0.00.01.2.06.02	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	20.975.250	20.934.000	99,80	100
0.00.01.2.06.04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	54.272.000	53.266.000	98,15	100
0.00.01.2.06.05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	14.368.250	14.368.250	100,00	100
0.00.01.2.06.08	<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	21.735.000	21.735.000	100,00	100
0.00.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0	0
0.00.01.2.07.10	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	0	0	0	0
0.00.01.2.07.10	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	0	0	0	0
0.00.01.2.07.10	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	0	0	0	0
0.00.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	214.741.200	212721429	99,06	100
0.00.01.2.08.02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	15.541.200	13.521.429	87,00	100
0.00.01.2.08.04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	199.200.000	199.200.000	100,00	100
0.00.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.912.694	42173800	98,28	100
0.00.01.2.00.01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	12.912.694	12.173.800	94,28	100
0.00.01.2.00.10	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	30.000.000	30.000.000	100,00	100
0.00.01.2.13	Penataan Organisasi	4.999.775	4999775	100,00	100
0.00.01.2.13.02	<i>Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana</i>	4.999.775	4.999.775	100,00	100
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	99.881.585	99880585	100,00	100
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	99.881.585	99880585	100,00	100

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
7.01.02.2.02.03	<i>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	99.881.585	99.880.585	100,00	100
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	9.999.920	9.999.920	100,00	100
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	9.999.920	9.999.920	100,00	100
7.01.03.2.01.01	<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	9.999.920	9.999.920	100,00	100
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.995.575	4.995.575	100,00	100
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.995.575	4.995.575	100,00	100
7.01.04.2.01.01	<i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	4.995.575	4.995.575	100,00	100
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	4.998.705	4.823.894	96,50	100
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	4.998.705	4.823.894	96,50	100
7.01.05.2.01.08	<i>Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>	4.998.705	4.823.894	96,50	100
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.120.000	14.600.000	96,56	100
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.120.000	14.600.000	96,56	100
7.01.06.2.01.17	<i>Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya</i>	15.120.000	14.600.000	96,56	100
Total		2.661.283.043	2.477.813.638	93,11	100

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.205.753.640	3.993.485.772	94.95	97.7
0.00.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.125.645.179	2.983.107.993	95.44	98.55
0.00.01.2.02.01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	2.932.445.179	2.792.667.993	95.23	98.45
0.00.01.2.02.02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	193.200.000	190.440.000	98.57	99.99
0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	435.299.940	414.566.347	95.24	95.84
0.00.01.2.06.00	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	247.059.600	246.723.047	99.86	99.99
0.00.01.2.06.02	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	18.184.840	18.184.000	100.00	100.00
0.00.01.2.06.04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	88.355.500	67.965.350	76.92	79.54
0.00.01.2.06.05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	24.200.000	24.199.950	100.00	100.00
0.00.01.2.06.08	<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	57.500.000	57.494.000	99.99	99.99
0.00.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	118.978.015	118.810.000	99.86	99.99
0.00.01.2.07.07	<i>Pengadaan Aset Tetap Lainnya</i>	118.978.015	118.810.000	99.86	99.99
0.00.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	430.200.600	391.520.044	91.01	93.99
0.00.01.2.08.01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	9.000.000	9.000.000	100.00	100.00
0.00.01.2.08.02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	54.000.600	39.120.044	72.44	75.50
0.00.01.2.08.04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	367.200.000	343.400.000	93.52	96.56
0.00.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.629.906	85.481.388	89.39	92.5
0.00.01.2.00.01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	26.504.998	20.079.800	75.76	78.50
0.00.01.2.00.06	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	69.124.908	65.401.588	94.61	97.87
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	928.080.885	899.106.288	96.88	99.32
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	928.080.885	899.106.288	96.88	99.32
8.01.02.2.01.04	<i>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>	914.427.285	887.152.688	97.02	99.45
8.01.02.2.01.05	<i>Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>	13.653.600	11.953.600	87.55	90.89
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	17.015.466.100	16.922.988.900	99.46	99.63

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	17.015.466.100	16.922.988.900	99.46	99.63
8.01.03.2.01.02	<i>Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah</i>	16.057.603.690	16.055.329.090	99.99	99.99
8.01.03.2.01.03	<i>Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah</i>	26.101.935	26.040.935	99.77	99.99
8.01.03.2.01.05	<i>Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>	931.760.475	841.618.875	90.33	93.45
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	28.434.205	28.356.405	99.73	99.99
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	28.434.205	28.356.405	99.73	99.99
8.01.04.2.01.05	<i>Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>	28.434.205	28.356.405	99.73	99.99
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	84.999.495	63.276.195	74.44	77.46
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	84.999.495	63.276.195	74.44	77.46
8.01.05.2.01.04	<i>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>	24.999.795	10.149.795	40.60	43.78
8.01.05.2.01.05	<i>Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>	59.999.700	53.126.400	88.54	91.50
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	425.398.335	389.756.009	91.62	94.78
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	425.398.335	389.756.009	91.62	94.78
8.01.06.2.01.01	<i>Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>	90.330.290	89.052.839	98.59	99.45

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
8.01.06.2.01.04	<i>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>	184.517.335	158.762.496	86.04	89.98
8.01.06.2.01.05	<i>Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>	150.550.710	141.940.674	94.28	97.87
Total		22.688.132.660	22.296.969.569	98.28	99.09



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR
Jln. Jend. Achmad Yani No.49 Telp (0526) 2091440
Tamiang Layang 73611

RISALAH RAPAT PARIPURNA

TAHUN SIDANG	: 2024
MASA SIDANG	: II
JENIS RAPAT	: RAPAT PARIPURNA
SIFAT RAPAT	: TERBUKA
RAPAT PARIPURNA KE	: III (TIGA)
HARI	: JUMAT
TANGGAL	: 22 MARET 2024
WAKTU PEMBUKAAN	: 13.15 WIB
WAKTU SKOR	: 13:50 WIB
AGENDA RAPAT	: PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWAB KEPALA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
PIMPINAN RAPAT	: NUR SULISTIO, S.Pd.I.,M.AP (Ketua DPRD)
SEKRETARIS RAPAT	: INA KURNIANI, S.Sos,MM (Sekretaris DPRD)
JUMLAH ANGGOTA DPRD	
YANG HADIR	: SESUAI DAFTAR HADIR TERLAMPIR
UNDANGAN LAIN	: SESUAI DAFTAR HADIR TERLAMPIR

*Risalah Rapat Paripurna III MS II Tahun Sidang 2024 : Penyampaian Laporan Keterangan
Pertanggungjawab Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023*

Pimpinan Rapat :

Assalamualaikum Wr.Wb Salam Sejahtera dan Selamat Pagi

- Yth. Saudara Pj. Bupati Barito Timur;
- Yth. Saudara Wakil-Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Barito Timur;
- Yth. Saudara Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli Bupati dan Kepala Perangkat Daerah serta Pejabat Administrator dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur;
- Yth. Saudara Camat dan Lurah se Kabupaten Barito Timur;
- Yth. Saudara Tim Ahli dan Staf Ahli Fraksi DPRD Kabupaten Barito Timur;
- Yth. Wartawan Media Cetak maupun Elektronik yang berkenan hadir pada saat ini.

Pimpinan Rapat :

Pertama-tama Marilah Kita Panjatkan Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat, kasih dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat hadir dan mengikuti Rapat Paripurna III Masa Sidang II Tahun Sidang 2024 dengan agenda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023

Rapat Paripurna pada hari ini dilaksanakan berdasarkan :

1. Ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Ketentuan Pasal 127 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Barito Timur;
4. Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Barito Timur bulan Maret 2024;

Risalah Rapat Paripurna III MS II Tahun Sidang 2024 : Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawab Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023

5. Surat Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur Nomor
005/169/DPRD/2024 tanggal 20 Maret 2024 perihal Undangan Rapat
Paripurna DPRD Kabupaten Barito Timur.

Kami atas nama Pimpinan beserta seluruh Anggota DPRD Kabupaten Barito Timur menyampaikan ucapan terima kasih kepada **Yth. Saudara Pj. Bupati Barito Timur** beserta jajarannya, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Barito Timur serta undangan lainnya yang telah berkenan untuk memenuhi undangan kami.

Pimpinan Rapat :

Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Sebelum Rapat Paripurna ini dibuka dengan resmi, disilahkan kepada **Yth. Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Timur** untuk membacakan daftar hadir Pimpinan dan Anggota DPRD.

Sekretaris DPRD :

Terima Kasih Pimpinan Rapat,

Salam Sejahtera dan Selamat Pagi

Dapat kami sampaikan bahwa Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Barito Timur berjumlah 25 orang.

Hadir dan telah menandatangani daftar hadir berjumlah 17 orang,
Berhalangan hadir 8 orang

Dengan Keterangan :

Belum hadir 7 orang

Demikian pembacaan daftar hadir Pimpinan dan Anggota DPRD, selanjutnya kami serahkan kembali kepada Pimpinan Rapat, terima kasih.

Pimpinan Rapat :

Terima kasih kepada Yth. Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Timur yang telah membacakan daftar hadir Pimpinan dan Anggota DPRD,

Risalah Rapat Paripurna III MS II Tahun Sidang 2024 : Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023

Dari jumlah 25 orang Anggota DPRD, yang terdiri dari 3 orang Unsur Pimpinan dan 22 orang Anggota DPRD, Hadir dan telah menandatangani daftar hadir berjumlah 17 orang, berhalangan hadir 8 orang.

Dengan Keterangan :

Belum hadir 8 orang

Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 124 Ayat (1) huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Barito Timur, maka kuorum terpenuhi dan Rapat Paripurna III Masa Sidang II Tahun Sidang 2024, **dapat dilaksanakan.**

Pimpinan Rapat :

Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Dengan mengucapkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan atas seijin kita yang hadir pada saat ini, maka Rapat Paripurna III Masa Sidang II Tahun Sidang 2024 Jum'at, 22 Maret 2024 **kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.**

----- ***Ketuk Palu 3 kali*** -----

Pimpinan Rapat :

Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Sebelum masuk pada acara selanjutnya terlebih dahulu akan kami bacakan susunan acara kita pada hari ini :

1. Pembacaan Daftar Hadir;
2. Pembukaan Sidang;
3. Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023;
4. Penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023;
5. Penutup.

Demikian susunan acara kita pada sidang hari ini.

Risalah Rapat Paripurna III MS II Tahun Sidang 2024 : Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawab Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023

Pimpinan Rapat :

Sidang Dewan dan hadirin yang kami Hormati,

Selanjutnya kita masuk acara ke - 3, yakni Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023, kepada **Yth. Saudara Pj. Bupati Barito Timur**, disilahkan.

Pj. Bupati : --- ***Pembacaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023 Terlampir*** ---

Pimpinan Rapat :

Demikian tadi telah kita dengarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023 yang disampaikan oleh **Saudara Pj. Bupati Barito Timur** dan terima kasih atas penyampaiannya.

Pimpinan Rapat :

Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Ruang lingkup Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah meliputi :

1. hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi :
 - a. capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan;
 - b. kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya;
 - c. tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran sebelumnya;
2. hasil pelaksanaan tugas pembantuan meliputi capaian tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat dan tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Daerah provinsi, untuk

Risalah Rapat Paripurna III MS II Tahun Sidang 2024 : Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawab Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023

capaian penugasan Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.

Pimpinan Rapat :

Sidang Dewan dan hadirin yang kami Hormati,

Acara selanjutnya adalah Penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023;

=== Hadirin disilakan Berdiri===

---Proses Penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023 kepada Pimpinan DPRD ---

==== Hadirin disilakan duduk Kembali ====

Pimpinan Rapat :

Sidang Dewan dan hadirin yang kami Hormati,

Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pimpinan Rapat :

Sebelum Rapat Paripurna ini ditutup secara resmi, perkenankanlah kami selaku Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Barito Timur sekali lagi menyampaikan ucapan terima kasih kepada **Yth. Saudara Pj. Bupati Barito Timur** beserta jajarannya, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Barito Timur serta hadirin sekalian yang telah hadir dan mengikuti Rapat Paripurna III Masa Sidang II Tahun Sidang 2024 dan kami mohon maaf atas segala kekurangannya.

Pimpinan Rapat :

Selanjutnya dengan mengucapkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan atas seijin kita yang hadir pada saat ini maka Rapat Paripurna III Masa Sidang II Tahun Sidang 2024, **kami nyatakan ditutup dengan resmi.**

Risalah Rapat Paripurna III MS II Tahun Sidang 2024 : Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawab Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023

-----**Ketuk Palu 3 kali**-----

Wasalamualaikum Wr... Wb, Selamat Siang, Syalom

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR**

Pimpinan Rapat,

NUR SULISTIO, S.Pd.I., M.AP
Ketua

**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BARITO TIMUR,**

INA KIRUNIANI, S.Sos.,MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640903 198503 2 006

*Risalah Rapat Paripurna III MS II Tahun Sidang 2024 : Penyampaian Laporan Keterangan
Pertanggungjawab Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023*



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR**

*Jln. Jend. Achmad Yani No.49 Telp (0526) 2091440
Tamiang Layang 73611*

RISALAH RAPAT PARIPURNA

TAHUN SIDANG	: 2024
MASA SIDANG	: II
JENIS RAPAT	: RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA I
SIFAT RAPAT	: TERBUKA
RAPAT PARIPURNA KE	: I (SATU)
HARI	: KAMIS
TANGGAL	: 16 MEI 2024
WAKTU PEMBUKAAN	: 11.00 WIB
WAKTU SKOR	: 12:40 WIB
AGENDA RAPAT	: PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG REKOMENDASI TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
PIMPINAN RAPAT	: NUR SULISTIO,S.Pd.I.,M.AP (Ketua I DPRD)
SEKRETARIS RAPAT	: INA KURNIANI,S.Sos.,MM (Sekretaris DPRD)
JUMLAH ANGGOTA DPRD	
YANG HADIR	: SESUAI DAFTAR HADIR TERLAMPIR
UNDANGAN LAIN	: SESUAI DAFTAR HADIR TERLAMPIR

Risalah Rapat Paripurna Istimewa I MS II Tahun Sidang 2024 Penyampaian Keputusan DPRD Kabupaten Barito Timur Tentang Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023

Pembawa Acara :

Pimpinan DPRD Kabupaten Barito Timur dan Pj. Bupati Barito Timur beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah memasuki ruangan

Hadirin dimohon berdiri ...

Hadirin dipersilakan duduk kembali ...

Sekretaris DPRD :

Salam Sejahtera dan Selamat Pagi

Rapat Paripurna Istimewa I Masa Sidang II Tahun Sidang 2024 DPRD Kabupaten Barito Timur dengan agenda Penyampaian Keputusan DPRD Kabupaten Barito Timur tentang Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan susunan acara sebagai berikut :

1. Pembukaan Rapat Paripurna Istimewa;
2. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
3. Laporan Ketua Pansus;
4. Pembacaan Laporan Panitia Khusus tentang Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023;
5. Pembacaan Keputusan DPRD Kabupaten Barito Timur tentang Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023;
6. Penyerahan Keputusan DPRD Kabupaten Barito Timur kepada Pj. Bupati Barito Timur;
7. Sambutan Pj. Bupati Barito Timur;
8. Pembacaan Do'a;
9. Menyanyikan Lagu Wajib Nasional Bagimu Negeri;
10. Penutup.

Pembawa Acara :

Hadirin yang kami hormati,

Rapat Paripurna Istimewa I Masa Sidang II Tahun Sidang 2024 akan dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur, kepada **Yang terhormat Bapak Nur Sulistio, S, Pd.I., M.AP** disilakan.

Risalah Rapat Paripurna Istimewa I MS II Tahun Sidang 2024 Penyampaian Keputusan DPRD Kabupaten Barito Timur Tentang Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023

Pimpinan Rapat :

Assalamualaikum Wr. Wb Salam Sejahtera dan Selamat Pagi ...

Yang terhormat Saudara Pj. Bupati Barito Timur;
Yang terhormat Saudara Wakil-Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Barito Timur;
Yang terhormat Saudara Kapolres Barito Timur atau yang mewakili;
Yang terhormat Saudara Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur atau yang mewakili;
Yang terhormat Saudara Dandim 1012/Buntok atau yang mewakili;
Yang terhormat Saudara Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang atau yang mewakili;
Yang terhormat Saudara Ketua Pengadilan Agama Tamiang Layang atau yang mewakili;
Yang kami hormati Saudara Ketua KPU Kabupaten Barito Timur beserta Anggota dan Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Timur beserta Anggota;
Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli Bupati dan Kepala Perangkat Daerah serta Pejabat Administrator dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur;
Yang kami hormati Saudara Pabung 1012 Tamiang Layang;
Yang kami hormati Saudara Pimpinan Bank Kalimantan Tengah;
Yang kami hormati Saudara Kepala BPJS Kabupaten Barito Timur;
Yang kami hormati Saudara Kepala Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Janang;
Yang kami hormati Saudara Kepala PT. PLN (Pesero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Tamiang Layang;
Yang kami hormati Saudara Camat dan Lurah se Kabupaten Barito Timur;
Yang kami hormati Saudara Tim Ahli dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD Kabupaten Barito Timur;
Yang kami hormati Rekan – rekan Wartawan Media Cetak maupun Elektronik yang berkenan hadir pada saat ini.

Pimpinan Rapat :

Sidang Dewan dan Hadirin yang kami hormati,

Risalah Rapat Paripurna Istimewa I MS II Tahun Sidang 2024 Penyampaian Keputusan DPRD Kabupaten Barito Timur Tentang Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023

Kami atas nama Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Barito Timur, menyampaikan ucapan terima kasih kepada **Yang terhormat Saudara Pj Bupati Barito Timur** dan jajarannya, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Barito Timur, serta undangan lainnya yang telah memenuhi undangan kami dalam rangka mengikuti Rapat Paripurna Istimewa I Masa Sidang II Tahun Sidang 2024 dengan agenda Penyampaian Keputusan DPRD Kabupaten Barito Timur tentang Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023. Sebelum Rapat Paripurna Istimewa ini dibuka secara resmi, kita awali dengan menyanyikan **Lagu Kebangsaan Indonesia Raya**

Pimpinan Rapat : ----- Hadirin dimohon berdiri -----

... Menyanyikan Lagu Indonesia Raya ...

----- Hadirin dipersilakan duduk kembali -----

Pimpinan Rapat :

Dengan mengucapkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan atas seijin kita yang hadir pada saat ini, maka Rapat Paripurna Istimewa I Masa Sidang II Tahun Sidang 2024 hari ini Kamis, 16 Mei 2024 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

----- Ketuk Palu 3 kali -----

Pimpinan Rapat :

Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Pelaksanaan Rapat Paripurna Istimewa pada hari ini berdasarkan :

1. Pasal 127 ayat (5) Peraturan DPRD Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur;
2. Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Barito Timur bulan Mei 2024;
3. Surat Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur Nomor 005/265/DPRD/2024, tanggal 15 Mei 2024, perihal Undangan Rapat Paripurna Istimewa I Masa sidang II Tahun Sidang 2024.

Risalah Rapat Paripurna Istimewa I MS II Tahun Sidang 2024 Penyampaian Keputusan DPRD Kabupaten Barito Timur Tentang Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023

Pimpinan Rapat :**Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati,**

Berdasarkan Ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, DPRD harus melakukan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dengan memperhatikan :

- a. capaian kinerja program dan kegiatan; dan
- b. pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Kemudian berdasarkan hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, DPRD memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam :

- a. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
- b. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
- c. penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023 telah disampaikan oleh **Yang terhormat Saudara Pj. Bupati Barito Timur** pada Rapat Paripurna III Masa Sidang II Tahun Sidang 2024 dengan agenda Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023. Untuk lebih teliti, cermat dan fokus dalam menelaah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023, DPRD Kabupaten Barito Timur telah membentuk Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Barito Timur Nomor 188.4/8/DPRD/2024 tentang Pembentukan Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan susunan sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1. Wahyudinoor, SP., MP | Jabatan Ketua Pansus |
| 2. Drs. H. Zain Alkim | Jabatan Wakil Ketua Pansus |
| 3. Mardianto, SH | Jabatan Anggota Pansus |
| 4. Rida Heriyani | Jabatan Anggota Pansus |
| 5. Broelalano | Jabatan Anggota Pansus |

Risalah Rapat Paripurna Istimewa I MS II Tahun Sidang 2024 Penyampaian Keputusan DPRD Kabupaten Barito Timur Tentang Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023

6. **Raran, A. Md** Jabatan Anggota Pansus
7. **Roma Analta** Jabatan Anggota Pansus
8. **Rini, S. Sos., M. AP** Jabatan Anggota Pansus
9. **Trisna Andrilawitni, S. Pd** Jabatan Anggota Pansus
10. **Hadi Santoso, ST** Jabatan Anggota Pansus

Diinformasikan juga bahwa Pansus LKPJ telah melaksanakan :

1. Rapat Kerja Pansus LKPJ dengan agenda Pembahasan dan Penyusunan Jadwal Kegiatan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023, hari Senin, 29 April 2024;
2. Kegiatan Pansus LKPJ, hari Minggu s/d Rabu, 5 s/d 8 Mei 2024;
3. Rapat Kerja Pansus LKPJ dengan agenda Meminta Keterangan dan Penjelasan terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023, hari Senin, 13 Mei 2024;
4. Rapat Kerja Pansus LKPJ dengan agenda Penyusunan Laporan Panitia Khusus terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023, hari Rabu, 15 Mei 2024.

Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023 akan disampaikan kepada **Pj. Bupati Barito Timur** dengan tembusan kepada **Menteri Dalam Negeri** Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat serta hasil Rekomendasi dimaksud akan ditindaklanjuti oleh **Pj. Bupati Barito Timur** adalah sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun anggaran berikutnya.

Pimpinan Rapat :

Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Kita masuk pada acara yang ke 3, yaitu Laporan Ketua Panitia Khusus, kepada **Yang terhormat Saudara Wahyudinoor, SP., MP** disilakan

**Ketua Pansus : ----- Penyampaian Laporan Pansus LKPJ
Terlampir -----**

Pimpinan Rapat :

Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Risalah Rapat Paripurna Istimewa I MS II Tahun Sidang 2024 Penyampaian Keputusan DPRD Kabupaten Barito Timur Tentang Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023

Selanjutnya kita akan mendengarkan Pembacaan Laporan Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023 yang akan dibacakan secara bergantian oleh Anggota Panitia Khusus :

1. **Yang terhormat Saudara Wahyudinoor, SP., MP;**
2. **Yang terhormat Saudara Raran, A. Md;**
3. **Yang terhormat Saudara Mardianto, SH** disilakan.

Anggota Pansus : ----- Membacakan Laporan Pansus LKPJ -----

Pimpinan Rapat :

Terima Kasih kepada Anggota Panitia Khusus yang telah menyampaikan laporannya, acara selanjutnya kita akan dengarkan pembacaan Keputusan DPRD Kabupaten Barito Timur, untuk itu kepada **Yang kami hormati Sekretaris DPRD atau yang mewakili,** disilakan.

Sekretaris DPRD :

Terima Kasih Pimpinan Rapat, saya akan bacakan Keputusan DPRD Kabupaten Barito Timur sebagai berikut :

----- Membacakan Keputusan DPRD -----

Demikian Pembacaan Keputusan DPRD Kabupaten Barito Timur, selanjutnya saya serahkan kembali kepada Pimpinan Rapat, Terima Kasih.

Pimpinan Rapat :

Terima Kasih kepada **Yang kami hormati Sekretaris DPRD atau yang mewakili** yang telah membacakan Keputusan DPRD Kabupaten Barito Timur.

Pimpinan Rapat :

Sidang Dewan dan hadirin yang kami Hormati,

Acara selanjutnya adalah Penyerahan Keputusan DPRD Kabupaten Barito Timur tentang Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023;

=== Hadirin disilakan Berdiri===

Risalah Rapat Paripurna Istimewa I MS II Tahun Sidang 2024 Penyampaian Keputusan DPRD Kabupaten Barito Timur Tentang Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023

---Proses Penyerahan Keputusan DPRD Kabupaten Barito Timur tentang Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023 kepada Yang terhormat Saudara Pj. Bupati Barito Timur ---

==== Hadirin disilakan duduk Kembali ====

Pimpinan Rapat :

Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Dengan telah disampaikannya Keputusan DPRD ini kepada **Yang terhormat Saudara Pj. Bupati Barito Timur**, maka selesai juga tugas Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023, saya atas nama DPRD Kabupaten Barito Timur mengucapkan apresiasi dan penghargaan yang setinggi – tinggi kepada **Yang terhormat Anggota DPRD Kabupaten Barito Timur** yang tergabung dalam Panitia Khusus pada tahun ini. Selanjutnya kita akan masuk pada acara yang ke 7 yaitu sambutan Pj. Bupati Barito Timur, kepada **Yang terhormat Saudara Pj. Bupati Barito Timur**, disilakan.

Pj. Bupati Barito Timur : ----- Penyampaian Sambutan -----

Pimpinan Rapat :

Terima kasih kepada **Yang terhormat Saudara Pj. Bupati Barito Timur** yang telah menyampaikan sambutannya, selanjutnya sebagai ungkapan syukur atas terlaksananya acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdo'a yang akan dipimpin oleh Petugas dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Timur, kepada petugas yang telah ditunjuk, disilakan

Pembaca Do'a : ----- Membacakan Do'a -----

Pimpinan Rapat :

Terima kasih kepada Petugas dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Timur yang telah memimpin kita dalam Do'a.

Risalah Rapat Paripurna Istimewa I MS II Tahun Sidang 2024 Penyampaian Keputusan DPRD Kabupaten Barito Timur Tentang Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023

Pimpinan Rapat :

Selanjutnya marilah kita bersama menyanyikan Lagu Wajib Nasional Bagimu Negeri,

----- **Hadirin dimohon berdiri** -----

----- **Menyanyikan Lagu Bagimu Negeri** -----

----- **Hadirin dipersilakan duduk kembali** -----

Pimpinan Rapat :

Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Sebelum Rapat Paripurna Istimewa ini ditutup secara resmi, perkenankanlah kami selaku Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Barito Timur menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada **Yang terhormat Saudara Pj. Bupati Barito Timur** beserta jajarannya, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Barito Timur serta hadirin sekalian dalam mengikuti Rapat Paripurna Istimewa hari ini hingga berakhir dengan tertib dan lancar serta kami mohon maaf atas segala kekurangannya.

Dengan mengucapkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan atas seijin kita yang hadir pada saat ini maka Rapat Paripurna Istimewa I Masa Sidang II Tahun Sidang 2024, **kami nyatakan ditutup dengan resmi.**

----- **Ketuk Palu 3 kali** -----

Wasalammualaikum Wr... Wb, Selamat Siang, Syalom.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR**

Pimpinan Rapat,

NUR SULISTIO, S.Pd.I, M.AP
Ketua DPRD

**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BARITO TIMUR,**

INA KARUNIANI, S.Sos., MM
Pemrina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640903 198503 2 006

Risalah Rapat Paripurna Istimewa I MS II Tahun Sidang 2024 Penyampaian Keputusan DPRD Kabupaten Barito Timur Tentang Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR**

NOMOR 188.4/9/DPRD/2024

TENTANG

**REKOMENDASI TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023 telah disampaikan pada Rapat Paripurna III Masa Sidang II Tahun Sidang 2024;
- c. bahwa untuk lebih meneliti, mencermati dan fokus menelaah Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023 telah dibentuk Panitia Khusus Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Barito Timur Nomor



Panitia Khusus Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun
Anggaran 2023;

- d. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023 telah dibahas dalam Rapat Kerja Pansus LKPJ dengan Agenda Penyusunan Laporan Panitia Khusus terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023;
- e. bahwa hasil sebagaimana dimaksud pada huruf d, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Barito Timur tentang Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 - 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);



10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 50);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur 2021 Nomor 67, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2021 Nomor 55);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 75)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 Nomor 79);
14. Peraturan DPRD Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan DPRD Kabupaten Barito Timur tentang Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023;
- KEDUA : Menyampaikan Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024 kepada Pj. Bupati Barito Timur sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Keputusan DPRD ini;
- KETIGA : Keputusan DPRD ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 16 Mei 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR**
KETUA

NUR SULISTIO



**LAMPIRAN
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 188.4/9/DPRD/2024
TENTANG REKOMENDASI TERHADAP LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

**REKOMENDASI TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

A. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan atau otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah secara proposional, Implementasi dari Undang-Undang tersebut diatas diwujudkan dalam pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada di daerah dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyat.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan lintas bidang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah mengamanatkan perluasan dan peningkatan pelayanan dasar sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan dan salah satu faktor pendukung kualitas layanan dasar adalah kualitas pengelolaan keuangan daerah yang harus memenuhi prinsip kepatuhan, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas serta rensponsif.

Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah akan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi terlaksananya optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik.

1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

a. Catatan

Realisasi PAD sangat rendah pencapaiannya hanya 77,86 % dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

b. Rekomendasi

1. Sangat perlu dipetakan masalah penyebab tidak tercapainya Optimalisasi pendapatan daerah dilakukan dengan mensinergikan program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
2. Dalam konteks pengelolaan pendapatan daerah di Kabupaten Barito Timur sumber pendapatan utama daerah

perlu adanya strategi-strategi dalam rangka peningkatan PAD diwaktu yang akan datang. Disamping itu sumber-sumber pendapatan lainnya juga perlu ditingkatkan antara lain bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), lain-lain pendapatan yang sah, Dana Perimbangan sehingga proporsi DAU secara bertahap dapat mulai digantikan oleh sumber-sumber pendapatan yang dapat diupayakan oleh daerah.

3. Diharapkan adanya kajian mengenai potensi daerah yang cermat dan akurat yang dapat dipergunakan sebagai landasan dalam perencanaan pendapatan daerah.

2. Pengelolaan Belanja Daerah

a. Catatan

1. Sebagaimana diketahui target Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.202.208.265.241,00 (Satu Triliun, Dua Ratus Dua Milyar, Dua Ratus Delapan Juta, Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu, Dua Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 1.059.721.629.160,41 (Satu Triliun, Lima Puluh Sembilan Milyar, Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Juta, Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu, Seratus Enam Puluh Rupiah, Empat Puluh Satu Sen) atau 88,15%. Dengan Uraian Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 sebagai berikut:
 1. Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 793.117.097.656,00 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Milyar, Seratus Tujuh Belas Juta, Sembilan Puluh Tujuh Ribu, Enam Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) dengan presentasi 87,69%
 2. Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 229.313.802.685,00 (Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Milyar, Tiga Ratus Tiga Belas Juta, Delapan Ratus Dua Ribu, Enam Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) dengan presentasi 87,81%
 3. Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar) dengan presentasi 25,33%

4. Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 169.777.364.900,00 (Seratus Enam Puluh Sembilan Milyar, Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta, Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu, Sembilan Ratus Rupiah) dengan presentasi 94,44%
2. Jika Anggaran Belanja Daerah Tahun 2023 sebesar Rp. 1.202.208.265.241,00 (Satu Triliun, Dua Ratus Dua Milyar, Dua Ratus Delapan Juta, Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu, Dua Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) dibandingkan dengan realisasinya belanja sebesar Rp. 1.059.721.629.160,41 (Satu Triliun, Lima Puluh Sembilan Milyar, Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Juta, Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu, Seratus Enam Puluh Rupiah, Empat Puluh Satu Sen) maka pada Tahun 2023 Keuangan Daerah mengalami surplus/deposit sebesar Rp. 76.179.729.045,38 (Tujuh Puluh Enam Milyar, Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta, Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu, Empat Puluh Lima Rupiah, Tiga Puluh Delapan Sen).
3. Realisasi penerimaan pembiayaan yang cukup besar tahun 2023 sebesar Rp. 241.287.048.039,00 (Dua Ratus Empat Puluh Satu Milyar, Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta, Empat Puluh Delapan Ribu, Tiga Puluh Sembilan Rupiah) semuanya bersumber dari SILPA menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah belum bisa menghasilkan sumber-sumber Produktif. Sehingga Pembiayaan Netto Rp. 230.512.047.039 (Dua Ratus Tiga Puluh Milyar, Lima Ratus Dua Belas Juta Empat Puluh Tujuh Ribu, Tiga Puluh Sembilan Rupiah) sehingga dapat menghasilkan SILPA di Tahun 2023 sebesar Rp. 154.332.317.993,79 (Seratus Lima Puluh Empat Milyar, Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta, Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu, Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah, Tujuh Puluh Sembilan Sen).

b. Rekomendasi

1. Pemerintah Daerah seharusnya bisa mengembangkan usaha-usaha Daerah seperti : mengaktifkan kembali Perusahaan Daerah yang diharapkan bisa menyumbangkan

Profesional dalam bekerja dan dapat terlaksana sesuai dengan target yang diharapkan.

2. Agar APBD Tahun 2023 ini bisa mengoptimalkan penggunaan SILPA ini untuk Pembangunan Daerah baik Pembangunan Infrastruktur, Peningkatan Kapasitas SDM ASN maupun program yang lebih produktif sehingga dapat mendorong PAD misalnya dengan mengembangkan pembangunan pariwisata dan fasilitas ekonomi bagi daerah.

B. URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. Urusan Pendidikan

a. Catatan

1. LAKIP belum sepenuhnya mengacu pada Permenpan 53/2014
2. E-SAKIP melebihi batas waktu yang ditentukan.

b. Rekomendasi

1. LAKIP disusun berdasarkan Pemenpan 53/2014 perlunya sinkronisasi dengan instansi terkait yaitu Inspektorat.
2. Dokumen Laporan Kinerja dipublikasi sesuai waktu yang ditentukan

2. Urusan Kesehatan

a. Catatan

1. Pelayanan ANC (Antenatal Care - pemeriksaan ibu hamil) secara standar masih belum maksimal dilaksanakan karena beberapa SDM Kesehatan (dokter, bidan) baru mendapat pelatihan.
2. Masih kurangnya data pada pelaporan pelayanan Kesehatan.
3. Terdapat beberapa puskesmas yang belum mencapai target skrining dan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) untuk skrining DM (Diabetes Militus) ke Masyarakat terbatas yaitu hanya mencapai 55,55 persen.
4. Terdapat beberapa desa yang PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) belum terealisasi dari yang ditargetkan.
5. Perlunya kesadaran kelompok beresiko untuk melakukan deteksi dini HIV serta rendahnya SDM Kesehatan.

b. Rekomendasi

1. Perlunya peningkatan Kembali kapasitas SDM Kesehatan

2. Mengoptimalkan pelaporan terhadap pelayanan Kesehatan dalam kegiatan skrining Kesehatan.
3. Optimalisasi skrining deteksi dini DM di fasilitas Kesehatan/posbindu dan menyediakan BMHP untuk menunjang skrining DM melalui Puskesmas-puskesmas.
4. Perlunya Mengoptimalkan peran Puskesmas sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Kesehatan terkait penanganan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
5. Perlunya meningkatkan koordinasi dengan pihak pengelola lokalisasi dan pemerintah desa setempat, serta tetap mengoptimalkan peningkatan kompetensi SDM Kesehatan melalui Diklat serta tambahan beasiswa.

3. Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

a. Catatan

1. Belum adanya data secara menyeluruh permukiman rawan banjir data base Sungai yang terupdate, sehingga realisasi yang ada merupakan rekapitan total pekerjaan yang telah dilaksanakan sampai tahun 2023.
2. Belum adanya update data inventarisasi secara menyeluruh untuk Kawasan persawahan yang aktif sehingga pekerjaan yang ada dilaksanakan berdasarkan usulan dan rekomendasi.
3. Kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung penanganan persampahan.
4. Belum tersedianya fasilitas pengaturan limpasan air hujan di saluran drainase perkotaan tamiang layang dan ampah.

b. Rekomendasi

1. Peningkatan anggaran untuk pekerjaan pembuatan Data Base Sungai sehingga dalam menangani permukiman banjir bisa terintegrasi dalam tahun ke tahun.
2. Harus berkoordinasi dengan pihak Dinas Pertanian untuk melaksanakan inventarisasi menyeluruh persawahan yang aktif dan memerlukan jaringan irigasi.
3. Perlunya membangun fasilitas pengaturan limpasan air hujan seperti penggunaan sistim pengumpulan air hujan dan juga fasilitas resapan air hujan.
4. Perlunya membangun fasilitas pengaturan limpasan air

4. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

a. Catatan

1. Belum ada SK Kepala Daerah terkait Kawasan rawan bencana di Kabupaten Barito Timur.
2. Masih belum tersedianya rumah layak huni bagi Masyarakat korban bencana, longsor, kebakaran.
3. Belum maksimalnya koordinasi dan sosialisasi antar OPD teknis pemilik PERDA dan PERKADA kepada masyarakat serta Pemerintah Barito Timur.
4. Belum maksimalnya warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yaitu hanya 29,24 persen dari target 75 persen.

b. Rekomendasi

1. Melakukan koordinasi dengan pihak BPBD Damkar Kabupaten Barito Timur terkait Data Wilayah rawan bencana, sehingga bisa tepat sasaran.
2. Perlunya koordinasi dengan BPBD Damkar Kabupaten Barito Timur terkait SK Kepala Daerah tentang Kawasan rawan bencana sehingga dapat dilakukan penanganan terhadap korban bencana.
3. Perlunya memaksimalkan Koordinasi, Pendampingan serta Sosialisasi OPD pemegang PERDA dan PERKADA kepada masyarakat dan Organisasi Perangkat Daerah lainnya.
4. Perlunya meningkatkan layanan penyelamatan dan evaluasi bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana.

5. Urusan Sosial

a. Catatan

1. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dari target sebesar 75% yang tercapai baru 30,84%.
2. Persentase fakir miskin yang mendapat bantuan dari target sebesar 80% yang tercapai hanya 43,25% sehingga masih rendah dan belum memenuhi target.
3. Meningkatnya angka kemiskinan di Barito Timur berdasarkan Data BPS naik 0,04 persen.

b. Rekomendasi

1. Perlu adanya anggaran yang cukup untuk pemenuhan kebutuhan dasarpenyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti.
2. Pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) diharapkan secara online dapat di pantau semua pihak progresnya sehingga dapat di tangani secara tepat dan cepat.
3. Perlunya meningkatkan SDM dengan melakukan Pendidikan dan Pelatihan serta peran dari semua lini.

C. URUSAN WAJIB YANG BERKENAAN DENGAN PELAYANAN NON DASAR

1. Urusan Tenaga Kerja

a. Catatan

Belum adanya data tenaga kerja yang bersertifikat Kompetensi di perusahaan.

b. Rekomendasi

- Perlunya mengevaluasi dan memperbaiki teknis permintaan data ke perusahaan terkait data tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi.
- Perlunya memberikan informasi terkait pembukaan lapangan pekerjaan melalui media sosial.

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana

a. Catatan

Rendahnya persentase Data Gender dan Anak yang dikelola dari target 100 persen hanya terealisasi 50 persen sehingga belum memenuhi kebutuhan.

b. Rekomendasi

Perlunya Advokasi pengisian sesuai kebutuhan data pada setiap OPD/Lembaga.

3. Urusan Pangan

a. Catatan

1. Belum adanya Peraturan Bupati terkait ketersediaan pangan (cadangan beras, jagung sesuai kebutuhan).
2. Belum adanya alat pengiji (Pangan Segar yang aman di konsumsi).

b. Rekomendasi

1. Perlunya Pembentukan Peraturan Daerah tentang Cadangan Pangan pada PERDA Tahun 2024.
2. Perlunya Pengadaan Alat uji yang memadai.

4. Urusan Pertanahan

a. Catatan

1. Belum tercapainya target kegiatan dalam penerbitan sertifikat dan registrasi pengembangan perumahan.
2. Rendahnya Capaian target dari 15 persen hanya yang terealisasi 6 persen karena kegiatan masih dalam proses lelang (Rumah Tidak Layak Huni)

b. Rekomendasi

1. Perlunya mempercepat Proses pendataan pengembangan.
2. Perlunya mempercepat proses pelaksanaan lelang fisik.

5. Urusan Lingkungan Hidup

a. Catatan

Belum maksimalnya jumlah IUP yang ada di Kabupaten Barito Timur sehingga banyak yang tidak aktif.

b. Rekomendasi

Perlunya melaksanakan pengawasan aktif dan pasif ke semua perusahaan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.

6. Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

a. Catatan

Rusaknya Peralalatan Cetak KIA.

b. Rekomendasi

1. Perlunya Pengadaan Printer Cetak KIA
2. Perlunya keseriusan dalam meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

a. Catatan

1. Terbatasnya Anggaran sehingga tidak semua desa mendapatkan pelatihan.
2. Persentase LKD tidak terpenuhi dari target 35 persen
3. Belum terkelola dengan baik BUMDes yang dibuat hamper di setiap kecamatan.

b. Rekomendasi

1. Perlunya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Lanjutan Lampiran 4:

2. Perlunya melakukan pembinaan LKD dalam pelaksanaan event-event baik ditingkat kabupaten, Provinsi maupun Nasional.
3. Perlunya peraturan dan perencanaan yang menyangkut Tata Kelola BUMDes.

8. Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

a. Catatan

Terbatasnya sarana dan tenaga teknis yang aktif dan terlapor dalam SIGA.

b. Rekomendasi

Perlunya pembinaan keaktifan fungsi dan tugas tenaga teknis.

9. Urusan Perhubungan

a. Catatan

1. Belum adanya angkuatan umum perintis perdesaan di Kabupaten Barito Timur.
2. Masih belum beroperasinya Pelabuhan Telang Baru.

b. Rekomendasi

1. Perlunya Anggaran yang cukup untuk pengadaan Angkutan Perintis.
2. Perlunya percepatan dalam pembentukan Perusahaan Daerah yang bergerak di Bidang Usaha Kepelabuhan agar dapat berproses pada tahun 2024.

10. Urusan Komunikasi dan Informatika

a. Catatan

1. Tidak optimalnya layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.
2. Tidak Optimalnya Layanan Komunikasi secara Publik.

b. Rekomendasi

1. Perlunya Peningkatan Dukungan Kebijakan dan prioritas Anggaran SPBE serta peningkatan SDM TIK.
2. Perlunya pengembangan Sistem Jaringan Internet di wilayah perdesaan yang terisolir serta perlu dibangunnya radio milik Pemda sebagai salah satu media informasi yang bisa diakses masyarakat yang tertinggal di perdesaan.

11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a. Catatan

1. Belum Optimalnya Koperasi yang berkualitas sehingga persentasenya hanya 19,71 Persen dari Target 100 Persen.
2. Kurangnya Dukungan Fasilitas Pendampingan Kelembagaan dan usaha untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten.
3. Rendahnya Persentasi usaha Mikro yang bermitra di bidang UMKM sehingga hanya mencapai target 80 Persen.

b. Rekomendasi

1. Perlunya pembinaan dan pendampingan dalam menjalankan usaha Koperasi yang berkualitas.
2. Perlunya Penyuluhan dan Pembinaan tentang Regulasi Koperasi, Kelembagaan Koperasi dan Pelaporan Keuangan.
3. Perlunya mengembangkan kemitraan dengan pihak Perbankan.

12. Urusan Penanaman Modal

a. Catatan

Tidak semua Perusahaan melaporkan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal).

b. Rekomendasi

Perlunya melakukan Pengawasan dan Pembinaan pada Perusahaan, Agar Persentasenya tidak hanya 55 Persen saja.

13. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

a. Catatan

1. Kurangnya tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Masyarakat.
2. Kurangnya tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri (kegiatan wirausaha muda pemula).
3. Belum maksimalnya kegiatan yang melibatkan organisasi Kepemudaan.
4. Kurangnya minat masyarakat terkait kesenian tradisional dalam pelaksanaan event-event yang terbatas.

b. Rekomendasi

1. Perlunya Pendampingan atau stimulus bagi Kegiatan Organisasi Kepemudaan.
2. Perlunya meningkatkan Jumlah Kegiatan Pelatihan dan

3. Perlunya melibatkan kesempatan kepada atlit muda dalam rangka pembibitan prestasi olahraga.
4. Perlunya Dukungan Penyelenggaraan event-event mandiri.

14. Urusan Perpustakaan dan Kearsipan

a. Catatan

1. Rendahnya Persentase Fasilitas Depo Kearsipan tidak memadai sebagai media penyimpanan arsip fisik, dalam hal ini Rak Arsip dan Box arsip sudah Rapuh dan Gudang Penyimpanan terlalu Kecil untuk menampung keseluruhan arsip dari seluruh OPD di Kabupaten Barito Timur.
2. Belum Tersedianya perangkat IT yang memadai sebagai Pengalih media Arsip Fisik sebagai Arsip Digital.

b. Rekomendasi

1. Perlu peningkatannya melakukan upaya peningkatan Fasilitas Depo Kearsipan dan berkoordinasi dengan ANRI terkait Kualifikasi Depo yang Berstandar Nasional sehingga dapat mencapai target.
2. Perlunya mengupayakan peningkatan Perangkat IT yang memadai sebagai Media Penyimpanan Arsip Digital.

D. URUSAN PILIHAN

Pemerintah Kabupaten Barito Timur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 menetapkan 6 Urusan Pilihan yaitu, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi.

Urusan Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi.

a. Catatan

1. Rendahnya jumlah produksi perikanan tangkap dikarenakan penangkapan dengan menggunakan alat yang tidak ramah lingkungan sehingga populasi ikan di perairan umum berkurang.
2. Mahalnya harga pakan ikan sehingga membuat pengusaha ikan mengurangi aktivitas usaha pembudidayaan ikan.
3. Rendahnya kunjungan wisatawan paska pandemik covid-19 dan

4. Tidak adanya pengajuan ijin atau rekomendasi ijin pendirian usaha ke Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM.
5. Kurangnya minat pelaku usaha UMKM dalam partisipasi keikutsertaan pameran atau ajang promosi pemasaran hasil UMKM.
6. Belum terbentuknya IKM (Industri Kecil Menengah) sehingga tidak memiliki ijin industri.

b. Rekomendasi

1. Perlunya pengawasan perairan dengan rajia patroli bersama Pokmaswas, TNI dan Polri
2. Perlunya adanya bantuan alat pembuat pakan ikan.
3. Perlunya penigkatan kualitas pelayanan pariwisata dan promosi yang aktif melalui website, media sosial, booklet, dan event-event.
4. Perlunya membuat regulasi aturan yang lebih mempermudah dalam pengurusan ijin usaha di wilayah Kabupaten Barito Timur.
5. Perlunya meningkatkan sosialisasi pemahaman terhadap pentingnya promosi produk lokal UMKM dalam meningkatkan mutu dan kualitas produk.
6. Perlunya mengefektifkan pembinaan dan medorong IKM untuk membuat perijinan, serta mendaftarkan ke dalam SIINas.

E. UNSUR PENDUKUNG, PENUNJANG, PENGAWAS URUSAN DAN KEWILAYAHAN

1. Sekretariat Daerah

a. Catatan

1. Belum optimalnya penyaluran dana bansos sehingga belum tepat sasaran
2. Belum terlaksananya tentang status kejelasan perangkat desa
3. Pengelolaan Dana Hibah penerima perlu perbaikan karena realisasi belanja tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.

b. Rekomendasi

1. Perlunya Pemutahiran data penerima dana bansos sehingga tepat sasaran
2. Perlunya Keputusan bersama tentang status perangkat desa.



2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

a. Catatan

1. Rendahnya PAD dari tahun sebelumnya.
2. Kurang optimal Rekonsiliasi Keuangan dan Aset dengan OPD.
3. Belum optimal pengelolaan dan inventarisir Barang Milik Daerah.

b. Rekomendasi

1. Perlunya peningkatan PAD dari BUMD dan pendapatan lain yang sah.
2. Perlunya Bimtek untuk menambah pengetahuan.
3. Peningkatan Penata Usahaan Barang Milik Daerah dengan Inventarisasi dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah yang rutin dengan semua OPD.

3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

a. Catatan

Kurangnya minat PNS untuk mengikuti ijin dan tugas belajar.

b. Rekomendasi

Perlunya Pemerintah Kabupaten Barito Timur memberikan kesempatan bagi PNS untuk mengikuti ujian Dinas dan tugas belajar

4. Inspektorat Daerah

a. Catatan

1. LAKIP belum sepenuhnya mengacu pada Permenpan 53/2014;
2. Belum terlaksananya audit kinerja.

b. Rekomendasi

1. Perlunya penyusunan LAKIP berdasarkan Pemenpan 53/2014;
2. Perlunya melakukan audit kinerja

5. Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah

a. Catatan

- LAKIP belum sepenuhnya mengacu pada Permenpan 53/2014.
- Belum maksimal program perencanaan dalam penanggulangan kemiskinan.

b. Rekomendasi

- Perlunya Penyusunan LAKIP berdasarkan Pemenpan

kegiatan-kegiatan yang terdapat di SKPD.

6. Badan Pendapatan Daerah

a. Catatan

- Rendahnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- Minimnya inovasi kegiatan yang dilakukan dinas terkait sehingga pendapatan menurun.
- Kurang optimalnya pengalihan sumber-sumber potensi PAD yang besar belum terkelola maksimal.

b. Rekomendasi

Kurangnya dukungan sumber anggaran yang cukup dan kualitas SDM yang kurang sehingga pengelolaan sumber-sumber potensi PAD yang besar belum terkelola maksimal.

7. Unsur Kewilayahan

a. Catatan

Belum Optimalnya Peningkatan SDA terkait Nilai LAKIP demi menunjang kegiatan di setiap kantor Kecamatan.

b. Rekomendasi

Perlunya meningkatkan SDM Aparatur dengan Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek sesuai bidang masing-masing serta meningkatkan sarana dan prasana yang memadai di setiap Kecamatan.

F. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Ada 69 Catatan dan 69 Rekomendasi yang harus benar-benar diperhatikan sebagai bahan evaluasi guna langkah-langkah perbaikan untuk Anggaran Tahun 2024.
2. Terhadap sektor-sektor yang telah mencapai target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan sebagaimana yang telah dilaporkan dalam LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 memberikan apresiasi atas keberhasilan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur. Namun demikian DPRD Kabupaten Barito Timur juga berharap agar catatan-catatan DPRD Kabupaten Barito Timur terutama terhadap kinerja yang belum mencapai target agar dapat ditindak lanjuti dengan segera oleh eksekutif pada proses perencanaan berikutnya, dimulai pada saat pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan pengawasan melalui Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Barito Timur.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR
KETUA.**

NOR SULISTIO



**BAPPLITBANGDA
KABUPATEN BARITO TIMUR
TAHUN 2025**